Kajian Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan Tahun 2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Kajian Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan Tahun 2021

Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kuningan

Kata Pengantar

Kajian Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Di saat seluruh perhatian pembangunan perekonomian mengalami perubahan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 di sisi lain bahwa pemenuhan kebutuhan standar kehidupan tetaplah harus terpenuhi. Batasan-batasan yang diberlakukan terhadap kegiatan masyarkat secara umum bukan hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia melakukan hal yang sama, semua dilakukan untuk mencegah terus menyebarluasnya penyakit Covid-19 yang belum ditemukan obatnya sampai denga saat tulisan ini dibuat.

Akan tetapi pembatasan yang dilakukan tersebut tidak mengurangi kebutuhan penduduk akan ketersediaan bahan pokok konsumsi. Bahan pokok konsumsi selain dari proses industri juga dari produksi pertanian, hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa pertanian proses produksi jangan menjadi terganggu karena pandemi Covid-19 ini. Produksi bahan makanan hasil produksi pertanian seperti beras dll harus tetap diproduksi karena menjadi bahan pokok yang dominan di konsumsi penduduk di Indonesia.

Kecenderungan pertanian yang pekerjanya di dominasi oleh penduduk usia dewasa akhir justru menimbulkan permasalahan di waktu yang akan datang. Wacana tentang alih generasi pelaku atau pekerja pertanian adalah sebuah wacana yang baik dan perlu terus mendapat perhatian serius demi masa depan pertanian di Kabupaten Kuningan.

Pertanian selain juga sebagai kategori perekonomian yang tujuan utamanya menjamin ketahanan pangan juga menjadi kategori yang secara ketenagakerjaan mampu bertahan di tengah terjadinya pandemi Covid-19. Jadi dalam hal ini pembangunan pertanian yang efektif dan efisien selain mampu memperkuat ketahanan pangan juga mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk

pekerja pertanian. Efektif dan efisien yang dimaksud bukan hanya produktifitasnya tetapi juga ketersediaan terkait sarana pemasaran dan diversifikasi pemanfaatannya.

Kajian Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan, 2021 ini menyajikan data PDRB dan Ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2020 untuk digunakan sebagai perencanaan dan evaluasi pembangunan pertanian kedepan. Adapun data tersebut bersumber pada data resmi pada halaman web BPS Propinsi Jawa Barat dan BPS Kabupaten Kuningan.

Kekurangan dari kajian ini masih sangat mungkin terjadi, Untuk itu, kritik dan saran akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi perbaikan dan penyempurnaan studi ini di masa mendatang.

Kuningan, April 2021

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan
Tim Penyusun

Daftar Isi

Kajian Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan Tahun 2021

DAFTAR ISI

		Hal
Kata Pengantar ……..		i
Daftar Isi ……...		iii
Daftar Tabel ……..		v
Daftar Grafik …….		xi
BAB I.	PENDAHULUAN ……...	1
1.1.	Latar Belakang ……	1
1.2.	Permasalahan ……...	2
1.3.	Tujuan Penulisan Kajian …….	3
BAB II.	TEORI-TEORI KETENAGAKERJAAN ……...	5
2.1.	Teori Klasik Adam Smith ……..	5
2.2.	Teori Malthus …….	5
2.3.	Teori Keynes ……..	6
2.4.	Teori Harrod-Domar ……..	7
2.5.	Teori Ester Boserup ……	8
2.6.	Teori Pasar Tenaga Kerja ……...	8
2.7.	Teori Penawaran Dan Permintaan Tenaga Kerja ……...	9
BAB III.	KONSEP DAN PENJELASAN TEKNIS KETENAGAKERJAAN ……	10
3.1.	Konsep Ketenagakerjaan …….	10
3.2.	Penjelasan Teknis Ketenagakerjaan ……	10
BAB IV.	TABEL DAN GRAFIK KETENAGAKERJAAN KUNINGAN TAHUN 2020	12
BAB V.	PENGHITUNGAN PDRB (PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO) …	88
5.1.	Metode Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku ……...	88
5.2.	Metode Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan ……..	89

BAB VI.	METODE ANALISIS PDRB DAN KETENAGAKERJAAN DENGAN METODE LQ DAN SHIFT SHARE ……..	103
6.1.	Local Quotient Analysis (LQ) …….	103
6.2.	Fenomena Ketenagakerjaan Kuningan dan Jawa Barat Tahun 2020 ……..	108
BAB VII.	HASIL LQ ANALISIS, SHIFT SHARE & PENENTUAN KATEGORI PEREKONOMIAN UNGGULAN ……	119
7.1.	Hasil LQ Analisis ……	125
7.2.	Hasil Shift Share Analisis …….	
7.3.	Perhitungan Skor Hasil LQ dan Shift Share Analisis dan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan Tahun 2020 ……...	131
BAB VIII.	PEMBAHASAN HASIL ANALISIS KETENAGAKERJAAN & PERTANIAN ……	133
8.1.	Menjaga Stabilitas Sektor Pertanian Saat Pandemi Covid-19 ……...	133
8.2.	Strategi Ekonomi Sektor Pertanian Di Tengah Pandemi Covid-19 ……	136
8.3.	Petani Merugi Saat Sektor Pertanian Tumbuh di Tengah Pandemi Corona, Apa Masalahnya? ……	145
8.4.	COVID-19 dan Dampaknya Pada Pertanian Dan Ketahanan Pangan …...	149
8.5.	Generasi Muda Dan Pekerjaan Di Sektor Pertanian : Faktor Persepsi Dan Minat ……	167
8.6.	Upaya Meningkatkan Minat ke Sektor Pertanian	176
8.7.	Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Generasi Muda Bekerja Di Pertanian ….	178
BAB IX.	PENUTUP DAN SARAN ……...	198
Daftar Pustaka ……...		202

Daftar Tabel

Kajian Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan Tahun 2021

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal
Tabel 4.1.	Perkembangan Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2018 sd 2020 ……	15
Tabel 4.2.1.	Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu (Agustus 2020) …….	16
Tabel 4.2.2.	Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu (Agustus 2020) …….	17
Tabel 4.2.3.	Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu (Agustus 2020) …….	18
Tabel 4.3.1.	Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kab. /Kota dan Kelompok Umur (Agustus2020)) ……...	24
Tabel 4.3.2.	Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kab. /Kota dan Kelompok Umur (Agustus2020)) ……	25
Tabel 4.3.3.	Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kab. /Kota dan Kelompok Umur (Agustus2020)) ……	26
Tabel 4.4.1.	Persentase Penduduk awa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kab. /Kota dan Kelompok Umur (Agustus2020)) ……	27
Tabel 4.4.2.	Persentase Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kab. /Kota dan Kelompok Umur (Agustus2020))	28
Tabel 4.4.3.	Persentase Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kab. /Kota dan Kelompok Umur (Agustus2020))	29
Tabel 4.5.1.	Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Agustus 2020) …	31
Tabel 4.5.2.	Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Agustus 2020) ……	32
Tabel 4.5.3.	Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Agustus 2020) ……	33
Tabel 4.6.1.	Persentase Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Agustus 2020) ……	34
Tabel 4.6.2.	Persentase Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Agustus 2020) ……	35
Tabel 4.6.3.	Persentase Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Agustus 2020) ……	36

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal
Tabel 4.7.1.	Penduduk di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kab. /Kota dan Kelompok Umur (Agustus2020)) ……..	39
Tabel 4.7.2.	Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kab. /Kota dan Kelompok Umur (Agustus2020)) …….	40
Tabel 4.7.3.	Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kab. /Kota dan Kelompok Umur (Agustus2020)) …….	41
Tabel 4.8.1.	Persentase Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kab. /Kota dan Kelompok Umur (Agustus2020)) …….	42
Tabel 4.8.2.	Persentase Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kab. /Kota dan Kelompok Umur (Agustus2020)) ……	43
Tabel 4.8.3.	Persentase Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kab. /Kota dan Kelompok Umur (Agustus2020)) ……...	44
Tabel 4.9.1.	Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Agustus 2020) ……	46
Tabel 4.9.2.	Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Agustus 2020) ……	47
Tabel 4.9.3.	Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Agustus 2020) ……	48
Tabel 4.10.1.	Persentase Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Agustus 2020) ……	49
Tabel 4.10.2.	Persentase Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Agustus 2020) ……	50
Tabel 4.10.3.	Persentase Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Agustus 2020) ……	51
Tabel 4.11.1.	Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama (Agustus 2020)	54
Tabel 4.11.2.	Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama (Agustus 2020) ……	56
Tabel 4.11.3.	Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama (Agustus 2020) ……	58

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal
Tabel 4.12.1.	Persentase Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama (Agustus 2020) ……	60
Tabel 4.12.2.	Persentase Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama (Agustus 2020) ……...	62
Tabel 4.12.3.	Persentase Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama (Agustus 2020) ……...	64
Tabel 4.13.1.	Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utam (Agustus 2020) …....	66
Tabel 4.13.2.	Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utam (Agustus 2020) ……...	67
Tabel 4.13.3.	Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utam (Agustus 2020) ……...	68
Tabel 4.14.1.	Persentase Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utam (Agustus 2020) ……...	69
Tabel 4.14.2.	Persentase Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utam (Agustus 2020) …….	70
Tabel 4.14.3.	Persentase Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utam (Agustus 2020) …….	71
Tabel 4.15.1.	Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Agustus 2020) ……...	72
Tabel 4.15.2.	Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Agustus 2020) ……	73
Tabel 4.15.3.	Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Agustus 2020) ……	74
Tabel 4.16.1.	Persentase Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Agustus 2020) ……	75

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal

Tabel 4.16.2.	Persentase Laki-laki Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Agustus 2020) ……...	76
Tabel 4.16.3.	Persentase Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Agustus 2020) ……...	77
Tabel 4.17.1.	Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Kategori Pengangguran Terbuka (Agustus 2020) ……...	80
Tabel 4.17.2.	Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Kategori Pengangguran Terbuka (Agustus 2020) ……	81
Tabel 4.17.3.	Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Kategori Pengangguran Terbuka (Agustus 2020) ……	82
Tabel 4.18.1.	Persentase Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Kategori Pengangguran Terbuka (Agustus 2020) ……	83
Tabel 4.18.2.	Persentase Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Kategori Pengangguran Terbuka (Agustus 2020) ……	84
Tabel 4.18.3.	Persentase Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Kategori Pengangguran Terbuka (Agustus 2020) ……	85
Tabel 5.1.	PDRB ADHB, ADHK (Tahun 2010=100) & Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 sampai dengan 2020 …….	92
Tabel 5.2.1.	PDRB Kabupaten Kuningan Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 sd 2020 (Juta Rupiah) …….	93
Tabel 5.2.2.	PDRB Provinsi Jawa Barat Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 sd 2020 (Juta Rupiah) …….	94
Tabel 5.3.1.	PDRB Kabupaten Kuningan Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 sd 2020 (Juta Rupiah) ……...	95
Tabel 5.3.2.	PDRB Provinsi Jawa Barat Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 sd 2020 (Juta Rupiah) …….	96
Tabel 5.4.2.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kuningan Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 sd 2020 (Persen) ……	97
Tabel 5.4.2.	Distribusi Persentase PDRB Provinsi Jawa Barat Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 sd 2020 (Persen) ……...	98
Tabel 5.5.1.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kuningan Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 sd 2020 (Persen) ……	99

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal

Tabel 5.5.2.	Distribusi Persentase PDRB Provinsi Jawa Barat Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 sd 2020 (Persen) ……	100
Tabel 5.6.1.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kuningan Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 Sd 2020 / LPE (Persen) ……	101
Tabel 5.6.2.	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 Sd 2020 / LPE (Persen) ……	102
Tabel 6.1.	Persentase Daya Serap Kategori Perekonomian di Kabupaten Kuningan dan Jawa Barat Tahun 2020 ……...	109
Tabel 6.2.	Jumlah Produksi Beras dan Jumlah Konsumsi Beras Tahun 2020 di Kabupaten Kota di Propinsi Jawa Barat ……	111
Tabel 6.3.	Persentase Surplus Beras Tahun 2020 di Kabupaten Kota yang Produksi Berasnya Lebih Dari Kebutuhannya ……	112
Tabel 6.4.	Produktifitas Padi (GKG) KW per Hektare Menurut Kabupaten Kota di Jawa Barat Tahun 2020 …….	112
Tabel 6.5.	Luas Panen Padi di Provinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota, 2019-2020 (Hektare) …….	114

Daftar Grafik

Kajian Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan Tahun 2021

DAFTAR GRAFIK

Nomor Grafik	Judul Grafik	Hal
Grafik 4.1.1.	TPAK (Tingkat Partisipasi Angktan Kerja) Penduduk Menurut Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2020	19
Grafik 4.1.2.	TPAK (Tingkat Partisipasi Angktan Kerja) Penduduk Laki-laki Menurut Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2020	19
Grafik 4.1.3.	TPAK (Tingkat Partisipasi Angktan Kerja) Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten / Kotadi Jawa Barat Tahun 2020	20
Grafik 4.1.4.	Tingkat Ketidakaktifan Penduduk Menurut Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2020	20
Grafik 4.1.5.	Tingkat Ketidakaktifan Penduduk Laki-laki Menurut Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2020	21
Grafik 4.1.6.	Tingkat Ketidakaktifan Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2020	21
Grafik 4.2.1.	EPR (Employment to Population Ratio) Penduduk Menurut Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2020	22
Grafik 4.2.2.	EPR (Employment to Population Ratio) Penduduk Laki-laki Menurut Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2020	22
Grafik 4.2.3.	EPR (Employment to Population Ratio) Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2020	23
Grafik 4.3.	Selisih Persentase Penduduk Kuningan dan Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut dan Kelompok Umur (Agustus 2020)	30
Grafik 4.4.	Selisih Persentase Penduduk Kuningan dan Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Agustus 2020)	37
Grafik 4.5.	Persentase Penduduk di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten / Kota dan Jenis Pendidikan D-I atau Lebih Tinggi yang Ditamatkan (Agustus 2020)	38
Grafik 4.6.	Selisih Persentase Penduduk Kuningan dan Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur (Agustus 2020)	45
Grafik 4.7.	Selisih Persentase Penduduk Kuningan dan Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Agustus 2020)	52
Grafik 4.8.	Persentase Penduduk di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten / Kota dan Jenis Pendidikan D-I atau Lebih Tinggi yang Ditamatkan (Agustus 2020)	53

Nomor Grafik	Judul Grafik	Hal

Grafik 4.9. Selisih Persentase Penduduk Kuningan dan Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Agustus 2020) …… 78

Grafik 4.10 Persentase Penduduk di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten / Kota dan Jenis Pendidikan D-I atau Lebih Tinggi yang Ditamatkan (Agustus 2020) …… 79

Grafik 4.11 Selisih Persentase Penduduk Kuningan dan Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kategori Pengangguran Terbuka (Agustus 2020) …… 86

Grafik 4.12 Persentase Penduduk di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten / Kota dan Kategori Pengangguran Terbuka sebagai Pencari Kerja (Agustus 2020) …… 87

Grafik 6.1. Persentase Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Kuningan & Jawa Barat 2018 sd 2020 …… 110

Grafik 6.2. Produktifitas Gabah Kering Giling GKG per Hektare (Kw/Ha) di Kabupaten Kota Seluruh Jawa Barat Tahun 2020 …… 113

Grafik 6.3. Luas Panen Padi di Provinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota, 2019-2020 (Hektare) …… 115

Grafik 6.4. Produksi Gabah Kering Giling di Provinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota, 2019-2020 (GKG Ton) …… 116

Grafik 6.5. Persentase Perkembangan Luas Panen Tanaman Padi Kabupaten Kota di Jawa Barat Tahun 2019 & 2020 …… 117

Grafik 6.6. Persentase Perkembangan Produksi Gabah Kering Giling (GKG) Kabupaten Kota di Jawa Barat Tahun 2019 & 2020 …… 118

Bab 1
Pendahuluan

Kajian Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan Tahun 2021

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020 sudah banyak terjadi bencana mulai dari banjir, bencana alam seperti puting beliung, tanah longsor, erupsi gunung, gelombang pasang atau abrasi, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan gempa bumi. Dan pada Maret 2020 dikejutkan dengan wabah virus corona (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Dimana Covid-19 ini bermula dan terdeteksi di negara Wuhan, China pada Desember 2019 dan mulai tersebar keberbagai penjuru dunia termaksuk Indonesia pada Maret 2020. Pada awalnya virus ini diketahui pertama kali muncul di pasat hewan dan pasar seafood di kota Wuhan. Koresponden kesehatan dan sains BBC, Michelle Roberts and James Gallager mengatakan dipasar grosir hewan dan makanan laut tersebut sejumlah hewan liar seperti ular, kelelawar dan ayam, dan dari sini timbulah banyak dugaan bahwa virus ini dapat menyebar dari hewan kemanusia, dan kemudian dari manusia ke manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring berjalannya waktu, hingga petugas medis pun terkena infeksi virus corona. Dan pada akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pheumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia.

Sampel isolat dari pasien yang diteliti menunjukan adanya infeksi corona virus berjenis betacoronavirus tipe baru yang diberi nama pada tahun 2019 novel Coronavirus (2019-nCov). Dan pada tanggal 11 Februari 2020 World Health Organization memberi nama virus baru tersebut Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai Coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Secara global, kasus positif corona mencapai 2.601.774 kasus dengan angka kematian akibat penyakit covid-19 mencapai 183.803 jiwa, sementara pasien pasien covid-19 yang berhasil

sembuh kini tercatat sebanyak 674.413 orang. Sementara di Indonesia terhitung pada tanggal 20 April 2020, sendiri total kasus positif corona telah mencapai 6.760 pasien. Semakin meningkatnya jumlah pasien yang diakibatkan Covid-19 ini membuat pemerintah Indonesia mengeluaran berbagai kebijakan untuk dapat menyelesaikan kasus Covid-19, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan social distancing atau masyarakat menyebutnya dengan #dirumahaja.

Hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi bahkan memutus rantai infeksi Covid-19 dimana seseorang perlu menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, serta tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain. Selain itu pemerintah menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang merupakan strategi pemerintah untuk dapat mencegah virus corona semakin menyebar, sementara itu menurut Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI, PSBB tak sepenuhnya membatasi seluruh kegiatan masyarakat, pembatasan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja di suatu wilayah yang terduga terinfeksi Covid-19. Banyak sekolah dan Universitas yang diliburkan oleh pemerintah dengan memberlakukan belajar dan bekerja didalam rumah, membatasi kegiatan keagamaan, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan ditempat umum dan meliburkan tempat kerja dan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan. Dengan adanya pendemi penyakit Covid-19 ini mau tidak mau beberapa perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau karyawan sehingga terjadi PHK terhadap karyawan sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit. Banyak pula perusahaan yang mengambil langkah-langkah dan ektrim untuk mempertahankan bisnis mereka dan tentunya untuk mengurangi kerugian akibat covid-19. Menurut pemantauan ILO (International Labour Organization) karena adanya tindakan karantina penuh atau parsial saat ini sudah berdampak pada hampir 2,7 milliar pekerja, yang sudah mewakili sekitar 81 persen tenaga kerja dunia. Dalam situasi saat ini, usaha diberbagai sektor ekonomi sedang menghadapi krisis

ekonomi yang dapat mengancam operasi dan kesehatan mereka, terutama di antara perusahaan kecil, sementara jutaan pekerja rentan kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta mengalami PHK.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dari penulisan kajian ini adalah :

1. Bagaimana Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana arahan pembangunan ketenagakerjaan pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Kuningan?

1.3. Tujuan Penulisan Kajian

Merujuk pada pokok permasalahan di atas ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari penulisan kajian ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan tahun 2020 ini

1. Melakukan kajian terhadap data perekonomian (Angka PDRB) dan data ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan.
2. Melakukan analisis terhadap angka PDRB dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan dengan menggunakan Local Qoutient Analisis dan Shift Share Analisis; data PDRB dan Ketenagakerjaan di Jawa Barat yang menjadi pembanding utamanya.
3. Menentukan kategori perekonomian yang menjadi kategori basis yang memiliki daya saing di Kabupaten Kuningan, terutama di masa pandemik seperti saat ini.

4. Memberikan beberapa kajian literatur terhadap kategori perekonomian di Kabupaten Kuningan yang menjadi basis utama dan berdaya saing untuk dapat dijadikan sebagai rujukan dasar pola pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Kuningan.
5. Memberikan gambaran tentang peluang dan tantangan dari pembangunan kategori basis perekonomian yang berdaya saing tinggi.
6. Menentukan cara optimal dalam pengembangan peluang dan solusi dari tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Kuningan.
7. Memberikan masukan tentang langkah dan cara yang akan ditempuh dalam kebijakan pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Kuningan pada saat pandemik Covid 19 dan sesudahnya.

Bab II
TEORI TEORI KETENAGAKERJAAN

Kajian Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan Tahun 2021

BAB II.

TEORI-TEORI KETENAGAKERJAAN

2.1. Teori Klasik Adam Smith

Menurut Mulyadi (2003), teori klasik menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith (1729-1790) juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (necessary condition) bagi pertumbuhan ekonomi.

2.2. Teori Malthus

Sesudah Adam Smith, Thomas Robert Malthus (1766-1834) dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran-pemikiran ekonomi. Buku Malthus yang dikenal paling luas adalah Principles of Population. Menurut Mulyadi (2003), dari buku tersebut akan dilihat bahwa meskipun Malthus termasuk salah seorang pengikut Adam Smith, tidak semua pemikirannya sejalan dengan pemikiran Smith. Disatu pihak Smith optimis bahwa kesejahteraan umat manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari pembagian kerja dan spesialisasi. Sebaliknya, Malthus justru pesimis tentang masa depan umat manusia. Kenyataan bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi utama tetap jumlahnya. Dalam banyak hal justru

luas tanah untuk pertanian berkurang karena sebagian digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-pabrik dan bangunan lain serta pembuatan jalan. Menurut Malthus manusia berkembang jauh labih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Malthus tidak percaya bahwa teknologi mampu berkembang lebih cepat dari jumlah penduduk sehingga perlu dilakukan pembatasan dalam jumlah penduduk. Pembatasan ini disebut Malthus sebagai pembatasan moral.

2.3. Teori Keynes

Kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan (equilibrium). Dalam posisi keseimbangan semua sumber daya, termasuk tenaga kerja, akan digunakan secara penuh (full-employed). Dengan demikian di bawah sistem yang didasarkan pada mekanisme pasar tidak ada pengangguran. Kalau tidak ada yang bekerja, daripada tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka mereka bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah. Kesediaan untuk bekerja dengan tingkat upah lebih rendah ini akan menarik perusahaan untuk memperkerjakan mereka lebih banyak.

Kritikan Jhon Maynard Keynes (1883-1946) terhadap sistem klasik salah satunya adalah tentang pendapatnya yang mengatakan bahwa tidak ada mekanisme penyesuaian (adjustment) otomatis yang menjamin bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangan pada tingkat penggunaan kerja penuh. Dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik di atas. Di manapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (labor union) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan pekerja dari penurunan tingkat upah. Kalaupun tingkat upah diturunkan maka boleh jadi tingkat pendapatan masyarakat akan turun. Turunnya pendapatan sebagian anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli

masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan akan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunnya harga-harga.

Kalau harga-harga turun, maka kurva nilai produktivitas marjinal tenaga kerja (marginal value of productivity of labor), yang dijadikan sebagai patokan oleh pengusaha dalam memperkerjakan tenaga kerja akan turun. Jika penurunan dalam harga-harga tidak begitu besar, maka kurva nilai produktivitasnya hanya turun sedikit. Meskipun demikian jumlah tenaga kerja yang bertambah tetap saja lebih kecil dari jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Lebih parah lagi kalau harga-harga turun drastis maka kurva nilai produktivitas marginal dari tenaga kerja juga turun drastis dimana jumlah tenaga kerja yang tertampung menjadi semakin kecil dan pengangguran menjadi semakin bertambah luas (Mulyadi, 2003).

2.4. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar dikenal sebagai teori pertumbuhan. Menurut teori ini dalam Mulyadi (2003), investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Peran modal fisik di dalam model pertumbuhan sangat penting, akan tetapi kapasitas produksi hanya dapat meningkat bila sumber daya lain (modal fisik) membesar. Di samping itu dalam model pertumbuhan, jumlah penduduk yang besar tidak mengurangi pendapatan per kapita asalkan modal fisiknya meningkat. Model yang sama juga dikemukakan oleh model Solow di mana dalam model ini dipakai suatu fungsi produksi Cobb-Douglas. Angkatan kerja diasumsikan tumbuh secara geometris dan full employment selalu tercapai. Tetapi, dalam model ini pekerja sudah diperluaskan secara jelas sebagai salah satu faktor produksi, dan bukan sekedar pembagi (untuk memperoleh output pekerja). Dalam model ini juga dilihat substitusi antara modal fisik dan pekerja.

2.5. Teori Ester Boserup

Boserup berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk justru menyebabkan dipakainya sistem pertanian yang lebih intensif disuatu masyarakat dan meningkatnya output di sektor pertanian. Boserup juga berpendapat bahwa pertambahan penduduk berakibat dipilihnya sistem teknologi pertanian pada tingkatan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, inovasi (teknologi) ada lebih dahulu. Inovasi itu hanya menguntungkan bila jumlah penduduk lebih banyak. Inovasi menurut Boserup dapat meningkatkan output pekerja, tetapi hanya dilakukan bila jumlah pekerjanya banyak. Pertumbuhan penduduk justru mendorong diterapkannya suatu inovasi (teknologi) baru (Mulyadi, 2003).

Dari keseluruhan teori tenaga kerja dan pertumbuhan yang mendominasi sebagian besar teori-teori pembangunan pada tahun 1950-an dan 1960-an dan pada awal tahun 1980-an dikenal bentuk aliran ekonomi sisi penawaran atau supply-side economics, yang memfokuskan pada kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan output nasional melalui akumulasi modal. Karena model ini menghubungkan tingkat penyediaan kesempatan kerja dengan tingkat pertumbuhan GNP, artinya dengan memaksimumkan penyerapan tenaga kerja, untuk memaksimumkan pertumbuhan GNP dan kesempatan kerja dengan cara memaksimumkan tingkat tabungan dan investasi.

2.6. Teori Pasar Tenaga Kerja

Solmon (1980) dalam Sinaga (2005) menjelaskan, bahwa pasar tenaga kerja adalah tempat aktivitas dari bertemunya pelaku-pelaku, pencari kerja dan pemberi lowongan kerja. Proses bertemunya pencari kerja dan pemberi lowongan kerja dapat terjadi sebentar saja namun dapat pula memakan waktu yang lama, masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak di pasar yaitu:

setiap perusahaan yang menawarkan lowongan kerja maka menginginkan kualitas serta keahlian pekerja berbeda-beda sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat upah. Sedangkan pencari kerja memiliki keahlian juga berbeda-beda sehingga pekerja menginginkan tingkat upah yang juga berbeda-beda pula. Di mana letak masalah dari kedua belah pihak adalah keterbatasan informasi.

2.7. Teori Penawaran Dan Permintaan Tenaga Kerja

Suparmoko dan Maria (2000) dalam Sinaga (2005) menjelaskan bahwa pada prinsipnya teori penawaran tenaga kerja dan teori permintaan tenaga kerja merupakan fungsi dari tingkat upah, di mana pendapat dari kaum klasik menyatakan, jika semakin tinggi tingkat upah yang diminta oleh kaum pekerja maka akan semakin sedikit jumlah penawaran tenaga kerja (lowongan kerja) yang dapat diberikan dan akan berlaku sebaliknya. Dalam memahami mekanisme pasar tenaga kerja harus dilihat bagaimana individu pekerja terdapat perbedaan, maka untuk menentukan kuva penawaran tenaga kerja pada suatu daerah adalah dengan menjumlahkan kurva-kurva penawaran dari setiap individu, oleh sebab itu kurva dari penawaran tenaga kerja berbentuk melengkung kebelakang (backward bending curve).

Bab III
KONSEP DAN PENJELASAN TEKNIS KETENAGAKERJAAN

Kajian Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan Tahun 2021

BAB III.

KONSEP DAN PENJELASAN TEKNIS KETENAGAKERJAAN

1.1. Konsep Ketenagakerjaan

1. **Angkatan Kerja** adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi seperti penduduk bekerja, atau yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
2. **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus.
3. **Pengangguran** meliputi penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.
4. **TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)** adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas).
5. **TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja.

1.2. Penjelasan Teknis Ketenagakerjaan

Terdapat beberapa indikator yang disusun ke dalam kajian ketenagakerjaan ini, yaitu:

Indikator 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK); Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, indikator ini digunakan untuk mengindikasikan besarnya penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk umur kerja.

Indikator 2. Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (Employment to Population Ratio-EPR); Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (Employment to Population Ratio-EPR) didefinisikan sebagai proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang bekerja terhadap penduduk umur kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja, yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Indikator 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama; Kategorisasi status pekerjaan utama dapat membantu memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dengan kemajuan pembangunan, suatu

negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan jumlah penduduk bekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian. Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan utama dalam Sakernas adalah: Berusaha sendiri; Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar; Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar; Buruh/karyawan/pegawai; Pekerja bebas di pertanian; Pekerja bebas di nonpertanian; dan Pekerja keluarga/tak dibayar.

Indikator 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama; Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam literatur pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa. Dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota. Klasifikasi lapangan pekerjaan disajikan dalam 17 kategori yang mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015 yang berdasarkan International Standard Industrial Classsification (ISIC) revisi 4. Tujuh belas (17) kategori yang dimaksud adalah : A. Pertanian, kehutanan, dan perikanan; B. Pertambangan dan penggalian; C. Industri pengolahan; D. Pengadaan listrik dan gas; E. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; F. Konstruksi; G. Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor; H. Transportasi dan pergudangan; I. Penyediaan akomodasi dan makan minum; J. Informasi dan komunikasi; K. Jasa keuangan dan asuransi; L. Real estat; M,N. Jasa perusahaan; O. Administrasi pemerintahan,

pertahanan, dan jaminan sosial wajib; P. Jasa pendidikan; Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial; R,S,T,U. Jasa lainnya. https://www.bps.go.id

Indikator 5. Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama; Klasifikasi jenis pekerjaan menggunakan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014 yang mengacu kepada International Standard Classification of Occupation (ISCO) 2008 dengan uraian jenis pekerjaan yang lebih rinci. Dalam penyajian publikasi ini klasifikasi tersebut dikonversikan ke Klasifikasi Jabatan Indonesia (KJI) 1982. Dengan kategori sebagai berikut: 0/1. Tenaga profesional, teknisi, dan yang sejenis; 2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan; 3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis; 4. Tenaga usaha penjualan; 5. Tenaga usaha jasa; 6. Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan; 7/8/9. Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar; X/00. Lainnya. Indikator 6.

Indikator 6. Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); atau biasa disebut tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif (tingkat pengangguran relatif rendah pada orang-orang miskin). Penganggur adalah penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja. Bersama dengan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk, tingkat pengangguran menyediakan indikator situasi pasar tenaga kerja di negara-negara yang mengumpulkan informasi tentang tenaga kerja. Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas: Penduduk tidak bekerja dan mencari pekerjaan; Penduduk tidak

bekerja dan mempersiapkan usaha; Penduduk tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; Penduduk tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja. https://www.bps.go.id

Indikator 7. Pengangguran Menurut Pendidikan; Tingkat pengangguran menurut pendidikan memberikan gambaran adanya penawaran tenaga kerja yang tidak terserap pada tingkat pendidikan tertentu. Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual adalah berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (International Standard Classification of Education-ISCED-97). Pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan ISCED-97 adalah sebagai berikut: 1. Tidak pernah bersekolah adalah penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali; 2. Pendidikan Dasar, yaitu penduduk yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan, dan Paket B; 3. Pendidikan Menengah, yaitu penduduk dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK, dan Paket C; 4. Pendidikan Tinggi, yaitu penduduk yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/S1, dan S2/S3.

I**ndikator 8. Tingkat Ketidakaktifan**; Tingkat ketidakaktifan adalah proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (bukan angkatan kerja). Tingkat ketidakaktifan ini jika dijumlahkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) maka hasilnya adalah 100 persen. Dengan kata lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 (satu) dikurangi dengan TPAK.

Bab IV
TABEL DAN GRAFIK KETENAGAKERJAAN KUNINGAN TAHUN 2020

Kajian Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan Tahun 2021

BAB IV. TABEL DAN GRAFIK KETENAGAKERJAAN KUNINGAN TAHUN 2020

Tabel 4.1. Perkembangan Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2018 sd 2020

Kabupaten/Kota	Tahun								
	2018			2019			2020		
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	TPT (%)	Bekerja	Pengangguran Terbuka	TPT (%)	Bekerja	Pengangguran Terbuka	TPT (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kab. Bogor	2.364.831	257.686	9,83	2.539.196	254.645	9,11	2.342.939	390.731	14,29
Kab. Sukabumi	1.052.564	89.503	7,84	1.061.319	92.880	8,05	1.036.735	110.098	9,60
Kab. Cianjur	904.671	103.043	10,23	1.007.775	109.574	9,81	1.054.579	131.016	11,05
Kab. Bandung	1.569.936	83.860	5,07	1.678.121	97.942	5,51	1.569.974	147.402	8,58
Kab. Garut	1.030.909	79.087	7,12	1.084.901	86.093	7,35	1.052.573	103.607	8,96
Kab. Tasikmalaya	791.784	58.860	6,92	836.402	56.299	6,31	877.416	67.290	7,12
Kab. Ciamis	591.270	28.766	4,64	601.243	32.702	5,16	640.767	38.425	5,66
Kab. Kuningan	437.968	43.839	9,10	460.227	49.304	9,68	463.164	58.513	11,22
Kab. Cirebon	897.849	106.883	10,64	961.983	111.064	10,35	938.217	122.145	11,52
Kab. Majalengka	581.773	30.619	5,00	612.010	27.985	4,37	625.576	38.798	5,84
Kab. Sumedang	518.100	42.260	7,54	539.658	44.989	7,70	574.606	63.062	9,89
Kab. Indramayu	786.455	72.668	8,46	830.672	75.643	8,35	854.045	86.661	9,21
Kab. Subang	710.617	67.769	8,71	755.892	71.822	8,68	746.284	78.183	9,48
Kab. Purwakarta	394.932	43.583	9,94	405.052	43.683	9,73	384.543	47.885	11,07
Kab. Karawang	1.032.660	103.641	9,12	1.018.087	109.111	9,68	1.028.735	133.898	11,52
Kab. Bekasi	1.470.550	158.747	9,74	1.612.313	159.396	9,00	1.628.231	212.435	11,54
Kab. Bandung Barat	683.707	63.909	8,55	701.917	63.034	8,24	656.087	91.557	12,25
Kab. Pangandaran	234.550	8.743	3,59	226.853	10.729	4,52	233.143	12.476	5,08
Kota Bogor	469.069	50.624	9,74	482.921	48.676	9,16	449.120	65.203	12,68
Kota Sukabumi	133.698	12.532	8,57	141.762	13.145	8,49	122.662	16.995	12,17
Kota Bandung	1.133.542	99.205	8,05	1.217.862	108.508	8,18	1.167.849	147.081	11,19
Kota Cirebon	148.378	14.806	9,07	138.598	13.781	9,04	139.334	17.166	10,97
Kota Bekasi	1.319.308	132.701	9,14	1.372.345	124.143	8,30	1.348.530	161.311	10,68
Kota Depok	1.023.848	73.104	6,66	1.104.720	72.002	6,12	1.077.600	118.032	9,87
Kota Cimahi	272.379	23.696	8,00	269.978	23.771	8,09	254.699	39.055	13,30
Kota Tasikmalaya	294.478	21.783	6,89	310.555	22.594	6,78	315.844	27.441	7,99
Kota Banjar	87.104	5.514	5,95	91.471	6.000	6,16	91.602	6.610	6,73
Jawa Barat	20.936.930	1.877.431	8,23	22.063.833	1.929.515	8,04	21.674.854	2.533.076	10,46

Tabel 4.2.1. Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu *(Agustus 2020)*

Laki-laki+Perempuan

Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja					Bukan Angkatan Kerja				Jumlah	% Bekerja thd Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT	% Angkatan Kerja thd Penduduk Usia Kerja
	Bekerja	Pengangguran Terbuka			Jumlah Angkatan Kerja	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah				
		Pernah Bekerja	Tdk Pernah Bekerja	Jumlah									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kab. Bogor	2.342.939	250.380	140.351	390.731	2.733.670	368.707	1.018.963	241.815	1.629.485	4.363.155	85,71	14,29	62,65
Kab. Sukabumi	1.036.735	58.176	51.922	110.098	1.146.833	134.592	489.413	91.973	715.978	1.862.811	90,40	9,60	61,56
Kab. Cianjur	1.054.579	88.002	43.014	131.016	1.185.595	87.863	368.602	69.770	526.235	1.711.830	88,95	11,05	69,26
Kab. Bandung	1.569.974	98.042	49.360	147.402	1.717.376	219.034	686.541	138.298	1.043.873	2.761.249	91,42	8,58	62,20
Kab. Garut	1.052.573	42.634	60.973	103.607	1.156.180	143.148	469.613	123.118	735.879	1.892.059	91,04	8,96	61,11
Kab. Tasikmalaya	877.416	38.992	28.298	67.290	944.706	81.075	275.740	56.908	413.723	1.358.429	92,88	7,12	69,54
Kab. Ciamis	640.767	22.789	15.636	38.425	679.192	53.804	181.251	36.814	271.869	951.061	94,34	5,66	71,41
Kab. Kuningan	463.164	37.798	20.715	58.513	521.677	55.411	205.229	59.432	320.072	841.749	88,78	11,22	61,98
Kab. Cirebon	938.217	74.031	48.114	122.145	1.060.362	122.193	405.978	73.794	601.965	1.662.327	88,48	11,52	63,79
Kab. Majalengka	625.576	26.433	12.365	38.798	664.374	49.283	199.756	40.309	289.348	953.722	94,16	5,84	69,66
Kab. Sumedang	574.606	36.392	26.670	63.062	637.668	61.304	185.045	40.612	286.961	924.629	90,11	9,89	68,96
Kab. Indramayu	854.045	46.345	40.316	86.661	940.706	77.289	280.502	54.410	412.201	1.352.907	90,79	9,21	69,53
Kab. Subang	746.284	41.406	36.777	78.183	824.467	76.165	275.343	60.183	411.691	1.236.158	90,52	9,48	66,70
Kab. Purwakarta	384.543	23.392	24.493	47.885	432.428	50.602	187.262	39.665	277.529	709.957	88,93	11,07	60,91
Kab. Karawang	1.028.735	57.912	75.986	133.898	1.162.633	103.765	448.594	76.536	628.895	1.791.528	88,48	11,52	64,90
Kab. Bekasi	1.628.231	144.814	67.621	212.435	1.840.666	260.798	630.754	133.460	1.025.012	2.865.678	88,46	11,54	64,23
Kab. Bandung Barat	656.087	54.294	37.263	91.557	747.644	90.631	341.046	68.600	500.277	1.247.921	87,75	12,25	59,91
Kab. Pangandaran	233.143	7.258	5.218	12.476	245.619	15.490	47.502	11.241	74.233	319.852	94,92	5,08	76,79
Kota Bogor	449.120	38.530	26.673	65.203	514.323	69.074	194.079	68.301	331.454	845.777	87,32	12,68	60,81
Kota Sukabumi	122.662	12.209	4.786	16.995	139.657	21.254	61.954	27.707	110.915	250.572	87,83	12,17	55,74
Kota Bandung	1.167.849	84.714	62.367	147.081	1.314.930	191.618	414.355	111.196	717.169	2.032.099	88,81	11,19	64,71
Kota Cirebon	139.334	10.571	6.595	17.166	156.500	20.548	55.325	13.068	88.941	245.441	89,03	10,97	63,76
Kota Bekasi	1.348.530	104.075	57.236	161.311	1.509.841	244.171	438.520	139.608	822.299	2.332.140	89,32	10,68	64,74
Kota Depok	1.077.600	84.568	33.464	118.032	1.195.632	173.553	415.316	84.823	673.692	1.869.324	90,13	9,87	63,96
Kota Cimahi	254.699	26.291	12.764	39.055	293.754	44.353	110.791	19.849	174.993	468.747	86,70	13,30	62,67
Kota Tasikmalaya	315.844	17.339	10.102	27.441	343.285	44.463	102.368	25.781	172.612	515.897	92,01	7,99	66,54
Kota Banjar	91.602	4.047	2.563	6.610	98.212	7.998	30.469	9.134	47.601	145.813	93,27	6,73	67,35
Jawa Barat	21.674.854	1.531.434	1.001.642	2.533.076	24.207.930	2.868.186	8.520.311	1.916.405	13.304.902	37.512.832	89,54	10,46	64,53

Tabel 4.2.2. Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu *(Agustus 2020)*

Laki-laki

Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja					Bukan Angkatan Kerja				Jumlah	% Bekerja thd Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT	% Angkatan Kerja thd Penduduk Usia Kerja
	Bekerja	Pengangguran Terbuka			Jumlah Angkatan Kerja	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah				
		Pernah Bekerja	Tdk Pernah Bekerja	Jumlah									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kab. Bogor	1.543.726	169.149	93.196	262.345	1.806.071	203.774	54.883	171.984	430.641	2.236.712	85,47	14,53	80,75
Kab. Sukabumi	696.908	43.300	32.868	76.168	773.076	73.031	37.643	58.614	169.288	942.364	90,15	9,85	82,04
Kab. Cianjur	672.890	66.646	28.846	95.492	768.382	40.810	27.818	45.503	114.131	882.513	87,57	12,43	87,07
Kab. Bandung	1.013.331	68.442	32.931	101.373	1.114.704	111.853	68.242	102.559	282.654	1.397.358	90,91	9,09	79,77
Kab. Garut	683.959	37.059	37.282	74.341	758.300	70.518	27.680	91.912	190.110	948.410	90,20	9,80	79,95
Kab. Tasikmalaya	520.485	26.238	19.784	46.022	566.507	39.905	26.921	33.050	99.876	666.383	91,88	8,12	85,01
Kab. Ciamis	374.550	17.282	7.690	24.972	399.522	29.576	10.516	24.843	64.935	464.457	93,75	6,25	86,02
Kab. Kuningan	292.807	27.018	10.835	37.853	330.660	30.595	21.695	36.194	88.484	419.144	88,55	11,45	78,89
Kab. Cirebon	596.726	53.874	29.658	83.532	680.258	66.445	50.565	52.308	169.318	849.576	87,72	12,28	80,07
Kab. Majalengka	376.156	16.414	8.121	24.535	400.691	24.768	19.723	27.109	71.600	472.291	93,88	6,12	84,84
Kab. Sumedang	344.455	24.891	12.419	37.310	381.765	30.866	17.659	26.831	75.356	457.121	90,23	9,77	83,52
Kab. Indramayu	542.915	31.169	25.959	57.128	600.043	37.196	35.901	22.558	95.655	695.698	90,48	9,52	86,25
Kab. Subang	468.702	28.541	22.580	51.121	519.823	38.194	22.483	40.346	101.023	620.846	90,17	9,83	83,73
Kab. Purwakarta	263.200	17.791	15.104	32.895	296.095	23.279	15.889	25.586	64.754	360.849	88,89	11,11	82,06
Kab. Karawang	687.681	41.259	47.104	88.363	776.044	54.943	42.564	45.144	142.651	918.695	88,61	11,39	84,47
Kab. Bekasi	1.070.038	96.051	47.942	143.993	1.214.031	129.939	22.137	92.753	244.829	1.458.860	88,14	11,86	83,22
Kab. Bandung Barat	456.380	42.871	23.257	66.128	522.508	46.280	17.739	45.909	109.928	632.436	87,34	12,66	82,62
Kab. Pangandaran	134.571	5.768	1.820	7.588	142.159	7.482	1.631	6.549	15.662	157.821	94,66	5,34	90,08
Kota Bogor	295.513	26.779	12.802	39.581	335.094	33.958	8.245	50.369	92.572	427.666	88,19	11,81	78,35
Kota Sukabumi	80.325	9.168	2.516	11.684	92.009	11.144	4.063	19.249	34.456	126.465	87,30	12,70	72,75
Kota Bandung	719.975	55.482	36.531	92.013	811.988	91.689	42.848	76.061	210.598	1.022.586	88,67	11,33	79,41
Kota Cirebon	84.720	6.337	3.944	10.281	95.001	10.519	6.847	9.454	26.820	121.821	89,18	10,82	77,98
Kota Bekasi	830.533	70.625	31.647	102.272	932.805	121.655	32.908	83.869	238.432	1.171.237	89,04	10,96	79,64
Kota Depok	674.983	61.118	16.251	77.369	752.352	92.912	34.259	57.976	185.147	937.499	89,72	10,28	80,25
Kota Cimahi	160.348	17.324	8.221	25.545	185.893	24.045	11.815	13.482	49.342	235.235	86,26	13,74	79,02
Kota Tasikmalaya	191.633	13.012	5.982	18.994	210.627	21.830	7.243	18.458	47.531	258.158	90,98	9,02	81,59
Kota Banjar	52.183	3.045	1.527	4.572	56.755	4.361	4.894	5.312	14.567	71.322	91,94	8,06	79,58
Jawa Barat	13.829.693	1.076.653	616.817	1.693.470	15.523.163	1.471.567	674.811	1.283.982	3.430.360	18.953.523	89,09	10,91	81,90

Tabel 4.2.3. Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu *(Agustus 2020)*

Perempuan

Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja					Bukan Angkatan Kerja				Jumlah	% Bekerja thd Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT	% Angkatan Kerja thd Penduduk Usia Kerja
	Bekerja	Pengangguran Terbuka			Jumlah Angkatan Kerja	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah				
		Pernah Bekerja	Tdk Pernah Bekerja	Jumlah									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kab. Bogor	799.213	81.231	47.155	128.386	927.599	164.933	964.080	69.831	1.198.844	2.126.443	86,16	13,84	43,62
Kab. Sukabumi	339.827	14.876	19.054	33.930	373.757	61.561	451.770	33.359	546.690	920.447	90,92	9,08	40,61
Kab. Cianjur	381.689	21.356	14.168	35.524	417.213	47.053	340.784	24.267	412.104	829.317	91,49	8,51	50,31
Kab. Bandung	556.643	29.600	16.429	46.029	602.672	107.181	618.299	35.739	761.219	1.363.891	92,36	7,64	44,19
Kab. Garut	368.614	5.575	23.691	29.266	397.880	72.630	441.933	31.206	545.769	943.649	92,64	7,36	42,16
Kab. Tasikmalaya	356.931	12.754	8.514	21.268	378.199	41.170	248.819	23.858	313.847	692.046	94,38	5,62	54,65
Kab. Ciamis	266.217	5.507	7.946	13.453	279.670	24.228	170.735	11.971	206.934	486.604	95,19	4,81	57,47
Kab. Kuningan	170.357	10.780	9.880	20.660	191.017	24.816	183.534	23.238	231.588	422.605	89,18	10,82	45,20
Kab. Cirebon	341.491	20.157	18.456	38.613	380.104	55.748	355.413	21.486	432.647	812.751	89,84	10,16	46,77
Kab. Majalengka	249.420	10.019	4.244	14.263	263.683	24.515	180.033	13.200	217.748	481.431	94,59	5,41	54,77
Kab. Sumedang	230.151	11.501	14.251	25.752	255.903	30.438	167.386	13.781	211.605	467.508	89,94	10,06	54,74
Kab. Indramayu	311.130	15.176	14.357	29.533	340.663	40.093	244.601	31.852	316.546	657.209	91,33	8,67	51,83
Kab. Subang	277.582	12.865	14.197	27.062	304.644	37.971	252.860	19.837	310.668	615.312	91,12	8,88	49,51
Kab. Purwakarta	121.343	5.601	9.389	14.990	136.333	27.323	171.373	14.079	212.775	349.108	89,00	11,00	39,05
Kab. Karawang	341.054	16.653	28.882	45.535	386.589	48.822	406.030	31.392	486.244	872.833	88,22	11,78	44,29
Kab. Bekasi	558.193	48.763	19.679	68.442	626.635	130.859	608.617	40.707	780.183	1.406.818	89,08	10,92	44,54
Kab. Bandung Barat	199.707	11.423	14.006	25.429	225.136	44.351	323.307	22.691	390.349	615.485	88,71	11,29	36,58
Kab. Pangandaran	98.572	1.490	3.398	4.888	103.460	8.008	45.871	4.692	58.571	162.031	95,28	4,72	63,85
Kota Bogor	153.607	11.751	13.871	25.622	179.229	35.116	185.834	17.932	238.882	418.111	85,70	14,30	42,87
Kota Sukabumi	42.337	3.041	2.270	5.311	47.648	10.110	57.891	8.458	76.459	124.107	88,85	11,15	38,39
Kota Bandung	447.874	29.232	25.836	55.068	502.942	99.929	371.507	35.135	506.571	1.009.513	89,05	10,95	49,82
Kota Cirebon	54.614	4.234	2.651	6.885	61.499	10.029	48.478	3.614	62.121	123.620	88,80	11,20	49,75
Kota Bekasi	517.997	33.450	25.589	59.039	577.036	122.516	405.612	55.739	583.867	1.160.903	89,77	10,23	49,71
Kota Depok	402.617	23.450	17.213	40.663	443.280	80.641	381.057	26.847	488.545	931.825	90,83	9,17	47,57
Kota Cimahi	94.351	8.967	4.543	13.510	107.861	20.308	98.976	6.367	125.651	233.512	87,47	12,53	46,19
Kota Tasikmalaya	124.211	4.327	4.120	8.447	132.658	22.633	95.125	7.323	125.081	257.739	93,63	6,37	51,47
Kota Banjar	39.419	1.002	1.036	2.038	41.457	3.637	25.575	3.822	33.034	74.491	95,08	4,92	55,65
Jawa Barat	7.845.161	454.781	384.825	839.606	8.684.767	1.396.619	7.845.500	632.423	9.874.542	18.559.309	90,33	9,67	46,79

Grafik 4.1.1. TPAK (Tingkat Partisipasi Angktan Kerja) Penduduk Menurut Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2020

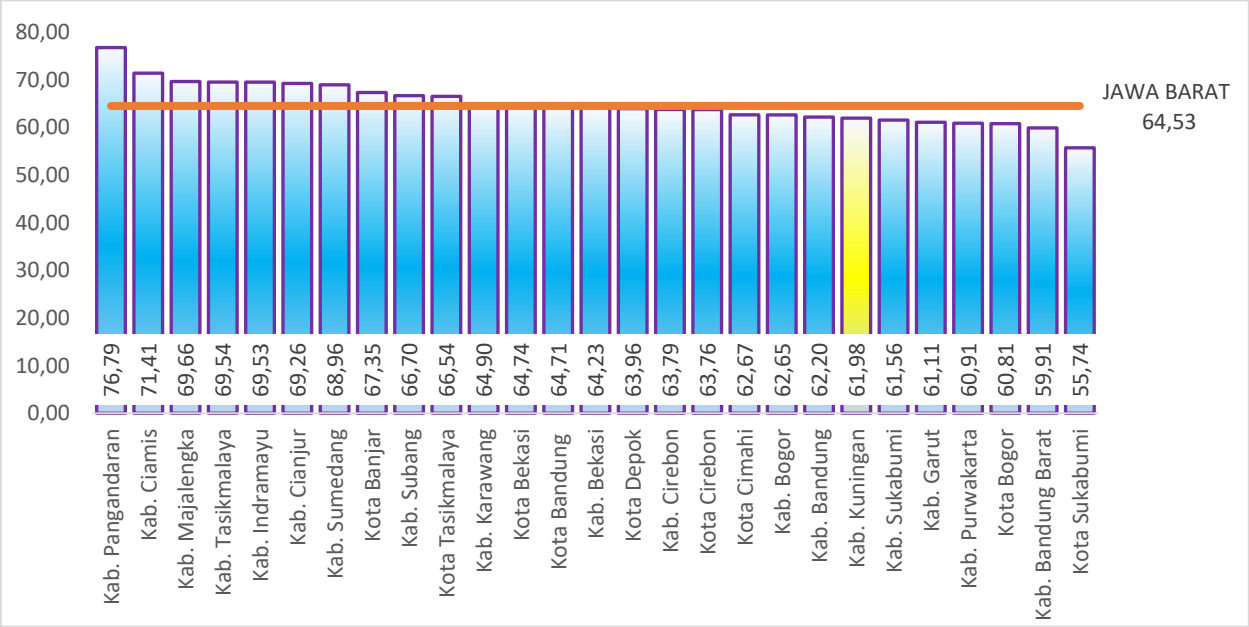

Grafik 4.1.2. TPAK (Tingkat Partisipasi Angktan Kerja) Penduduk Laki-laki Menurut Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2020

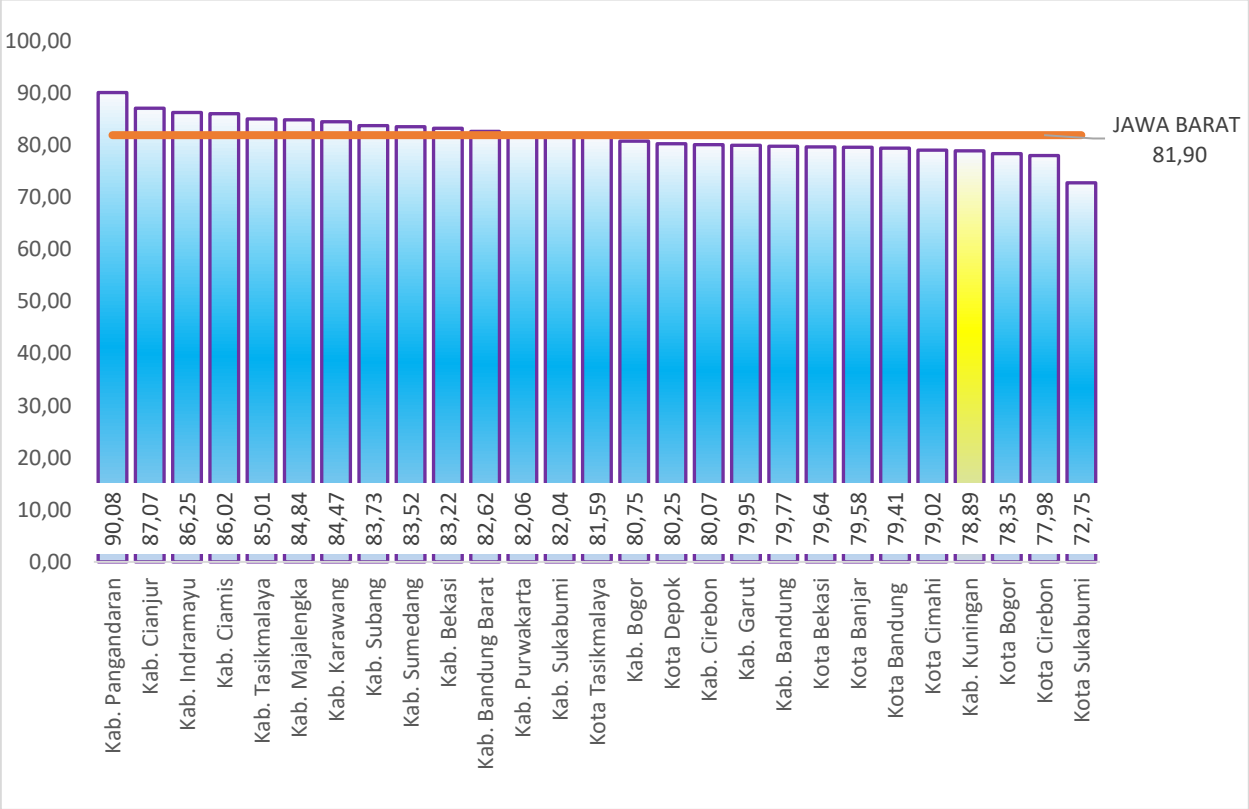

Grafik 4.1.3. TPAK (Tingkat Partisipasi Angktan Kerja) Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten / Kotadi Jawa Barat Tahun 2020

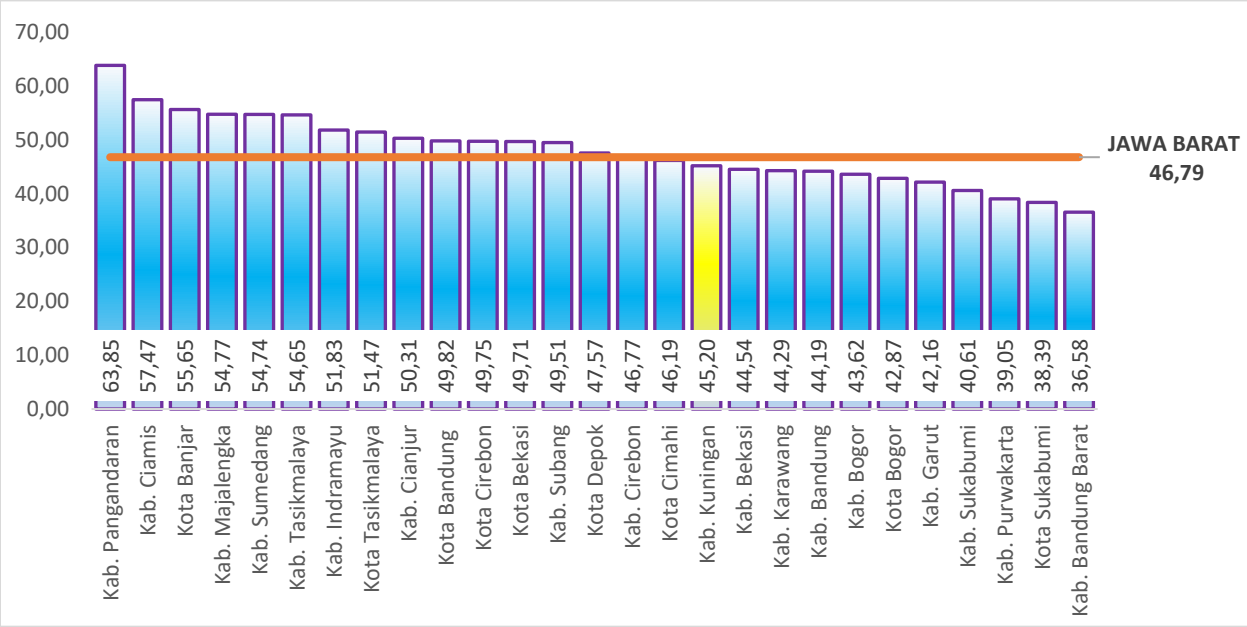

Grafik 4.1.4. Tingkat Ketidakaktifan Penduduk Menurut Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2020

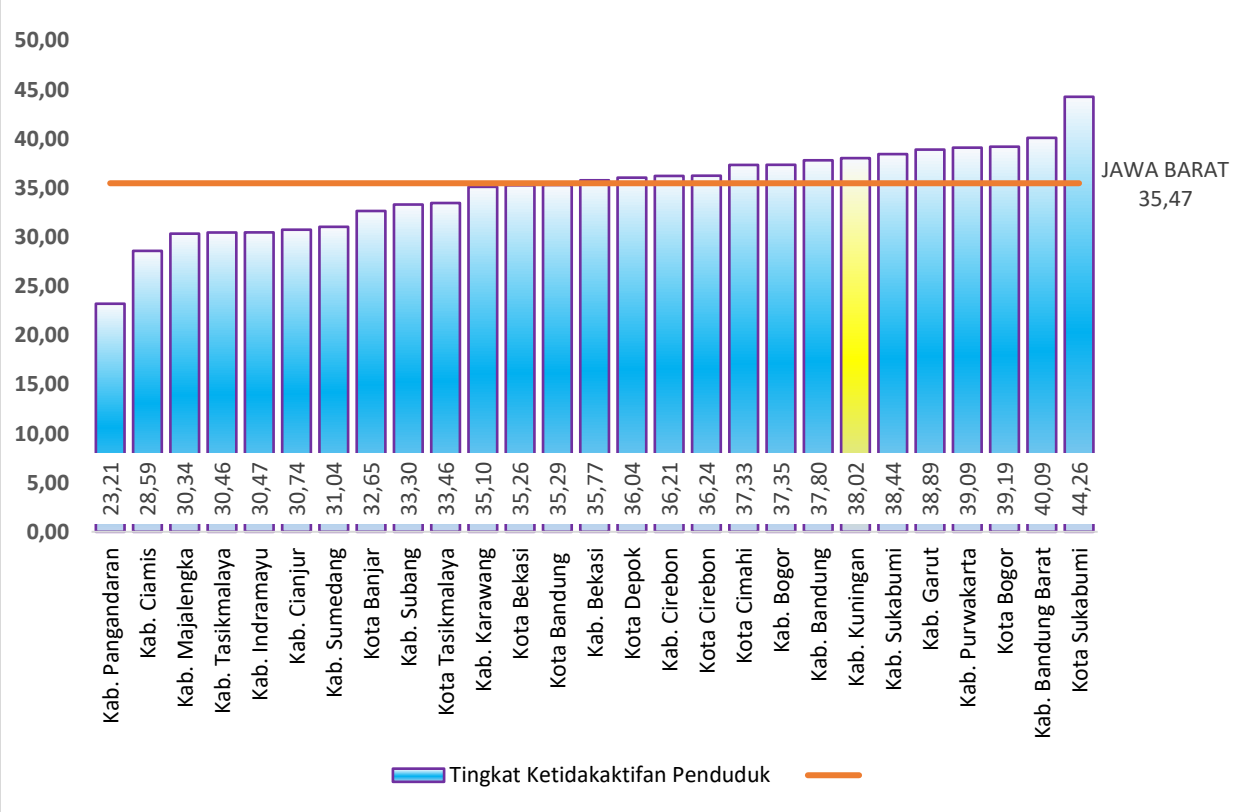

Grafik 4.1.5. Tingkat Ketidakaktifan Penduduk Laki-laki Menurut Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2020

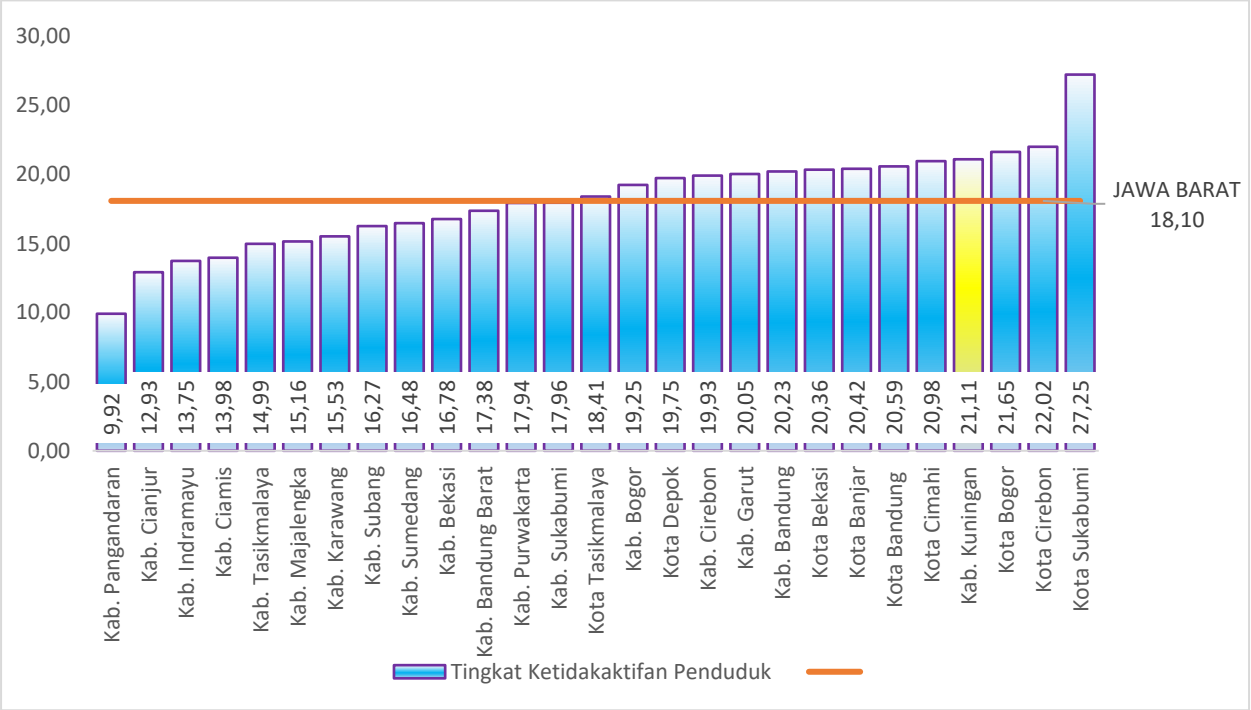

Grafik 4.1.6. Tingkat Ketidakaktifan Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2020

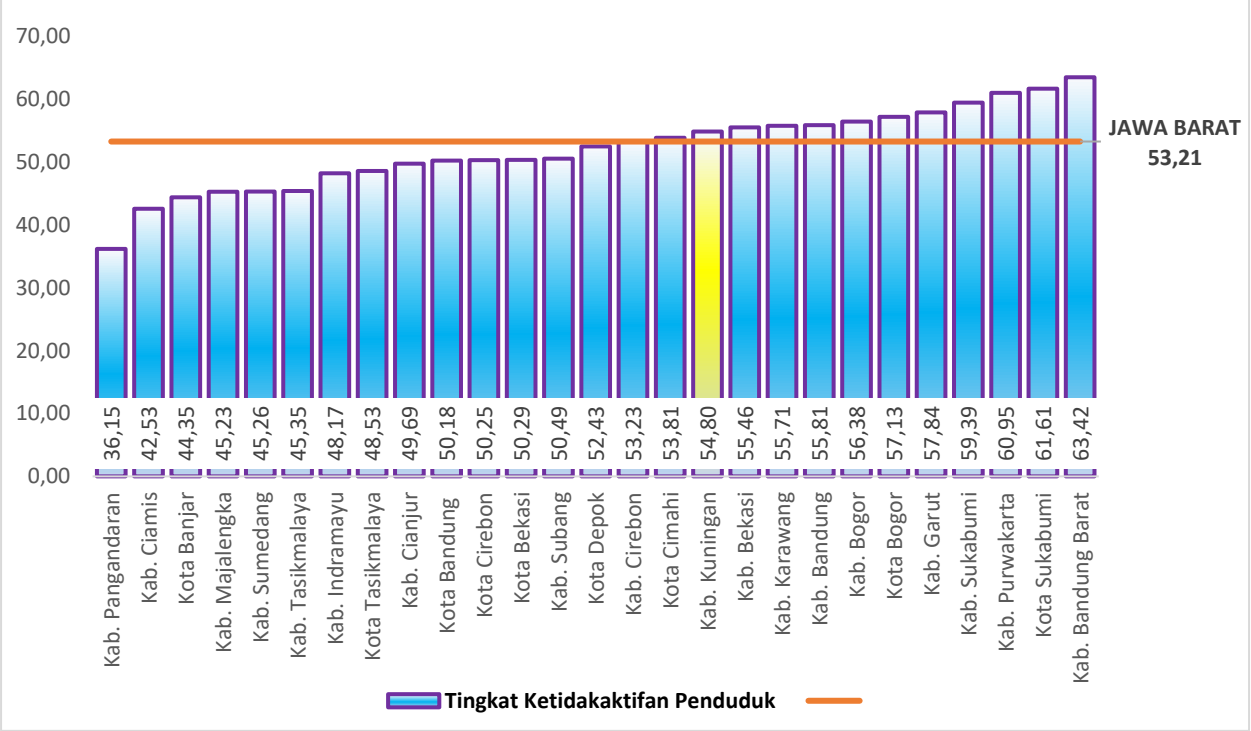

Grafik 4.2.1. EPR (*Employment to Population Ratio*) Penduduk Menurut Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2020

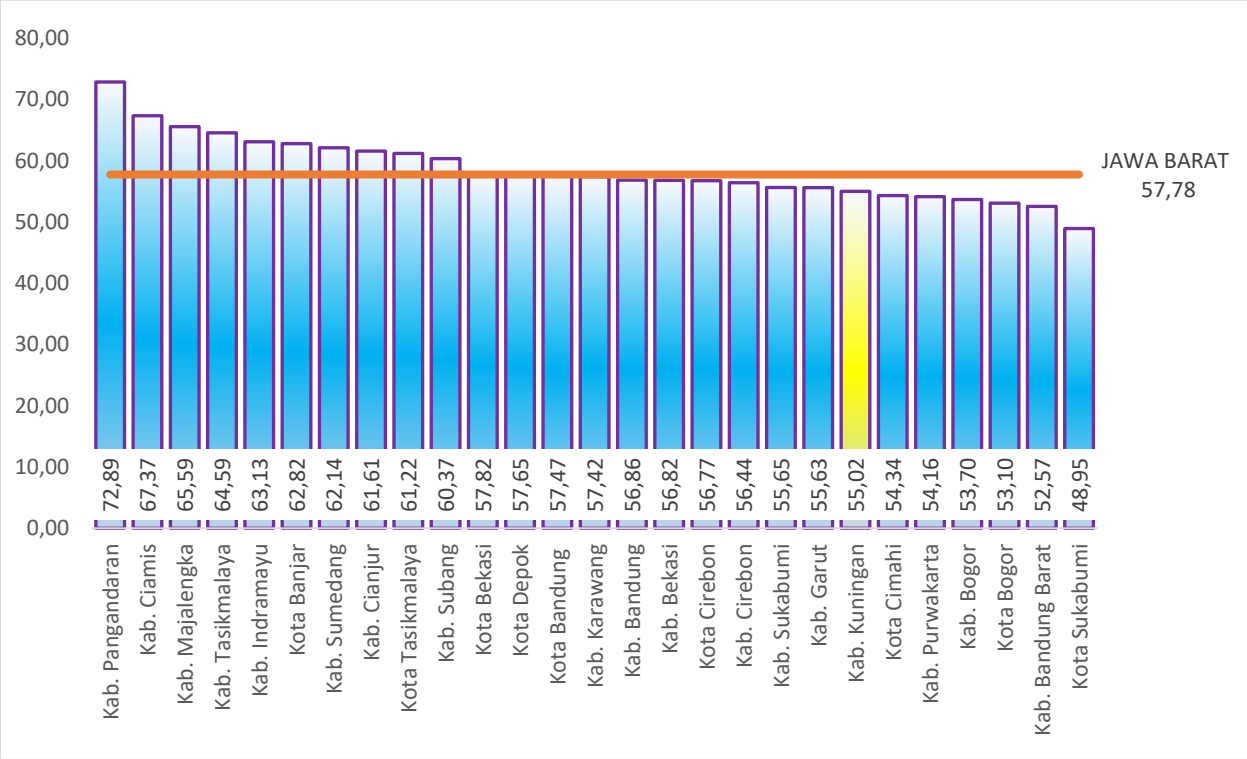

Grafik 4.2.2. EPR (*Employment to Population Ratio*) Penduduk Laki-laki Menurut Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2020

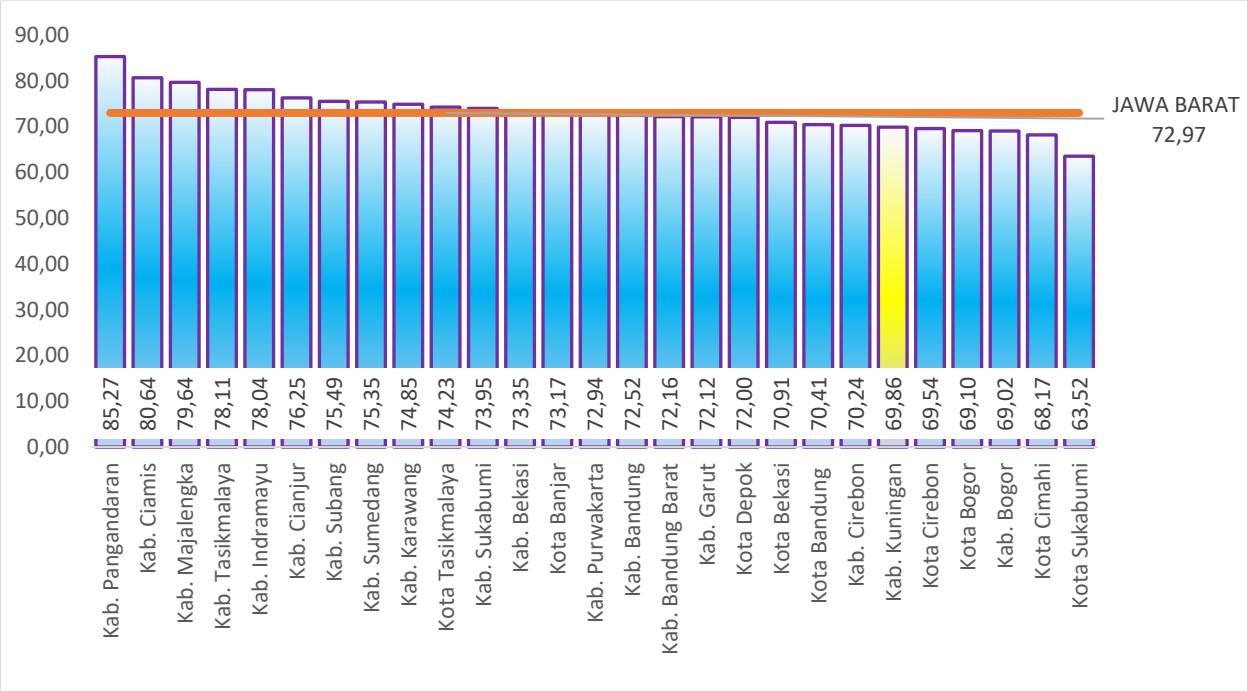

Grafik 4.2.3. EPR (*Employment to Population Ratio*) Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2020

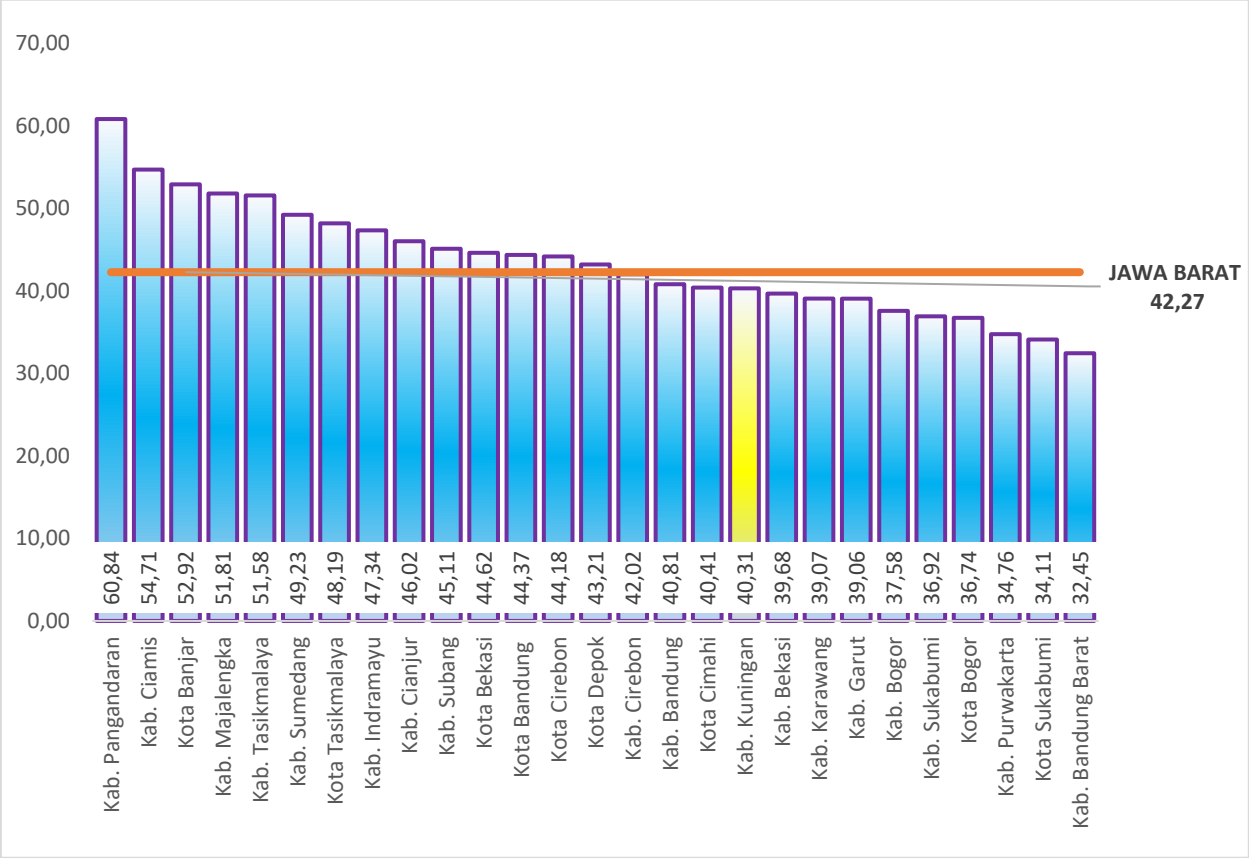

Tabel 4.3.1. Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kab. /Kota dan Kelompok Umur *(Agustus2020)*

Kab. /Kota	Kelompok Umur										Jumlah/*Total*
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kab. Bogor	153.241	391.060	356.957	373.027	335.567	317.168	264.753	209.040	137.941	194.916	2.733.670
Kab. Sukabumi	46.285	124.757	121.687	123.821	130.526	131.883	134.520	117.038	88.479	127.837	1.146.833
Kab. Cianjur	70.085	130.873	119.570	113.307	131.464	126.228	137.170	114.517	90.417	151.964	1.185.595
Kab. Bandung	81.622	206.298	208.456	232.923	226.242	196.623	163.444	137.225	114.627	149.916	1.717.376
Kab. Garut	62.460	123.311	125.223	127.459	129.137	129.433	128.766	113.569	78.158	138.664	1.156.180
Kab. Tasikmalaya	41.952	68.887	80.686	94.143	102.468	112.392	119.951	97.695	75.390	151.142	944.706
Kab. Ciamis	28.501	49.806	51.502	53.851	62.684	71.071	80.432	76.472	73.559	131.314	679.192
Kab. Kuningan	20.791	46.243	49.943	53.610	57.360	63.625	55.509	53.385	43.614	77.597	521.677
Kab. Cirebon	68.937	128.380	135.458	123.591	121.804	108.636	102.145	92.972	72.893	105.546	1.060.362
Kab. Majalengka	28.413	54.994	60.014	62.399	70.913	70.062	74.669	71.312	60.166	111.432	664.374
Kab. Sumedang	29.984	64.198	58.159	61.204	66.207	65.074	67.753	63.265	60.139	101.685	637.668
Kab. Indramayu	50.172	90.322	104.992	96.128	101.955	101.782	101.756	100.166	72.968	120.465	940.706
Kab. Subang	37.169	72.004	83.263	80.662	88.601	93.102	91.395	82.876	70.871	124.524	824.467
Kab. Purwakarta	19.401	56.263	53.000	50.059	50.816	48.902	47.049	36.664	28.389	41.885	432.428
Kab. Karawang	66.881	155.413	150.625	139.519	133.259	118.581	107.759	97.635	75.423	117.538	1.162.633
Kab. Bekasi	84.027	277.737	283.423	259.867	253.018	206.396	158.624	129.793	77.832	109.949	1.840.666
Kab. Bandung Barat	28.824	86.469	92.127	83.183	91.755	85.011	79.096	62.073	58.441	80.665	747.644
Kab. Pangandaran	8.460	17.942	18.800	19.134	24.291	27.313	30.324	28.033	23.396	47.926	245.619
Kota Bogor	26.202	69.094	73.929	66.074	60.017	60.455	51.918	45.607	31.565	29.462	514.323
Kota Sukabumi	3.806	16.372	17.879	17.750	15.537	16.929	16.118	13.749	10.726	10.791	139.657
Kota Bandung	65.995	174.605	178.398	173.580	157.040	143.354	133.812	115.032	76.247	96.867	1.314.930
Kota Cirebon	6.364	18.789	19.220	19.841	17.542	18.627	16.925	16.019	12.152	11.021	156.500
Kota Bekasi	57.973	208.578	240.974	207.622	181.718	181.156	165.839	129.748	77.555	58.678	1.509.841
Kota Depok	43.835	150.717	170.659	170.043	160.573	150.579	125.411	101.395	66.828	55.592	1.195.632
Kota Cimahi	14.111	35.917	40.365	43.625	36.104	35.621	32.515	26.791	15.488	13.217	293.754
Kota Tasikmalaya	14.869	39.540	40.454	38.300	39.793	39.193	38.233	32.548	26.286	34.069	343.285
Kota Banjar	5.463	8.217	9.201	9.477	9.628	11.249	11.006	10.410	9.753	13.808	98.212
Jawa Barat	1.165.823	2.866.786	2.944.964	2.894.199	2.856.019	2.730.445	2.536.892	2.175.029	1.629.303	2.408.470	24.207.930

Tabel 4.3.2. Penduduk Lak-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kab. /Kota dan Kelompok Umur *(Agustus2020)*

Kab. /Kota	Kelompok Umur										Jumlah/*Total*
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kab. Bogor	79.097	232.721	241.522	248.001	234.765	212.696	180.178	145.651	97.356	134.084	1.806.071
Kab. Sukabumi	22.102	76.988	90.892	86.651	85.998	87.740	86.365	76.727	61.481	98.132	773.076
Kab. Cianjur	46.923	86.108	85.936	82.051	85.431	78.616	81.918	71.381	54.271	95.747	768.382
Kab. Bandung	43.220	127.535	150.072	158.547	145.417	123.427	107.479	88.326	68.653	102.028	1.114.704
Kab. Garut	37.086	84.078	91.197	90.443	88.031	83.121	78.827	66.315	49.561	89.641	758.300
Kab. Tasikmalaya	25.479	45.384	54.281	56.834	62.305	65.634	68.268	54.480	43.062	90.780	566.507
Kab. Ciamis	15.907	26.293	32.632	35.687	38.069	39.943	44.814	44.240	41.442	80.495	399.522
Kab. Kuningan	11.371	26.985	33.601	37.125	37.202	38.405	36.068	32.920	28.292	48.691	330.660
Kab. Cirebon	35.825	81.871	90.084	87.292	83.223	72.277	64.757	57.588	44.847	62.494	680.258
Kab. Majalengka	13.825	32.358	41.443	42.512	45.252	42.312	44.068	40.394	34.514	64.013	400.691
Kab. Sumedang	16.067	37.696	37.400	38.724	38.184	40.985	40.438	35.691	34.088	62.492	381.765
Kab. Indramayu	33.189	62.236	67.268	66.865	68.308	62.687	61.113	56.828	47.837	73.712	600.043
Kab. Subang	22.782	42.492	54.438	51.145	54.616	59.140	57.772	53.311	42.877	81.250	519.823
Kab. Purwakarta	12.582	35.746	37.316	37.872	34.305	34.171	31.073	25.205	18.920	28.905	296.095
Kab. Karawang	36.817	91.379	100.765	98.643	90.499	86.765	74.999	66.414	52.137	77.626	776.044
Kab. Bekasi	43.504	155.109	192.122	186.486	170.008	148.070	113.568	85.102	52.866	67.196	1.214.031
Kab. Bandung Barat	19.352	58.888	67.110	65.324	63.351	59.517	52.963	42.446	36.040	57.517	522.508
Kab. Pangandaran	5.003	10.898	11.706	11.903	13.911	15.249	16.267	15.301	13.343	28.578	142.159
Kota Bogor	12.466	38.468	45.110	45.109	44.414	40.015	35.764	30.847	21.346	21.555	335.094
Kota Sukabumi	1.988	9.586	11.161	12.354	11.242	10.748	10.646	9.285	7.030	7.969	92.009
Kota Bandung	36.226	102.183	108.698	113.043	98.710	88.884	82.447	72.086	51.105	58.606	811.988
Kota Cirebon	3.444	10.901	12.473	12.935	11.550	11.256	9.979	9.385	6.862	6.216	95.001
Kota Bekasi	24.035	113.518	142.078	135.658	121.652	116.567	106.743	85.333	48.897	38.324	932.805
Kota Depok	14.769	84.694	105.097	113.601	107.956	98.326	82.341	65.392	42.232	37.944	752.352
Kota Cimahi	6.953	21.877	26.858	28.333	24.307	23.112	19.093	16.151	10.437	8.772	185.893
Kota Tasikmalaya	8.269	22.774	25.017	25.374	24.892	23.745	22.758	19.737	15.615	22.446	210.627
Kota Banjar	2.034	4.764	5.830	5.857	5.666	6.109	6.355	6.354	5.527	8.259	56.755
Jawa Barat	630.315	1.723.530	1.962.107	1.974.369	1.889.264	1.769.517	1.617.061	1.372.890	1.030.638	1.553.472	15.523.163

Tabel 4.3.3. Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kab. /Kota dan Kelompok Umur *(Agustus2020))*

Kab. /Kota	Kelompok Umur										Jumlah/*Total*
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kab. Bogor	74.144	158.339	115.435	125.026	100.802	104.472	84.575	63.389	40.585	60.832	927.599
Kab. Sukabumi	24.183	47.769	30.795	37.170	44.528	44.143	48.155	40.311	26.998	29.705	373.757
Kab. Cianjur	23.162	44.765	33.634	31.256	46.033	47.612	55.252	43.136	36.146	56.217	417.213
Kab. Bandung	38.402	78.763	58.384	74.376	80.825	73.196	55.965	48.899	45.974	47.888	602.672
Kab. Garut	25.374	39.233	34.026	37.016	41.106	46.312	49.939	47.254	28.597	49.023	397.880
Kab. Tasikmalaya	16.473	23.503	26.405	37.309	40.163	46.758	51.683	43.215	32.328	60.362	378.199
Kab. Ciamis	12.594	23.513	18.870	18.164	24.615	31.128	35.618	32.232	32.117	50.819	279.670
Kab. Kuningan	9.420	19.258	16.342	16.485	20.158	25.220	19.441	20.465	15.322	28.906	191.017
Kab. Cirebon	33.112	46.509	45.374	36.299	38.581	36.359	37.388	35.384	28.046	43.052	380.104
Kab. Majalengka	14.588	22.636	18.571	19.887	25.661	27.750	30.601	30.918	25.652	47.419	263.683
Kab. Sumedang	13.917	26.502	20.759	22.480	28.023	24.089	27.315	27.574	26.051	39.193	255.903
Kab. Indramayu	16.983	28.086	37.724	29.263	33.647	39.095	40.643	43.338	25.131	46.753	340.663
Kab. Subang	14.387	29.512	28.825	29.517	33.985	33.962	33.623	29.565	27.994	43.274	304.644
Kab. Purwakarta	6.819	20.517	15.684	12.187	16.511	14.731	15.976	11.459	9.469	12.980	136.333
Kab. Karawang	30.064	64.034	49.860	40.876	42.760	31.816	32.760	31.221	23.286	39.912	386.589
Kab. Bekasi	40.523	122.628	91.301	73.381	83.010	58.326	45.056	44.691	24.966	42.753	626.635
Kab. Bandung Barat	9.472	27.581	25.017	17.859	28.404	25.494	26.133	19.627	22.401	23.148	225.136
Kab. Pangandaran	3.457	7.044	7.094	7.231	10.380	12.064	14.057	12.732	10.053	19.348	103.460
Kota Bogor	13.736	30.626	28.819	20.965	15.603	20.440	16.154	14.760	10.219	7.907	179.229
Kota Sukabumi	1.818	6.786	6.718	5.396	4.295	6.181	5.472	4.464	3.696	2.822	47.648
Kota Bandung	29.769	72.422	69.700	60.537	58.330	54.470	51.365	42.946	25.142	38.261	502.942
Kota Cirebon	2.920	7.888	6.747	6.906	5.992	7.371	6.946	6.634	5.290	4.805	61.499
Kota Bekasi	33.938	95.060	98.896	71.964	60.066	64.589	59.096	44.415	28.658	20.354	577.036
Kota Depok	29.066	66.023	65.562	56.442	52.617	52.253	43.070	36.003	24.596	17.648	443.280
Kota Cimahi	7.158	14.040	13.507	15.292	11.797	12.509	13.422	10.640	5.051	4.445	107.861
Kota Tasikmalaya	6.600	16.766	15.437	12.926	14.901	15.448	15.475	12.811	10.671	11.623	132.658
Kota Banjar	3.429	3.453	3.371	3.620	3.962	5.140	4.651	4.056	4.226	5.549	41.457
Jawa Barat	535.508	1.143.256	982.857	919.830	966.755	960.928	919.831	802.139	598.665	854.998	8.684.767

Tabel 4.4.1. Persentase Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kab. /Kota dan Kelompok Umur *(Agustus2020)*

Kab. /Kota	Kelompok Umur										Jumlah/*Total*
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kab. Bogor	5,61	14,31	13,06	13,65	12,28	11,60	9,68	7,65	5,05	7,13	100,00
Kab. Sukabumi	4,04	10,88	10,61	10,80	11,38	11,50	11,73	10,21	7,72	11,15	100,00
Kab. Cianjur	5,91	11,04	10,09	9,56	11,09	10,65	11,57	9,66	7,63	12,82	100,00
Kab. Bandung	4,75	12,01	12,14	13,56	13,17	11,45	9,52	7,99	6,67	8,73	100,00
Kab. Garut	5,40	10,67	10,83	11,02	11,17	11,19	11,14	9,82	6,76	11,99	100,00
Kab. Tasikmalaya	4,44	7,29	8,54	9,97	10,85	11,90	12,70	10,34	7,98	16,00	100,00
Kab. Ciamis	4,20	7,33	7,58	7,93	9,23	10,46	11,84	11,26	10,83	19,33	100,00
Kab. Kuningan	3,99	8,86	9,57	10,28	11,00	12,20	10,64	10,23	8,36	14,87	100,00
Kab. Cirebon	6,50	12,11	12,77	11,66	11,49	10,25	9,63	8,77	6,87	9,95	100,00
Kab. Majalengka	4,28	8,28	9,03	9,39	10,67	10,55	11,24	10,73	9,06	16,77	100,00
Kab. Sumedang	4,70	10,07	9,12	9,60	10,38	10,20	10,63	9,92	9,43	15,95	100,00
Kab. Indramayu	5,33	9,60	11,16	10,22	10,84	10,82	10,82	10,65	7,76	12,81	100,00
Kab. Subang	4,51	8,73	10,10	9,78	10,75	11,29	11,09	10,05	8,60	15,10	100,00
Kab. Purwakarta	4,49	13,01	12,26	11,58	11,75	11,31	10,88	8,48	6,57	9,69	100,00
Kab. Karawang	5,75	13,37	12,96	12,00	11,46	10,20	9,27	8,40	6,49	10,11	100,00
Kab. Bekasi	4,57	15,09	15,40	14,12	13,75	11,21	8,62	7,05	4,23	5,97	100,00
Kab. Bandung Barat	3,86	11,57	12,32	11,13	12,27	11,37	10,58	8,30	7,82	10,79	100,00
Kab. Pangandaran	3,44	7,30	7,65	7,79	9,89	11,12	12,35	11,41	9,53	19,51	100,00
Kota Bogor	5,09	13,43	14,37	12,85	11,67	11,75	10,09	8,87	6,14	5,73	100,00
Kota Sukabumi	2,73	11,72	12,80	12,71	11,13	12,12	11,54	9,84	7,68	7,73	100,00
Kota Bandung	5,02	13,28	13,57	13,20	11,94	10,90	10,18	8,75	5,80	7,37	100,00
Kota Cirebon	4,07	12,01	12,28	12,68	11,21	11,90	10,81	10,24	7,76	7,04	100,00
Kota Bekasi	3,84	13,81	15,96	13,75	12,04	12,00	10,98	8,59	5,14	3,89	100,00
Kota Depok	3,67	12,61	14,27	14,22	13,43	12,59	10,49	8,48	5,59	4,65	100,00
Kota Cimahi	4,80	12,23	13,74	14,85	12,29	12,13	11,07	9,12	5,27	4,50	100,00
Kota Tasikmalaya	4,33	11,52	11,78	11,16	11,59	11,42	11,14	9,48	7,66	9,92	100,00
Kota Banjar	5,56	8,37	9,37	9,65	9,80	11,45	11,21	10,60	9,93	14,06	100,00
Jawa Barat	4,82	11,84	12,17	11,96	11,80	11,28	10,48	8,98	6,73	9,95	100,00

Tabel 4.4.2. Persentase Penduduk Lak-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kab. /Kota dan Kelompok Umur *(Agustus2020)*

Kab. /Kota	Kelompok Umur										Jumlah/*Total*
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kab. Bogor	4,38	12,89	13,37	13,73	13,00	11,78	9,98	8,06	5,39	7,42	100,00
Kab. Sukabumi	2,86	9,96	11,76	11,21	11,12	11,35	11,17	9,92	7,95	12,69	100,00
Kab. Cianjur	6,11	11,21	11,18	10,68	11,12	10,23	10,66	9,29	7,06	12,46	100,00
Kab. Bandung	3,88	11,44	13,46	14,22	13,05	11,07	9,64	7,92	6,16	9,15	100,00
Kab. Garut	4,89	11,09	12,03	11,93	11,61	10,96	10,40	8,75	6,54	11,82	100,00
Kab. Tasikmalaya	4,50	8,01	9,58	10,03	11,00	11,59	12,05	9,62	7,60	16,02	100,00
Kab. Ciamis	3,98	6,58	8,17	8,93	9,53	10,00	11,22	11,07	10,37	20,15	100,00
Kab. Kuningan	3,44	8,16	10,16	11,23	11,25	11,61	10,91	9,96	8,56	14,73	100,00
Kab. Cirebon	5,27	12,04	13,24	12,83	12,23	10,62	9,52	8,47	6,59	9,19	100,00
Kab. Majalengka	3,45	8,08	10,34	10,61	11,29	10,56	11,00	10,08	8,61	15,98	100,00
Kab. Sumedang	4,21	9,87	9,80	10,14	10,00	10,74	10,59	9,35	8,93	16,37	100,00
Kab. Indramayu	5,53	10,37	11,21	11,14	11,38	10,45	10,18	9,47	7,97	12,28	100,00
Kab. Subang	4,38	8,17	10,47	9,84	10,51	11,38	11,11	10,26	8,25	15,63	100,00
Kab. Purwakarta	4,25	12,07	12,60	12,79	11,59	11,54	10,49	8,51	6,39	9,76	100,00
Kab. Karawang	4,74	11,77	12,98	12,71	11,66	11,18	9,66	8,56	6,72	10,00	100,00
Kab. Bekasi	3,58	12,78	15,83	15,36	14,00	12,20	9,35	7,01	4,35	5,53	100,00
Kab. Bandung Barat	3,70	11,27	12,84	12,50	12,12	11,39	10,14	8,12	6,90	11,01	100,00
Kab. Pangandaran	3,52	7,67	8,23	8,37	9,79	10,73	11,44	10,76	9,39	20,10	100,00
Kota Bogor	3,72	11,48	13,46	13,46	13,25	11,94	10,67	9,21	6,37	6,43	100,00
Kota Sukabumi	2,16	10,42	12,13	13,43	12,22	11,68	11,57	10,09	7,64	8,66	100,00
Kota Bandung	4,46	12,58	13,39	13,92	12,16	10,95	10,15	8,88	6,29	7,22	100,00
Kota Cirebon	3,63	11,47	13,13	13,62	12,16	11,85	10,50	9,88	7,22	6,54	100,00
Kota Bekasi	2,58	12,17	15,23	14,54	13,04	12,50	11,44	9,15	5,24	4,11	100,00
Kota Depok	1,96	11,26	13,97	15,10	14,35	13,07	10,94	8,69	5,61	5,04	100,00
Kota Cimahi	3,74	11,77	14,45	15,24	13,08	12,43	10,27	8,69	5,61	4,72	100,00
Kota Tasikmalaya	3,93	10,81	11,88	12,05	11,82	11,27	10,80	9,37	7,41	10,66	100,00
Kota Banjar	3,58	8,39	10,27	10,32	9,98	10,76	11,20	11,20	9,74	14,55	100,00
Jawa Barat	4,06	11,10	12,64	12,72	12,17	11,40	10,42	8,84	6,64	10,01	100,00

Tabel 4.4.3. Persentase Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kab. /Kota dan Kelompok Umur *(Agustus2020))*

Kab. /Kota	Kelompok Umur										Jumlah/*Total*
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kab. Bogor	7,99	17,07	12,44	13,48	10,87	11,26	9,12	6,83	4,38	6,56	100,00
Kab. Sukabumi	6,47	12,78	8,24	9,94	11,91	11,81	12,88	10,79	7,22	7,95	100,00
Kab. Cianjur	5,55	10,73	8,06	7,49	11,03	11,41	13,24	10,34	8,66	13,47	100,00
Kab. Bandung	6,37	13,07	9,69	12,34	13,41	12,15	9,29	8,11	7,63	7,95	100,00
Kab. Garut	6,38	9,86	8,55	9,30	10,33	11,64	12,55	11,88	7,19	12,32	100,00
Kab. Tasikmalaya	4,36	6,21	6,98	9,86	10,62	12,36	13,67	11,43	8,55	15,96	100,00
Kab. Ciamis	4,50	8,41	6,75	6,49	8,80	11,13	12,74	11,53	11,48	18,17	100,00
Kab. Kuningan	4,93	10,08	8,56	8,63	10,55	13,20	10,18	10,71	8,02	15,13	100,00
Kab. Cirebon	8,71	12,24	11,94	9,55	10,15	9,57	9,84	9,31	7,38	11,33	100,00
Kab. Majalengka	5,53	8,58	7,04	7,54	9,73	10,52	11,61	11,73	9,73	17,98	100,00
Kab. Sumedang	5,44	10,36	8,11	8,78	10,95	9,41	10,67	10,78	10,18	15,32	100,00
Kab. Indramayu	4,99	8,24	11,07	8,59	9,88	11,48	11,93	12,72	7,38	13,72	100,00
Kab. Subang	4,72	9,69	9,46	9,69	11,16	11,15	11,04	9,70	9,19	14,20	100,00
Kab. Purwakarta	5,00	15,05	11,50	8,94	12,11	10,81	11,72	8,41	6,95	9,52	100,00
Kab. Karawang	7,78	16,56	12,90	10,57	11,06	8,23	8,47	8,08	6,02	10,32	100,00
Kab. Bekasi	6,47	19,57	14,57	11,71	13,25	9,31	7,19	7,13	3,98	6,82	100,00
Kab. Bandung Barat	4,21	12,25	11,11	7,93	12,62	11,32	11,61	8,72	9,95	10,28	100,00
Kab. Pangandaran	3,34	6,81	6,86	6,99	10,03	11,66	13,59	12,31	9,72	18,70	100,00
Kota Bogor	7,66	17,09	16,08	11,70	8,71	11,40	9,01	8,24	5,70	4,41	100,00
Kota Sukabumi	3,82	14,24	14,10	11,32	9,01	12,97	11,48	9,37	7,76	5,92	100,00
Kota Bandung	5,92	14,40	13,86	12,04	11,60	10,83	10,21	8,54	5,00	7,61	100,00
Kota Cirebon	4,75	12,83	10,97	11,23	9,74	11,99	11,29	10,79	8,60	7,81	100,00
Kota Bekasi	5,88	16,47	17,14	12,47	10,41	11,19	10,24	7,70	4,97	3,53	100,00
Kota Depok	6,56	14,89	14,79	12,73	11,87	11,79	9,72	8,12	5,55	3,98	100,00
Kota Cimahi	6,64	13,02	12,52	14,18	10,94	11,60	12,44	9,86	4,68	4,12	100,00
Kota Tasikmalaya	4,98	12,64	11,64	9,74	11,23	11,64	11,67	9,66	8,04	8,76	100,00
Kota Banjar	8,27	8,33	8,13	8,73	9,56	12,40	11,22	9,78	10,19	13,38	100,00
Jawa Barat	6,17	13,16	11,32	10,59	11,13	11,06	10,59	9,24	6,89	9,84	100,00

Grafik 4.3. Selisih Persentase Penduduk Kuningan dan Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur *(Agustus2020)*

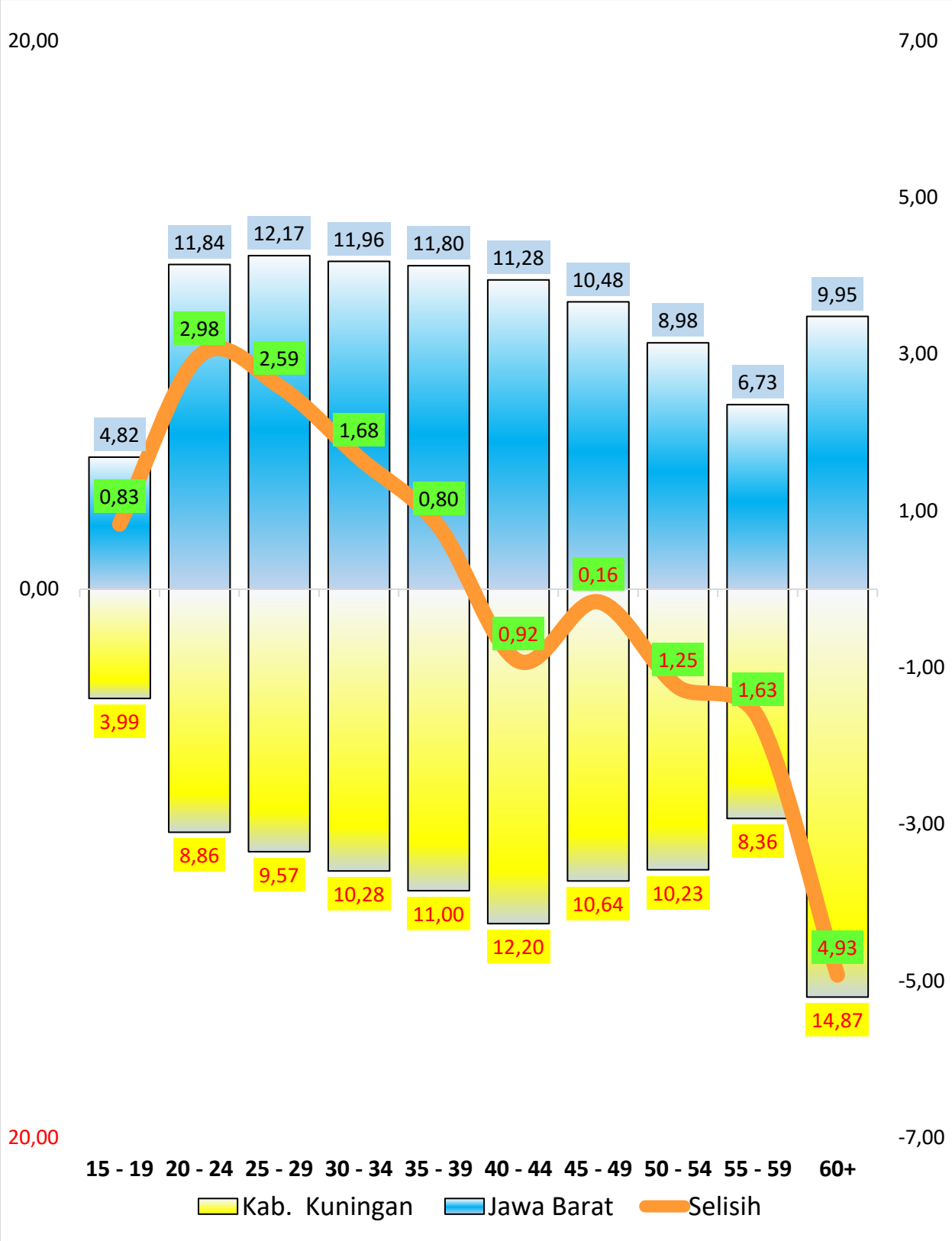

Tabel 4.5.1. Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan *(Agustus 2020)*

Kab. /Kota	Tidak/belum pernah sekolah/ Tidak/belum Tamat SD	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					Jumlah
		Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas		Diploma I/II/III/ Akademi/ Universitas	
				Umum	Kejuruan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Bogor	273.564	671.524	489.224	462.901	522.321	314.136	2.733.670
Kab. Sukabumi	64.370	531.883	269.286	155.116	72.272	53.906	1.146.833
Kab. Cianjur	158.462	566.072	184.776	115.490	96.689	64.106	1.185.595
Kab. Bandung	38.071	540.313	453.015	357.854	179.003	149.120	1.717.376
Kab. Garut	109.491	507.345	232.822	183.258	62.822	60.442	1.156.180
Kab. Tasikmalaya	41.788	513.248	163.971	97.561	62.906	65.232	944.706
Kab. Ciamis	24.879	355.499	131.176	70.341	58.270	39.027	679.192
Kab. Kuningan	39.051	221.559	86.022	67.720	69.707	37.618	521.677
Kab. Cirebon	181.914	310.896	173.231	162.184	173.509	58.628	1.060.362
Kab. Majalengka	55.857	324.525	106.656	75.353	57.827	44.156	664.374
Kab. Sumedang	18.510	238.667	122.598	95.254	94.737	67.902	637.668
Kab. Indramayu	269.324	243.462	151.306	124.019	99.216	53.379	940.706
Kab. Subang	101.040	284.653	178.509	113.137	82.547	64.581	824.467
Kab. Purwakarta	28.112	130.910	82.901	88.783	70.826	30.896	432.428
Kab. Karawang	151.760	311.758	204.999	216.185	191.122	86.809	1.162.633
Kab. Bekasi	123.532	301.627	255.073	447.862	461.721	250.851	1.840.666
Kab. Bandung Barat	47.268	301.211	152.408	122.699	73.857	50.201	747.644
Kab. Pangandaran	14.538	114.473	53.444	27.554	19.348	16.262	245.619
Kota Bogor	17.709	99.235	78.010	100.172	121.390	97.807	514.323
Kota Sukabumi	1.459	34.089	23.344	34.012	23.676	23.077	139.657
Kota Bandung	20.723	195.810	213.338	368.024	209.330	307.705	1.314.930
Kota Cirebon	17.154	24.747	20.439	38.983	27.135	28.042	156.500
Kota Bekasi	41.264	140.617	210.888	340.517	343.384	433.171	1.509.841
Kota Depok	40.378	120.380	154.005	264.561	290.931	325.377	1.195.632
Kota Cimahi	6.331	32.960	52.442	74.518	66.103	61.400	293.754
Kota Tasikmalaya	8.030	118.442	66.577	61.179	54.301	34.756	343.285
Kota Banjar	6.429	31.797	17.236	12.933	17.763	12.054	98.212
Jawa Barat	1.901.008	7.267.702	4.327.696	4.278.170	3.602.713	2.830.641	24.207.930

Tabel 4.5.2. Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan *(Agustus 2020)*

Kab. /Kota	Tidak/belum pernah sekolah/ Tidak/belum Tamat SD	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					Jumlah
		Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas		Diploma I/II/III/ Akademi/ Universitas	
				Umum	Kejuruan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Bogor	162.050	469.533	338.385	315.827	350.776	169.500	1.806.071
Kab. Sukabumi	39.586	351.443	194.519	96.439	54.443	36.646	773.076
Kab. Cianjur	87.484	368.700	128.168	76.871	64.978	42.181	768.382
Kab. Bandung	20.344	347.598	288.708	242.045	124.859	91.150	1.114.704
Kab. Garut	71.883	331.029	151.857	124.963	48.382	30.186	758.300
Kab. Tasikmalaya	25.964	294.841	103.957	64.734	45.849	31.162	566.507
Kab. Ciamis	12.954	199.809	87.014	40.165	40.211	19.369	399.522
Kab. Kuningan	22.701	141.931	53.489	43.094	48.928	20.517	330.660
Kab. Cirebon	106.219	211.355	106.513	104.209	115.615	36.347	680.258
Kab. Majalengka	29.851	188.720	68.049	49.060	41.257	23.754	400.691
Kab. Sumedang	10.315	136.082	68.349	57.324	71.389	38.306	381.765
Kab. Indramayu	157.945	163.322	98.469	82.927	68.864	28.516	600.043
Kab. Subang	62.289	182.701	110.137	73.598	62.031	29.067	519.823
Kab. Purwakarta	17.586	91.969	51.530	60.904	58.119	15.987	296.095
Kab. Karawang	89.184	226.082	140.250	140.069	141.893	38.566	776.044
Kab. Bekasi	60.642	186.598	171.270	288.097	365.232	142.192	1.214.031
Kab. Bandung Barat	30.758	204.665	117.108	81.478	57.911	30.588	522.508
Kab. Pangandaran	8.424	60.358	32.300	19.987	12.296	8.794	142.159
Kota Bogor	12.174	59.918	56.811	69.901	81.881	54.409	335.094
Kota Sukabumi	1.097	21.826	16.294	23.827	16.458	12.507	92.009
Kota Bandung	10.740	122.228	131.985	231.361	141.570	174.104	811.988
Kota Cirebon	9.578	15.754	13.242	25.510	15.457	15.460	95.001
Kota Bekasi	16.932	84.459	124.843	230.186	234.622	241.763	932.805
Kota Depok	22.390	73.682	102.610	189.472	190.644	173.554	752.352
Kota Cimahi	3.816	20.377	32.719	48.751	44.946	35.284	185.893
Kota Tasikmalaya	4.096	75.022	40.406	37.011	35.937	18.155	210.627
Kota Banjar	3.298	18.142	10.394	7.600	11.599	5.722	56.755
Jawa Barat	1.100.300	4.648.144	2.839.376	2.825.410	2.546.147	1.563.786	15.523.163

Tabel 4.5.3. Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan *(Agustus 2020)*

Kab. /Kota	Tidak/belum pernah sekolah/ Tidak/belum Tamat SD	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					Jumlah
		Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas		Diploma I/II/III/ Akademi/ Universitas	
				Umum	Kejuruan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Bogor	111.514	201.991	150.839	147.074	171.545	144.636	927.599
Kab. Sukabumi	24.784	180.440	74.767	58.677	17.829	17.260	373.757
Kab. Cianjur	70.978	197.372	56.608	38.619	31.711	21.925	417.213
Kab. Bandung	17.727	192.715	164.307	115.809	54.144	57.970	602.672
Kab. Garut	37.608	176.316	80.965	58.295	14.440	30.256	397.880
Kab. Tasikmalaya	15.824	218.407	60.014	32.827	17.057	34.070	378.199
Kab. Ciamis	11.925	155.690	44.162	30.176	18.059	19.658	279.670
Kab. Kuningan	16.350	79.628	32.533	24.626	20.779	17.101	191.017
Kab. Cirebon	75.695	99.541	66.718	57.975	57.894	22.281	380.104
Kab. Majalengka	26.006	135.805	38.607	26.293	16.570	20.402	263.683
Kab. Sumedang	8.195	102.585	54.249	37.930	23.348	29.596	255.903
Kab. Indramayu	111.379	80.140	52.837	41.092	30.352	24.863	340.663
Kab. Subang	38.751	101.952	68.372	39.539	20.516	35.514	304.644
Kab. Purwakarta	10.526	38.941	31.371	27.879	12.707	14.909	136.333
Kab. Karawang	62.576	85.676	64.749	76.116	49.229	48.243	386.589
Kab. Bekasi	62.890	115.029	83.803	159.765	96.489	108.659	626.635
Kab. Bandung Barat	16.510	96.546	35.300	41.221	15.946	19.613	225.136
Kab. Pangandaran	6.114	54.115	21.144	7.567	7.052	7.468	103.460
Kota Bogor	5.535	39.317	21.199	30.271	39.509	43.398	179.229
Kota Sukabumi	362	12.263	7.050	10.185	7.218	10.570	47.648
Kota Bandung	9.983	73.582	81.353	136.663	67.760	133.601	502.942
Kota Cirebon	7.576	8.993	7.197	13.473	11.678	12.582	61.499
Kota Bekasi	24.332	56.158	86.045	110.331	108.762	191.408	577.036
Kota Depok	17.988	46.698	51.395	75.089	100.287	151.823	443.280
Kota Cimahi	2.515	12.583	19.723	25.767	21.157	26.116	107.861
Kota Tasikmalaya	3.934	43.420	26.171	24.168	18.364	16.601	132.658
Kota Banjar	3.131	13.655	6.842	5.333	6.164	6.332	41.457
Jawa Barat	800.708	2.619.558	1.488.320	1.452.760	1.056.566	1.266.855	8.684.767

Tabel 4.6.1. Persentase Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan *(Agustus 2020)*

Kab. /Kota	Tidak/belum pernah sekolah/ Tidak/belum Tamat SD	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					Jumlah
		Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas		Diploma I/II/III/ Akademi/ Universitas	
				Umum	Kejuruan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Bogor	10,01	24,56	17,90	16,93	19,11	11,49	100,00
Kab. Sukabumi	5,61	46,38	23,48	13,53	6,30	4,70	100,00
Kab. Cianjur	13,37	47,75	15,59	9,74	8,16	5,41	100,00
Kab. Bandung	2,22	31,46	26,38	20,84	10,42	8,68	100,00
Kab. Garut	9,47	43,88	20,14	15,85	5,43	5,23	100,00
Kab. Tasikmalaya	4,42	54,33	17,36	10,33	6,66	6,91	100,00
Kab. Ciamis	3,66	52,34	19,31	10,36	8,58	5,75	100,00
Kab. Kuningan	7,49	42,47	16,49	12,98	13,36	7,21	100,00
Kab. Cirebon	17,16	29,32	16,34	15,30	16,36	5,53	100,00
Kab. Majalengka	8,41	48,85	16,05	11,34	8,70	6,65	100,00
Kab. Sumedang	2,90	37,43	19,23	14,94	14,86	10,65	100,00
Kab. Indramayu	28,63	25,88	16,08	13,18	10,55	5,67	100,00
Kab. Subang	12,26	34,53	21,65	13,72	10,01	7,83	100,00
Kab. Purwakarta	6,50	30,27	19,17	20,53	16,38	7,14	100,00
Kab. Karawang	13,05	26,81	17,63	18,59	16,44	7,47	100,00
Kab. Bekasi	6,71	16,39	13,86	24,33	25,08	13,63	100,00
Kab. Bandung Barat	6,32	40,29	20,39	16,41	9,88	6,71	100,00
Kab. Pangandaran	5,92	46,61	21,76	11,22	7,88	6,62	100,00
Kota Bogor	3,44	19,29	15,17	19,48	23,60	19,02	100,00
Kota Sukabumi	1,04	24,41	16,72	24,35	16,95	16,52	100,00
Kota Bandung	1,58	14,89	16,22	27,99	15,92	23,40	100,00
Kota Cirebon	10,96	15,81	13,06	24,91	17,34	17,92	100,00
Kota Bekasi	2,73	9,31	13,97	22,55	22,74	28,69	100,00
Kota Depok	3,38	10,07	12,88	22,13	24,33	27,21	100,00
Kota Cimahi	2,16	11,22	17,85	25,37	22,50	20,90	100,00
Kota Tasikmalaya	2,34	34,50	19,39	17,82	15,82	10,12	100,00
Kota Banjar	6,55	32,38	17,55	13,17	18,09	12,27	100,00
Jawa Barat	7,85	30,02	17,88	17,67	14,88	11,69	100,00

Tabel 4.6.2. Persentase Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan *(Agustus 2020)*

Kab. /Kota	Tidak/belum pernah sekolah/ Tidak/belum Tamat SD	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					Jumlah
		Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas		Diploma I/II/III/ Akademi/ Universitas	
				Umum	Kejuruan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Bogor	8,97	26,00	18,74	17,49	19,42	9,39	100,00
Kab. Sukabumi	5,12	45,46	25,16	12,47	7,04	4,74	100,00
Kab. Cianjur	11,39	47,98	16,68	10,00	8,46	5,49	100,00
Kab. Bandung	1,83	31,18	25,90	21,71	11,20	8,18	100,00
Kab. Garut	9,48	43,65	20,03	16,48	6,38	3,98	100,00
Kab. Tasikmalaya	4,58	52,05	18,35	11,43	8,09	5,50	100,00
Kab. Ciamis	3,24	50,01	21,78	10,05	10,06	4,85	100,00
Kab. Kuningan	6,87	42,92	16,18	13,03	14,80	6,20	100,00
Kab. Cirebon	15,61	31,07	15,66	15,32	17,00	5,34	100,00
Kab. Majalengka	7,45	47,10	16,98	12,24	10,30	5,93	100,00
Kab. Sumedang	2,70	35,65	17,90	15,02	18,70	10,03	100,00
Kab. Indramayu	26,32	27,22	16,41	13,82	11,48	4,75	100,00
Kab. Subang	11,98	35,15	21,19	14,16	11,93	5,59	100,00
Kab. Purwakarta	5,94	31,06	17,40	20,57	19,63	5,40	100,00
Kab. Karawang	11,49	29,13	18,07	18,05	18,28	4,97	100,00
Kab. Bekasi	5,00	15,37	14,11	23,73	30,08	11,71	100,00
Kab. Bandung Barat	5,89	39,17	22,41	15,59	11,08	5,85	100,00
Kab. Pangandaran	5,93	42,46	22,72	14,06	8,65	6,19	100,00
Kota Bogor	3,63	17,88	16,95	20,86	24,44	16,24	100,00
Kota Sukabumi	1,19	23,72	17,71	25,90	17,89	13,59	100,00
Kota Bandung	1,32	15,05	16,25	28,49	17,43	21,44	100,00
Kota Cirebon	10,08	16,58	13,94	26,85	16,27	16,27	100,00
Kota Bekasi	1,82	9,05	13,38	24,68	25,15	25,92	100,00
Kota Depok	2,98	9,79	13,64	25,18	25,34	23,07	100,00
Kota Cimahi	2,05	10,96	17,60	26,23	24,18	18,98	100,00
Kota Tasikmalaya	1,94	35,62	19,18	17,57	17,06	8,62	100,00
Kota Banjar	5,81	31,97	18,31	13,39	20,44	10,08	100,00
Jawa Barat	7,09	29,94	18,29	18,20	16,40	10,07	100,00

Tabel 4.6.3. Persentase Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan *(Agustus 2020)*

Kab. /Kota	Tidak/belum pernah sekolah/ Tidak/belum Tamat SD	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					Jumlah
		Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas		Diploma I/II/III/ Akademi/ Universitas	
				Umum	Kejuruan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Bogor	12,02	21,78	16,26	15,86	18,49	15,59	100,00
Kab. Sukabumi	6,63	48,28	20,00	15,70	4,77	4,62	100,00
Kab. Cianjur	17,01	47,31	13,57	9,26	7,60	5,26	100,00
Kab. Bandung	2,94	31,98	27,26	19,22	8,98	9,62	100,00
Kab. Garut	9,45	44,31	20,35	14,65	3,63	7,60	100,00
Kab. Tasikmalaya	4,18	57,75	15,87	8,68	4,51	9,01	100,00
Kab. Ciamis	4,26	55,67	15,79	10,79	6,46	7,03	100,00
Kab. Kuningan	8,56	41,69	17,03	12,89	10,88	8,95	100,00
Kab. Cirebon	19,91	26,19	17,55	15,25	15,23	5,86	100,00
Kab. Majalengka	9,86	51,50	14,64	9,97	6,28	7,74	100,00
Kab. Sumedang	3,20	40,09	21,20	14,82	9,12	11,57	100,00
Kab. Indramayu	32,69	23,52	15,51	12,06	8,91	7,30	100,00
Kab. Subang	12,72	33,47	22,44	12,98	6,73	11,66	100,00
Kab. Purwakarta	7,72	28,56	23,01	20,45	9,32	10,94	100,00
Kab. Karawang	16,19	22,16	16,75	19,69	12,73	12,48	100,00
Kab. Bekasi	10,04	18,36	13,37	25,50	15,40	17,34	100,00
Kab. Bandung Barat	7,33	42,88	15,68	18,31	7,08	8,71	100,00
Kab. Pangandaran	5,91	52,31	20,44	7,31	6,82	7,22	100,00
Kota Bogor	3,09	21,94	11,83	16,89	22,04	24,21	100,00
Kota Sukabumi	0,76	25,74	14,80	21,38	15,15	22,18	100,00
Kota Bandung	1,98	14,63	16,18	27,17	13,47	26,56	100,00
Kota Cirebon	12,32	14,62	11,70	21,91	18,99	20,46	100,00
Kota Bekasi	4,22	9,73	14,91	19,12	18,85	33,17	100,00
Kota Depok	4,06	10,53	11,59	16,94	22,62	34,25	100,00
Kota Cimahi	2,33	11,67	18,29	23,89	19,62	24,21	100,00
Kota Tasikmalaya	2,97	32,73	19,73	18,22	13,84	12,51	100,00
Kota Banjar	7,55	32,94	16,50	12,86	14,87	15,27	100,00
Jawa Barat	9,22	30,16	17,14	16,73	12,17	14,59	100,00

Grafik 4.4. Selisih Persentase Penduduk Kuningan dan Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan *(Agustus2020)*

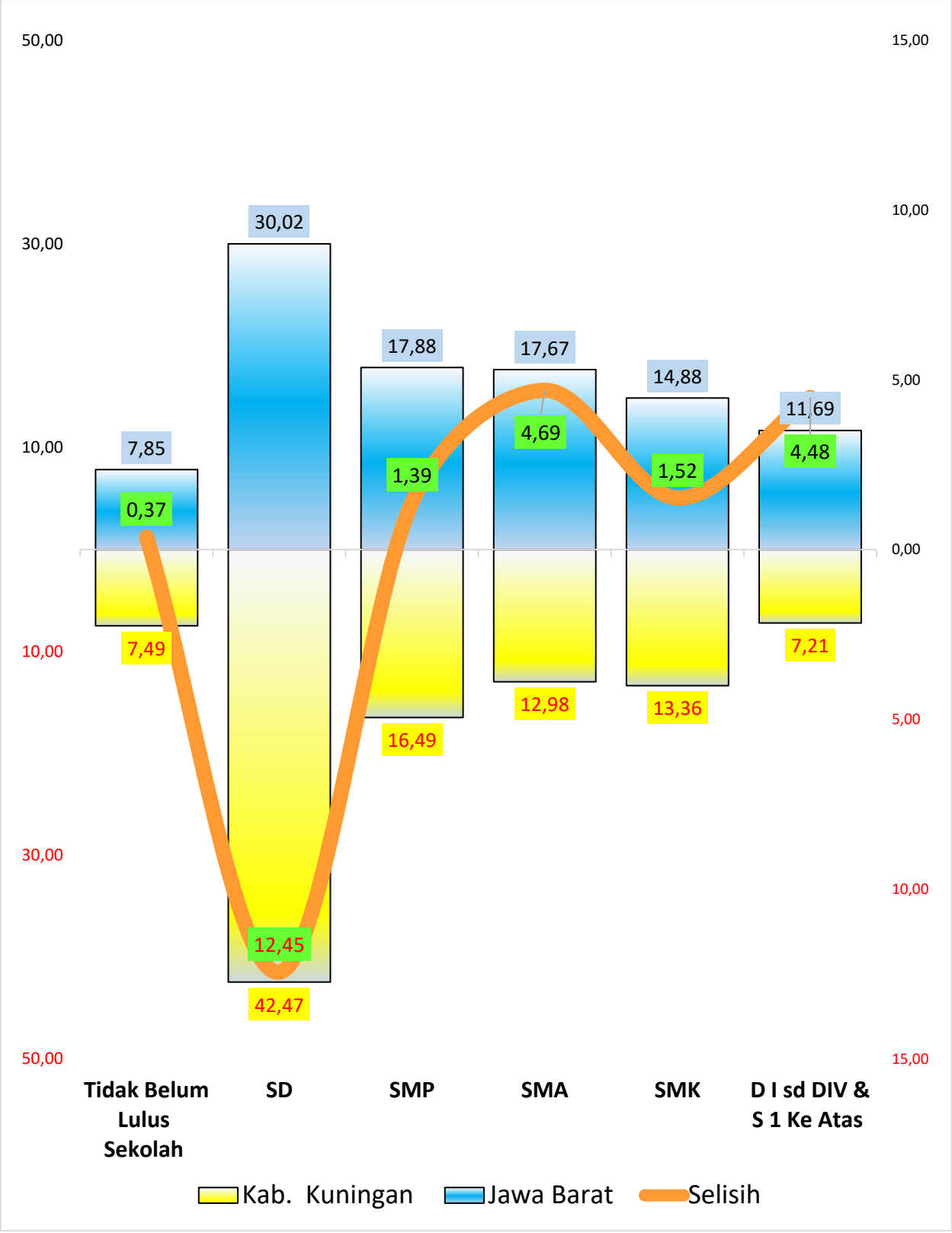

Grafik 4.5. Persentase Penduduk di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten / Kota dan Jenis Pendidikan D-I atau Lebih Tinggi yang Ditamatkan *(Agustus2020)*

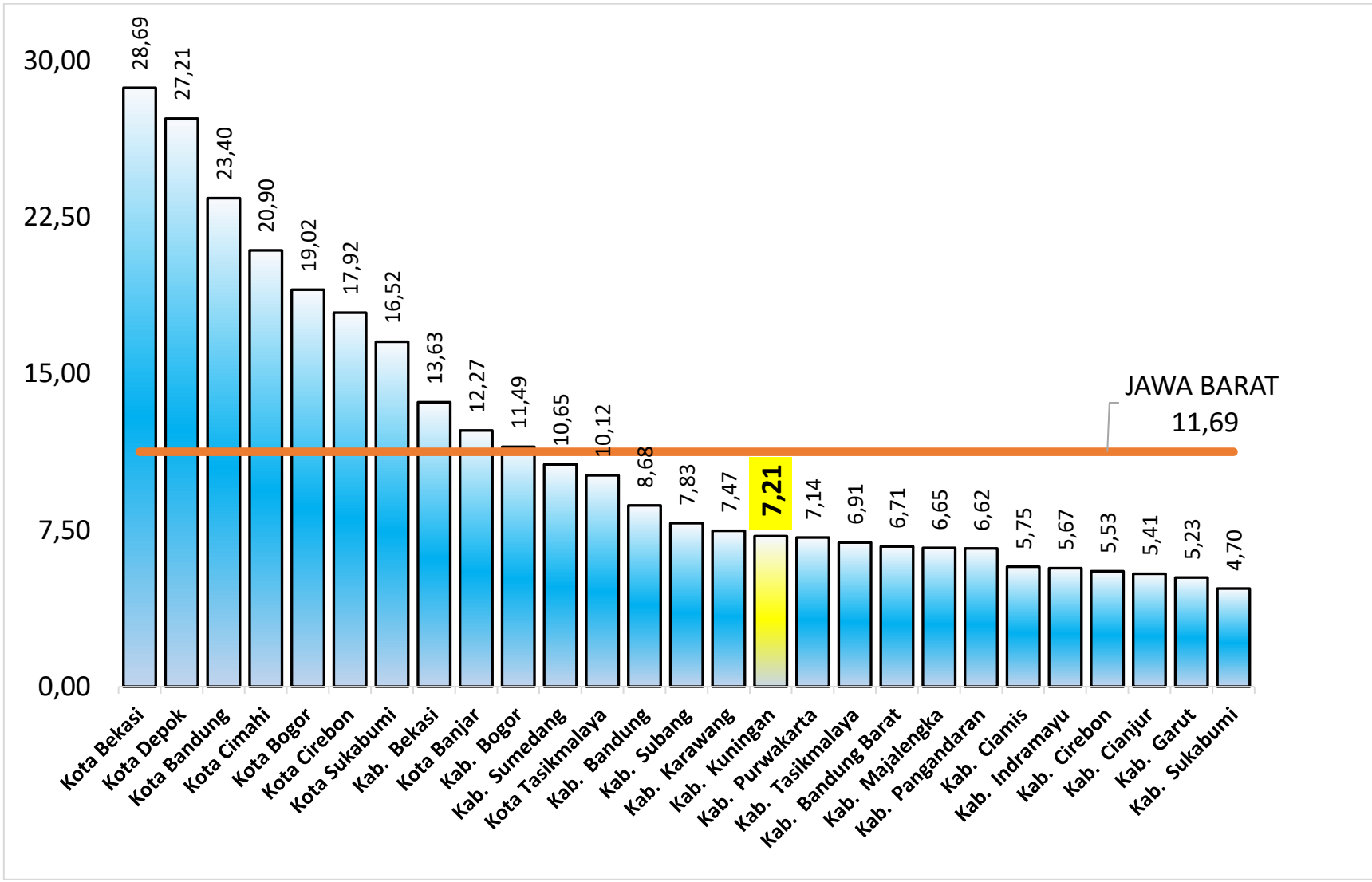

Tabel 4.7.1. Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kab. /Kota dan Kelompok Umur *(Agustus2020)*

Kab. /Kota	Kelompok Umur										Jumlah/*Total*
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kab. Bogor	90.739	273.873	283.186	333.566	316.377	292.874	240.413	197.383	123.287	191.241	2.342.939
Kab. Sukabumi	28.243	88.482	104.745	112.957	128.344	119.975	127.323	113.631	85.925	127.110	1.036.735
Kab. Cianjur	42.608	97.138	99.992	102.965	118.034	120.583	129.242	108.974	84.970	150.073	1.054.579
Kab. Bandung	61.874	164.693	180.400	213.327	217.489	188.513	157.688	124.486	112.738	148.766	1.569.974
Kab. Garut	38.096	92.640	114.471	116.534	119.800	123.727	124.143	110.412	74.579	138.171	1.052.573
Kab. Tasikmalaya	24.596	49.406	73.210	88.618	97.894	107.134	117.566	95.766	73.401	149.825	877.416
Kab. Ciamis	19.249	41.118	47.373	53.491	60.252	69.189	78.313	71.799	72.084	127.899	640.767
Kab. Kuningan	11.683	32.586	40.655	48.100	51.442	60.226	51.624	48.706	40.545	77.597	463.164
Kab. Cirebon	42.502	93.222	119.229	112.807	114.133	103.323	94.760	84.302	69.441	104.498	938.217
Kab. Majalengka	19.575	45.608	55.169	58.190	67.941	69.633	71.828	68.211	59.223	110.198	625.576
Kab. Sumedang	15.407	45.609	52.825	57.480	61.263	60.203	64.969	59.174	57.652	100.024	574.606
Kab. Indramayu	39.987	60.988	91.542	89.589	96.547	94.392	92.890	97.263	71.127	119.720	854.045
Kab. Subang	21.441	55.341	73.819	73.836	81.816	85.390	86.554	78.042	67.181	122.864	746.284
Kab. Purwakarta	11.343	38.506	49.083	46.217	48.056	45.880	44.283	34.124	26.828	40.223	384.543
Kab. Karawang	28.370	110.592	133.742	127.223	130.032	113.722	105.013	93.316	70.871	115.854	1.028.735
Kab. Bekasi	56.808	208.976	241.442	239.875	235.297	191.877	149.910	121.508	75.208	107.330	1.628.231
Kab. Bandung Barat	11.405	63.945	66.875	78.428	86.173	82.026	74.762	59.516	56.477	76.480	656.087
Kab. Pangandaran	5.437	15.554	16.739	18.449	23.651	26.578	29.318	27.145	22.536	47.736	233.143
Kota Bogor	14.531	53.101	61.973	58.936	56.096	56.011	47.985	42.731	30.307	27.449	449.120
Kota Sukabumi	2.151	12.295	15.307	15.934	14.193	15.171	14.482	12.401	10.357	10.371	122.662
Kota Bandung	41.676	131.495	154.532	163.052	146.211	130.943	126.781	109.034	69.352	94.773	1.167.849
Kota Cirebon	4.627	12.901	17.672	17.942	16.024	17.598	15.665	14.836	11.186	10.883	139.334
Kota Bekasi	37.655	170.797	201.528	189.227	175.642	166.277	155.855	124.077	70.079	57.393	1.348.530
Kota Depok	25.804	119.121	157.046	158.828	149.851	141.266	115.950	96.138	60.604	52.992	1.077.600
Kota Cimahi	7.478	27.854	34.602	38.507	32.552	31.576	29.447	25.262	14.577	12.844	254.699
Kota Tasikmalaya	10.275	32.267	35.770	36.815	38.897	35.631	36.821	31.841	25.084	32.443	315.844
Kota Banjar	3.983	7.161	8.053	8.919	9.010	10.561	10.495	10.050	9.562	13.808	91.602
Jawa Barat	717.543	2.145.269	2.530.980	2.659.812	2.693.017	2.560.279	2.394.080	2.060.128	1.545.181	2.368.565	21.674.854

Tabel 4.7.2. Penduduk Lak-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kab. /Kota dan Kelompok Umur *(Agustus2020)*

Kab. /Kota	Kelompok Umur										Jumlah/*Total*
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kab. Bogor	42.034	155.699	204.803	218.026	221.979	189.634	158.910	135.422	85.073	132.146	1.543.726
Kab. Sukabumi	12.368	47.591	78.362	79.157	84.467	80.660	81.997	74.418	60.483	97.405	696.908
Kab. Cianjur	28.697	60.825	68.210	75.225	75.758	74.133	76.309	67.542	50.999	95.192	672.890
Kab. Bandung	35.685	98.797	130.058	144.759	137.058	117.195	103.546	76.531	67.674	102.028	1.013.331
Kab. Garut	24.275	61.589	82.760	79.518	79.250	80.215	76.693	63.158	47.353	89.148	683.959
Kab. Tasikmalaya	14.680	30.930	48.091	53.818	58.291	62.639	66.646	52.551	42.492	90.347	520.485
Kab. Ciamis	10.784	21.091	29.812	35.687	35.934	39.479	43.017	40.420	40.267	78.059	374.550
Kab. Kuningan	7.186	17.213	28.243	32.708	33.556	36.297	33.468	29.390	26.055	48.691	292.807
Kab. Cirebon	19.653	59.157	79.045	78.177	77.420	68.514	59.937	51.982	41.395	61.446	596.726
Kab. Majalengka	8.828	25.190	38.174	39.230	43.961	41.883	43.084	38.948	34.079	62.779	376.156
Kab. Sumedang	7.852	27.598	34.130	35.912	35.390	37.758	38.656	34.189	32.139	60.831	344.455
Kab. Indramayu	27.903	42.831	58.723	63.926	64.296	56.819	54.666	54.788	45.996	72.967	542.915
Kab. Subang	14.485	33.120	46.280	45.944	49.269	52.582	55.214	51.203	40.280	80.325	468.702
Kab. Purwakarta	8.011	23.737	35.191	34.234	31.545	31.657	29.345	23.568	18.325	27.587	263.200
Kab. Karawang	14.263	59.837	88.655	88.017	89.054	84.469	73.928	63.337	48.495	77.626	687.681
Kab. Bekasi	26.136	110.689	162.389	171.278	158.383	136.955	109.281	79.138	50.242	65.547	1.070.038
Kab. Bandung Barat	8.164	44.104	46.538	60.569	60.219	56.885	49.335	40.559	34.620	55.387	456.380
Kab. Pangandaran	3.343	9.585	10.063	11.723	13.416	14.659	15.902	14.807	12.685	28.388	134.571
Kota Bogor	6.677	29.618	35.768	41.225	41.839	37.998	33.466	28.467	20.653	19.802	295.513
Kota Sukabumi	1.132	7.132	9.308	11.266	10.002	9.495	9.582	8.052	6.661	7.695	80.325
Kota Bandung	24.752	75.131	95.672	106.063	91.680	78.326	78.299	66.864	45.902	57.286	719.975
Kota Cirebon	2.513	6.648	11.254	11.669	11.087	10.992	9.373	8.883	6.085	6.216	84.720
Kota Bekasi	13.452	86.525	119.432	126.364	117.339	105.614	99.363	80.951	43.629	37.864	830.533
Kota Depok	7.600	65.022	93.855	106.014	99.851	90.255	75.648	61.978	38.975	35.785	674.983
Kota Cimahi	3.458	16.403	22.605	25.640	22.186	20.451	16.524	14.807	9.681	8.593	160.348
Kota Tasikmalaya	5.662	17.381	22.781	23.889	24.480	20.750	21.346	19.030	15.079	21.235	191.633
Kota Banjar	1.424	3.975	4.917	5.512	5.350	5.572	5.844	5.994	5.336	8.259	52.183
Jawa Barat	381.017	1.237.418	1.685.119	1.805.550	1.773.060	1.641.886	1.519.379	1.286.977	970.653	1.528.634	13.829.693

Tabel 4.7.3. Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kab. /Kota dan Kelompok Umur *(Agustus2020))*

Kab. /Kota	Kelompok Umur										Jumlah/*Total*
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kab. Bogor	48.705	118.174	78.383	115.540	94.398	103.240	81.503	61.961	38.214	59.095	799.213
Kab. Sukabumi	15.875	40.891	26.383	33.800	43.877	39.315	45.326	39.213	25.442	29.705	339.827
Kab. Cianjur	13.911	36.313	31.782	27.740	42.276	46.450	52.933	41.432	33.971	54.881	381.689
Kab. Bandung	26.189	65.896	50.342	68.568	80.431	71.318	54.142	47.955	45.064	46.738	556.643
Kab. Garut	13.821	31.051	31.711	37.016	40.550	43.512	47.450	47.254	27.226	49.023	368.614
Kab. Tasikmalaya	9.916	18.476	25.119	34.800	39.603	44.495	50.920	43.215	30.909	59.478	356.931
Kab. Ciamis	8.465	20.027	17.561	17.804	24.318	29.710	35.296	31.379	31.817	49.840	266.217
Kab. Kuningan	4.497	15.373	12.412	15.392	17.886	23.929	18.156	19.316	14.490	28.906	170.357
Kab. Cirebon	22.849	34.065	40.184	34.630	36.713	34.809	34.823	32.320	28.046	43.052	341.491
Kab. Majalengka	10.747	20.418	16.995	18.960	23.980	27.750	28.744	29.263	25.144	47.419	249.420
Kab. Sumedang	7.555	18.011	18.695	21.568	25.873	22.445	26.313	24.985	25.513	39.193	230.151
Kab. Indramayu	12.084	18.157	32.819	25.663	32.251	37.573	38.224	42.475	25.131	46.753	311.130
Kab. Subang	6.956	22.221	27.539	27.892	32.547	32.808	31.340	26.839	26.901	42.539	277.582
Kab. Purwakarta	3.332	14.769	13.892	11.983	16.511	14.223	14.938	10.556	8.503	12.636	121.343
Kab. Karawang	14.107	50.755	45.087	39.206	40.978	29.253	31.085	29.979	22.376	38.228	341.054
Kab. Bekasi	30.672	98.287	79.053	68.597	76.914	54.922	40.629	42.370	24.966	41.783	558.193
Kab. Bandung Barat	3.241	19.841	20.337	17.859	25.954	25.141	25.427	18.957	21.857	21.093	199.707
Kab. Pangandaran	2.094	5.969	6.676	6.726	10.235	11.919	13.416	12.338	9.851	19.348	98.572
Kota Bogor	7.854	23.483	26.205	17.711	14.257	18.013	14.519	14.264	9.654	7.647	153.607
Kota Sukabumi	1.019	5.163	5.999	4.668	4.191	5.676	4.900	4.349	3.696	2.676	42.337
Kota Bandung	16.924	56.364	58.860	56.989	54.531	52.617	48.482	42.170	23.450	37.487	447.874
Kota Cirebon	2.114	6.253	6.418	6.273	4.937	6.606	6.292	5.953	5.101	4.667	54.614
Kota Bekasi	24.203	84.272	82.096	62.863	58.303	60.663	56.492	43.126	26.450	19.529	517.997
Kota Depok	18.204	54.099	63.191	52.814	50.000	51.011	40.302	34.160	21.629	17.207	402.617
Kota Cimahi	4.020	11.451	11.997	12.867	10.366	11.125	12.923	10.455	4.896	4.251	94.351
Kota Tasikmalaya	4.613	14.886	12.989	12.926	14.417	14.881	15.475	12.811	10.005	11.208	124.211
Kota Banjar	2.559	3.186	3.136	3.407	3.660	4.989	4.651	4.056	4.226	5.549	39.419
Jawa Barat	336.526	907.851	845.861	854.262	919.957	918.393	874.701	773.151	574.528	839.931	7.845.161

Tabel 4.8.1. Persentase Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kab. /Kota dan Kelompok Umur *(Agustus2020)*

Kab. /Kota	Kelompok Umur										Jumlah/*Total*
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kab. Bogor	3,87	11,69	12,09	14,24	13,50	12,50	10,26	8,42	5,26	8,16	100,00
Kab. Sukabumi	2,72	8,53	10,10	10,90	12,38	11,57	12,28	10,96	8,29	12,26	100,00
Kab. Cianjur	4,04	9,21	9,48	9,76	11,19	11,43	12,26	10,33	8,06	14,23	100,00
Kab. Bandung	3,94	10,49	11,49	13,59	13,85	12,01	10,04	7,93	7,18	9,48	100,00
Kab. Garut	3,62	8,80	10,88	11,07	11,38	11,75	11,79	10,49	7,09	13,13	100,00
Kab. Tasikmalaya	2,80	5,63	8,34	10,10	11,16	12,21	13,40	10,91	8,37	17,08	100,00
Kab. Ciamis	3,00	6,42	7,39	8,35	9,40	10,80	12,22	11,21	11,25	19,96	100,00
Kab. Kuningan	2,52	7,04	8,78	10,39	11,11	13,00	11,15	10,52	8,75	16,75	100,00
Kab. Cirebon	4,53	9,94	12,71	12,02	12,16	11,01	10,10	8,99	7,40	11,14	100,00
Kab. Majalengka	3,13	7,29	8,82	9,30	10,86	11,13	11,48	10,90	9,47	17,62	100,00
Kab. Sumedang	2,68	7,94	9,19	10,00	10,66	10,48	11,31	10,30	10,03	17,41	100,00
Kab. Indramayu	4,68	7,14	10,72	10,49	11,30	11,05	10,88	11,39	8,33	14,02	100,00
Kab. Subang	2,87	7,42	9,89	9,89	10,96	11,44	11,60	10,46	9,00	16,46	100,00
Kab. Purwakarta	2,95	10,01	12,76	12,02	12,50	11,93	11,52	8,87	6,98	10,46	100,00
Kab. Karawang	2,76	10,75	13,00	12,37	12,64	11,05	10,21	9,07	6,89	11,26	100,00
Kab. Bekasi	3,49	12,83	14,83	14,73	14,45	11,78	9,21	7,46	4,62	6,59	100,00
Kab. Bandung Barat	1,74	9,75	10,19	11,95	13,13	12,50	11,40	9,07	8,61	11,66	100,00
Kab. Pangandaran	2,33	6,67	7,18	7,91	10,14	11,40	12,58	11,64	9,67	20,47	100,00
Kota Bogor	3,24	11,82	13,80	13,12	12,49	12,47	10,68	9,51	6,75	6,11	100,00
Kota Sukabumi	1,75	10,02	12,48	12,99	11,57	12,37	11,81	10,11	8,44	8,45	100,00
Kota Bandung	3,57	11,26	13,23	13,96	12,52	11,21	10,86	9,34	5,94	8,12	100,00
Kota Cirebon	3,32	9,26	12,68	12,88	11,50	12,63	11,24	10,65	8,03	7,81	100,00
Kota Bekasi	2,79	12,67	14,94	14,03	13,02	12,33	11,56	9,20	5,20	4,26	100,00
Kota Depok	2,39	11,05	14,57	14,74	13,91	13,11	10,76	8,92	5,62	4,92	100,00
Kota Cimahi	2,94	10,94	13,59	15,12	12,78	12,40	11,56	9,92	5,72	5,04	100,00
Kota Tasikmalaya	3,25	10,22	11,33	11,66	12,32	11,28	11,66	10,08	7,94	10,27	100,00
Kota Banjar	4,35	7,82	8,79	9,74	9,84	11,53	11,46	10,97	10,44	15,07	100,00
Jawa Barat	3,31	9,90	11,68	12,27	12,42	11,81	11,05	9,50	7,13	10,93	100,00

Tabel 4.8.2. Persentase Penduduk Lak-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kab. /Kota dan Kelompok Umur *(Agustus2020)*

Kab. /Kota	Kelompok Umur										Jumlah/*Total*
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kab. Bogor	2,72	10,09	13,27	14,12	14,38	12,28	10,29	8,77	5,51	8,56	100,00
Kab. Sukabumi	1,77	6,83	11,24	11,36	12,12	11,57	11,77	10,68	8,68	13,98	100,00
Kab. Cianjur	4,26	9,04	10,14	11,18	11,26	11,02	11,34	10,04	7,58	14,15	100,00
Kab. Bandung	3,52	9,75	12,83	14,29	13,53	11,57	10,22	7,55	6,68	10,07	100,00
Kab. Garut	3,55	9,00	12,10	11,63	11,59	11,73	11,21	9,23	6,92	13,03	100,00
Kab. Tasikmalaya	2,82	5,94	9,24	10,34	11,20	12,03	12,80	10,10	8,16	17,36	100,00
Kab. Ciamis	2,88	5,63	7,96	9,53	9,59	10,54	11,48	10,79	10,75	20,84	100,00
Kab. Kuningan	2,45	5,88	9,65	11,17	11,46	12,40	11,43	10,04	8,90	16,63	100,00
Kab. Cirebon	3,29	9,91	13,25	13,10	12,97	11,48	10,04	8,71	6,94	10,30	100,00
Kab. Majalengka	2,35	6,70	10,15	10,43	11,69	11,13	11,45	10,35	9,06	16,69	100,00
Kab. Sumedang	2,28	8,01	9,91	10,43	10,27	10,96	11,22	9,93	9,33	17,66	100,00
Kab. Indramayu	5,14	7,89	10,82	11,77	11,84	10,47	10,07	10,09	8,47	13,44	100,00
Kab. Subang	3,09	7,07	9,87	9,80	10,51	11,22	11,78	10,92	8,59	17,14	100,00
Kab. Purwakarta	3,04	9,02	13,37	13,01	11,99	12,03	11,15	8,95	6,96	10,48	100,00
Kab. Karawang	2,07	8,70	12,89	12,80	12,95	12,28	10,75	9,21	7,05	11,29	100,00
Kab. Bekasi	2,44	10,34	15,18	16,01	14,80	12,80	10,21	7,40	4,70	6,13	100,00
Kab. Bandung Barat	1,79	9,66	10,20	13,27	13,19	12,46	10,81	8,89	7,59	12,14	100,00
Kab. Pangandaran	2,48	7,12	7,48	8,71	9,97	10,89	11,82	11,00	9,43	21,10	100,00
Kota Bogor	2,26	10,02	12,10	13,95	14,16	12,86	11,32	9,63	6,99	6,70	100,00
Kota Sukabumi	1,41	8,88	11,59	14,03	12,45	11,82	11,93	10,02	8,29	9,58	100,00
Kota Bandung	3,44	10,44	13,29	14,73	12,73	10,88	10,88	9,29	6,38	7,96	100,00
Kota Cirebon	2,97	7,85	13,28	13,77	13,09	12,97	11,06	10,49	7,18	7,34	100,00
Kota Bekasi	1,62	10,42	14,38	15,21	14,13	12,72	11,96	9,75	5,25	4,56	100,00
Kota Depok	1,13	9,63	13,90	15,71	14,79	13,37	11,21	9,18	5,77	5,30	100,00
Kota Cimahi	2,16	10,23	14,10	15,99	13,84	12,75	10,31	9,23	6,04	5,36	100,00
Kota Tasikmalaya	2,95	9,07	11,89	12,47	12,77	10,83	11,14	9,93	7,87	11,08	100,00
Kota Banjar	2,73	7,62	9,42	10,56	10,25	10,68	11,20	11,49	10,23	15,83	100,00
Jawa Barat	2,76	8,95	12,18	13,06	12,82	11,87	10,99	9,31	7,02	11,05	100,00

Tabel 4.8.3. Persentase Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kab. /Kota dan Kelompok Umur *(Agustus2020))*

Kab. /Kota	Kelompok Umur										Jumlah/*Total*
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kab. Bogor	6,09	14,79	9,81	14,46	11,81	12,92	10,20	7,75	4,78	7,39	100,00
Kab. Sukabumi	4,67	12,03	7,76	9,95	12,91	11,57	13,34	11,54	7,49	8,74	100,00
Kab. Cianjur	3,64	9,51	8,33	7,27	11,08	12,17	13,87	10,85	8,90	14,38	100,00
Kab. Bandung	4,70	11,84	9,04	12,32	14,45	12,81	9,73	8,62	8,10	8,40	100,00
Kab. Garut	3,75	8,42	8,60	10,04	11,00	11,80	12,87	12,82	7,39	13,30	100,00
Kab. Tasikmalaya	2,78	5,18	7,04	9,75	11,10	12,47	14,27	12,11	8,66	16,66	100,00
Kab. Ciamis	3,18	7,52	6,60	6,69	9,13	11,16	13,26	11,79	11,95	18,72	100,00
Kab. Kuningan	2,64	9,02	7,29	9,04	10,50	14,05	10,66	11,34	8,51	16,97	100,00
Kab. Cirebon	6,69	9,98	11,77	10,14	10,75	10,19	10,20	9,46	8,21	12,61	100,00
Kab. Majalengka	4,31	8,19	6,81	7,60	9,61	11,13	11,52	11,73	10,08	19,01	100,00
Kab. Sumedang	3,28	7,83	8,12	9,37	11,24	9,75	11,43	10,86	11,09	17,03	100,00
Kab. Indramayu	3,88	5,84	10,55	8,25	10,37	12,08	12,29	13,65	8,08	15,03	100,00
Kab. Subang	2,51	8,01	9,92	10,05	11,73	11,82	11,29	9,67	9,69	15,32	100,00
Kab. Purwakarta	2,75	12,17	11,45	9,88	13,61	11,72	12,31	8,70	7,01	10,41	100,00
Kab. Karawang	4,14	14,88	13,22	11,50	12,02	8,58	9,11	8,79	6,56	11,21	100,00
Kab. Bekasi	5,49	17,61	14,16	12,29	13,78	9,84	7,28	7,59	4,47	7,49	100,00
Kab. Bandung Barat	1,62	9,94	10,18	8,94	13,00	12,59	12,73	9,49	10,94	10,56	100,00
Kab. Pangandaran	2,12	6,06	6,77	6,82	10,38	12,09	13,61	12,52	9,99	19,63	100,00
Kota Bogor	5,11	15,29	17,06	11,53	9,28	11,73	9,45	9,29	6,28	4,98	100,00
Kota Sukabumi	2,41	12,20	14,17	11,03	9,90	13,41	11,57	10,27	8,73	6,32	100,00
Kota Bandung	3,78	12,58	13,14	12,72	12,18	11,75	10,82	9,42	5,24	8,37	100,00
Kota Cirebon	3,87	11,45	11,75	11,49	9,04	12,10	11,52	10,90	9,34	8,55	100,00
Kota Bekasi	4,67	16,27	15,85	12,14	11,26	11,71	10,91	8,33	5,11	3,77	100,00
Kota Depok	4,52	13,44	15,70	13,12	12,42	12,67	10,01	8,48	5,37	4,27	100,00
Kota Cimahi	4,26	12,14	12,72	13,64	10,99	11,79	13,70	11,08	5,19	4,51	100,00
Kota Tasikmalaya	3,71	11,98	10,46	10,41	11,61	11,98	12,46	10,31	8,05	9,02	100,00
Kota Banjar	6,49	8,08	7,96	8,64	9,28	12,66	11,80	10,29	10,72	14,08	100,00
Jawa Barat	4,29	11,57	10,78	10,89	11,73	11,71	11,15	9,86	7,32	10,71	100,00

Grafik 4.6. Selisih Persentase Penduduk Kuningan dan Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur *(Agustus2020)*

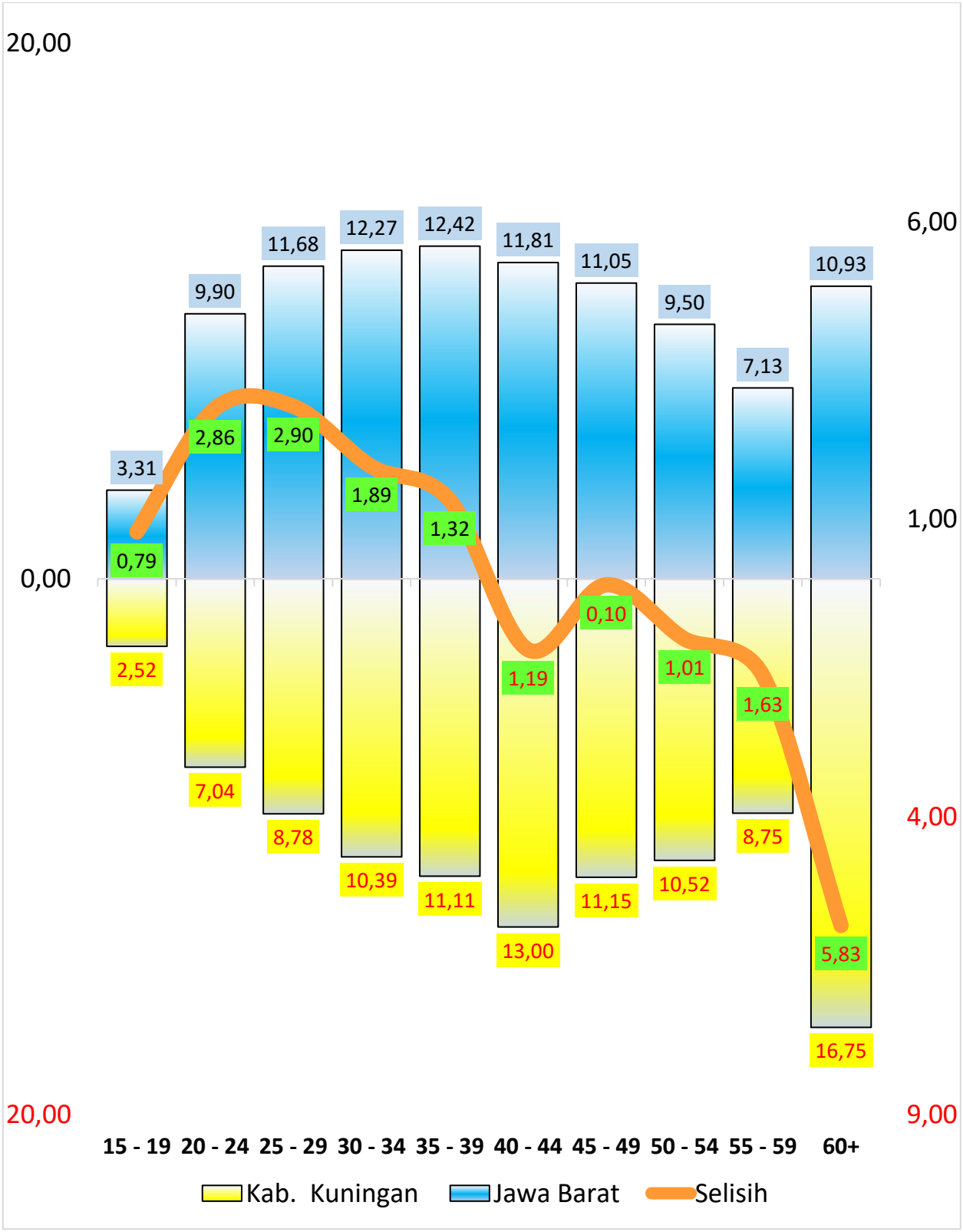

Tabel 4.9.1. Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan *(Agustus 2020)*

Kab. /Kota	Tidak/belum pernah sekolah/ Tidak/belum Tamat SD	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					Jumlah
		Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas		Diploma I/II/III/ Akademi/ Universitas	
				Umum	Kejuruan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Bogor	258.776	604.002	416.407	387.102	402.493	274.159	2.342.939
Kab. Sukabumi	61.673	504.337	238.993	125.813	57.799	48.120	1.036.735
Kab. Cianjur	153.528	523.386	153.858	90.985	72.058	60.764	1.054.579
Kab. Bandung	38.071	519.692	413.159	315.198	150.914	132.940	1.569.974
Kab. Garut	106.908	479.478	205.851	149.691	52.630	58.015	1.052.573
Kab. Tasikmalaya	41.788	491.391	150.823	84.127	48.536	60.751	877.416
Kab. Ciamis	23.868	343.355	123.939	64.680	48.012	36.913	640.767
Kab. Kuningan	37.382	201.893	74.650	58.030	57.630	33.579	463.164
Kab. Cirebon	172.590	290.341	150.430	135.067	132.918	56.871	938.217
Kab. Majalengka	54.469	317.275	98.893	66.749	47.500	40.690	625.576
Kab. Sumedang	18.510	227.022	113.048	80.549	73.743	61.734	574.606
Kab. Indramayu	260.226	224.575	134.684	107.959	77.034	49.567	854.045
Kab. Subang	98.540	273.951	155.586	96.800	62.826	58.581	746.284
Kab. Purwakarta	25.149	121.062	75.278	80.131	56.333	26.590	384.543
Kab. Karawang	143.281	295.681	177.094	185.998	147.222	79.459	1.028.735
Kab. Bekasi	120.901	282.062	233.388	395.097	382.775	214.008	1.628.231
Kab. Bandung Barat	42.436	278.762	135.254	99.146	55.745	44.744	656.087
Kab. Pangandaran	14.064	111.522	49.955	25.512	16.512	15.578	233.143
Kota Bogor	15.794	88.252	70.640	83.818	99.420	91.196	449.120
Kota Sukabumi	1.336	31.511	20.931	28.036	19.160	21.688	122.662
Kota Bandung	18.061	184.370	200.014	313.809	176.088	275.507	1.167.849
Kota Cirebon	13.644	21.673	19.518	33.947	23.974	26.578	139.334
Kota Bekasi	38.942	134.462	184.535	307.581	300.988	382.022	1.348.530
Kota Depok	34.896	111.549	142.829	242.848	248.627	296.851	1.077.600
Kota Cimahi	6.009	31.372	44.464	64.239	54.536	54.079	254.699
Kota Tasikmalaya	7.166	109.705	64.035	56.324	46.318	32.296	315.844
Kota Banjar	6.300	30.741	16.196	11.568	15.420	11.377	91.602
Jawa Barat	1.814.308	6.833.422	3.864.452	3.690.804	2.927.211	2.544.657	21.674.854

Tabel 4.9.2. Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan *(Agustus 2020)*

Kab. /Kota	Tidak/belum pernah sekolah/ Tidak/belum Tamat SD	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					Jumlah
		Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas		Diploma I/II/III/ Akademi/ Universitas	
				Umum	Kejuruan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Bogor	420.740	289.401	257.331	275.673	150.540	1.543.726	420.740
Kab. Sukabumi	332.965	170.846	79.208	43.912	32.355	696.908	332.965
Kab. Cianjur	334.484	104.581	62.036	45.924	40.027	672.890	334.484
Kab. Bandung	332.443	263.476	208.528	107.076	81.464	1.013.331	332.443
Kab. Garut	309.624	130.986	102.923	40.950	29.620	683.959	309.624
Kab. Tasikmalaya	280.280	94.194	55.611	35.685	28.751	520.485	280.280
Kab. Ciamis	191.390	82.326	37.762	33.475	17.654	374.550	191.390
Kab. Kuningan	127.151	47.246	36.784	41.428	18.867	292.807	127.151
Kab. Cirebon	196.422	91.624	88.755	86.615	34.590	596.726	196.422
Kab. Majalengka	184.939	62.457	43.742	34.951	21.604	376.156	184.939
Kab. Sumedang	128.818	63.341	48.669	57.586	35.726	344.455	128.818
Kab. Indramayu	149.963	86.714	71.090	56.788	26.314	542.915	149.963
Kab. Subang	174.664	94.448	63.379	47.826	27.076	468.702	174.664
Kab. Purwakarta	85.238	45.150	56.103	46.302	14.645	263.200	85.238
Kab. Karawang	214.785	122.001	123.787	107.709	35.685	687.681	214.785
Kab. Bekasi	174.233	154.691	256.138	303.951	121.884	1.070.038	174.233
Kab. Bandung Barat	190.360	104.291	64.274	43.845	25.456	456.380	190.360
Kab. Pangandaran	58.413	29.854	18.731	11.188	8.435	134.571	58.413
Kota Bogor	51.579	52.559	59.630	70.065	50.605	295.513	51.579
Kota Sukabumi	19.888	14.771	19.711	13.134	11.847	80.325	19.888
Kota Bandung	113.670	123.838	196.767	121.325	155.591	719.975	113.670
Kota Cirebon	14.303	12.421	22.570	13.654	14.881	84.720	14.303
Kota Bekasi	80.305	105.969	209.662	207.606	211.902	830.533	80.305
Kota Depok	67.024	96.424	172.631	163.711	156.503	674.983	67.024
Kota Cimahi	18.789	28.371	42.094	36.485	30.793	160.348	18.789
Kota Tasikmalaya	68.617	38.423	34.242	30.453	16.387	191.633	68.617
Kota Banjar	17.539	9.454	6.657	10.230	5.134	52.183	17.539
Jawa Barat	4.338.626	2.519.857	2.438.815	2.087.547	1.404.336	13.829.693	4.338.626

Tabel 4.9.3. Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan *(Agustus 2020)*

Kab. /Kota	Tidak/belum pernah sekolah/ Tidak/belum Tamat SD	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					Jumlah
		Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas		Diploma I/II/III/ Akademi/ Universitas	
				Umum	Kejuruan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Bogor	183.262	127.006	129.771	126.820	123.619	799.213	183.262
Kab. Sukabumi	171.372	68.147	46.605	13.887	15.765	339.827	171.372
Kab. Cianjur	188.902	49.277	28.949	26.134	20.737	381.689	188.902
Kab. Bandung	187.249	149.683	106.670	43.838	51.476	556.643	187.249
Kab. Garut	169.854	74.865	46.768	11.680	28.395	368.614	169.854
Kab. Tasikmalaya	211.111	56.629	28.516	12.851	32.000	356.931	211.111
Kab. Ciamis	151.965	41.613	26.918	14.537	19.259	266.217	151.965
Kab. Kuningan	74.742	27.404	21.246	16.202	14.712	170.357	74.742
Kab. Cirebon	93.919	58.806	46.312	46.303	22.281	341.491	93.919
Kab. Majalengka	132.336	36.436	23.007	12.549	19.086	249.420	132.336
Kab. Sumedang	98.204	49.707	31.880	16.157	26.008	230.151	98.204
Kab. Indramayu	74.612	47.970	36.869	20.246	23.253	311.130	74.612
Kab. Subang	99.287	61.138	33.421	15.000	31.505	277.582	99.287
Kab. Purwakarta	35.824	30.128	24.028	10.031	11.945	121.343	35.824
Kab. Karawang	80.896	55.093	62.211	39.513	43.774	341.054	80.896
Kab. Bekasi	107.829	78.697	138.959	78.824	92.124	558.193	107.829
Kab. Bandung Barat	88.402	30.963	34.872	11.900	19.288	199.707	88.402
Kab. Pangandaran	53.109	20.101	6.781	5.324	7.143	98.572	53.109
Kota Bogor	36.673	18.081	24.188	29.355	40.591	153.607	36.673
Kota Sukabumi	11.623	6.160	8.325	6.026	9.841	42.337	11.623
Kota Bandung	70.700	76.176	117.042	54.763	119.916	447.874	70.700
Kota Cirebon	7.370	7.097	11.377	10.320	11.697	54.614	7.370
Kota Bekasi	54.157	78.566	97.919	93.382	170.120	517.997	54.157
Kota Depok	44.525	46.405	70.217	84.916	140.348	402.617	44.525
Kota Cimahi	12.583	16.093	22.145	18.051	23.286	94.351	12.583
Kota Tasikmalaya	41.088	25.612	22.082	15.865	15.909	124.211	41.088
Kota Banjar	13.202	6.742	4.911	5.190	6.243	39.419	13.202
Jawa Barat	2.494.796	1.344.595	1.251.989	839.664	1.140.321	7.845.161	2.494.796

Tabel 4.10.1. Persentase Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan *(Agustus 2020)*

Kab. /Kota	Tidak/belum pernah sekolah/ Tidak/belum Tamat SD	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					Jumlah
		Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas		Diploma I/II/III/ Akademi/ Universitas	
				Umum	Kejuruan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Bogor	11,04	25,78	17,77	16,52	17,18	11,70	100,00
Kab. Sukabumi	5,95	48,65	23,05	12,14	5,58	4,64	100,00
Kab. Cianjur	14,56	49,63	14,59	8,63	6,83	5,76	100,00
Kab. Bandung	2,42	33,10	26,32	20,08	9,61	8,47	100,00
Kab. Garut	10,16	45,55	19,56	14,22	5,00	5,51	100,00
Kab. Tasikmalaya	4,76	56,00	17,19	9,59	5,53	6,92	100,00
Kab. Ciamis	3,72	53,59	19,34	10,09	7,49	5,76	100,00
Kab. Kuningan	8,07	43,59	16,12	12,53	12,44	7,25	100,00
Kab. Cirebon	18,40	30,95	16,03	14,40	14,17	6,06	100,00
Kab. Majalengka	8,71	50,72	15,81	10,67	7,59	6,50	100,00
Kab. Sumedang	3,22	39,51	19,67	14,02	12,83	10,74	100,00
Kab. Indramayu	30,47	26,30	15,77	12,64	9,02	5,80	100,00
Kab. Subang	13,20	36,71	20,85	12,97	8,42	7,85	100,00
Kab. Purwakarta	6,54	31,48	19,58	20,84	14,65	6,91	100,00
Kab. Karawang	13,93	28,74	17,21	18,08	14,31	7,72	100,00
Kab. Bekasi	7,43	17,32	14,33	24,27	23,51	13,14	100,00
Kab. Bandung Barat	6,47	42,49	20,62	15,11	8,50	6,82	100,00
Kab. Pangandaran	6,03	47,83	21,43	10,94	7,08	6,68	100,00
Kota Bogor	3,52	19,65	15,73	18,66	22,14	20,31	100,00
Kota Sukabumi	1,09	25,69	17,06	22,86	15,62	17,68	100,00
Kota Bandung	1,55	15,79	17,13	26,87	15,08	23,59	100,00
Kota Cirebon	9,79	15,55	14,01	24,36	17,21	19,08	100,00
Kota Bekasi	2,89	9,97	13,68	22,81	22,32	28,33	100,00
Kota Depok	3,24	10,35	13,25	22,54	23,07	27,55	100,00
Kota Cimahi	2,36	12,32	17,46	25,22	21,41	21,23	100,00
Kota Tasikmalaya	2,27	34,73	20,27	17,83	14,66	10,23	100,00
Kota Banjar	6,88	33,56	17,68	12,63	16,83	12,42	100,00
Jawa Barat	8,37	31,53	17,83	17,03	13,51	11,74	100,00

Tabel 4.10.2. Persentase Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan *(Agustus 2020)*

Kab. /Kota	Tidak/belum pernah sekolah/ Tidak/belum Tamat SD	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					Jumlah
		Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas		Diploma I/II/III/ Akademi/ Universitas	
				Umum	Kejuruan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Bogor	9,72	27,25	18,75	16,67	17,86	9,75	100,00
Kab. Sukabumi	5,40	47,78	24,51	11,37	6,30	4,64	100,00
Kab. Cianjur	12,76	49,71	15,54	9,22	6,82	5,95	100,00
Kab. Bandung	2,01	32,81	26,00	20,58	10,57	8,04	100,00
Kab. Garut	10,21	45,27	19,15	15,05	5,99	4,33	100,00
Kab. Tasikmalaya	4,99	53,85	18,10	10,68	6,86	5,52	100,00
Kab. Ciamis	3,19	51,10	21,98	10,08	8,94	4,71	100,00
Kab. Kuningan	7,29	43,42	16,14	12,56	14,15	6,44	100,00
Kab. Cirebon	16,54	32,92	15,35	14,87	14,52	5,80	100,00
Kab. Majalengka	7,57	49,17	16,60	11,63	9,29	5,74	100,00
Kab. Sumedang	2,99	37,40	18,39	14,13	16,72	10,37	100,00
Kab. Indramayu	28,01	27,62	15,97	13,09	10,46	4,85	100,00
Kab. Subang	13,08	37,27	20,15	13,52	10,20	5,78	100,00
Kab. Purwakarta	5,99	32,39	17,15	21,32	17,59	5,56	100,00
Kab. Karawang	12,17	31,23	17,74	18,00	15,66	5,19	100,00
Kab. Bekasi	5,53	16,28	14,46	23,94	28,41	11,39	100,00
Kab. Bandung Barat	6,17	41,71	22,85	14,08	9,61	5,58	100,00
Kab. Pangandaran	5,91	43,41	22,18	13,92	8,31	6,27	100,00
Kota Bogor	3,75	17,45	17,79	20,18	23,71	17,12	100,00
Kota Sukabumi	1,21	24,76	18,39	24,54	16,35	14,75	100,00
Kota Bandung	1,22	15,79	17,20	27,33	16,85	21,61	100,00
Kota Cirebon	8,13	16,88	14,66	26,64	16,12	17,56	100,00
Kota Bekasi	1,82	9,67	12,76	25,24	25,00	25,51	100,00
Kota Depok	2,77	9,93	14,29	25,58	24,25	23,19	100,00
Kota Cimahi	2,38	11,72	17,69	26,25	22,75	19,20	100,00
Kota Tasikmalaya	1,83	35,81	20,05	17,87	15,89	8,55	100,00
Kota Banjar	6,07	33,61	18,12	12,76	19,60	9,84	100,00
Jawa Barat	7,52	31,37	18,22	17,63	15,09	10,15	100,00

Tabel 4.10.3. Persentase Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan *(Agustus 2020)*

Kab. /Kota	Tidak/belum pernah sekolah/ Tidak/belum Tamat SD	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					Jumlah
		Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas		Diploma I/II/III/ Akademi/ Universitas	
				Umum	Kejuruan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Bogor	13,61	22,93	15,89	16,24	15,87	15,47	100,00
Kab. Sukabumi	7,08	50,43	20,05	13,71	4,09	4,64	100,00
Kab. Cianjur	17,73	49,49	12,91	7,58	6,85	5,43	100,00
Kab. Bandung	3,18	33,64	26,89	19,16	7,88	9,25	100,00
Kab. Garut	10,05	46,08	20,31	12,69	3,17	7,70	100,00
Kab. Tasikmalaya	4,43	59,15	15,87	7,99	3,60	8,97	100,00
Kab. Ciamis	4,48	57,08	15,63	10,11	5,46	7,23	100,00
Kab. Kuningan	9,42	43,87	16,09	12,47	9,51	8,64	100,00
Kab. Cirebon	21,63	27,50	17,22	13,56	13,56	6,52	100,00
Kab. Majalengka	10,43	53,06	14,61	9,22	5,03	7,65	100,00
Kab. Sumedang	3,56	42,67	21,60	13,85	7,02	11,30	100,00
Kab. Indramayu	34,77	23,98	15,42	11,85	6,51	7,47	100,00
Kab. Subang	13,41	35,77	22,03	12,04	5,40	11,35	100,00
Kab. Purwakarta	7,74	29,52	24,83	19,80	8,27	9,84	100,00
Kab. Karawang	17,47	23,72	16,15	18,24	11,59	12,83	100,00
Kab. Bekasi	11,06	19,32	14,10	24,89	14,12	16,50	100,00
Kab. Bandung Barat	7,15	44,27	15,50	17,46	5,96	9,66	100,00
Kab. Pangandaran	6,20	53,88	20,39	6,88	5,40	7,25	100,00
Kota Bogor	3,07	23,87	11,77	15,75	19,11	26,43	100,00
Kota Sukabumi	0,86	27,45	14,55	19,66	14,23	23,24	100,00
Kota Bandung	2,07	15,79	17,01	26,13	12,23	26,77	100,00
Kota Cirebon	12,36	13,49	12,99	20,83	18,90	21,42	100,00
Kota Bekasi	4,60	10,46	15,17	18,90	18,03	32,84	100,00
Kota Depok	4,03	11,06	11,53	17,44	21,09	34,86	100,00
Kota Cimahi	2,32	13,34	17,06	23,47	19,13	24,68	100,00
Kota Tasikmalaya	2,94	33,08	20,62	17,78	12,77	12,81	100,00
Kota Banjar	7,94	33,49	17,10	12,46	13,17	15,84	100,00
Jawa Barat	9,86	31,80	17,14	15,96	10,70	14,54	100,00

Grafik 4.7. Selisih Persentase Penduduk Kuningan dan Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan *(Agustus2020)*

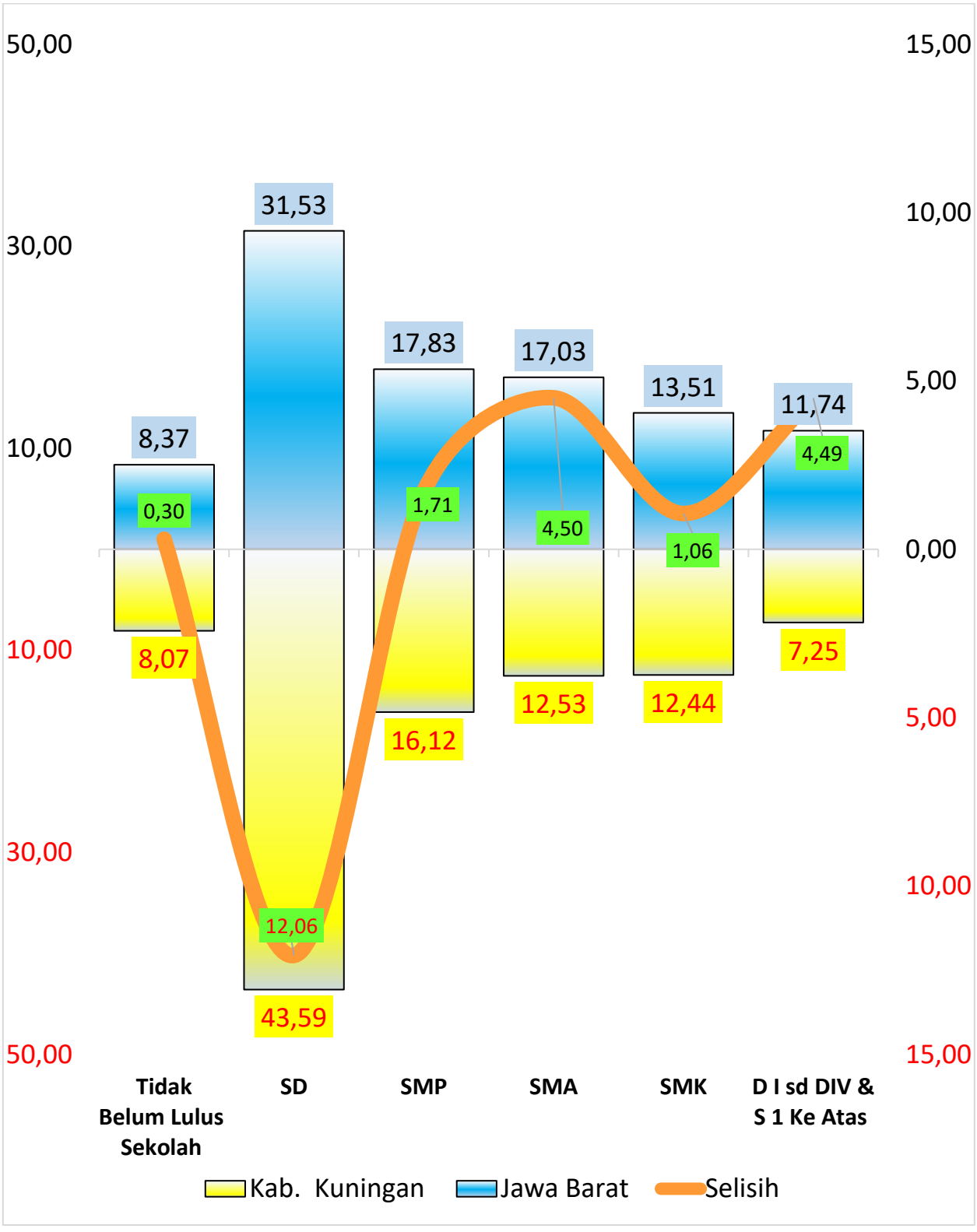

Grafik 4.8. Persentase Penduduk di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten / Kota dan Jenis Pendidikan D-I atau Lebih Tinggi yang Ditamatkan *(Agustus2020)*

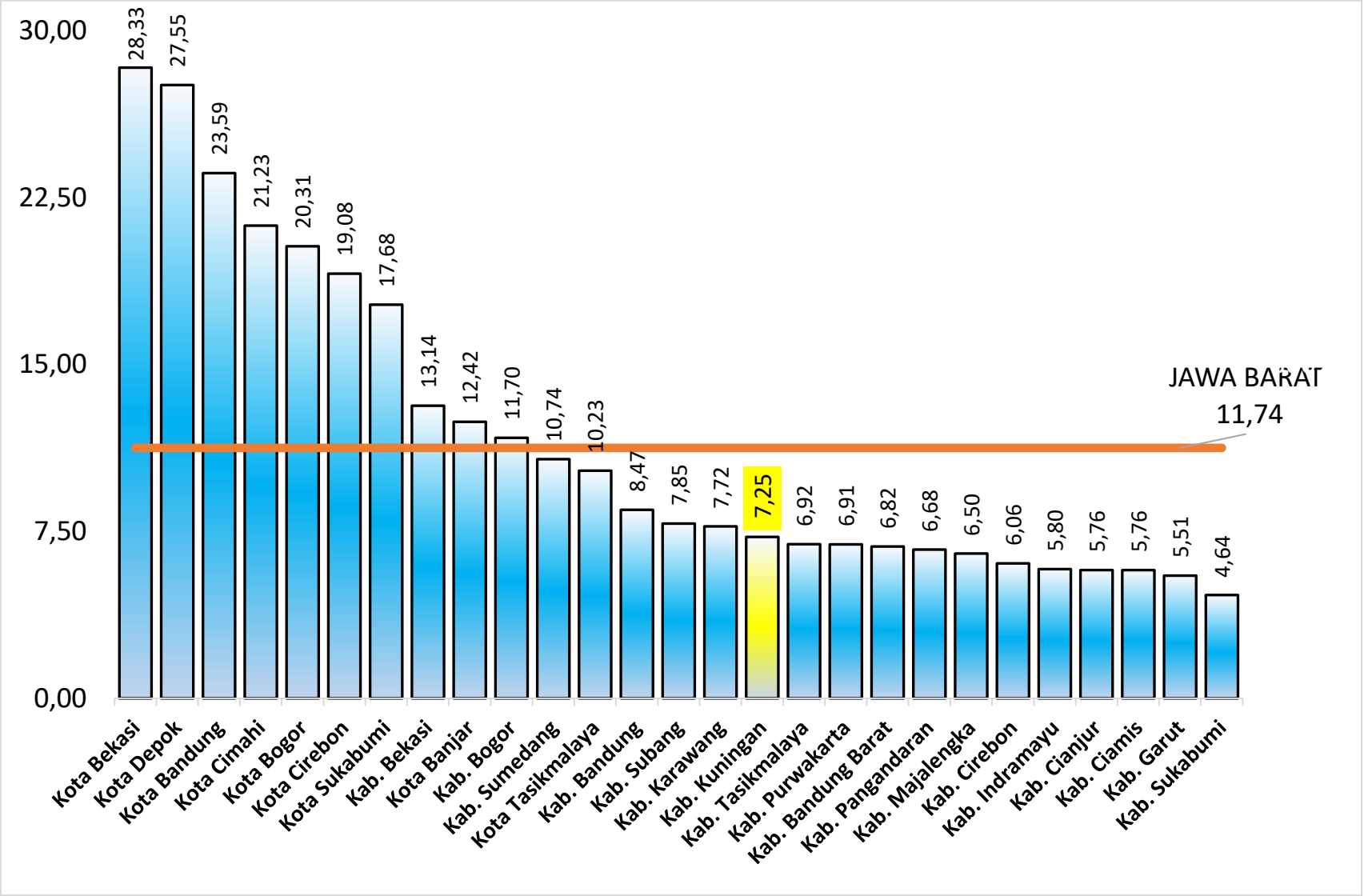

Tabel 4.11.1. Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama *(Agustus 2020)*

Kabupaten/Kota	Lapangan Pekerjaan Utama								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kab. Bogor	236.019	16.991	463.056	1.994	13.801	181.273	532.546	128.972	225.858
Kab. Sukabumi	319.339	12.181	168.395	2.932	1.072	77.586	219.094	47.379	56.884
Kab. Cianjur	410.638	5.783	120.416	880	2.145	76.900	208.123	32.608	70.706
Kab. Bandung	205.749	2.013	464.339	7.884	14.271	96.432	364.141	77.670	106.576
Kab. Garut	307.553	3.904	165.432	1.573	8.175	79.633	243.678	39.775	55.660
Kab. Tasikmalaya	326.111	1.516	129.195	1.976	3.121	55.023	197.447	22.638	35.459
Kab. Ciamis	195.643	417	123.045	-	1.263	43.757	149.582	22.856	36.967
Kab. Kuningan	132.775	606	39.177	1.784	2.109	38.370	114.890	15.691	49.250
Kab. Cirebon	103.818	6.139	200.594	3.093	6.656	99.589	229.137	38.238	103.463
Kab. Majalengka	174.418	3.152	130.817	1.593	1.913	37.563	125.205	16.443	58.100
Kab. Sumedang	148.643	5.532	94.058	2.638	478	51.224	118.955	23.648	39.096
Kab. Indramayu	281.099	5.130	77.844	1.422	4.035	52.077	191.198	32.369	93.506
Kab. Subang	227.800	4.525	121.343	1.078	6.209	42.380	153.550	32.174	46.417
Kab. Purwakarta	62.548	3.546	84.501	1.063	5.482	40.456	89.063	11.890	24.977
Kab. Karawang	166.937	1.063	227.674	3.256	14.521	84.252	209.537	39.768	104.487
Kab. Bekasi	68.500	3.545	459.856	472	45.611	93.449	371.472	110.825	128.910
Kab. Bandung Barat	167.705	125	99.385	2.247	9.904	75.661	132.304	33.513	33.058
Kab. Pangandaran	66.213	1.025	45.504	153	1.708	18.568	48.251	5.810	16.142
Kota Bogor	6.458	774	63.349	871	1.434	30.725	102.107	30.276	58.980
Kota Sukabumi	4.914	354	20.749	325	173	8.034	36.699	9.077	10.690
Kota Bandung	5.708	4.069	198.106	959	5.842	54.833	363.706	84.620	127.156
Kota Cirebon	2.444	1.096	16.036	329	974	9.598	42.933	9.332	20.754
Kota Bekasi	6.949	6.396	209.136	5.141	7.503	79.304	302.975	122.109	147.379
Kota Depok	9.530	2.763	135.447	5.303	8.431	55.582	256.140	104.314	81.307
Kota Cimahi	1.548	856	70.221	710	754	12.657	63.801	12.681	24.963
Kota Tasikmalaya	13.485	1.621	80.753	495	262	16.951	86.744	13.653	39.393
Kota Banjar	12.506	134	15.354	311	116	8.657	21.877	3.585	8.598
Jawa Barat	3.665.050	95.256	4.023.782	50.482	167.963	1.520.534	4.975.155	1.121.914	1.804.736

Catatan/*Note*:

*) A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan *; B. Pertambangan dan Penggalian;* C. Industri Pengolahan *; D. Pengadaan Listrik dan Gas ; E. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; F. Konstruksi; G. Perdagangan besar dan eceran;; H. Transportasi dan Pergudangan;* I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Tabel 4.11.1. **L a n j u t a n**

Kabupaten	Lapangan Pekerjaan Utama								Jumlah
	J	K	L	M,N	O	P	Q	R,S,T,U	
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Kab. Bogor	26.286	42.830	26.554	53.080	44.141	99.503	53.045	196.990	2.342.939
Kab. Sukabumi	9.242	2.468	3.866	3.718	10.920	40.415	6.845	54.399	1.036.735
Kab. Cianjur	3.768	5.931	1.614	2.973	17.178	43.550	8.146	43.220	1.054.579
Kab. Bandung	13.544	23.519	6.323	12.935	32.546	48.275	20.160	73.597	1.569.974
Kab. Garut	3.537	2.366	-	12.221	15.532	36.400	6.670	70.464	1.052.573
Kab. Tasikmalaya	5.909	4.103	1.395	8.238	7.990	37.924	5.284	34.087	877.416
Kab. Ciamis	3.371	2.186	-	6.050	7.237	25.760	5.169	17.464	640.767
Kab. Kuningan	2.316	4.817	1.725	5.273	7.246	24.207	3.347	19.581	463.164
Kab. Cirebon	2.672	9.933	1.013	8.687	15.302	29.170	8.609	72.104	938.217
Kab. Majalengka	1.701	5.584	-	2.843	11.133	23.047	5.925	26.139	625.576
Kab. Sumedang	4.469	3.973	1.289	2.209	18.721	40.046	4.890	14.737	574.606
Kab. Indramayu	6.380	5.512	1.431	3.302	16.803	29.087	6.601	46.249	854.045
Kab. Subang	-	6.013	1.127	7.516	16.496	32.878	9.322	37.456	746.284
Kab. Purwakarta	4.304	3.191	935	1.331	9.366	14.531	3.575	23.784	384.543
Kab. Karawang	6.513	7.649	3.536	19.699	13.601	38.322	12.577	75.343	1.028.735
Kab. Bekasi	21.111	18.424	15.203	60.106	33.294	71.329	33.516	92.608	1.628.231
Kab. Bandung Barat	4.608	4.487	876	9.305	15.481	28.186	2.612	36.630	656.087
Kab. Pangandaran	205	1.477	-	4.212	5.144	7.900	1.896	8.935	233.143
Kota Bogor	7.681	12.913	5.283	18.010	15.335	26.801	12.887	55.236	449.120
Kota Sukabumi	1.017	2.433	818	2.951	5.273	8.901	2.935	7.319	122.662
Kota Bandung	20.894	28.251	11.673	51.411	51.214	54.123	22.044	83.240	1.167.849
Kota Cirebon	1.344	4.151	527	2.189	2.854	8.726	4.356	11.691	139.334
Kota Bekasi	38.820	46.425	19.230	45.050	71.351	74.929	38.637	127.196	1.348.530
Kota Depok	31.045	47.123	15.679	53.621	59.117	65.917	26.521	119.760	1.077.600
Kota Cimahi	1.646	4.579	1.493	6.922	9.375	15.571	3.985	22.937	254.699
Kota Tasikmalaya	2.185	7.299	301	2.106	7.614	17.840	3.911	21.231	315.844
Kota Banjar	643	1.111	-	1.172	4.656	4.175	4.016	4.691	91.602
Jawa Barat	225.211	308.748	121.891	407.130	524.920	947.513	317.481	1.397.088	21.674.854

Catatan/*Note*:

) J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa keuangan dan asuransi; L. Real Estat; M,N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;* P. Jasa Pendidikan*; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;* R,S,T,U. Jasa Lainnya.

Tabel 4.11.2. Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama *(Agustus 2020)*

Kabupaten/Kota	Lapangan Pekerjaan Utama								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kab. Bogor	178.627	16.991	315.518	1.994	13.801	177.295	309.062	124.413	112.934
Kab. Sukabumi	216.058	10.962	87.478	2.031	1.072	76.599	138.252	47.379	31.350
Kab. Cianjur	266.854	5.783	70.053	880	2.145	76.423	115.718	32.608	34.439
Kab. Bandung	140.361	2.013	283.112	7.884	8.633	96.432	201.863	77.670	50.274
Kab. Garut	192.058	3.904	103.693	1.573	6.700	78.918	132.958	38.327	31.152
Kab. Tasikmalaya	175.886	1.516	74.691	1.976	3.121	55.023	107.647	22.638	20.359
Kab. Ciamis	106.597	417	63.281	-	1.263	43.433	79.653	22.856	22.158
Kab. Kuningan	85.897	606	24.470	1.784	639	37.940	60.254	14.747	23.024
Kab. Cirebon	82.839	5.477	113.719	1.257	6.086	98.789	113.257	37.163	50.785
Kab. Majalengka	113.123	3.152	63.503	1.593	1.130	37.122	73.706	15.893	25.752
Kab. Sumedang	86.888	5.532	48.122	2.216	478	51.224	55.950	22.601	16.963
Kab. Indramayu	218.415	5.130	51.991	1.422	4.035	50.863	79.496	31.704	33.849
Kab. Subang	158.938	4.525	52.170	1.078	6.209	42.024	85.954	32.174	20.681
Kab. Purwakarta	44.150	3.546	55.435	1.063	4.729	40.108	51.436	11.890	13.301
Kab. Karawang	138.421	1.063	158.205	1.922	14.521	81.375	111.638	39.768	51.278
Kab. Bekasi	50.167	3.545	322.911	472	37.514	87.887	192.609	101.263	63.698
Kab. Bandung Barat	114.834	125	69.055	2.247	6.922	75.661	73.582	33.513	19.777
Kab. Pangandaran	40.050	796	24.032	153	848	18.388	23.775	5.810	4.860
Kota Bogor	5.250	774	45.105	871	598	28.845	60.262	29.086	29.924
Kota Sukabumi	4.296	354	11.285	325	173	8.034	24.127	8.726	5.463
Kota Bandung	3.508	2.702	115.980	959	4.246	52.616	199.742	77.255	62.525
Kota Cirebon	1.867	1.096	10.488	329	537	9.397	22.994	8.876	9.973
Kota Bekasi	6.949	4.459	140.301	3.384	4.924	70.981	168.930	111.034	71.313
Kota Depok	8.154	2.208	86.050	5.303	6.468	52.514	138.482	94.691	43.532
Kota Cimahi	1.548	572	39.983	710	412	12.293	39.297	12.438	13.371
Kota Tasikmalaya	9.154	1.621	52.307	495	262	16.347	48.711	12.945	17.377
Kota Banjar	7.833	134	7.490	311	116	8.657	10.711	3.497	2.851
Jawa Barat	2.458.722	89.003	2.490.428	44.232	137.582	1.485.188	2.720.066	1.070.965	882.963

Catatan/*Note*:

*) A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan *; B. Pertambangan dan Penggalian;* C. Industri Pengolahan *; D. Pengadaan Listrik dan Gas ; E. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; F. Konstruksi; G. Perdagangan besar dan eceran;; H. Transportasi dan Pergudangan;* I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Tabel 4.11.2. **L a n j u t a n**

Kabupaten	Lapangan Pekerjaan Utama								Jumlah
	J	K	L	M,N	O	P	Q	R,S,T,U	
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Kab. Bogor	19.240	22.643	20.807	42.752	36.736	43.315	22.091	85.507	1.543.726
Kab. Sukabumi	7.933	1.605	3.032	3.718	9.695	22.690	4.321	32.733	696.908
Kab. Cianjur	3.768	4.051	1.614	2.973	15.696	23.267	2.522	14.096	672.890
Kab. Bandung	11.871	15.057	6.323	12.686	25.253	28.437	7.246	38.216	1.013.331
Kab. Garut	3.537	1.758	-	8.890	10.649	15.355	3.871	50.616	683.959
Kab. Tasikmalaya	2.334	4.103	1.395	7.103	5.589	13.259	1.562	22.283	520.485
Kab. Ciamis	1.940	1.605	-	4.563	6.141	10.033	2.404	8.206	374.550
Kab. Kuningan	2.316	3.227	1.725	4.293	6.477	12.730	1.510	11.168	292.807
Kab. Cirebon	1.506	4.604	1.013	4.968	12.160	18.118	4.785	40.200	596.726
Kab. Majalengka	-	2.347	-	2.843	10.631	11.187	3.107	11.067	376.156
Kab. Sumedang	4.105	3.063	643	1.870	15.098	21.214	989	7.499	344.455
Kab. Indramayu	3.097	5.512	-	2.545	14.728	12.047	3.167	24.914	542.915
Kab. Subang	-	5.138	610	7.516	11.136	14.639	3.389	22.521	468.702
Kab. Purwakarta	3.219	2.286	935	1.331	6.973	7.618	1.104	14.076	263.200
Kab. Karawang	4.595	3.870	2.478	18.933	10.239	11.906	3.951	33.518	687.681
Kab. Bekasi	17.356	8.238	13.128	53.854	21.940	33.245	15.343	46.868	1.070.038
Kab. Bandung Barat	2.816	3.693	393	7.922	12.535	12.128	766	20.411	456.380
Kab. Pangandaran	-	507	-	3.045	3.703	3.650	515	4.439	134.571
Kota Bogor	4.210	7.007	5.016	15.003	12.965	12.309	5.041	33.247	295.513
Kota Sukabumi	575	1.846	223	2.230	3.603	3.902	1.512	3.651	80.325
Kota Bandung	15.414	17.171	8.613	35.105	36.421	24.148	7.822	55.748	719.975
Kota Cirebon	732	2.739	358	1.354	2.554	3.543	1.958	5.925	84.720
Kota Bekasi	24.316	28.453	14.446	31.063	46.007	33.582	11.539	58.852	830.533
Kota Depok	20.844	28.139	10.052	41.461	48.242	22.976	10.423	55.444	674.983
Kota Cimahi	861	2.705	1.493	5.457	7.152	6.264	1.186	14.606	160.348
Kota Tasikmalaya	870	4.762	301	1.420	6.688	7.723	1.196	9.454	191.633
Kota Banjar	382	411	-	1.172	3.047	1.708	1.914	1.949	52.183
Jawa Barat	157.837	186.540	94.598	326.070	402.058	430.993	125.234	727.214	13.829.693

Catatan/*Note*:

) J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa keuangan dan asuransi; L. Real Estat; M,N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;* P. Jasa Pendidikan*; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;* R,S,T,U. Jasa Lainnya.

Tabel 4.11.3. Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama *(Agustus 2020)*

Kabupaten/Kota	Lapangan Pekerjaan Utama								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kab. Bogor	57.392	-	147.538	-	-	3.978	223.484	4.559	112.924
Kab. Sukabumi	103.281	1.219	80.917	901	-	987	80.842	-	25.534
Kab. Cianjur	143.784	-	50.363	-	-	477	92.405	-	36.267
Kab. Bandung	65.388	-	181.227	-	5.638	-	162.278	-	56.302
Kab. Garut	115.495	-	61.739	-	1.475	715	110.720	1.448	24.508
Kab. Tasikmalaya	150.225	-	54.504	-	-	-	89.800	-	15.100
Kab. Ciamis	89.046	-	59.764	-	-	324	69.929	-	14.809
Kab. Kuningan	46.878	-	14.707	-	1.470	430	54.636	944	26.226
Kab. Cirebon	20.979	662	86.875	1.836	570	800	115.880	1.075	52.678
Kab. Majalengka	61.295	-	67.314	-	783	441	51.499	550	32.348
Kab. Sumedang	61.755	-	45.936	422	-	-	63.005	1.047	22.133
Kab. Indramayu	62.684	-	25.853	-	-	1.214	111.702	665	59.657
Kab. Subang	68.862	-	69.173	-	-	356	67.596	-	25.736
Kab. Purwakarta	18.398	-	29.066	-	753	348	37.627	-	11.676
Kab. Karawang	28.516	-	69.469	1.334	-	2.877	97.899	-	53.209
Kab. Bekasi	18.333	-	136.945	-	8.097	5.562	178.863	9.562	65.212
Kab. Bandung Barat	52.871	-	30.330	-	2.982	-	58.722	-	13.281
Kab. Pangandaran	26.163	229	21.472	-	860	180	24.476	-	11.282
Kota Bogor	1.208	-	18.244	-	836	1.880	41.845	1.190	29.056
Kota Sukabumi	618	-	9.464	-	-	-	12.572	351	5.227
Kota Bandung	2.200	1.367	82.126	-	1.596	2.217	163.964	7.365	64.631
Kota Cirebon	577	-	5.548	-	437	201	19.939	456	10.781
Kota Bekasi	-	1.937	68.835	1.757	2.579	8.323	134.045	11.075	76.066
Kota Depok	1.376	555	49.397	-	1.963	3.068	117.658	9.623	37.775
Kota Cimahi	-	284	30.238	-	342	364	24.504	243	11.592
Kota Tasikmalaya	4.331	-	28.446	-	-	604	38.033	708	22.016
Kota Banjar	4.673	-	7.864	-	-	-	11.166	88	5.747
Jawa Barat	1.206.328	6.253	1.533.354	6.250	30.381	35.346	2.255.089	50.949	921.773

Catatan/*Note*:

*) A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan *; B. Pertambangan dan Penggalian;* C. Industri Pengolahan *; D. Pengadaan Listrik dan Gas ; E. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; F. Konstruksi; G. Perdagangan besar dan eceran;; H. Transportasi dan Pergudangan;* I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Tabel 4.11.3. **L a n j u t a n**

Kabupaten	Lapangan Pekerjaan Utama								Jumlah
	J	K	L	M,N	O	P	Q	R,S,T,U	
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Kab. Bogor	7.046	20.187	5.747	10.328	7.405	56.188	30.954	111.483	799.213
Kab. Sukabumi	1.309	863	834	-	1.225	17.725	2.524	21.666	339.827
Kab. Cianjur	-	1.880	-	-	1.482	20.283	5.624	29.124	381.689
Kab. Bandung	1.673	8.462	-	249	7.293	19.838	12.914	35.381	556.643
Kab. Garut	-	608	-	3.331	4.883	21.045	2.799	19.848	368.614
Kab. Tasikmalaya	3.575	-	-	1.135	2.401	24.665	3.722	11.804	356.931
Kab. Ciamis	1.431	581	-	1.487	1.096	15.727	2.765	9.258	266.217
Kab. Kuningan	-	1.590	-	980	769	11.477	1.837	8.413	170.357
Kab. Cirebon	1.166	5.329	-	3.719	3.142	11.052	3.824	31.904	341.491
Kab. Majalengka	1.701	3.237	-	-	502	11.860	2.818	15.072	249.420
Kab. Sumedang	364	910	646	339	3.623	18.832	3.901	7.238	230.151
Kab. Indramayu	3.283	-	1.431	757	2.075	17.040	3.434	21.335	311.130
Kab. Subang	-	875	517	-	5.360	18.239	5.933	14.935	277.582
Kab. Purwakarta	1.085	905	-	-	2.393	6.913	2.471	9.708	121.343
Kab. Karawang	1.918	3.779	1.058	766	3.362	26.416	8.626	41.825	341.054
Kab. Bekasi	3.755	10.186	2.075	6.252	11.354	38.084	18.173	45.740	558.193
Kab. Bandung Barat	1.792	794	483	1.383	2.946	16.058	1.846	16.219	199.707
Kab. Pangandaran	205	970	-	1.167	1.441	4.250	1.381	4.496	98.572
Kota Bogor	3.471	5.906	267	3.007	2.370	14.492	7.846	21.989	153.607
Kota Sukabumi	442	587	595	721	1.670	4.999	1.423	3.668	42.337
Kota Bandung	5.480	11.080	3.060	16.306	14.793	29.975	14.222	27.492	447.874
Kota Cirebon	612	1.412	169	835	300	5.183	2.398	5.766	54.614
Kota Bekasi	14.504	17.972	4.784	13.987	25.344	41.347	27.098	68.344	517.997
Kota Depok	10.201	18.984	5.627	12.160	10.875	42.941	16.098	64.316	402.617
Kota Cimahi	785	1.874	-	1.465	2.223	9.307	2.799	8.331	94.351
Kota Tasikmalaya	1.315	2.537	-	686	926	10.117	2.715	11.777	124.211
Kota Banjar	261	700	-	-	1.609	2.467	2.102	2.742	39.419
Jawa Barat	67.374	122.208	27.293	81.060	122.862	516.520	192.247	669.874	7.845.161

Catatan/*Note*:

) J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa keuangan dan asuransi; L. Real Estat; M,N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;* P. Jasa Pendidikan*; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;* R,S,T,U. Jasa Lainnya.

Tabel 4.12.1. Persentase Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama *(Agustus 2020)*

Kabupaten/Kota	Lapangan Pekerjaan Utama								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kab. Bogor	10,07	0,73	19,76	0,09	0,59	7,74	22,73	5,50	9,64
Kab. Sukabumi	30,80	1,17	16,24	0,28	0,10	7,48	21,13	4,57	5,49
Kab. Cianjur	38,94	0,55	11,42	0,08	0,20	7,29	19,74	3,09	6,70
Kab. Bandung	13,11	0,13	29,58	0,50	0,91	6,14	23,19	4,95	6,79
Kab. Garut	29,22	0,37	15,72	0,15	0,78	7,57	23,15	3,78	5,29
Kab. Tasikmalaya	37,17	0,17	14,72	0,23	0,36	6,27	22,50	2,58	4,04
Kab. Ciamis	30,53	0,07	19,20	-	0,20	6,83	23,34	3,57	5,77
Kab. Kuningan	28,67	0,13	8,46	0,39	0,46	8,28	24,81	3,39	10,63
Kab. Cirebon	11,07	0,65	21,38	0,33	0,71	10,61	24,42	4,08	11,03
Kab. Majalengka	27,88	0,50	20,91	0,25	0,31	6,00	20,01	2,63	9,29
Kab. Sumedang	25,87	0,96	16,37	0,46	0,08	8,91	20,70	4,12	6,80
Kab. Indramayu	32,91	0,60	9,11	0,17	0,47	6,10	22,39	3,79	10,95
Kab. Subang	30,52	0,61	16,26	0,14	0,83	5,68	20,58	4,31	6,22
Kab. Purwakarta	16,27	0,92	21,97	0,28	1,43	10,52	23,16	3,09	6,50
Kab. Karawang	16,23	0,10	22,13	0,32	1,41	8,19	20,37	3,87	10,16
Kab. Bekasi	4,21	0,22	28,24	0,03	2,80	5,74	22,81	6,81	7,92
Kab. Bandung Barat	25,56	0,02	15,15	0,34	1,51	11,53	20,17	5,11	5,04
Kab. Pangandaran	28,40	0,44	19,52	0,07	0,73	7,96	20,70	2,49	6,92
Kota Bogor	1,44	0,17	14,11	0,19	0,32	6,84	22,73	6,74	13,13
Kota Sukabumi	4,01	0,29	16,92	0,26	0,14	6,55	29,92	7,40	8,72
Kota Bandung	0,49	0,35	16,96	0,08	0,50	4,70	31,14	7,25	10,89
Kota Cirebon	1,75	0,79	11,51	0,24	0,70	6,89	30,81	6,70	14,90
Kota Bekasi	0,52	0,47	15,51	0,38	0,56	5,88	22,47	9,05	10,93
Kota Depok	0,88	0,26	12,57	0,49	0,78	5,16	23,77	9,68	7,55
Kota Cimahi	0,61	0,34	27,57	0,28	0,30	4,97	25,05	4,98	9,80
Kota Tasikmalaya	4,27	0,51	25,57	0,16	0,08	5,37	27,46	4,32	12,47
Kota Banjar	13,65	0,15	16,76	0,34	0,13	9,45	23,88	3,91	9,39
Jawa Barat	16,91	0,44	18,56	0,23	0,77	7,02	22,95	5,18	8,33

Catatan/*Note*:

*) A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan *; B. Pertambangan dan Penggalian;* C. Industri Pengolahan *; D. Pengadaan Listrik dan Gas ; E. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; F. Konstruksi; G. Perdagangan besar dan eceran;; H. Transportasi dan Pergudangan;* I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Tabel 4.12.1. **L a n j u t a n**

Kabupaten	Lapangan Pekerjaan Utama								Jumlah
	J	K	L	M,N	O	P	Q	R,S,T,U	
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Kab. Bogor	1,12	1,83	1,13	2,27	1,88	4,25	2,26	8,41	100,00
Kab. Sukabumi	0,89	0,24	0,37	0,36	1,05	3,90	0,66	5,25	100,00
Kab. Cianjur	0,36	0,56	0,15	0,28	1,63	4,13	0,77	4,10	100,00
Kab. Bandung	0,86	1,50	0,40	0,82	2,07	3,07	1,28	4,69	100,00
Kab. Garut	0,34	0,22	-	1,16	1,48	3,46	0,63	6,69	100,00
Kab. Tasikmalaya	0,67	0,47	0,16	0,94	0,91	4,32	0,60	3,88	100,00
Kab. Ciamis	0,53	0,34	-	0,94	1,13	4,02	0,81	2,73	100,00
Kab. Kuningan	0,50	1,04	0,37	1,14	1,56	5,23	0,72	4,23	100,00
Kab. Cirebon	0,28	1,06	0,11	0,93	1,63	3,11	0,92	7,69	100,00
Kab. Majalengka	0,27	0,89	-	0,45	1,78	3,68	0,95	4,18	100,00
Kab. Sumedang	0,78	0,69	0,22	0,38	3,26	6,97	0,85	2,56	100,00
Kab. Indramayu	0,75	0,65	0,17	0,39	1,97	3,41	0,77	5,42	100,00
Kab. Subang	-	0,81	0,15	1,01	2,21	4,41	1,25	5,02	100,00
Kab. Purwakarta	1,12	0,83	0,24	0,35	2,44	3,78	0,93	6,19	100,00
Kab. Karawang	0,63	0,74	0,34	1,91	1,32	3,73	1,22	7,32	100,00
Kab. Bekasi	1,30	1,13	0,93	3,69	2,04	4,38	2,06	5,69	100,00
Kab. Bandung Barat	0,70	0,68	0,13	1,42	2,36	4,30	0,40	5,58	100,00
Kab. Pangandaran	0,09	0,63	-	1,81	2,21	3,39	0,81	3,83	100,00
Kota Bogor	1,71	2,88	1,18	4,01	3,41	5,97	2,87	12,30	100,00
Kota Sukabumi	0,83	1,98	0,67	2,41	4,30	7,26	2,39	5,97	100,00
Kota Bandung	1,79	2,42	1,00	4,40	4,39	4,63	1,89	7,13	100,00
Kota Cirebon	0,96	2,98	0,38	1,57	2,05	6,26	3,13	8,39	100,00
Kota Bekasi	2,88	3,44	1,43	3,34	5,29	5,56	2,87	9,43	100,00
Kota Depok	2,88	4,37	1,45	4,98	5,49	6,12	2,46	11,11	100,00
Kota Cimahi	0,65	1,80	0,59	2,72	3,68	6,11	1,56	9,01	100,00
Kota Tasikmalaya	0,69	2,31	0,10	0,67	2,41	5,65	1,24	6,72	100,00
Kota Banjar	0,70	1,21	-	1,28	5,08	4,56	4,38	5,12	100,00
Jawa Barat	1,04	1,42	0,56	1,88	2,42	4,37	1,46	6,45	100,00

Catatan/*Note*:

) J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa keuangan dan asuransi; L. Real Estat; M,N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;* P. Jasa Pendidikan*; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;* R,S,T,U. Jasa Lainnya.

Tabel 4.12.2. Persentase Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama *(Agustus 2020)*

Kabupaten/Kota	Lapangan Pekerjaan Utama								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kab. Bogor	11,57	1,10	20,44	0,13	0,89	11,48	20,02	8,06	7,32
Kab. Sukabumi	31,00	1,57	12,55	0,29	0,15	10,99	19,84	6,80	4,50
Kab. Cianjur	39,66	0,86	10,41	0,13	0,32	11,36	17,20	4,85	5,12
Kab. Bandung	13,85	0,20	27,94	0,78	0,85	9,52	19,92	7,66	4,96
Kab. Garut	28,08	0,57	15,16	0,23	0,98	11,54	19,44	5,60	4,55
Kab. Tasikmalaya	33,79	0,29	14,35	0,38	0,60	10,57	20,68	4,35	3,91
Kab. Ciamis	28,46	0,11	16,90	-	0,34	11,60	21,27	6,10	5,92
Kab. Kuningan	29,34	0,21	8,36	0,61	0,22	12,96	20,58	5,04	7,86
Kab. Cirebon	13,88	0,92	19,06	0,21	1,02	16,56	18,98	6,23	8,51
Kab. Majalengka	30,07	0,84	16,88	0,42	0,30	9,87	19,59	4,23	6,85
Kab. Sumedang	25,22	1,61	13,97	0,64	0,14	14,87	16,24	6,56	4,92
Kab. Indramayu	40,23	0,94	9,58	0,26	0,74	9,37	14,64	5,84	6,23
Kab. Subang	33,91	0,97	11,13	0,23	1,32	8,97	18,34	6,86	4,41
Kab. Purwakarta	16,77	1,35	21,06	0,40	1,80	15,24	19,54	4,52	5,05
Kab. Karawang	20,13	0,15	23,01	0,28	2,11	11,83	16,23	5,78	7,46
Kab. Bekasi	4,69	0,33	30,18	0,04	3,51	8,21	18,00	9,46	5,95
Kab. Bandung Barat	25,16	0,03	15,13	0,49	1,52	16,58	16,12	7,34	4,33
Kab. Pangandaran	29,76	0,59	17,86	0,11	0,63	13,66	17,67	4,32	3,61
Kota Bogor	1,78	0,26	15,26	0,29	0,20	9,76	20,39	9,84	10,13
Kota Sukabumi	5,35	0,44	14,05	0,40	0,22	10,00	30,04	10,86	6,80
Kota Bandung	0,49	0,38	16,11	0,13	0,59	7,31	27,74	10,73	8,68
Kota Cirebon	2,20	1,29	12,38	0,39	0,63	11,09	27,14	10,48	11,77
Kota Bekasi	0,84	0,54	16,89	0,41	0,59	8,55	20,34	13,37	8,59
Kota Depok	1,21	0,33	12,75	0,79	0,96	7,78	20,52	14,03	6,45
Kota Cimahi	0,97	0,36	24,94	0,44	0,26	7,67	24,51	7,76	8,34
Kota Tasikmalaya	4,78	0,85	27,30	0,26	0,14	8,53	25,42	6,76	9,07
Kota Banjar	15,01	0,26	14,35	0,60	0,22	16,59	20,53	6,70	5,46
Jawa Barat	17,78	0,64	18,01	0,32	0,99	10,74	19,67	7,74	6,38

Catatan/*Note*:

*) A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan *; B. Pertambangan dan Penggalian;* C. Industri Pengolahan *; D. Pengadaan Listrik dan Gas ; E. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; F. Konstruksi; G. Perdagangan besar dan eceran;; H. Transportasi dan Pergudangan;* I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Tabel 4.12.2. **L a n j u t a n**

Kabupaten	Lapangan Pekerjaan Utama								Jumlah
	J	K	L	M,N	O	P	Q	R,S,T,U	
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Kab. Bogor	1,25	1,47	1,35	2,77	2,38	2,81	1,43	5,54	100,00
Kab. Sukabumi	1,14	0,23	0,44	0,53	1,39	3,26	0,62	4,70	100,00
Kab. Cianjur	0,56	0,60	0,24	0,44	2,33	3,46	0,37	2,09	100,00
Kab. Bandung	1,17	1,49	0,62	1,25	2,49	2,81	0,72	3,77	100,00
Kab. Garut	0,52	0,26	-	1,30	1,56	2,25	0,57	7,40	100,00
Kab. Tasikmalaya	0,45	0,79	0,27	1,36	1,07	2,55	0,30	4,28	100,00
Kab. Ciamis	0,52	0,43	-	1,22	1,64	2,68	0,64	2,19	100,00
Kab. Kuningan	0,79	1,10	0,59	1,47	2,21	4,35	0,52	3,81	100,00
Kab. Cirebon	0,25	0,77	0,17	0,83	2,04	3,04	0,80	6,74	100,00
Kab. Majalengka	-	0,62	-	0,76	2,83	2,97	0,83	2,94	100,00
Kab. Sumedang	1,19	0,89	0,19	0,54	4,38	6,16	0,29	2,18	100,00
Kab. Indramayu	0,57	1,02	-	0,47	2,71	2,22	0,58	4,59	100,00
Kab. Subang	-	1,10	0,13	1,60	2,38	3,12	0,72	4,80	100,00
Kab. Purwakarta	1,22	0,87	0,36	0,51	2,65	2,89	0,42	5,35	100,00
Kab. Karawang	0,67	0,56	0,36	2,75	1,49	1,73	0,57	4,87	100,00
Kab. Bekasi	1,62	0,77	1,23	5,03	2,05	3,11	1,43	4,38	100,00
Kab. Bandung Barat	0,62	0,81	0,09	1,74	2,75	2,66	0,17	4,47	100,00
Kab. Pangandaran	-	0,38	-	2,26	2,75	2,71	0,38	3,30	100,00
Kota Bogor	1,42	2,37	1,70	5,08	4,39	4,17	1,71	11,25	100,00
Kota Sukabumi	0,72	2,30	0,28	2,78	4,49	4,86	1,88	4,55	100,00
Kota Bandung	2,14	2,38	1,20	4,88	5,06	3,35	1,09	7,74	100,00
Kota Cirebon	0,86	3,23	0,42	1,60	3,01	4,18	2,31	6,99	100,00
Kota Bekasi	2,93	3,43	1,74	3,74	5,54	4,04	1,39	7,09	100,00
Kota Depok	3,09	4,17	1,49	6,14	7,15	3,40	1,54	8,21	100,00
Kota Cimahi	0,54	1,69	0,93	3,40	4,46	3,91	0,74	9,11	100,00
Kota Tasikmalaya	0,45	2,48	0,16	0,74	3,49	4,03	0,62	4,93	100,00
Kota Banjar	0,73	0,79	-	2,25	5,84	3,27	3,67	3,73	100,00
Jawa Barat	1,14	1,35	0,68	2,36	2,91	3,12	0,91	5,26	100,00

Catatan/*Note*:

) J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa keuangan dan asuransi; L. Real Estat; M,N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;* P. Jasa Pendidikan*; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;* R,S,T,U. Jasa Lainnya.

Tabel 4.12.3. Persentase Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama *(Agustus 2020)*

Kabupaten/Kota	Lapangan Pekerjaan Utama								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kab. Bogor	7,18	-	18,46	-	-	0,50	27,96	0,57	14,13
Kab. Sukabumi	30,39	0,36	23,81	0,27	-	0,29	23,79	-	7,51
Kab. Cianjur	37,67	-	13,19	-	-	0,12	24,21	-	9,50
Kab. Bandung	11,75	-	32,56	-	1,01	-	29,15	-	10,11
Kab. Garut	31,33	-	16,75	-	0,40	0,19	30,04	0,39	6,65
Kab. Tasikmalaya	42,09	-	15,27	-	-	-	25,16	-	4,23
Kab. Ciamis	33,45	-	22,45	-	-	0,12	26,27	-	5,56
Kab. Kuningan	27,52	-	8,63	-	0,86	0,25	32,07	0,55	15,39
Kab. Cirebon	6,14	0,19	25,44	0,54	0,17	0,23	33,93	0,31	15,43
Kab. Majalengka	24,58	-	26,99	-	0,31	0,18	20,65	0,22	12,97
Kab. Sumedang	26,83	-	19,96	0,18	-	-	27,38	0,45	9,62
Kab. Indramayu	20,15	-	8,31	-	-	0,39	35,90	0,21	19,17
Kab. Subang	24,81	-	24,92	-	-	0,13	24,35	-	9,27
Kab. Purwakarta	15,16	-	23,95	-	0,62	0,29	31,01	-	9,62
Kab. Karawang	8,36	-	20,37	0,39	-	0,84	28,70	-	15,60
Kab. Bekasi	3,28	-	24,53	-	1,45	1,00	32,04	1,71	11,68
Kab. Bandung Barat	26,47	-	15,19	-	1,49	-	29,40	-	6,65
Kab. Pangandaran	26,54	0,23	21,78	-	0,87	0,18	24,83	-	11,45
Kota Bogor	0,79	-	11,88	-	0,54	1,22	27,24	0,77	18,92
Kota Sukabumi	1,46	-	22,35	-	-	-	29,70	0,83	12,35
Kota Bandung	0,49	0,31	18,34	-	0,36	0,50	36,61	1,64	14,43
Kota Cirebon	1,06	-	10,16	-	0,80	0,37	36,51	0,83	19,74
Kota Bekasi	-	0,37	13,29	0,34	0,50	1,61	25,88	2,14	14,68
Kota Depok	0,34	0,14	12,27	-	0,49	0,76	29,22	2,39	9,38
Kota Cimahi	-	0,30	32,05	-	0,36	0,39	25,97	0,26	12,29
Kota Tasikmalaya	3,49	-	22,90	-	-	0,49	30,62	0,57	17,72
Kota Banjar	11,85	-	19,95	-	-	-	28,33	0,22	14,58
Jawa Barat	15,38	0,08	19,55	0,08	0,39	0,45	28,74	0,65	11,75

Catatan/*Note*:

*) A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan *; B. Pertambangan dan Penggalian;* C. Industri Pengolahan *; D. Pengadaan Listrik dan Gas ; E. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; F. Konstruksi; G. Perdagangan besar dan eceran;; H. Transportasi dan Pergudangan;* I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Tabel 4.12.3. **L a n j u t a n**

Kabupaten	Lapangan Pekerjaan Utama								Jumlah
	J	K	L	M,N	O	P	Q	R,S,T,U	
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Kab. Bogor	0,88	2,53	0,72	1,29	0,93	7,03	3,87	13,95	100,00
Kab. Sukabumi	0,39	0,25	0,25	-	0,36	5,22	0,74	6,38	100,00
Kab. Cianjur	-	0,49	-	-	0,39	5,31	1,47	7,63	100,00
Kab. Bandung	0,30	1,52	-	0,04	1,31	3,56	2,32	6,36	100,00
Kab. Garut	-	0,16	-	0,90	1,32	5,71	0,76	5,38	100,00
Kab. Tasikmalaya	1,00	-	-	0,32	0,67	6,91	1,04	3,31	100,00
Kab. Ciamis	0,54	0,22	-	0,56	0,41	5,91	1,04	3,48	100,00
Kab. Kuningan	-	0,93	-	0,58	0,45	6,74	1,08	4,94	100,00
Kab. Cirebon	0,34	1,56	-	1,09	0,92	3,24	1,12	9,34	100,00
Kab. Majalengka	0,68	1,30	-	-	0,20	4,76	1,13	6,04	100,00
Kab. Sumedang	0,16	0,40	0,28	0,15	1,57	8,18	1,69	3,14	100,00
Kab. Indramayu	1,06	-	0,46	0,24	0,67	5,48	1,10	6,86	100,00
Kab. Subang	-	0,32	0,19	-	1,93	6,57	2,14	5,38	100,00
Kab. Purwakarta	0,89	0,75	-	-	1,97	5,70	2,04	8,00	100,00
Kab. Karawang	0,56	1,11	0,31	0,22	0,99	7,75	2,53	12,26	100,00
Kab. Bekasi	0,67	1,82	0,37	1,12	2,03	6,82	3,26	8,19	100,00
Kab. Bandung Barat	0,90	0,40	0,24	0,69	1,48	8,04	0,92	8,12	100,00
Kab. Pangandaran	0,21	0,98	-	1,18	1,46	4,31	1,40	4,56	100,00
Kota Bogor	2,26	3,84	0,17	1,96	1,54	9,43	5,11	14,32	100,00
Kota Sukabumi	1,04	1,39	1,41	1,70	3,94	11,81	3,36	8,66	100,00
Kota Bandung	1,22	2,47	0,68	3,64	3,30	6,69	3,18	6,14	100,00
Kota Cirebon	1,12	2,59	0,31	1,53	0,55	9,49	4,39	10,56	100,00
Kota Bekasi	2,80	3,47	0,92	2,70	4,89	7,98	5,23	13,19	100,00
Kota Depok	2,53	4,72	1,40	3,02	2,70	10,67	4,00	15,97	100,00
Kota Cimahi	0,83	1,99	-	1,55	2,36	9,86	2,97	8,83	100,00
Kota Tasikmalaya	1,06	2,04	-	0,55	0,75	8,15	2,19	9,48	100,00
Kota Banjar	0,66	1,78	-	-	4,08	6,26	5,33	6,96	100,00
Jawa Barat	0,86	1,56	0,35	1,03	1,57	6,58	2,45	8,54	100,00

Catatan/*Note*:

) J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa keuangan dan asuransi; L. Real Estat; M,N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;* P. Jasa Pendidikan*; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;* R,S,T,U. Jasa Lainnya.

Tabel 4.13.1. Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utam *(Agustus 2020)*

Kabupaten/Kota	Status Pekerjaan Utama							Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kab. Bogor	592.089	165.333	67.640	1.073.315	91.672	180.918	171.972	2.342.939
Kab. Sukabumi	216.438	152.133	17.646	330.622	112.423	86.572	120.901	1.036.735
Kab. Cianjur	187.711	185.487	51.511	253.382	120.546	101.320	154.622	1.054.579
Kab. Bandung	264.027	178.477	51.363	773.338	73.385	89.793	139.591	1.569.974
Kab. Garut	272.301	159.103	19.534	242.714	104.269	128.239	126.413	1.052.573
Kab. Tasikmalaya	179.888	206.491	25.463	183.316	86.478	75.054	120.726	877.416
Kab. Ciamis	147.187	120.575	14.860	175.695	48.507	35.055	98.888	640.767
Kab. Kuningan	102.912	74.065	24.022	130.276	28.753	34.233	68.903	463.164
Kab. Cirebon	212.545	97.796	32.812	338.584	38.216	120.946	97.318	938.217
Kab. Majalengka	126.441	122.144	22.158	186.219	38.255	51.198	79.161	625.576
Kab. Sumedang	121.441	94.401	16.792	196.642	26.339	38.589	80.402	574.606
Kab. Indramayu	184.689	168.291	28.891	195.504	96.587	80.476	99.607	854.045
Kab. Subang	175.569	104.340	33.237	242.244	68.974	46.791	75.129	746.284
Kab. Purwakarta	68.575	40.463	9.217	166.368	24.325	41.041	34.554	384.543
Kab. Karawang	273.424	68.045	15.176	426.350	98.685	88.980	58.075	1.028.735
Kab. Bekasi	373.071	110.278	37.264	909.570	21.571	89.145	87.332	1.628.231
Kab. Bandung Barat	160.099	69.843	13.944	251.878	48.718	63.841	47.764	656.087
Kab. Pangandaran	33.654	66.180	10.355	49.022	9.355	20.095	44.482	233.143
Kota Bogor	100.518	25.459	11.261	248.552	862	35.860	26.608	449.120
Kota Sukabumi	31.916	7.125	5.574	63.494	1.550	6.447	6.556	122.662
Kota Bandung	309.042	60.554	57.863	622.501	762	35.195	81.932	1.167.849
Kota Cirebon	32.120	12.058	8.274	65.060	187	10.228	11.407	139.334
Kota Bekasi	312.711	62.064	35.732	843.492	1.330	30.562	62.639	1.348.530
Kota Depok	235.976	54.129	40.918	658.774	628	28.159	59.016	1.077.600
Kota Cimahi	53.987	18.139	7.672	141.634	-	12.690	20.577	254.699
Kota Tasikmalaya	75.646	35.206	14.427	143.541	3.887	14.032	29.105	315.844
Kota Banjar	21.660	12.597	2.012	37.558	2.319	5.570	9.886	91.602
Jawa Barat	4.865.637	2.470.776	675.618	8.949.645	1.148.583	1.551.029	2.013.566	21.674.854

Catatan

) 1. Berusaha Sendiri; 2. Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar;* 3. Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar*; 4. Buruh/ Karyawan/ Pegawai;* 5. Pekerja Bebas di Pertanian*; 6. Pekerja Bebas di Non Pertanian;* 7. Pekerja Tak Dibayar

Tabel 4.13.2. Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utam (Agustus 2020)

Kabupaten/Kota	Status Pekerjaan Utama							Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kab. Bogor	374.025	89.405	57.544	743.438	64.271	156.134	58.909	1.543.726
Kab. Sukabumi	178.322	102.779	16.206	216.094	82.459	76.715	24.333	696.908
Kab. Cianjur	126.188	134.992	41.946	165.535	81.125	84.408	38.696	672.890
Kab. Bandung	183.968	100.898	41.828	536.991	48.326	66.820	34.500	1.013.331
Kab. Garut	197.063	96.396	17.593	159.329	62.040	106.208	45.330	683.959
Kab. Tasikmalaya	114.773	123.868	20.800	123.515	49.846	65.249	22.434	520.485
Kab. Ciamis	97.080	67.010	11.602	116.960	29.061	31.370	21.467	374.550
Kab. Kuningan	66.425	54.912	21.304	84.489	15.802	29.725	20.150	292.807
Kab. Cirebon	124.605	50.432	27.017	226.813	26.908	97.556	43.395	596.726
Kab. Majalengka	71.919	82.763	18.647	114.840	24.488	39.882	23.617	376.156
Kab. Sumedang	70.932	60.054	13.480	129.054	17.086	35.046	18.803	344.455
Kab. Indramayu	97.523	105.902	24.526	145.341	68.722	72.226	28.675	542.915
Kab. Subang	111.555	73.977	27.372	145.049	50.657	38.929	21.163	468.702
Kab. Purwakarta	45.784	22.731	8.745	118.920	16.904	37.342	12.774	263.200
Kab. Karawang	185.267	36.851	12.674	283.053	81.265	73.734	14.837	687.681
Kab. Bekasi	214.889	62.415	36.542	647.996	15.414	69.049	23.733	1.070.038
Kab. Bandung Barat	108.567	45.481	13.044	192.100	32.975	51.394	12.819	456.380
Kab. Pangandaran	16.907	44.270	7.062	33.675	5.914	18.335	8.408	134.571
Kota Bogor	67.259	17.147	9.146	164.754	862	30.454	5.891	295.513
Kota Sukabumi	21.635	4.687	4.996	40.337	1.388	5.279	2.003	80.325
Kota Bandung	192.961	29.437	45.029	400.497	762	27.382	23.907	719.975
Kota Cirebon	17.658	4.985	6.927	41.507	187	9.400	4.056	84.720
Kota Bekasi	185.782	34.110	27.412	542.865	1.330	22.260	16.774	830.533
Kota Depok	152.043	28.913	30.196	424.368	628	21.652	17.183	674.983
Kota Cimahi	35.064	11.042	6.710	90.103	-	9.588	7.841	160.348
Kota Tasikmalaya	43.320	19.038	11.500	97.221	2.329	11.029	7.196	191.633
Kota Banjar	11.087	6.590	1.527	22.909	1.605	5.116	3.349	52.183
Jawa Barat	3.112.601	1.511.085	561.375	6.007.753	782.354	1.292.282	562.243	13.829.693

Catatan

) 1. Berusaha Sendiri; 2. Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar;* 3. Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar*; 4. Buruh/ Karyawan/ Pegawai;* 5. Pekerja Bebas di Pertanian*; 6. Pekerja Bebas di Non Pertanian;* 7. Pekerja Tak Dibayar

Tabel 4.13.3. Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utam *(Agustus 2020)*

Kabupaten/Kota	Status Pekerjaan Utama							Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kab. Bogor	218.064	75.928	10.096	329.877	27.401	24.784	113.063	799.213
Kab. Sukabumi	38.116	49.354	1.440	114.528	29.964	9.857	96.568	339.827
Kab. Cianjur	61.523	50.495	9.565	87.847	39.421	16.912	115.926	381.689
Kab. Bandung	80.059	77.579	9.535	236.347	25.059	22.973	105.091	556.643
Kab. Garut	75.238	62.707	1.941	83.385	42.229	22.031	81.083	368.614
Kab. Tasikmalaya	65.115	82.623	4.663	59.801	36.632	9.805	98.292	356.931
Kab. Ciamis	50.107	53.565	3.258	58.735	19.446	3.685	77.421	266.217
Kab. Kuningan	36.487	19.153	2.718	45.787	12.951	4.508	48.753	170.357
Kab. Cirebon	87.940	47.364	5.795	111.771	11.308	23.390	53.923	341.491
Kab. Majalengka	54.522	39.381	3.511	71.379	13.767	11.316	55.544	249.420
Kab. Sumedang	50.509	34.347	3.312	67.588	9.253	3.543	61.599	230.151
Kab. Indramayu	87.166	62.389	4.365	50.163	27.865	8.250	70.932	311.130
Kab. Subang	64.014	30.363	5.865	97.195	18.317	7.862	53.966	277.582
Kab. Purwakarta	22.791	17.732	472	47.448	7.421	3.699	21.780	121.343
Kab. Karawang	88.157	31.194	2.502	143.297	17.420	15.246	43.238	341.054
Kab. Bekasi	158.182	47.863	722	261.574	6.157	20.096	63.599	558.193
Kab. Bandung Barat	51.532	24.362	900	59.778	15.743	12.447	34.945	199.707
Kab. Pangandaran	16.747	21.910	3.293	15.347	3.441	1.760	36.074	98.572
Kota Bogor	33.259	8.312	2.115	83.798	-	5.406	20.717	153.607
Kota Sukabumi	10.281	2.438	578	23.157	162	1.168	4.553	42.337
Kota Bandung	116.081	31.117	12.834	222.004	-	7.813	58.025	447.874
Kota Cirebon	14.462	7.073	1.347	23.553	-	828	7.351	54.614
Kota Bekasi	126.929	27.954	8.320	300.627	-	8.302	45.865	517.997
Kota Depok	83.933	25.216	10.722	234.406	-	6.507	41.833	402.617
Kota Cimahi	18.923	7.097	962	51.531	-	3.102	12.736	94.351
Kota Tasikmalaya	32.326	16.168	2.927	46.320	1.558	3.003	21.909	124.211
Kota Banjar	10.573	6.007	485	14.649	714	454	6.537	39.419
Jawa Barat	1.753.036	959.691	114.243	2.941.892	366.229	258.747	1.451.323	7.845.161

Catatan

) 1. Berusaha Sendiri; 2. Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar;* 3. Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar*; 4. Buruh/ Karyawan/ Pegawai;* 5. Pekerja Bebas di Pertanian*; 6. Pekerja Bebas di Non Pertanian;* 7. Pekerja Tak Dibayar

Tabel 4.14.1. Persentase Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utam (Agustus 2020)

Kabupaten/Kota	Status Pekerjaan Utama							Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kab. Bogor	25,27	7,06	2,89	45,81	3,91	7,72	7,34	100,00
Kab. Sukabumi	20,88	14,67	1,70	31,89	10,84	8,35	11,66	100,00
Kab. Cianjur	17,80	17,59	4,88	24,03	11,43	9,61	14,66	100,00
Kab. Bandung	16,82	11,37	3,27	49,26	4,67	5,72	8,89	100,00
Kab. Garut	25,87	15,12	1,86	23,06	9,91	12,18	12,01	100,00
Kab. Tasikmalaya	20,50	23,53	2,90	20,89	9,86	8,55	13,76	100,00
Kab. Ciamis	22,97	18,82	2,32	27,42	7,57	5,47	15,43	100,00
Kab. Kuningan	22,22	15,99	5,19	28,13	6,21	7,39	14,88	100,00
Kab. Cirebon	22,65	10,42	3,50	36,09	4,07	12,89	10,37	100,00
Kab. Majalengka	20,21	19,53	3,54	29,77	6,12	8,18	12,65	100,00
Kab. Sumedang	21,13	16,43	2,92	34,22	4,58	6,72	13,99	100,00
Kab. Indramayu	21,63	19,71	3,38	22,89	11,31	9,42	11,66	100,00
Kab. Subang	23,53	13,98	4,45	32,46	9,24	6,27	10,07	100,00
Kab. Purwakarta	17,83	10,52	2,40	43,26	6,33	10,67	8,99	100,00
Kab. Karawang	26,58	6,61	1,48	41,44	9,59	8,65	5,65	100,00
Kab. Bekasi	22,91	6,77	2,29	55,86	1,32	5,47	5,36	100,00
Kab. Bandung Barat	24,40	10,65	2,13	38,39	7,43	9,73	7,28	100,00
Kab. Pangandaran	14,43	28,39	4,44	21,03	4,01	8,62	19,08	100,00
Kota Bogor	22,38	5,67	2,51	55,34	0,19	7,98	5,92	100,00
Kota Sukabumi	26,02	5,81	4,54	51,76	1,26	5,26	5,34	100,00
Kota Bandung	26,46	5,19	4,95	53,30	0,07	3,01	7,02	100,00
Kota Cirebon	23,05	8,65	5,94	46,69	0,13	7,34	8,19	100,00
Kota Bekasi	23,19	4,60	2,65	62,55	0,10	2,27	4,64	100,00
Kota Depok	21,90	5,02	3,80	61,13	0,06	2,61	5,48	100,00
Kota Cimahi	21,20	7,12	3,01	55,61	-	4,98	8,08	100,00
Kota Tasikmalaya	23,95	11,15	4,57	45,45	1,23	4,44	9,21	100,00
Kota Banjar	23,65	13,75	2,20	41,00	2,53	6,08	10,79	100,00
Jawa Barat	22,45	11,40	3,12	41,29	5,30	7,16	9,29	100,00

Catatan

) 1. Berusaha Sendiri; 2. Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar;* 3. Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar*; 4. Buruh/ Karyawan/ Pegawai;* 5. Pekerja Bebas di Pertanian*; 6. Pekerja Bebas di Non Pertanian;* 7. Pekerja Tak Dibayar

Tabel 4.14.2. Persentase Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utam (Agustus 2020)

Kabupaten/Kota	Status Pekerjaan Utama							Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kab. Bogor	24,23	5,79	3,73	48,16	4,16	10,11	3,82	100,00
Kab. Sukabumi	25,59	14,75	2,33	31,01	11,83	11,01	3,49	100,00
Kab. Cianjur	18,75	20,06	6,23	24,60	12,06	12,54	5,75	100,00
Kab. Bandung	18,15	9,96	4,13	52,99	4,77	6,59	3,40	100,00
Kab. Garut	28,81	14,09	2,57	23,30	9,07	15,53	6,63	100,00
Kab. Tasikmalaya	22,05	23,80	4,00	23,73	9,58	12,54	4,31	100,00
Kab. Ciamis	25,92	17,89	3,10	31,23	7,76	8,38	5,73	100,00
Kab. Kuningan	22,69	18,75	7,28	28,85	5,40	10,15	6,88	100,00
Kab. Cirebon	20,88	8,45	4,53	38,01	4,51	16,35	7,27	100,00
Kab. Majalengka	19,12	22,00	4,96	30,53	6,51	10,60	6,28	100,00
Kab. Sumedang	20,59	17,43	3,91	37,47	4,96	10,17	5,46	100,00
Kab. Indramayu	17,96	19,51	4,52	26,77	12,66	13,30	5,28	100,00
Kab. Subang	23,80	15,78	5,84	30,95	10,81	8,31	4,52	100,00
Kab. Purwakarta	17,40	8,64	3,32	45,18	6,42	14,19	4,85	100,00
Kab. Karawang	26,94	5,36	1,84	41,16	11,82	10,72	2,16	100,00
Kab. Bekasi	20,08	5,83	3,42	60,56	1,44	6,45	2,22	100,00
Kab. Bandung Barat	23,79	9,97	2,86	42,09	7,23	11,26	2,81	100,00
Kab. Pangandaran	12,56	32,90	5,25	25,02	4,39	13,62	6,25	100,00
Kota Bogor	22,76	5,80	3,09	55,75	0,29	10,31	1,99	100,00
Kota Sukabumi	26,93	5,84	6,22	50,22	1,73	6,57	2,49	100,00
Kota Bandung	26,80	4,09	6,25	55,63	0,11	3,80	3,32	100,00
Kota Cirebon	20,84	5,88	8,18	48,99	0,22	11,10	4,79	100,00
Kota Bekasi	22,37	4,11	3,30	65,36	0,16	2,68	2,02	100,00
Kota Depok	22,53	4,28	4,47	62,87	0,09	3,21	2,55	100,00
Kota Cimahi	21,87	6,89	4,18	56,19	-	5,98	4,89	100,00
Kota Tasikmalaya	22,61	9,93	6,00	50,73	1,22	5,76	3,76	100,00
Kota Banjar	21,25	12,63	2,93	43,90	3,08	9,80	6,42	100,00
Jawa Barat	22,51	10,93	4,06	43,44	5,66	9,34	4,07	100,00

Catatan

) 1. Berusaha Sendiri; 2. Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar;* 3. Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar*; 4. Buruh/ Karyawan/ Pegawai;* 5. Pekerja Bebas di Pertanian*; 6. Pekerja Bebas di Non Pertanian;* 7. Pekerja Tak Dibayar

Tabel 4.14.3. Persentase Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utam *(Agustus 2020)*

Kabupaten/Kota	Status Pekerjaan Utama							Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kab. Bogor	27,28	9,50	1,26	41,28	3,43	3,10	14,15	100,00
Kab. Sukabumi	11,22	14,52	0,42	33,70	8,82	2,90	28,42	100,00
Kab. Cianjur	16,12	13,23	2,51	23,02	10,33	4,43	30,37	100,00
Kab. Bandung	14,38	13,94	1,71	42,46	4,50	4,13	18,88	100,00
Kab. Garut	20,41	17,01	0,53	22,62	11,46	5,98	22,00	100,00
Kab. Tasikmalaya	18,24	23,15	1,31	16,75	10,26	2,75	27,54	100,00
Kab. Ciamis	18,82	20,12	1,22	22,06	7,30	1,38	29,08	100,00
Kab. Kuningan	21,42	11,24	1,60	26,88	7,60	2,65	28,62	100,00
Kab. Cirebon	25,75	13,87	1,70	32,73	3,31	6,85	15,79	100,00
Kab. Majalengka	21,86	15,79	1,41	28,62	5,52	4,54	22,27	100,00
Kab. Sumedang	21,95	14,92	1,44	29,37	4,02	1,54	26,76	100,00
Kab. Indramayu	28,02	20,05	1,40	16,12	8,96	2,65	22,80	100,00
Kab. Subang	23,06	10,94	2,11	35,01	6,60	2,83	19,44	100,00
Kab. Purwakarta	18,78	14,61	0,39	39,10	6,12	3,05	17,95	100,00
Kab. Karawang	25,85	9,15	0,73	42,02	5,11	4,47	12,68	100,00
Kab. Bekasi	28,34	8,57	0,13	46,86	1,10	3,60	11,39	100,00
Kab. Bandung Barat	25,80	12,20	0,45	29,93	7,88	6,23	17,50	100,00
Kab. Pangandaran	16,99	22,23	3,34	15,57	3,49	1,79	36,60	100,00
Kota Bogor	21,65	5,41	1,38	54,55	-	3,52	13,49	100,00
Kota Sukabumi	24,28	5,76	1,37	54,70	0,38	2,76	10,75	100,00
Kota Bandung	25,92	6,95	2,87	49,57	-	1,74	12,96	100,00
Kota Cirebon	26,48	12,95	2,47	43,13	-	1,52	13,46	100,00
Kota Bekasi	24,50	5,40	1,61	58,04	-	1,60	8,85	100,00
Kota Depok	20,85	6,26	2,66	58,22	-	1,62	10,39	100,00
Kota Cimahi	20,06	7,52	1,02	54,62	-	3,29	13,50	100,00
Kota Tasikmalaya	26,03	13,02	2,36	37,29	1,25	2,42	17,64	100,00
Kota Banjar	26,82	15,24	1,23	37,16	1,81	1,15	16,58	100,00
Jawa Barat	22,35	12,23	1,46	37,50	4,67	3,30	18,50	100,00

Catatan

) 1. Berusaha Sendiri; 2. Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar;* 3. Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar*; 4. Buruh/ Karyawan/ Pegawai;* 5. Pekerja Bebas di Pertanian*; 6. Pekerja Bebas di Non Pertanian;* 7. Pekerja Tak Dibayar

Tabel 4.15.1. Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Agustus 2020)

Kab. /Kota	Tidak/belum pernah sekolah/ Tidak/belum Tamat SD	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					Jumlah
		Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas		Diploma I/II/III/ Akademi/ Universitas	
				Umum	Kejuruan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Bogor	14.788	67.522	72.817	75.799	119.828	39.977	390.731
Kab. Sukabumi	2.697	27.546	30.293	29.303	14.473	5.786	110.098
Kab. Cianjur	4.934	42.686	30.918	24.505	24.631	3.342	131.016
Kab. Bandung	-	20.621	39.856	42.656	28.089	16.180	147.402
Kab. Garut	2.583	27.867	26.971	33.567	10.192	2.427	103.607
Kab. Tasikmalaya	-	21.857	13.148	13.434	14.370	4.481	67.290
Kab. Ciamis	1.011	12.144	7.237	5.661	10.258	2.114	38.425
Kab. Kuningan	1.669	19.666	11.372	9.690	12.077	4.039	58.513
Kab. Cirebon	9.324	20.555	22.801	27.117	40.591	1.757	122.145
Kab. Majalengka	1.388	7.250	7.763	8.604	10.327	3.466	38.798
Kab. Sumedang	-	11.645	9.550	14.705	20.994	6.168	63.062
Kab. Indramayu	9.098	18.887	16.622	16.060	22.182	3.812	86.661
Kab. Subang	2.500	10.702	22.923	16.337	19.721	6.000	78.183
Kab. Purwakarta	2.963	9.848	7.623	8.652	14.493	4.306	47.885
Kab. Karawang	8.479	16.077	27.905	30.187	43.900	7.350	133.898
Kab. Bekasi	2.631	19.565	21.685	52.765	78.946	36.843	212.435
Kab. Bandung Barat	4.832	22.449	17.154	23.553	18.112	5.457	91.557
Kab. Pangandaran	474	2.951	3.489	2.042	2.836	684	12.476
Kota Bogor	1.915	10.983	7.370	16.354	21.970	6.611	65.203
Kota Sukabumi	123	2.578	2.413	5.976	4.516	1.389	16.995
Kota Bandung	2.662	11.440	13.324	54.215	33.242	32.198	147.081
Kota Cirebon	3.510	3.074	921	5.036	3.161	1.464	17.166
Kota Bekasi	2.322	6.155	26.353	32.936	42.396	51.149	161.311
Kota Depok	5.482	8.831	11.176	21.713	42.304	28.526	118.032
Kota Cimahi	322	1.588	7.978	10.279	11.567	7.321	39.055
Kota Tasikmalaya	864	8.737	2.542	4.855	7.983	2.460	27.441
Kota Banjar	129	1.056	1.040	1.365	2.343	677	6.610
Jawa Barat	86.700	434.280	463.244	587.366	675.502	285.984	2.533.076

Tabel 4.15.2. Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan *(Agustus 2020)*

Kab. /Kota	Tidak/belum pernah sekolah/ Tidak/belum Tamat SD	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					Jumlah
		Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas		Diploma I/II/III/ Akademi/ Universitas	
				Umum	Kejuruan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Bogor	12.009	48.793	48.984	58.496	75.103	18.960	262.345
Kab. Sukabumi	1.964	18.478	23.673	17.231	10.531	4.291	76.168
Kab. Cianjur	1.646	34.216	23.587	14.835	19.054	2.154	95.492
Kab. Bandung	-	15.155	25.232	33.517	17.783	9.686	101.373
Kab. Garut	2.027	21.405	20.871	22.040	7.432	566	74.341
Kab. Tasikmalaya	-	14.561	9.763	9.123	10.164	2.411	46.022
Kab. Ciamis	1.011	8.419	4.688	2.403	6.736	1.715	24.972
Kab. Kuningan	1.370	14.780	6.243	6.310	7.500	1.650	37.853
Kab. Cirebon	7.499	14.933	14.889	15.454	29.000	1.757	83.532
Kab. Majalengka	1.388	3.781	5.592	5.318	6.306	2.150	24.535
Kab. Sumedang	-	7.264	5.008	8.655	13.803	2.580	37.310
Kab. Indramayu	5.899	13.359	11.755	11.837	12.076	2.202	57.128
Kab. Subang	980	8.037	15.689	10.219	14.205	1.991	51.121
Kab. Purwakarta	1.824	6.731	6.380	4.801	11.817	1.342	32.895
Kab. Karawang	5.470	11.297	18.249	16.282	34.184	2.881	88.363
Kab. Bekasi	1.501	12.365	16.579	31.959	61.281	20.308	143.993
Kab. Bandung Barat	2.604	14.305	12.817	17.204	14.066	5.132	66.128
Kab. Pangandaran	474	1.945	2.446	1.256	1.108	359	7.588
Kota Bogor	1.099	8.339	4.252	10.271	11.816	3.804	39.581
Kota Sukabumi	123	1.938	1.523	4.116	3.324	660	11.684
Kota Bandung	1.956	8.558	8.147	34.594	20.245	18.513	92.013
Kota Cirebon	2.687	1.451	821	2.940	1.803	579	10.281
Kota Bekasi	1.843	4.154	18.874	20.524	27.016	29.861	102.272
Kota Depok	3.700	6.658	6.186	16.841	26.933	17.051	77.369
Kota Cimahi	-	1.588	4.348	6.657	8.461	4.491	25.545
Kota Tasikmalaya	585	6.405	1.983	2.769	5.484	1.768	18.994
Kota Banjar	129	603	940	943	1.369	588	4.572
Jawa Barat	59.788	309.518	319.519	386.595	458.600	159.450	1.693.470

Tabel 4.15.3. Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan *(Agustus 2020)*

Kab. /Kota	Tidak/belum pernah sekolah/ Tidak/belum Tamat SD	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					Jumlah
		Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas		Diploma I/II/III/ Akademi/ Universitas	
				Umum	Kejuruan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Bogor	2.779	18.729	23.833	17.303	44.725	21.017	128.386
Kab. Sukabumi	733	9.068	6.620	12.072	3.942	1.495	33.930
Kab. Cianjur	3.288	8.470	7.331	9.670	5.577	1.188	35.524
Kab. Bandung	-	5.466	14.624	9.139	10.306	6.494	46.029
Kab. Garut	556	6.462	6.100	11.527	2.760	1.861	29.266
Kab. Tasikmalaya	-	7.296	3.385	4.311	4.206	2.070	21.268
Kab. Ciamis	-	3.725	2.549	3.258	3.522	399	13.453
Kab. Kuningan	299	4.886	5.129	3.380	4.577	2.389	20.660
Kab. Cirebon	1.825	5.622	7.912	11.663	11.591	-	38.613
Kab. Majalengka	-	3.469	2.171	3.286	4.021	1.316	14.263
Kab. Sumedang	-	4.381	4.542	6.050	7.191	3.588	25.752
Kab. Indramayu	3.199	5.528	4.867	4.223	10.106	1.610	29.533
Kab. Subang	1.520	2.665	7.234	6.118	5.516	4.009	27.062
Kab. Purwakarta	1.139	3.117	1.243	3.851	2.676	2.964	14.990
Kab. Karawang	3.009	4.780	9.656	13.905	9.716	4.469	45.535
Kab. Bekasi	1.130	7.200	5.106	20.806	17.665	16.535	68.442
Kab. Bandung Barat	2.228	8.144	4.337	6.349	4.046	325	25.429
Kab. Pangandaran	-	1.006	1.043	786	1.728	325	4.888
Kota Bogor	816	2.644	3.118	6.083	10.154	2.807	25.622
Kota Sukabumi	-	640	890	1.860	1.192	729	5.311
Kota Bandung	706	2.882	5.177	19.621	12.997	13.685	55.068
Kota Cirebon	823	1.623	100	2.096	1.358	885	6.885
Kota Bekasi	479	2.001	7.479	12.412	15.380	21.288	59.039
Kota Depok	1.782	2.173	4.990	4.872	15.371	11.475	40.663
Kota Cimahi	322	-	3.630	3.622	3.106	2.830	13.510
Kota Tasikmalaya	279	2.332	559	2.086	2.499	692	8.447
Kota Banjar	-	453	100	422	974	89	2.038
Jawa Barat	26.912	124.762	143.725	200.771	216.902	126.534	839.606

Tabel 4.16.1. Persentase Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan *(Agustus 2020)*

Kab. /Kota	Tidak/belum pernah sekolah/ Tidak/belum Tamat SD	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					Jumlah
		Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas		Diploma I/II/III/ Akademi/ Universitas	
				Umum	Kejuruan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Bogor	3,78	17,28	18,64	19,40	30,67	10,23	100,00
Kab. Sukabumi	2,45	25,02	27,51	26,62	13,15	5,26	100,00
Kab. Cianjur	3,77	32,58	23,60	18,70	18,80	2,55	100,00
Kab. Bandung	-	13,99	27,04	28,94	19,06	10,98	100,00
Kab. Garut	2,49	26,90	26,03	32,40	9,84	2,34	100,00
Kab. Tasikmalaya	-	32,48	19,54	19,96	21,36	6,66	100,00
Kab. Ciamis	2,63	31,60	18,83	14,73	26,70	5,50	100,00
Kab. Kuningan	2,85	33,61	19,43	16,56	20,64	6,90	100,00
Kab. Cirebon	7,63	16,83	18,67	22,20	33,23	1,44	100,00
Kab. Majalengka	3,58	18,69	20,01	22,18	26,62	8,93	100,00
Kab. Sumedang	-	18,47	15,14	23,32	33,29	9,78	100,00
Kab. Indramayu	10,50	21,79	19,18	18,53	25,60	4,40	100,00
Kab. Subang	3,20	13,69	29,32	20,90	25,22	7,67	100,00
Kab. Purwakarta	6,19	20,57	15,92	18,07	30,27	8,99	100,00
Kab. Karawang	6,33	12,01	20,84	22,54	32,79	5,49	100,00
Kab. Bekasi	1,24	9,21	10,21	24,84	37,16	17,34	100,00
Kab. Bandung Barat	5,28	24,52	18,74	25,72	19,78	5,96	100,00
Kab. Pangandaran	3,80	23,65	27,97	16,37	22,73	5,48	100,00
Kota Bogor	2,94	16,84	11,30	25,08	33,69	10,14	100,00
Kota Sukabumi	0,72	15,17	14,20	35,16	26,57	8,17	100,00
Kota Bandung	1,81	7,78	9,06	36,86	22,60	21,89	100,00
Kota Cirebon	20,45	17,91	5,37	29,34	18,41	8,53	100,00
Kota Bekasi	1,44	3,82	16,34	20,42	26,28	31,71	100,00
Kota Depok	4,64	7,48	9,47	18,40	35,84	24,17	100,00
Kota Cimahi	0,82	4,07	20,43	26,32	29,62	18,75	100,00
Kota Tasikmalaya	3,15	31,84	9,26	17,69	29,09	8,96	100,00
Kota Banjar	1,95	15,98	15,73	20,65	35,45	10,24	100,00
Jawa Barat	3,42	17,14	18,29	23,19	26,67	11,29	100,00

Tabel 4.16.2. Persentase Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan *(Agustus 2020)*

Kab. /Kota	Tidak/belum pernah sekolah/ Tidak/belum Tamat SD	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					Jumlah
		Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas		Diploma I/II/III/ Akademi/ Universitas	
				Umum	Kejuruan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Bogor	4,58	18,60	18,67	22,30	28,63	7,23	100,00
Kab. Sukabumi	2,58	24,26	31,08	22,62	13,83	5,63	100,00
Kab. Cianjur	1,72	35,83	24,70	15,54	19,95	2,26	100,00
Kab. Bandung	-	14,95	24,89	33,06	17,54	9,55	100,00
Kab. Garut	2,73	28,79	28,07	29,65	10,00	0,76	100,00
Kab. Tasikmalaya	-	31,64	21,21	19,82	22,09	5,24	100,00
Kab. Ciamis	4,05	33,71	18,77	9,62	26,97	6,87	100,00
Kab. Kuningan	3,62	39,05	16,49	16,67	19,81	4,36	100,00
Kab. Cirebon	8,98	17,88	17,82	18,50	34,72	2,10	100,00
Kab. Majalengka	5,66	15,41	22,79	21,68	25,70	8,76	100,00
Kab. Sumedang	-	19,47	13,42	23,20	37,00	6,92	100,00
Kab. Indramayu	10,33	23,38	20,58	20,72	21,14	3,85	100,00
Kab. Subang	1,92	15,72	30,69	19,99	27,79	3,89	100,00
Kab. Purwakarta	5,54	20,46	19,40	14,59	35,92	4,08	100,00
Kab. Karawang	6,19	12,78	20,65	18,43	38,69	3,26	100,00
Kab. Bekasi	1,04	8,59	11,51	22,19	42,56	14,10	100,00
Kab. Bandung Barat	3,94	21,63	19,38	26,02	21,27	7,76	100,00
Kab. Pangandaran	6,25	25,63	32,24	16,55	14,60	4,73	100,00
Kota Bogor	2,78	21,07	10,74	25,95	29,85	9,61	100,00
Kota Sukabumi	1,05	16,59	13,03	35,23	28,45	5,65	100,00
Kota Bandung	2,13	9,30	8,85	37,60	22,00	20,12	100,00
Kota Cirebon	26,14	14,11	7,99	28,60	17,54	5,63	100,00
Kota Bekasi	1,80	4,06	18,45	20,07	26,42	29,20	100,00
Kota Depok	4,78	8,61	8,00	21,77	34,81	22,04	100,00
Kota Cimahi	-	6,22	17,02	26,06	33,12	17,58	100,00
Kota Tasikmalaya	3,08	33,72	10,44	14,58	28,87	9,31	100,00
Kota Banjar	2,82	13,19	20,56	20,63	29,94	12,86	100,00
Jawa Barat	3,53	18,28	18,87	22,83	27,08	9,42	100,00

Tabel 4.16.3. Persentase Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kab. /Kota Dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan *(Agustus 2020)*

Kab. /Kota	Tidak/belum pernah sekolah/ Tidak/belum Tamat SD	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					Jumlah
		Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas		Diploma I/II/III/ Akademi/ Universitas	
				Umum	Kejuruan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Bogor	2,16	14,59	18,56	13,48	34,84	16,37	100,00
Kab. Sukabumi	2,16	26,73	19,51	35,58	11,62	4,41	100,00
Kab. Cianjur	9,26	23,84	20,64	27,22	15,70	3,34	100,00
Kab. Bandung	-	11,88	31,77	19,85	22,39	14,11	100,00
Kab. Garut	1,90	22,08	20,84	39,39	9,43	6,36	100,00
Kab. Tasikmalaya	-	34,31	15,92	20,27	19,78	9,73	100,00
Kab. Ciamis	-	27,69	18,95	24,22	26,18	2,97	100,00
Kab. Kuningan	1,45	23,65	24,83	16,36	22,15	11,56	100,00
Kab. Cirebon	4,73	14,56	20,49	30,20	30,02	-	100,00
Kab. Majalengka	-	24,32	15,22	23,04	28,19	9,23	100,00
Kab. Sumedang	-	17,01	17,64	23,49	27,92	13,93	100,00
Kab. Indramayu	10,83	18,72	16,48	14,30	34,22	5,45	100,00
Kab. Subang	5,62	9,85	26,73	22,61	20,38	14,81	100,00
Kab. Purwakarta	7,60	20,79	8,29	25,69	17,85	19,77	100,00
Kab. Karawang	6,61	10,50	21,21	30,54	21,34	9,81	100,00
Kab. Bekasi	1,65	10,52	7,46	30,40	25,81	24,16	100,00
Kab. Bandung Barat	8,76	32,03	17,06	24,97	15,91	1,28	100,00
Kab. Pangandaran	-	20,58	21,34	16,08	35,35	6,65	100,00
Kota Bogor	3,18	10,32	12,17	23,74	39,63	10,96	100,00
Kota Sukabumi	-	12,05	16,76	35,02	22,44	13,73	100,00
Kota Bandung	1,28	5,23	9,40	35,63	23,60	24,85	100,00
Kota Cirebon	11,95	23,57	1,45	30,44	19,72	12,85	100,00
Kota Bekasi	0,81	3,39	12,67	21,02	26,05	36,06	100,00
Kota Depok	4,38	5,34	12,27	11,98	37,80	28,22	100,00
Kota Cimahi	2,38	-	26,87	26,81	22,99	20,95	100,00
Kota Tasikmalaya	3,30	27,61	6,62	24,70	29,58	8,19	100,00
Kota Banjar	-	22,23	4,91	20,71	47,79	4,37	100,00
Jawa Barat	3,21	14,86	17,12	23,91	25,83	15,07	100,00

Grafik 4.9. Selisih Persentase Penduduk Kuningan dan Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan *(Agustus2020)*

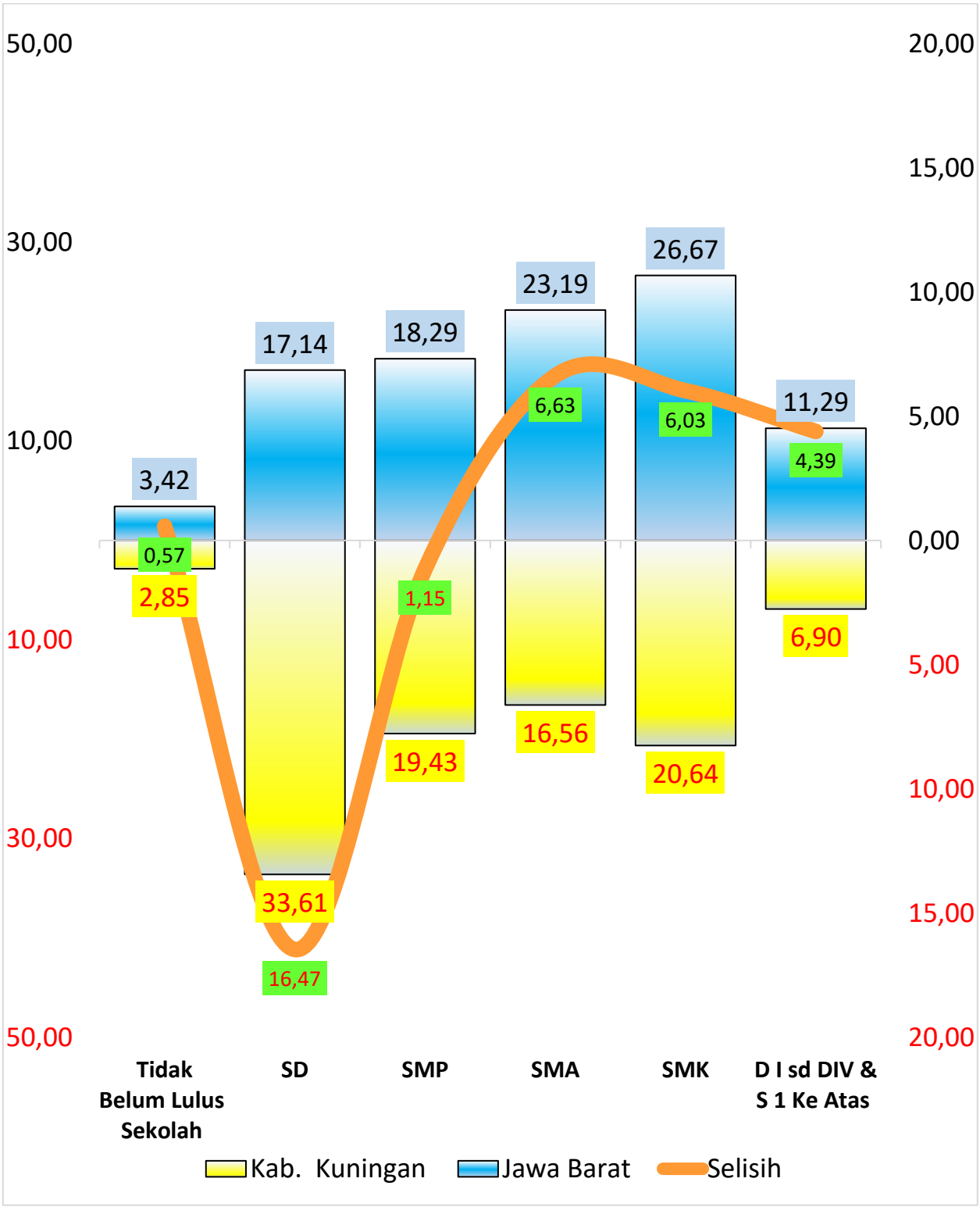

Grafik 4.10. Persentase Penduduk di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten / Kota dan Jenis Pendidikan D-I atau Lebih Tinggi yang Ditamatkan *(Agustus2020)*

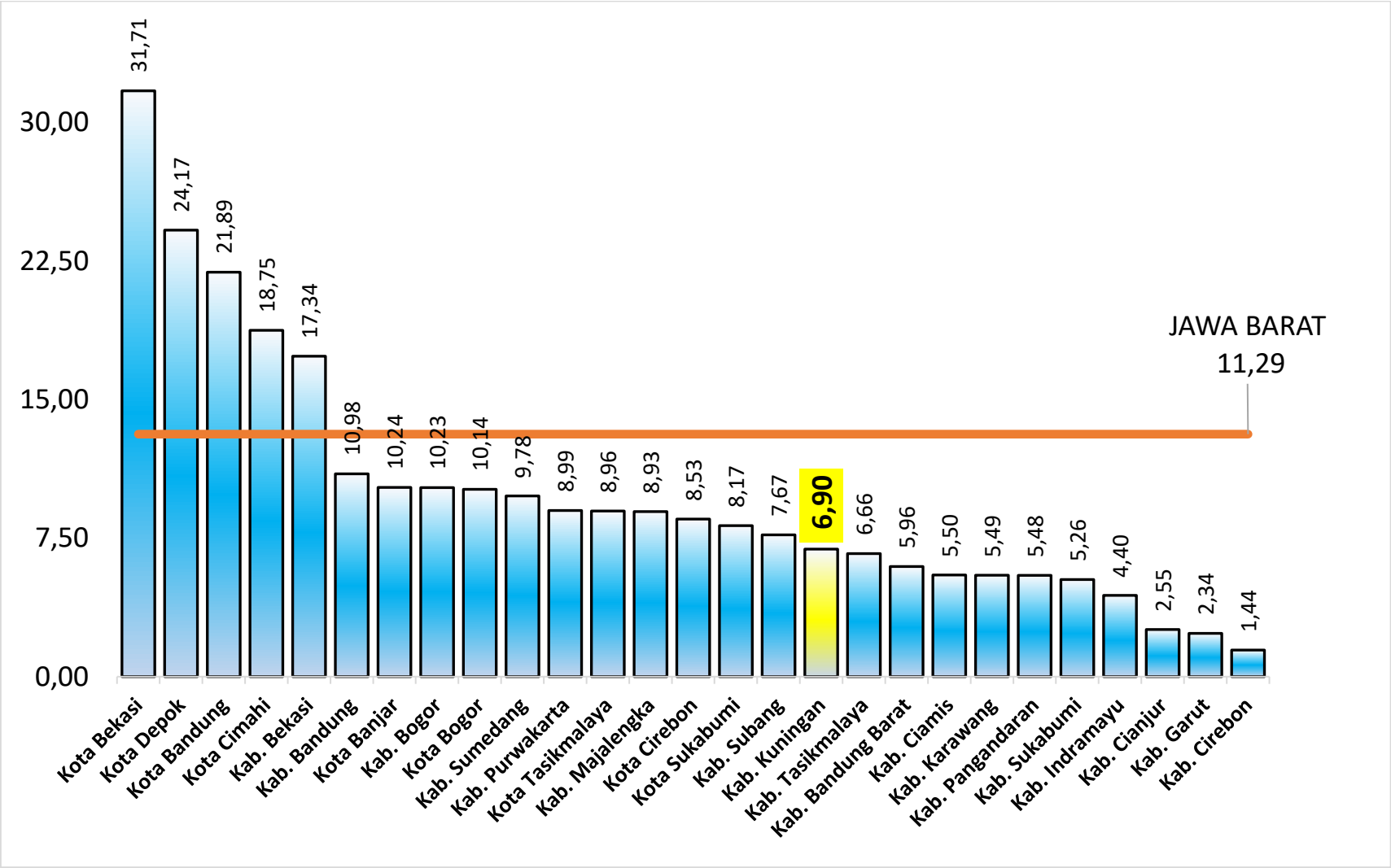

Tabel 4.17.1. Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Kategori Pengangguran Terbuka *(Agustus 2020)*

Kabupaten/Kota	Kategori Pengangguran Terbuka				Jumlah
	Mencari Pekerjaan	Mempersiapkan Usaha	Merasa Tidak Mungkin Mendapatkan Pekerjaan	Sudah Punya Pekerjaan Tetapi Belum Mulai Bekerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Bogor	337.731	11.416	15.939	25.645	390.731
Kab. Sukabumi	96.312	2.898	5.884	5.004	110.098
Kab. Cianjur	120.375	6.426	3.135	1.080	131.016
Kab. Bandung	135.357	8.343	-	3.702	147.402
Kab. Garut	91.535	4.183	2.691	5.198	103.607
Kab. Tasikmalaya	59.275	590	3.839	3.586	67.290
Kab. Ciamis	30.436	3.235	733	4.021	38.425
Kab. Kuningan	51.749	2.023	2.413	2.328	58.513
Kab. Cirebon	112.927	5.339	1.975	1.904	122.145
Kab. Majalengka	33.594	326	2.094	2.784	38.798
Kab. Sumedang	59.046	1.438	918	1.660	63.062
Kab. Indramayu	78.059	2.008	2.266	4.328	86.661
Kab. Subang	67.376	4.535	4.645	1.627	78.183
Kab. Purwakarta	43.291	222	2.562	1.810	47.885
Kab. Karawang	115.598	3.012	10.812	4.476	133.898
Kab. Bekasi	181.702	10.056	8.387	12.290	212.435
Kab. Bandung Barat	67.949	3.016	4.888	15.704	91.557
Kab. Pangandaran	10.587	609	405	875	12.476
Kota Bogor	54.364	4.736	5.405	698	65.203
Kota Sukabumi	14.942	124	1.308	621	16.995
Kota Bandung	124.320	7.992	6.631	8.138	147.081
Kota Cirebon	14.748	780	1.185	453	17.166
Kota Bekasi	144.761	4.215	4.798	7.537	161.311
Kota Depok	104.905	2.274	7.355	3.498	118.032
Kota Cimahi	33.116	1.581	2.739	1.619	39.055
Kota Tasikmalaya	24.032	838	240	2.331	27.441
Kota Banjar	4.990	379	437	804	6.610
Jawa Barat	2.213.077	92.594	103.684	123.721	2.533.076

Tabel 4.17.2. Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Kategori Pengangguran Terbuka *(Agustus 2020)*

Kabupaten/Kota	Kategori Pengangguran Terbuka				Jumlah
	Mencari Pekerjaan	Mempersiapkan Usaha	Merasa Tidak Mungkin Mendapatkan Pekerjaan	Sudah Punya Pekerjaan Tetapi Belum Mulai Bekerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Bogor	227.368	6.019	14.241	14.717	262.345
Kab. Sukabumi	66.780	1.638	2.746	5.004	76.168
Kab. Cianjur	87.740	4.617	3.135	-	95.492
Kab. Bandung	97.793	3.580	-	-	101.373
Kab. Garut	63.689	3.175	2.279	5.198	74.341
Kab. Tasikmalaya	40.401	590	2.433	2.598	46.022
Kab. Ciamis	19.653	3.235	-	2.084	24.972
Kab. Kuningan	33.344	2.023	1.567	919	37.853
Kab. Cirebon	77.396	3.182	1.288	1.666	83.532
Kab. Majalengka	20.939	-	1.696	1.900	24.535
Kab. Sumedang	36.747	-	-	563	37.310
Kab. Indramayu	53.299	1.292	1.536	1.001	57.128
Kab. Subang	46.133	2.366	2.622	-	51.121
Kab. Purwakarta	29.490	222	2.188	995	32.895
Kab. Karawang	77.057	356	7.165	3.785	88.363
Kab. Bekasi	126.076	4.484	6.798	6.635	143.993
Kab. Bandung Barat	50.901	2.083	2.873	10.271	66.128
Kab. Pangandaran	6.727	175	203	483	7.588
Kota Bogor	32.786	952	5.145	698	39.581
Kota Sukabumi	10.520	-	1.035	129	11.684
Kota Bandung	76.913	5.036	4.362	5.702	92.013
Kota Cirebon	8.665	211	952	453	10.281
Kota Bekasi	87.378	2.559	4.798	7.537	102.272
Kota Depok	67.163	2.274	5.486	2.446	77.369
Kota Cimahi	21.970	700	2.171	704	25.545
Kota Tasikmalaya	16.691	468	240	1.595	18.994
Kota Banjar	3.469	62	337	704	4.572
Jawa Barat	1.487.088	51.299	77.296	77.787	1.693.470

Tabel 4.17.3. Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Kategori Pengangguran Terbuka *(Agustus 2020)*

Kabupaten/Kota	Kategori Pengangguran Terbuka				Jumlah
	Mencari Pekerjaan	Mempersiapkan Usaha	Merasa Tidak Mungkin Mendapatkan Pekerjaan	Sudah Punya Pekerjaan Tetapi Belum Mulai Bekerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Bogor	110.363	5.397	1.698	10.928	128.386
Kab. Sukabumi	29.532	1.260	3.138	-	33.930
Kab. Cianjur	32.635	1.809	-	1.080	35.524
Kab. Bandung	37.564	4.763	-	3.702	46.029
Kab. Garut	27.846	1.008	412	-	29.266
Kab. Tasikmalaya	18.874	-	1.406	988	21.268
Kab. Ciamis	10.783	-	733	1.937	13.453
Kab. Kuningan	18.405	-	846	1.409	20.660
Kab. Cirebon	35.531	2.157	687	238	38.613
Kab. Majalengka	12.655	326	398	884	14.263
Kab. Sumedang	22.299	1.438	918	1.097	25.752
Kab. Indramayu	24.760	716	730	3.327	29.533
Kab. Subang	21.243	2.169	2.023	1.627	27.062
Kab. Purwakarta	13.801	-	374	815	14.990
Kab. Karawang	38.541	2.656	3.647	691	45.535
Kab. Bekasi	55.626	5.572	1.589	5.655	68.442
Kab. Bandung Barat	17.048	933	2.015	5.433	25.429
Kab. Pangandaran	3.860	434	202	392	4.888
Kota Bogor	21.578	3.784	260	-	25.622
Kota Sukabumi	4.422	124	273	492	5.311
Kota Bandung	47.407	2.956	2.269	2.436	55.068
Kota Cirebon	6.083	569	233	-	6.885
Kota Bekasi	57.383	1.656	-	-	59.039
Kota Depok	37.742	-	1.869	1.052	40.663
Kota Cimahi	11.146	881	568	915	13.510
Kota Tasikmalaya	7.341	370	-	736	8.447
Kota Banjar	1.521	317	100	100	2.038
Jawa Barat	725.989	41.295	26.388	45.934	839.606

Tabel 4.18.1. Persentase Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Kategori Pengangguran Terbuka *(Agustus 2020)*

Kabupaten/Kota	Kategori Pengangguran Terbuka				Jumlah
	Mencari Pekerjaan	Mempersiapkan Usaha	Merasa Tidak Mungkin Mendapatkan Pekerjaan	Sudah Punya Pekerjaan Tetapi Belum Mulai Bekerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Bogor	86,44	2,92	4,08	6,56	100,00
Kab. Sukabumi	87,48	2,63	5,34	4,55	100,00
Kab. Cianjur	91,88	4,90	2,39	0,82	100,00
Kab. Bandung	91,83	5,66	-	2,51	100,00
Kab. Garut	88,35	4,04	2,60	5,02	100,00
Kab. Tasikmalaya	88,09	0,88	5,71	5,33	100,00
Kab. Ciamis	79,21	8,42	1,91	10,46	100,00
Kab. Kuningan	88,44	3,46	4,12	3,98	100,00
Kab. Cirebon	92,45	4,37	1,62	1,56	100,00
Kab. Majalengka	86,59	0,84	5,40	7,18	100,00
Kab. Sumedang	93,63	2,28	1,46	2,63	100,00
Kab. Indramayu	90,07	2,32	2,61	4,99	100,00
Kab. Subang	86,18	5,80	5,94	2,08	100,00
Kab. Purwakarta	90,41	0,46	5,35	3,78	100,00
Kab. Karawang	86,33	2,25	8,07	3,34	100,00
Kab. Bekasi	85,53	4,73	3,95	5,79	100,00
Kab. Bandung Barat	74,21	3,29	5,34	17,15	100,00
Kab. Pangandaran	84,86	4,88	3,25	7,01	100,00
Kota Bogor	83,38	7,26	8,29	1,07	100,00
Kota Sukabumi	87,92	0,73	7,70	3,65	100,00
Kota Bandung	84,52	5,43	4,51	5,53	100,00
Kota Cirebon	85,91	4,54	6,90	2,64	100,00
Kota Bekasi	89,74	2,61	2,97	4,67	100,00
Kota Depok	88,88	1,93	6,23	2,96	100,00
Kota Cimahi	84,79	4,05	7,01	4,15	100,00
Kota Tasikmalaya	87,58	3,05	0,87	8,49	100,00
Kota Banjar	75,49	5,73	6,61	12,16	100,00
Jawa Barat	87,37	3,66	4,09	4,88	100,00

Tabel 4.18.2. Persentase Penduduk Laki-laki di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Kategori Pengangguran Terbuka *(Agustus 2020)*

Kabupaten/Kota	Kategori Pengangguran Terbuka				Jumlah
	Mencari Pekerjaan	Mempersiapkan Usaha	Merasa Tidak Mungkin Mendapatkan Pekerjaan	Sudah Punya Pekerjaan Tetapi Belum Mulai Bekerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Bogor	86,67	2,29	5,43	5,61	100,00
Kab. Sukabumi	87,67	2,15	3,61	6,57	100,00
Kab. Cianjur	91,88	4,83	3,28	-	100,00
Kab. Bandung	96,47	3,53	-	-	100,00
Kab. Garut	85,67	4,27	3,07	6,99	100,00
Kab. Tasikmalaya	87,79	1,28	5,29	5,65	100,00
Kab. Ciamis	78,70	12,95	-	8,35	100,00
Kab. Kuningan	88,09	5,34	4,14	2,43	100,00
Kab. Cirebon	92,65	3,81	1,54	1,99	100,00
Kab. Majalengka	85,34	-	6,91	7,74	100,00
Kab. Sumedang	98,49	-	-	1,51	100,00
Kab. Indramayu	93,30	2,26	2,69	1,75	100,00
Kab. Subang	90,24	4,63	5,13	-	100,00
Kab. Purwakarta	89,65	0,67	6,65	3,02	100,00
Kab. Karawang	87,21	0,40	8,11	4,28	100,00
Kab. Bekasi	87,56	3,11	4,72	4,61	100,00
Kab. Bandung Barat	76,97	3,15	4,34	15,53	100,00
Kab. Pangandaran	88,65	2,31	2,68	6,37	100,00
Kota Bogor	82,83	2,41	13,00	1,76	100,00
Kota Sukabumi	90,04	-	8,86	1,10	100,00
Kota Bandung	83,59	5,47	4,74	6,20	100,00
Kota Cirebon	84,28	2,05	9,26	4,41	100,00
Kota Bekasi	85,44	2,50	4,69	7,37	100,00
Kota Depok	86,81	2,94	7,09	3,16	100,00
Kota Cimahi	86,01	2,74	8,50	2,76	100,00
Kota Tasikmalaya	87,88	2,46	1,26	8,40	100,00
Kota Banjar	75,87	1,36	7,37	15,40	100,00
Jawa Barat	87,81	3,03	4,56	4,59	100,00

Tabel 4.18.3. Persentase Penduduk Perempuan di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Kategori Pengangguran Terbuka *(Agustus 2020)*

Kabupaten/Kota	Kategori Pengangguran Terbuka				Jumlah
	Mencari Pekerjaan	Mempersiapkan Usaha	Merasa Tidak Mungkin Mendapatkan Pekerjaan	Sudah Punya Pekerjaan Tetapi Belum Mulai Bekerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Bogor	85,96	4,20	1,32	8,51	100,00
Kab. Sukabumi	87,04	3,71	9,25	-	100,00
Kab. Cianjur	91,87	5,09	-	3,04	100,00
Kab. Bandung	81,61	10,35	-	8,04	100,00
Kab. Garut	95,15	3,44	1,41	-	100,00
Kab. Tasikmalaya	88,74	-	6,61	4,65	100,00
Kab. Ciamis	80,15	-	5,45	14,40	100,00
Kab. Kuningan	89,09	-	4,09	6,82	100,00
Kab. Cirebon	92,02	5,59	1,78	0,62	100,00
Kab. Majalengka	88,73	2,29	2,79	6,20	100,00
Kab. Sumedang	86,59	5,58	3,56	4,26	100,00
Kab. Indramayu	83,84	2,42	2,47	11,27	100,00
Kab. Subang	78,50	8,01	7,48	6,01	100,00
Kab. Purwakarta	92,07	-	2,49	5,44	100,00
Kab. Karawang	84,64	5,83	8,01	1,52	100,00
Kab. Bekasi	81,27	8,14	2,32	8,26	100,00
Kab. Bandung Barat	67,04	3,67	7,92	21,37	100,00
Kab. Pangandaran	78,97	8,88	4,13	8,02	100,00
Kota Bogor	84,22	14,77	1,01	-	100,00
Kota Sukabumi	83,26	2,33	5,14	9,26	100,00
Kota Bandung	86,09	5,37	4,12	4,42	100,00
Kota Cirebon	88,35	8,26	3,38	-	100,00
Kota Bekasi	97,20	2,80	-	-	100,00
Kota Depok	92,82	-	4,60	2,59	100,00
Kota Cimahi	82,50	6,52	4,20	6,77	100,00
Kota Tasikmalaya	86,91	4,38	-	8,71	100,00
Kota Banjar	74,63	15,55	4,91	4,91	100,00
Jawa Barat	86,47	4,92	3,14	5,47	100,00

Grafik 4.11. Selisih Persentase Penduduk Kuningan dan Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kategori Pengangguran Terbuka *(Agustus2020)*

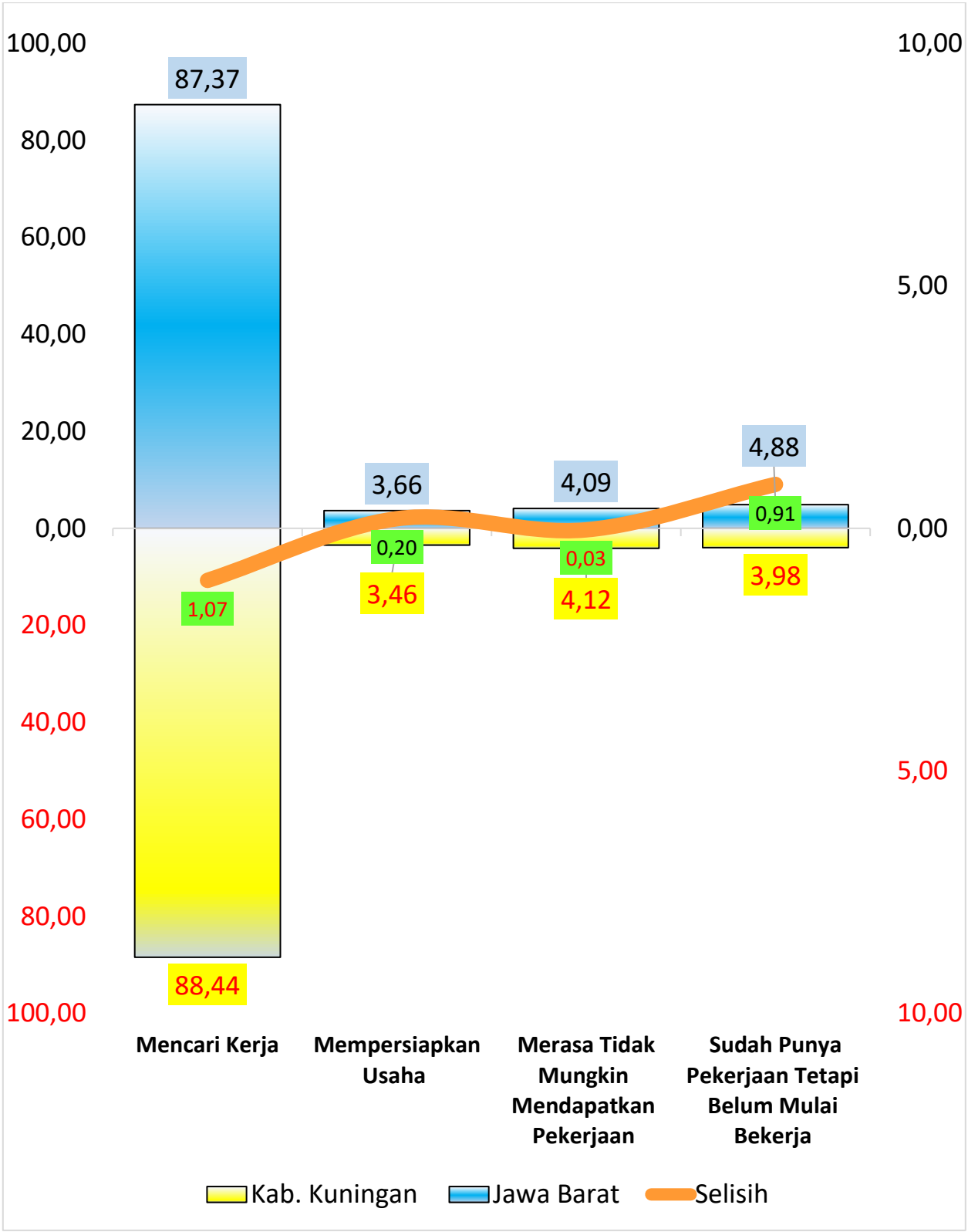

Grafik 4.12. Persentase Penduduk di Jawa Barat Berumur 15 Tahun ke Atas yang Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten / Kota dan Kategori Pengangguran Terbuka sebagai Pencari Kerja *(Agustus2020)*

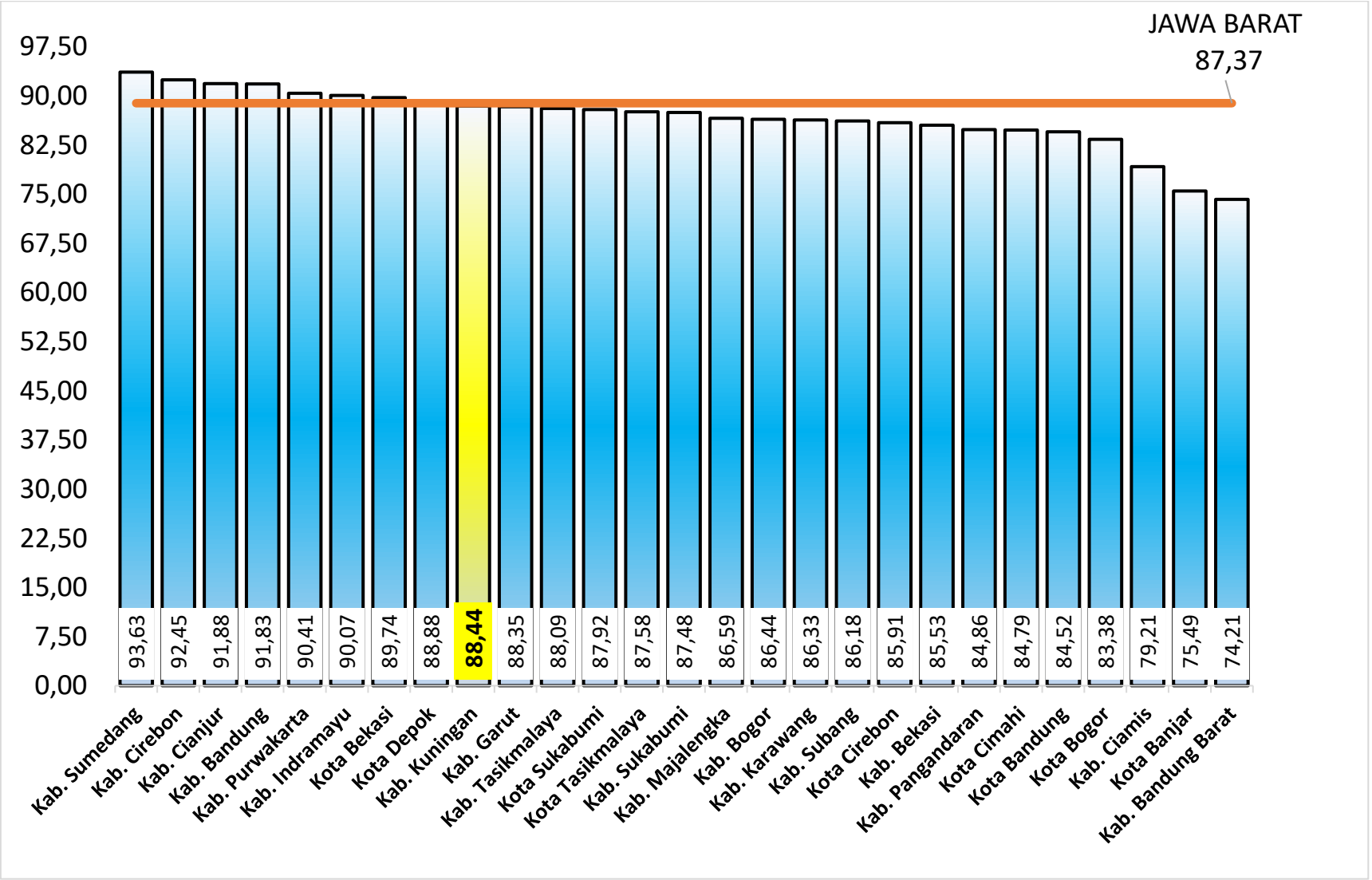

Bab V
PENGHITUNGAN PDRB (PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO)

Kajian Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan Tahun 2021

BAB V.

PENGHITUNGAN PDRB (PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO)

5.1. Metode Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Pendapatan Regional Kabupaten/Kota atas dasar harga berlaku dapat dihitung melalui dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang dimaksud dengan metode langsung adalah metode penghitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah. Metode langsung akan dapat memperlihatkan karakteristik sosial ekonomi setiap daerah. Di samping itu manfaat pemakaian data daerah dapat digunakan untuk menyempurnakan data statistik daerah yang lemah. Hasil penghitungannya memperlihatkan seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan daerah ini. Metode langsung dapat dilakukan dengan meneggunakan 3 macam pendekatan yaitu: a. Pendekatan produksi b. Pendekatan pendapatan c. Pendekatan pengeluaran. Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi yaitu mengalokir pendapatan regional Provinsi menjadi pendapatan regional Kabupaten/Kota dengan memakai berbagai macam indikator produksi atau indikator lainnya yang cocok sebgai sebagai alokator.

Dalam prakteknya, kadang-kadang metode alokasi terpaksa digunakan dalam memperkirakan data Provinsi dan kabupaten/Kota untuk sektor-sektor tertentu seperti penerbangan, pelayaran, dan segala bentuk cabang usaha yang mempunyai kantor pusat di lain daerah. Hasil metode alokasi dapat juga digunakan selaku kontrol terhadap penghitungan pendapatan regional masing-masing kabupaten/Kota. Salah satu asumsi yang dipergunakan di dalam metode alokasi adalah tersedianya data pendapatan regional Provinsi yang baik. Tanpa adanya data pendapatan regional Provinsi yang baik, hasil metode alokasi untuk Kabupaten tidak akan memuaskan. Namun tidak dapat disangkal bahwa penggunaan metode alokasi dapat pula

digunakan untuk mengecek metode langsung. Sebaliknya metode langsung dapat juga membantu penyempurnaan perhitungan pendapatan regional Provinsi.

5.2. Metode Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Perkembangan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan dalam tingkat harganya. Oleh karenanya untuk dapat mengukur perubahan volume produksi atau perkembangan produktivitas secara nyata, faktor pengaruh atas perubahan harga perlu dihilangkan dengan cara menghitung PDRB atas dasar harga konstan. Penghitungan atas dasar harga konstan ini berguna antara lain dalam perencanaan ekonomi, proyeksi dan untuk menilai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral. Produk domestik menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan apabila dikaitkan dengan data mengenai tenaga kerja dan barang modal yang dipakai dalam proses produksi dapat memberikan gambaran tentang tingkat produktivitas dan kapasitas produksi dari masing-masing lapangan usaha tersebut.

Produk riil per kapita biasanya juga dipakai sebagai indikator untuk menggambarkan perubahan tingkat kemakmuran ekonomi dari tahun ke tahun. Untuk perencanaan dan proyeksi pada masa yang akan datang atau ramalan dan penentuan target, selalu bertitik tolak dari penghitungan atas dasar harga konstan. Secara konsep nilai atas dasar harga konstan dapat juga mencerminkan kuantum produksi pada tahun yang berjalan yang dinilai atas dasar harga pada tahun dasar.

Dari segi metode statistik, suatu nilai atas dasar harga konstan dapat diperoleh dengan cara: (a) Revaluasi atas kuantum pada tahun berjalan dengan harga tahun dasar. Cara ini adalah

mengalikan kuantum pada tahun yang berjalan dengan harga tahun dasar. Hasilnya adalah nilai atas dasar harga konstan. (b) Ekstrapolasi atas nilai tahun dasar dengan suatu indeks kuantum. Cara mengalikan nilai tahun dasar dengan suatu indeks kuantum dibagi 100. (c) Deflasi atas suatu nilai pada tahun berjalan dengan suatu indeks harga. Cara ini adalah membagi nilai tahun berjalan dengan suatu indeks harga dibagi 100.

Dari sudut teori, indeks kuantum dalam hal ekstrapolasi haruslah yang disusun menurut rumus Laspeyres sedangkan indeks harga untuk hal deflasi haruslah yang disusun menurut rumus Paasche. Namun, dalam prakteknya dijumpai beberapa masalah. Tersedianya data indeks harga yang disusun menurut rumus Paasche merupakan suatu masalah. Hal ini disebabkan karena indeks ini membutuhkan timbangan kuantum dari tahun yang berjalan yang berarti bahwa setiap tahun suatu timbangan harus ditentukan. Oleh karena itu maka biasanya pilihan penyusunan indeks lebih sering memakai rumus Laspeyres. Karena dalam praktek seringkali hanya indeks Laspeyres yang tersedia, indeks ini dipakai untuk menghi-tung nilai atas dasar harga konstan.

Dalam hal deflasi nilai atas dasar harga berlaku, pemakaian indeks harga dengan rumus Laspeyres menimbulkan suatu kesalahan dalam hasil estimasinya. Kesalahan ini akan makin besar apabila perbedaan antara timbangan pada tahun dasar dengan timbangan pada tahun yang berjalan makin besar. Perkiraan produk/pendapatan domestik atas dasar harga konstan dapat dilakukan pada PDRB menurut lapangan usaha dengan cara menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan untuk berbagai lapangan usaha, atau terhadap PDRB menurut pengeluaran yaitu dengan menghitung komponen- komponen pengeluaran atas dasar harga konstan.

Ada 17 (Tujuh belas) kategori perekonomian yang membagi jumlah PDRB baik secara Berlaku maupun Konstan; kategori tersebut adalah sebagai berikut :

Kategori	Uraian Kategori Perekonomian
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B	Pertambangan dan Penggalian
C	Industri Pengolahan
D	Pengadaan Listrik dan Gas
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F	Konstruksi
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Kategori	Uraian Kategori Perekonomian
H	Transportasi dan Pergudangan
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J	Informasi dan Komunikasi
K	Jasa Keuangan dan Asuransi
L	Real Estate
M,N	Jasa Perusahaan
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P	Jasa Pendidikan
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R,S,T,U	Jasa lainnya

Berikut ini adalah angka PDRB Kabupaten Kuningan dan Propinsi Jawa Barat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 di rinci menurut ADHB dan ADHK (Tahun 2010=100) serta Laju Pertumbuhan Ekonomi nya (LPE)

Tabel 5.1. PDRB ADHB, ADHK (Tahun 2010=100) & Laju Pertumbuhan Ekonomi
Tahun 2011 sampai dengan 2020

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dalam Jutaan Rp				Laju Petumbuhan Ekonomi (LPE) Dalam Persen (%)	
	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2010 = 100)			
	Kab.Kuningan	Prov. Jawa Barat	Kab.Kuningan	Prov. Jawa Barat	Kab. Kuningan	Prov. Jabar
2011	10.867.301,78	1.021.628.597,37	10.371.175,26	965.622.061,10	5,62	6,50
2012	11.951.482,16	1.128.245.684,62	10.962.964,00	1.028.409.739,51	5,71	6,50
2013	13.459.362,64	1.258.989.328,78	11.648.539,43	1.093.543.545,87	6,25	6,33
2014	14.998.961,02	1.385.825.076,49	12.385.382,11	1.149.216.057,05	6,33	5,09
2015	16.986.674,71	1.524.974.827,42	13.175.671,72	1.207.232.341,56	6,38	5,05
2016	18.563.286,16	1.653.238.421,97	13.977.774,24	1.275.619.241,16	6,09	5,66
2017	20.463.990,21	1.788.117.361,36	14.866.619,07	1.343.662.141,83	6,36	5,33
2018	22.764.226,08	1.960.627.652,50	15.821.964,95	1.419.624.140,04	6,43	5,65
2019	25.093.281,91	2.124.043.623,50	16.864.146,93	1.491.575.953,74	6,59	5,07
2020	25.617.837,94	2.088.038.735,10	16.879.452,99	1.455.235.139,77	0,09	-2,44

TABEL 5.2.1. PDRB KABUPATEN KUNINGAN SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2014 SD 2020 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.720.358,1	4.069.406,6	4.439.444,6	4.868.260,7	5.511.079,4	6.113.441,6	6.302.502,6
B	Pertambangan dan Penggalian	285.353,2	306.417,0	307.905,6	300.734,9	305.312,4	303.550,0	312.732,5
C	Industri Pengolahan	355.268,4	395.682,5	439.419,1	473.636,8	508.868,1	562.081,8	576.332,7
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.927,1	13.356,4	15.855,6	19.068,1	21.434,3	22.885,2	22.377,6
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.681,5	14.211,9	16.151,0	18.852,6	21.844,3	23.881,9	26.318,3
F	Konstruksi	1.318.982,5	1.524.862,8	1.612.944,7	1.797.318,3	2.022.812,9	2.237.707,4	2.090.199,1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.488.289,1	2.640.930,8	2.800.766,2	3.001.193,0	3.238.074,4	3.578.483,8	3.586.951,2
H	Transportasi dan Pergudangan	2.098.803,4	2.585.603,5	2.862.980,5	3.103.893,8	3.351.578,7	3.574.365,4	3.591.669,3
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	260.093,4	292.590,7	326.651,0	370.198,1	420.079,4	466.024,4	466.229,2
J	Informasi dan Komunikasi	512.425,7	592.408,6	660.707,9	743.310,2	813.891,6	880.408,6	1.094.153,4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	795.600,3	910.946,1	1.040.882,0	1.154.281,5	1.275.978,5	1.392.982,8	1.414.088,9
L	Real Estate	419.401,4	445.472,8	482.818,1	534.641,2	590.338,8	646.473,0	655.420,9
M,N	Jasa Perusahaan	59.549,0	66.313,1	73.005,6	81.751,1	94.658,2	113.546,1	112.744,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	672.077,8	760.257,7	799.499,8	854.352,7	913.746,6	962.354,9	940.973,1
P	Jasa Pendidikan	1.342.841,1	1.619.230,5	1.835.064,8	2.172.064,7	2.579.715,0	2.986.533,3	3.182.125,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	208.466,4	252.868,3	287.535,1	324.724,6	359.680,5	404.722,1	401.017,6
R,S,T,U	Jasa lainnya	437.842,6	496.115,3	561.654,7	645.707,8	735.132,9	823.839,7	842.002,0
	P D R B	14.998.961,0	16.986.674,7	18.563.286,2	20.463.990,2	22.764.226,1	25.093.281,9	25.617.837,9

TABEL 5.2.2. PDRB PROVINSI JAWA BARAT SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2014 SD 2020 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	120.787.231,5	132.497.853,5	146.767.935,2	152.939.425,9	170.155.209,9	186.441.348,5	192.117.057,2
B	Pertambangan dan Penggalian	33.622.738,0	26.025.115,0	25.347.017,3	25.481.689,6	26.611.596,0	26.448.304,8	23.160.869,5
C	Industri Pengolahan	604.759.573,1	656.824.387,9	703.516.391,6	755.184.871,7	827.285.292,5	884.121.172,4	860.070.595,7
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11.008.528,5	11.437.568,8	11.920.087,4	10.855.233,3	10.924.693,9	10.966.977,2	10.069.938,7
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.019.667,6	1.160.269,6	1.343.138,1	1.588.061,4	1.789.856,5	1.936.906,2	2.156.069,5
F	Konstruksi	112.073.459,8	125.923.144,0	134.113.402,0	147.554.690,7	165.605.993,8	181.316.217,0	171.260.213,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	211.469.531,5	231.627.978,0	249.243.975,0	269.669.991,5	291.735.676,1	323.629.512,3	303.862.678,3
H	Transportasi dan Pergudangan	66.392.631,8	84.070.880,0	94.845.276,9	103.491.482,2	111.437.241,6	117.219.937,2	109.147.849,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	33.722.152,8	38.098.816,1	43.014.049,8	48.395.131,8	54.641.271,4	61.141.690,0	60.845.271,5
J	Informasi dan Komunikasi	34.152.993,3	39.711.997,1	45.461.350,2	51.845.066,8	56.270.696,5	60.943.950,8	82.061.410,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	35.512.837,5	39.811.237,4	46.100.572,3	50.121.391,7	54.705.401,1	57.514.863,0	58.459.009,9
L	Real Estate	14.438.750,1	15.578.023,6	16.813.545,8	18.659.369,9	20.753.973,8	22.955.756,5	23.561.251,1
M,N	Jasa Perusahaan	5.438.669,0	6.076.874,3	6.645.607,1	7.339.111,2	8.173.421,8	9.974.895,6	8.402.880,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	32.191.980,0	36.673.940,9	39.157.138,7	43.308.875,1	45.563.552,0	49.060.738,3	46.031.124,0
P	Jasa Pendidikan	35.314.726,2	40.563.279,3	44.676.514,8	51.393.975,4	59.300.936,3	68.079.319,8	75.567.573,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.700.874,0	10.614.557,1	12.064.601,2	13.472.969,0	14.781.001,8	16.680.679,7	16.214.505,5
R,S,T,U	Jasa lainnya	25.218.731,7	28.278.904,6	32.207.818,3	36.816.024,2	40.891.837,5	45.611.354,2	45.050.436,3
	P D R B	**1.385.825.076,5**	**1.524.974.827,4**	**1.653.238.422,0**	**1.788.117.361,4**	**1.960.627.652,5**	**2.124.043.623,5**	**2.088.038.735,1**

TABEL 5.3.1. PDRB KABUPATEN KUNINGAN SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2014 SD 2020 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.868.833,3	2.900.320,8	3.031.841,5	3.196.984,3	3.379.288,2	3.540.569,8	3.591.833,0
B	Pertambangan dan Penggalian	226.710,8	228.220,2	227.755,8	228.126,9	229.356,3	223.465,1	217.426,2
C	Industri Pengolahan	299.122,4	318.144,2	340.891,6	357.832,4	376.807,8	411.822,9	412.733,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12.280,9	12.651,8	13.398,2	13.945,4	14.549,9	15.094,3	14.794,6
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.227,2	11.915,2	12.609,4	13.530,3	14.525,5	14.991,3	16.318,3
F	Konstruksi	1.093.960,1	1.184.785,1	1.227.210,8	1.334.585,3	1.452.839,7	1.543.846,7	1.433.511,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.186.750,7	2.257.758,4	2.353.688,1	2.441.337,4	2.541.674,0	2.737.994,6	2.655.961,1
H	Transportasi dan Pergudangan	1.695.411,5	1.847.308,7	1.974.097,4	2.077.602,5	2.190.199,9	2.322.998,8	2.287.912,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	214.085,9	232.462,2	251.107,0	272.528,6	296.438,0	320.064,3	307.836,6
J	Informasi dan Komunikasi	540.347,4	625.003,2	695.961,6	772.127,1	841.965,9	919.420,3	1.142.555,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	628.605,3	682.812,3	746.641,1	783.175,8	823.957,3	855.982,2	859.970,0
L	Real Estate	380.427,1	399.586,5	426.498,9	465.746,0	507.036,9	553.005,8	554.888,0
M,N	Jasa Perusahaan	50.956,5	55.014,5	59.856,7	65.458,5	71.735,6	78.036,0	75.829,5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	488.827,3	499.795,5	514.892,2	523.685,9	537.052,3	561.596,9	540.307,1
P	Jasa Pendidikan	1.084.785,5	1.240.747,7	1.363.996,9	1.509.505,3	1.663.626,5	1.812.968,7	1.843.532,9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	188.117,3	214.663,7	234.422,3	257.394,1	277.907,2	302.650,4	292.772,3
R,S,T,U	Jasa lainnya	414.933,0	464.481,5	502.904,8	553.053,3	603.004,0	649.638,8	631.270,3
	P D R B	**12.385.382,1**	**13.175.671,7**	**13.977.774,2**	**14.866.619,1**	**15.821.965,0**	**16.864.146,9**	**16.879.453,0**

TABEL 5.3.2. PDRB PROVINSI JAWA BARAT SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2014 SD 2020 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	92.653.584,2	92.802.799,0	98.096.580,3	99.669.370,0	101.752.202,8	104.596.750,3	106.991.940,0
B	Pertambangan dan Penggalian	27.291.421,4	27.403.820,2	27.138.684,6	26.589.926,9	25.491.225,9	24.791.421,1	23.771.256,4
C	Industri Pengolahan	502.433.623,1	524.466.677,0	549.471.383,8	578.703.236,9	616.427.070,0	641.352.048,2	614.291.242,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.373.286,0	5.939.653,4	6.139.545,3	5.438.106,4	5.438.947,9	5.373.577,0	4.964.314,7
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	896.263,8	948.977,8	1.009.018,5	1.080.964,6	1.134.533,2	1.168.926,2	1.295.180,0
F	Konstruksi	92.603.491,6	98.555.254,7	103.507.069,5	111.001.029,2	119.305.155,0	126.631.198,7	119.068.584,1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	183.634.922,8	190.440.113,2	198.865.387,3	207.862.668,4	216.611.154,8	232.871.679,9	214.374.848,5
H	Transportasi dan Pergudangan	51.579.514,1	56.320.031,8	61.297.384,6	64.258.641,6	67.702.024,5	71.064.359,9	68.097.411,5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27.545.028,8	29.776.546,2	32.559.353,4	35.285.421,7	38.160.143,2	40.928.315,7	38.634.853,7
J	Informasi dan Komunikasi	36.005.412,4	41.878.751,6	47.856.799,5	53.527.156,1	58.420.751,3	63.861.229,7	85.980.065,8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	27.497.251,4	29.521.633,8	33.030.521,5	34.179.944,7	35.727.388,5	36.512.282,8	36.932.386,2
L	Real Estate	13.121.319,4	13.837.689,5	14.738.072,1	16.109.923,5	17.658.387,1	19.344.117,7	19.716.059,5
M,N	Jasa Perusahaan	4.561.081,0	4.932.613,4	5.334.980,4	5.784.330,0	6.284.130,7	6.859.664,4	5.599.118,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	23.676.877,0	24.987.382,2	25.739.067,0	26.933.346,2	27.360.564,7	28.704.062,4	26.716.829,1
P	Jasa Pendidikan	29.424.905,7	32.418.865,5	34.885.810,9	37.909.721,1	40.065.480,3	42.156.299,6	44.978.193,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.780.534,3	8.880.758,3	9.723.043,0	10.537.792,9	11.369.959,2	12.448.015,1	11.777.487,2
R,S,T,U	Jasa lainnya	22.137.540,0	24.120.774,0	26.226.539,6	28.790.561,6	30.715.020,9	32.912.005,2	32.045.368,6
	P D R B	**1.149.216.057,1**	**1.207.232.341,6**	**1.275.619.241,2**	**1.343.662.141,8**	**1.419.624.140,0**	**1.491.575.953,7**	**1.455.235.139,8**

TABEL 5.4.1. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN KUNINGAN SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2014 SD 2020 (PERSEN)

Kategori	Uraian	Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,80	23,96	23,92	23,79	24,21	24,36	24,60
B	Pertambangan dan Penggalian	1,90	1,80	1,66	1,47	1,34	1,21	1,22
C	Industri Pengolahan	2,37	2,33	2,37	2,31	2,24	2,24	2,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10
F	Konstruksi	8,79	8,98	8,69	8,78	8,89	8,92	8,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,59	15,55	15,09	14,67	14,22	14,26	14,00
H	Transportasi dan Pergudangan	13,99	15,22	15,42	15,17	14,72	14,24	14,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,73	1,72	1,76	1,81	1,85	1,86	1,82
J	Informasi dan Komunikasi	3,42	3,49	3,56	3,63	3,58	3,51	4,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,30	5,36	5,61	5,64	5,61	5,55	5,52
L	Real Estate	2,80	2,62	2,60	2,61	2,59	2,58	2,56
M,N	Jasa Perusahaan	0,40	0,39	0,39	0,40	0,42	0,45	0,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,48	4,48	4,31	4,17	4,01	3,84	3,67
P	Jasa Pendidikan	8,95	9,53	9,89	10,61	11,33	11,90	12,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,39	1,49	1,55	1,59	1,58	1,61	1,57
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,92	2,92	3,03	3,16	3,23	3,28	3,29
	P D R B	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

TABEL 5.4.2. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB PROVINSI JAWA BARAT SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2014 SD 2020 (PERSEN)

Kategori	Uraian	Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,72	8,69	8,88	8,55	8,68	8,78	9,20
B	Pertambangan dan Penggalian	2,43	1,71	1,53	1,43	1,36	1,25	1,11
C	Industri Pengolahan	43,64	43,07	42,55	42,23	42,19	41,62	41,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,79	0,75	0,72	0,61	0,56	0,52	0,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10
F	Konstruksi	8,09	8,26	8,11	8,25	8,45	8,54	8,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,26	15,19	15,08	15,08	14,88	15,24	14,55
H	Transportasi dan Pergudangan	4,79	5,51	5,74	5,79	5,68	5,52	5,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,43	2,50	2,60	2,71	2,79	2,88	2,91
J	Informasi dan Komunikasi	2,46	2,60	2,75	2,90	2,87	2,87	3,93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,56	2,61	2,79	2,80	2,79	2,71	2,80
L	Real Estate	1,04	1,02	1,02	1,04	1,06	1,08	1,13
M,N	Jasa Perusahaan	0,39	0,40	0,40	0,41	0,42	0,47	0,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,32	2,40	2,37	2,42	2,32	2,31	2,20
P	Jasa Pendidikan	2,55	2,66	2,70	2,87	3,02	3,21	3,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,63	0,70	0,73	0,75	0,75	0,79	0,78
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,82	1,85	1,95	2,06	2,09	2,15	2,16
	P D R B	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

TABEL 5.5.1. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN KUNINGAN SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2014 SD 2020 (PERSEN)

Kategori	Uraian	Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,16	22,01	21,69	21,50	21,36	20,99	21,28
B	Pertambangan dan Penggalian	1,83	1,73	1,63	1,53	1,45	1,33	1,29
C	Industri Pengolahan	2,42	2,41	2,44	2,41	2,38	2,44	2,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10
F	Konstruksi	8,83	8,99	8,78	8,98	9,18	9,15	8,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,66	17,14	16,84	16,42	16,06	16,24	15,73
H	Transportasi dan Pergudangan	13,69	14,02	14,12	13,97	13,84	13,77	13,55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,73	1,76	1,80	1,83	1,87	1,90	1,82
J	Informasi dan Komunikasi	4,36	4,74	4,98	5,19	5,32	5,45	6,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,08	5,18	5,34	5,27	5,21	5,08	5,09
L	Real Estate	3,07	3,03	3,05	3,13	3,20	3,28	3,29
M,N	Jasa Perusahaan	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,95	3,79	3,68	3,52	3,39	3,33	3,20
P	Jasa Pendidikan	8,76	9,42	9,76	10,15	10,51	10,75	10,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,52	1,63	1,68	1,73	1,76	1,79	1,73
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,35	3,53	3,60	3,72	3,81	3,85	3,74
	P D R B	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

TABEL 5.5.2. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB PROVINSI JAWA BARAT SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2014 SD 2020 (PERSEN)

Kategori	Uraian	Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,06	7,69	7,69	7,42	7,17	7,01	7,35
B	Pertambangan dan Penggalian	2,37	2,27	2,13	1,98	1,80	1,66	1,63
C	Industri Pengolahan	43,72	43,44	43,07	43,07	43,42	43,00	42,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,55	0,49	0,48	0,40	0,38	0,36	0,34
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
F	Konstruksi	8,06	8,16	8,11	8,26	8,40	8,49	8,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,98	15,77	15,59	15,47	15,26	15,61	14,73
H	Transportasi dan Pergudangan	4,49	4,67	4,81	4,78	4,77	4,76	4,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,40	2,47	2,55	2,63	2,69	2,74	2,65
J	Informasi dan Komunikasi	3,13	3,47	3,75	3,98	4,12	4,28	5,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,39	2,45	2,59	2,54	2,52	2,45	2,54
L	Real Estate	1,14	1,15	1,16	1,20	1,24	1,30	1,35
M,N	Jasa Perusahaan	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,46	0,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,06	2,07	2,02	2,00	1,93	1,92	1,84
P	Jasa Pendidikan	2,56	2,69	2,73	2,82	2,82	2,83	3,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,68	0,74	0,76	0,78	0,80	0,83	0,81
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,93	2,00	2,06	2,14	2,16	2,21	2,20
	P D R B	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

TABEL 5.6.1. LAJU PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN KUNINGAN SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2014 SD 2020 / LPE (PERSEN)

Kategori	Uraian	Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,53	1,10	4,53	5,45	5,70	4,77	1,45
B	Pertambangan dan Penggalian	4,66	0,67	-0,20	0,16	0,54	-2,57	-2,70
C	Industri Pengolahan	5,61	6,36	7,15	4,97	5,30	9,29	0,22
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,71	3,02	5,90	4,08	4,34	3,74	-1,99
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,82	6,13	5,83	7,30	7,36	3,21	8,85
F	Konstruksi	6,58	8,30	3,58	8,75	8,86	6,26	-7,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,38	3,25	4,25	3,72	4,11	7,72	-3,00
H	Transportasi dan Pergudangan	8,22	8,96	6,86	5,24	5,42	6,06	-1,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,81	8,58	8,02	8,53	8,77	7,97	-3,82
J	Informasi dan Komunikasi	16,19	15,67	11,35	10,94	9,04	9,20	24,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,91	8,62	9,35	4,89	5,21	3,89	0,47
L	Real Estate	4,69	5,04	6,74	9,20	8,87	9,07	0,34
M,N	Jasa Perusahaan	6,48	7,96	8,80	9,36	9,59	8,78	-2,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,82	2,24	3,02	1,71	2,55	4,57	-3,79
P	Jasa Pendidikan	19,67	14,38	9,93	10,67	10,21	8,98	1,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,10	14,11	9,20	9,80	7,97	8,90	-3,26
R,S,T,U	Jasa lainnya	10,80	11,94	8,27	9,97	9,03	7,73	-2,83
	P D R B	**6,33**	**6,38**	**6,09**	**6,36**	**6,43**	**6,59**	**0,09**

TABEL 5.6.2. LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROVINSI JAWA BARAT SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2014 SD 2020 / LPE (PERSEN)

Kategori	Uraian	Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,29	0,16	5,70	1,60	2,09	2,80	2,29
B	Pertambangan dan Penggalian	1,56	0,41	-0,97	-2,02	-4,13	-2,75	-4,11
C	Industri Pengolahan	5,17	4,39	4,77	5,32	6,52	4,04	-4,22
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,78	-6,80	3,37	-11,42	0,02	-1,20	-7,62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,95	5,88	6,33	7,13	4,96	3,03	10,80
F	Konstruksi	5,45	6,43	5,02	7,24	7,48	6,14	-5,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,31	3,71	4,42	4,52	4,21	7,51	-7,94
H	Transportasi dan Pergudangan	7,53	9,19	8,84	4,83	5,36	4,97	-4,18
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,00	8,10	9,35	8,37	8,15	7,25	-5,60
J	Informasi dan Komunikasi	17,47	16,31	14,27	11,85	9,14	9,31	34,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,36	7,36	11,89	3,48	4,53	2,20	1,15
L	Real Estate	4,46	5,46	6,51	9,31	9,61	9,55	1,92
M,N	Jasa Perusahaan	6,92	8,15	8,16	8,42	8,64	9,16	-18,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,46	5,53	3,01	4,64	1,59	4,91	-6,92
P	Jasa Pendidikan	14,43	10,17	7,61	8,67	5,69	5,22	6,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,78	14,14	9,48	8,38	7,90	9,48	-5,39
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,80	8,96	8,73	9,78	6,68	7,15	-2,63
	P D R B	**5,09**	**5,05**	**5,66**	**5,33**	**5,65**	**5,07**	**-2,44**

Bab VI
METODE ANALISIS PDRB DAN KETENAGAKERJAAN DENGAN METODE LQ DAN SHIFT SHARE

Kajian Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan Tahun 2021

BAB VI.

METODE ANALISIS PDRB DAN KETENAGAKERJAAN DENGAN METODE LQ DAN SHIFT SHARE

Location Quotient dan Shift Share Analysis sebagai Alat Guna Menentukan Strategi Pengembangan Ekonomi

6.1. Local Quotient Analysis (LQ)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau leading sektor. Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang menjadi acuan. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien LQ tersebut nantinya dapat berupa jumlah tenaga kerja per-sektor ekonomi, jumlah produksi atau satuan lain yang dapat digunakan sebagai kriteria.

$$LQ = \frac{Si/Ni}{S/N} = \frac{Si/S}{Ni/N}$$

Location Quotient Analysis (LQ)

Dimana :

Si = Jumlah buruh sektor kegiatan ekonomi i di daerah yang diselidiki

S = Jumlah buruh seluruh sektor kegiatan ekonomi di daerah yang diselidiki

Ni = Jumlah sektor kegiatan ekonomi i di daerah acuan yang lebih luas, di mana daerah yang di selidiki menjadi bagiannya

N = Jumlah seluruh buruh di daerah acuan yang lebih luas

Itu jika menggunakan data buruh atau tenaga kerja. Demikian pula jika menggunakan data lain, seperti PDRB.

Dari perhitungan Location Quotient (LQ) suatu sektor, kriteria umum yang dihasilkan adalah :

a. Jika LQ > 1, disebut sektor basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi darIpada tingkat wilayah acuan
b. Jika LQ < 1, disebut sektor non-basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari pada tingkat wilayah acuan
c. Jika LQ = 1, maka tingkat spesialisasi daerah sama dengan tingkat wilayah acuan.

Asumsi metoda LQ ini adalah penduduk di wilayah yang bersangkutan mempunyai pola permintaan wilayah sama dengan pola permintaan wilayah acuan. Asumsi lainnya adalah permintaan wilayah akan suatu barang akan dipenuhi terlebih dahulu oleh produksi wilayah, kekurangannya diimpor dari wilayah lain.

Keunggulan Analisis LQ:

Location Quotient merupakan suatu alat analisa yang digunakan dengan mudah dan cepat. LQ dapat digunakan sebagai alat analisis awal untuk suatu daerah, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan alat analisis lainnya. Karena demikian sederhananya, LQ dapat dihitung berulang kali untuk setiap perubahan spesialisasi dengan menggunakan berbagai peubah acuan dan periode waktu. Perubahan tingkat spesialisasi dari tiap sektor dapat pula diketahui dengan membandingkan LQ dari tahun ke tahun.

Kelemahan Analisis LQ:

Perlu diketahui bahwa nilai LQ dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nilai hasil perhitungannya bias, karena tingkat disagregasi peubah spesialisasi, pemilihan peubah acuan, pemilihan entity yang diperbandingkan, pemilihan tahun dan kualitas data.

Masalah paling mendasar pada model ekonomi basis ini adalah masalah time lag. Hal ini diakui, bahwa base multiplier atau pengganda tidak berlangsung secara tepat, karena membutuhkan time lag antara respon dari sektor basis terhadap permintaan dari luar wilayah dan respon dari sektor non basis terhadap perubahan sektor basis. Pendekatan yang biasanya dilakukan terhadap masalah ini adalah mengabaikan masalah time lag ini, namun dalam jangka panjang masalah ini pasti terjadi.

Pengganda basis dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut (Budiharsono, 2001:31) :

$$Pengganda\ Basis = \frac{Total\ Tenaga\ Kerja}{Tenaga\ Kerja\ Sektor\ Basis}$$

Atau:

$$Pengganda\ Basis = \frac{Perubahan\ Total\ Tenaga\ Kerja}{Perubahan\ Tenaga\ Kerja\ Sektor\ Basis}$$

Atau:

$$\Delta T = (1/(1 - dl))\Delta X$$

dimana :

T = Total Tenaga Kerja

X = Jumlah Tenaga Kerja Pada Sektor Basis

1/(1-dl) = Multiplier. (Ma'rif : 2000)

Pada umumnya jika dilakukan dengan hati-hati dan menggunakannya dengan hati-hati pula, maka model ekonomi basis ini merupakan alat yang baik untuk mengeksplorasi, mengevaluasi dan

memberikan dugaan permintaan basis untuk masa mendatang dan memprediksi tenaga kerja, pendapatan, populasi, investasi, kebutuhan pelayanan masyarakat dan sebagainya.

Menurut teori ini, sektor ekspor merupakan sektor yang paling penting dalam pembangunan daerah, karena (1) ekspor akan secara langsung menimbulkan kenaikan pendapatan faktor-faktor produksi dan pendapatan daerah, (2) pengembangan ekspor akan menimbulkan permintaan atas produksi industri lokal (residentary industry), yaitu industri di daerah yang memproduksi untuk memenuhi pasaran di daerah tersebut. Walaupun sebetulnya ada faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan daerah, yaitu pertambahan penduduk dan modal yang besar ke daerah tersebut.

Dalam perkembangannya, teori ekspor base dikembangkan lagi oleh Perlof dan Wingo ke dalam teori resource base yang didasarkan pada pengalaman empirik sejarah perkembangan daerah di Amerika Serikat (Sukirno,1982). Teori ini menganggap bahwa di samping ekspor, peranan kekayaan alam suatu daerah juga menentukan perkembangan daerah tersebut.

Shift – Share Analysis

Metoda ini digunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian daerah, pergeseran struktur, posisi relatif sektor-sektor ekonomi dan identifikasi sektor unggulan daerah dalam kaitannya dengan perekonomian wilayah acuan (wilayah yang lebih luas) dalam dua atau lebih kurun waktu.

Analisis ini bertolak pada asumsi bahwa pertumbuhan sektor daerah sama dengan pada tingkat wilayah acuan, membagi perubahan atau pertumbuhan kinerja ekonomi daerah (lokal) dalam tiga komponen :

1. Komponen Pertumbuhan Wilayah Acuan (KPW), yaitu mengukur kinerja perubahan ekonomi pada perekonomian acuan. Hal ini diartikan bahwa daerah yang bersangkutan tumbuh karena dipengaruhi oleh kebijakan wilayah acuan secara umum.

2. Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPP), yaitu mengukur perbedaan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi acuan dengan pertumbuhan agregat. Apabila komponen ini pada salah satu sektor wilayah acuan bernilai positif, berarti sektor tersebut berkembang dalam perekonomian acuan. Sebaliknya jika negatif, sektor tersebut menurun kinerjanya.
3. Komponen Pergeseran atau Pertumbuhan Pangsa Wilayah (KPK), yaitu mengukur kinerja sektor-sektor lokal terhadap sektor-sektor yang sama pada perekonomian acuan. Apabila komponen ini pada salah satu sektor positif, maka daya saing sektor lokal meningkat dibandingkan sektor yang sama pada ekonomi acuan, dan apabila negatif terjadi sebaliknya.

Dengan demikian apabila perubahan atau pertumbuhan kinerja ekonomi kota adalah PEK, maka persamaannya dapat diformulasikan sebagai berikut (Ma'rif, 2000:3)

$$PEK = KPW + KPP + KPK$$

Atau:

$$PEK = \left[\frac{Y^*}{Y} - 1\right] + \left[\frac{Y'i}{Yi} - \frac{Y^*}{Y}\right] + \left[\frac{y'i}{yi} - \frac{Y'i}{Yi}\right]$$

Di mana :

Y* = Indikator ekonomi acuan akhir tahun kajian

Y = Indikator ekonomi acuan awal tahun kajian

Y'i = Indikator ekonomi acuan sektor i akhir tahun kajian

Yi = Indikator ekonomi acuan sektor i awal tahun kajian

y'i = Indikator ekonomi daerah (lokal) sektor i akhir tahun kajian

yi = Indikator ekonomi daerah (lokal) sektor i awal tahun kajian

Pergeseran Netto (PN) dihitung dengan rumus :

$$PN = KPP + KPK$$

Selain data pendapatan dapat juga dipergunakan data kesempatan kerja.

Keunggulan Shift – Share Analysis:

a. Digunakan untuk memperileh gambaran rinci mengenai pergeseran struktur ekonomi
b. Menggambarkan posisi relatif masing-masing sektor perekonomian daerah terhadap wilayah acuan
c. Menggambarkan sektor-sektor unggulan yang dapat dipacu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
d. Menggambarkan sektor yang posisinya relatif lemah, namun dianggap strategis untuk dipacu (pertimbangan penyerapan tenaga kerja)

Kelemahan Shift – Share Analysis:

a. Asumsi yang digunakan bahwa sektor-sektor ekonomi acuan tumbuh dengan tingkat yang sama,
b. Pergeseran posisi sektor dianggap linier.

6.2. Fenomena Ketenagakerjaan Kuningan dan Jawa Barat Tahun 2020

Kalau dilihat jumlah penduduk yang bekerja maka dapat dilihat berdasarkan kateogri perekonomiannya maka selisih persentase antara Kabupaten Kuningan dan Propinsi Jawa Barat di tahun 2020 sangat berfluktuasi. Fluktuasi positif dalam hal ini menunjukkan presentase penduduk yang bekerja pada kategori perekonomian tersebut Kabupaten Kuningan lebih besar daripada di

Jawa Barat, demikian sebaliknya. Semakin besar selisih persentase penyerapan tenaga kerja yang semakin positif menunjukkan semakin kuatnya potensi pengembangan dari kategori perekonomian di Kabupaten Kuningan untuk dapat maju dan berkembang, karena ketersediaan tenagakerjanya yang cukup besar bila dibandingkan dengan kondisi di Jawa Barat secara keseluruhan.

Berikut adalah persentase daya serap ketenagakerjaan penduduk yang bekerja di Kabupaten Kuningan dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;

Tabel 6.1. Persentase Daya Serap Kategori Perekonomian di Kabupaten Kuningan & Jawa Barat Tahun 2020

Kategori Perekonomian dan Rincian		Kabupaten Kuningan	Jawa Barat	Selisih
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,67	16,91	11,76
B	Pertambangan dan Penggalian	0,13	0,44	-0,31
C	Industri Pengolahan	8,46	18,56	-10,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,39	0,23	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,46	0,77	-0,32
F	Konstruksi	8,28	7,02	1,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,81	22,95	1,85
H	Transportasi dan Pergudangan	3,39	5,18	-1,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,63	8,33	2,31
J	Informasi dan Komunikasi	0,50	1,04	-0,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,04	1,42	-0,38
L	Real Estate	0,37	0,56	-0,19
M,N	Jasa Perusahaan	1,14	1,88	-0,74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,56	2,42	-0,86
P	Jasa Pendidikan	5,23	4,37	0,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,72	1,46	-0,74
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,23	6,45	-2,22

Grafik 6.1. Persentase Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Kuningan & Jawa Barat 2018 sd 2020

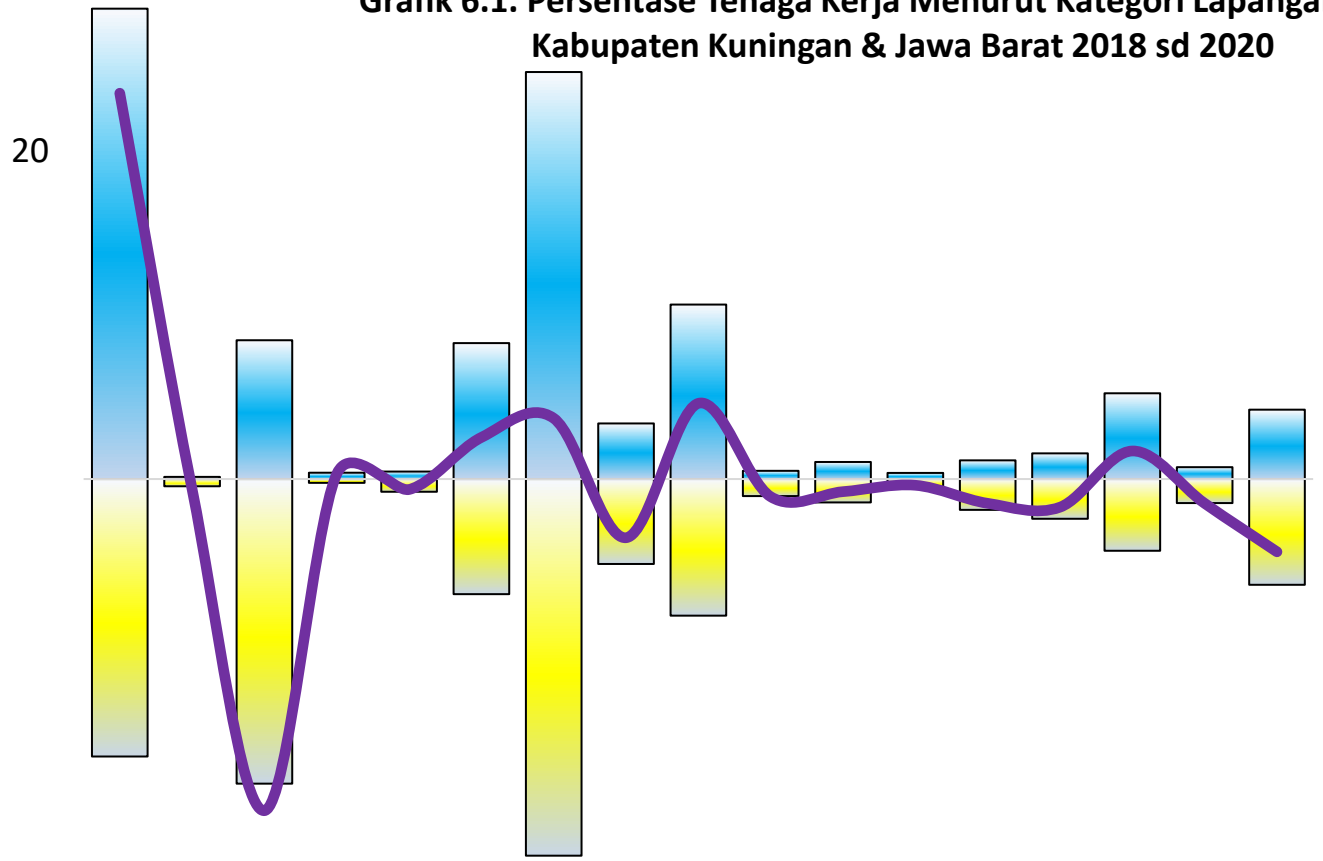

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M,N	O	P	Q	R,S,T, U
Kabupaten Kuningan	28,67	0,13	8,46	0,39	0,46	8,28	24,81	3,39	10,63	0,50	1,04	0,37	1,14	1,56	5,23	0,72	4,23
Jawa Barat	16,91	0,44	18,56	0,23	0,77	7,02	22,95	5,18	8,33	1,04	1,42	0,56	1,88	2,42	4,37	1,46	6,45
Potensi Tenaga Kerja	11,76	-0,31	-10,11	0,15	-0,32	1,27	1,85	-1,79	2,31	-0,54	-0,38	-0,19	-0,74	-0,86	0,85	-0,74	-2,22

Potensi pertanian (padi) Kabupaten Kuningan secara umum pada tahun 2020 mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduknya. Hal ini menunjukan Kabupaten Kuningan mampu menunjukkan dirinya sebagai kabupaten yang berswasembada beras di tahun 2020. Sebuah perstasi yang harus dipertahankan dan terus dikembangkan. Berikut ini adalah table terkait produksi padi dan jumlah konsumsinya selama tahun 2020 di kabupaten kota se Jawa Barat.

Tabel 6.2. Jumlah Produksi Beras dan Jumlah Konsumsi Beras Tahun 2020
di Kabupaten Kota di Propinsi Jawa Barat

Kabupaten / Kota	Produksi Beras (Ton)	Jumlah Konsumsi Beras (Ton)	Selisih (Ton)	Penilaian Kebutuhan Beras
KAB. BOGOR	171.763,14	746.244,24	-574.481,10	Membutuhkan Pasokan dari Daerah Lain
KAB. SUKABUMI	299.582,16	314.182,20	-14.600,04	Membutuhkan Pasokan dari Daerah Lain
KAB. CIANJUR	357.913,67	289.657,61	68.256,06	Kebutuhan Tercukupi Mandiri
KAB. BANDUNG	159.228,31	466.966,67	-307.738,36	Membutuhkan Pasokan dari Daerah Lain
KAB. GARUT	244.116,16	328.849,45	-84.733,29	Membutuhkan Pasokan dari Daerah Lain
KAB. TASIKMALAYA	255.287,06	224.074,31	31.212,75	Kebutuhan Tercukupi Mandiri
KAB. CIAMIS	162.465,77	150.844,43	11.621,34	Kebutuhan Tercukupi Mandiri
KAB. KUNINGAN	159.321,16	136.203,24	23.117,92	Kebutuhan Tercukupi Mandiri
KAB. CIREBON	285.576,14	274.361,76	11.214,38	Kebutuhan Tercukupi Mandiri
KAB. MAJALENGKA	325.363,32	152.580,66	172.782,66	Kebutuhan Tercukupi Mandiri
KAB. SUMEDANG	176.475,99	146.785,02	29.690,97	Kebutuhan Tercukupi Mandiri
KAB. INDRAMAYU	783.232,64	218.295,17	564.937,47	Kebutuhan Tercukupi Mandiri
KAB. SUBANG	557.708,57	197.288,52	360.420,05	Kebutuhan Tercukupi Mandiri
KAB. PURWAKARTA	91.896,76	118.872,43	-26.975,67	Membutuhkan Pasokan dari Daerah Lain
KAB. KARAWANG	624.991,50	293.318,45	331.673,05	Kebutuhan Tercukupi Mandiri
KAB. BEKASI	289.611,04	475.587,96	-185.976,92	Membutuhkan Pasokan dari Daerah Lain
KAB. BANDUNG BARAT	94.587,16	210.182,82	-115.595,66	Membutuhkan Pasokan dari Daerah Lain
KAB. PANGANDARAN	89.038,63	50.397,17	38.641,46	Kebutuhan Tercukupi Mandiri
KOTA. BOGOR	87,48	137.347,62	-137.260,14	Membutuhkan Pasokan dari Daerah Lain
KOTA. SUKABUMI	8.349,12	41.044,67	-32.695,55	Membutuhkan Pasokan dari Daerah Lain
KOTA. BANDUNG	3.906,11	320.296,14	-316.390,03	Membutuhkan Pasokan dari Daerah Lain
KOTA. CIREBON	592,46	80.849,28	-80.256,82	Membutuhkan Pasokan dari Daerah Lain
KOTA. BEKASI	1.564,41	374.959,92	-373.395,51	Membutuhkan Pasokan dari Daerah Lain
KOTA. DEPOK	108,72	302.969,63	-302.860,91	Membutuhkan Pasokan dari Daerah Lain
KOTA. CIMAHI	251,30	75.565,15	-75.313,85	Membutuhkan Pasokan dari Daerah Lain
KOTA. TASIKMALAYA	20.883,22	84.853,20	-63.969,98	Membutuhkan Pasokan dari Daerah Lain
KOTA. BANJAR	16.299,84	23.413,26	-7.113,42	Membutuhkan Pasokan dari Daerah Lain
JAWA. BARAT	5.180.201,84	6.235.990,98	-1.055.789,14	Membutuhkan Pasokan dari Daerah Lain

Tabel 6.3. Persentase Surplus Beras Tahun 2020 di Kabupaten Kota
yang Produksi Berasnya Lebih Dari Kebutuhannya

Kabupaten / Kota	Produksi Beras (Ton)	Jumlah Konsumsi Beras (Ton)	Selisih (Ton)	Persentase Surplus Beras
KAB. INDRAMAYU	783.232,64	218.295,17	564.937,47	258,80
KAB. SUBANG	557.708,57	197.288,52	360.420,05	182,69
KAB. KARAWANG	624.991,50	293.318,45	331.673,05	113,08
KAB. MAJALENGKA	325.363,32	152.580,66	172.782,66	113,24
KAB. CIANJUR	357.913,67	289.657,61	68.256,06	23,56
KAB. PANGANDARAN	89.038,63	50.397,17	38.641,46	76,67
KAB. TASIKMALAYA	255.287,06	224.074,31	31.212,75	13,93
KAB. SUMEDANG	176.475,99	146.785,02	29.690,97	20,23
KAB. KUNINGAN	159.321,16	136.203,24	23.117,92	16,97
KAB. CIAMIS	162.465,77	150.844,43	11.621,34	7,70
KAB. CIREBON	285.576,14	274.361,76	11.214,38	4,09

Tabel 6.4. Produktifitas Padi (GKG) KW per Hektare Menurut Kabupaten Kota di Jawa Barat Tahun 2020

Kabupaten / Kota	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Konsumsi Gabah Kering Giling (GKG Ton)	Produktifitas
KAB. BOGOR	55.692,05	298.974,65	53,68
KAB. SUKABUMI	93.371,47	521.459,25	55,85
KAB. CIANJUR	113.856,46	622.992,32	54,72
KAB. BANDUNG	50.150,32	277.156,28	55,27
KAB. GARUT	77.873,41	424.913,90	54,56
KAB. TASIKMALAYA	72.941,41	444.358,24	60,92
KAB. CIAMIS	52.925,20	282.791,46	53,43
KAB. KUNINGAN	45.785,65	277.317,90	60,57
KAB. CIREBON	83.233,39	497.080,10	59,72
KAB. MAJALENGKA	98.037,63	566.334,48	57,77
KAB. SUMEDANG	55.892,07	307.178,00	54,96
KAB. INDRAMAYU	226.626,09	1.363.311,87	60,16
KAB. SUBANG	169.416,08	970.759,74	57,30
KAB. PURWAKARTA	30.315,68	159.957,49	52,76
KAB. KARAWANG	181.915,22	1.087.873,90	59,80
KAB. BEKASI	103.171,69	504.103,31	48,86
KAB. BANDUNG BARAT	29.196,89	164.640,49	56,39
KAB. PANGANDARAN	29.313,07	154.982,57	52,87
KOTA. BOGOR	33,32	152,26	45,70
KOTA. SUKABUMI	2.335,74	14.532,67	62,22
KOTA. BANDUNG	1.074,49	6.799,08	63,28
KOTA. CIREBON	225,82	1.031,24	45,67
KOTA. BEKASI	483,64	2.723,05	56,30
KOTA. DEPOK	30,99	189,23	61,06
KOTA. CIMAHI	77,49	437,44	56,45
KOTA. TASIKMALAYA	7.569,30	36.349,80	48,02
KOTA. BANJAR	5.344,06	28.371,86	53,09
JAWA. BARAT	1.586.888,63	9.016.772,58	56,82

Grafik 6.2. Produktifitas Gabah Kering Giling GKG per Hektare (Kw/Ha) di Kabupaten Kota Seluruh Jawa Barat Tahun 2020

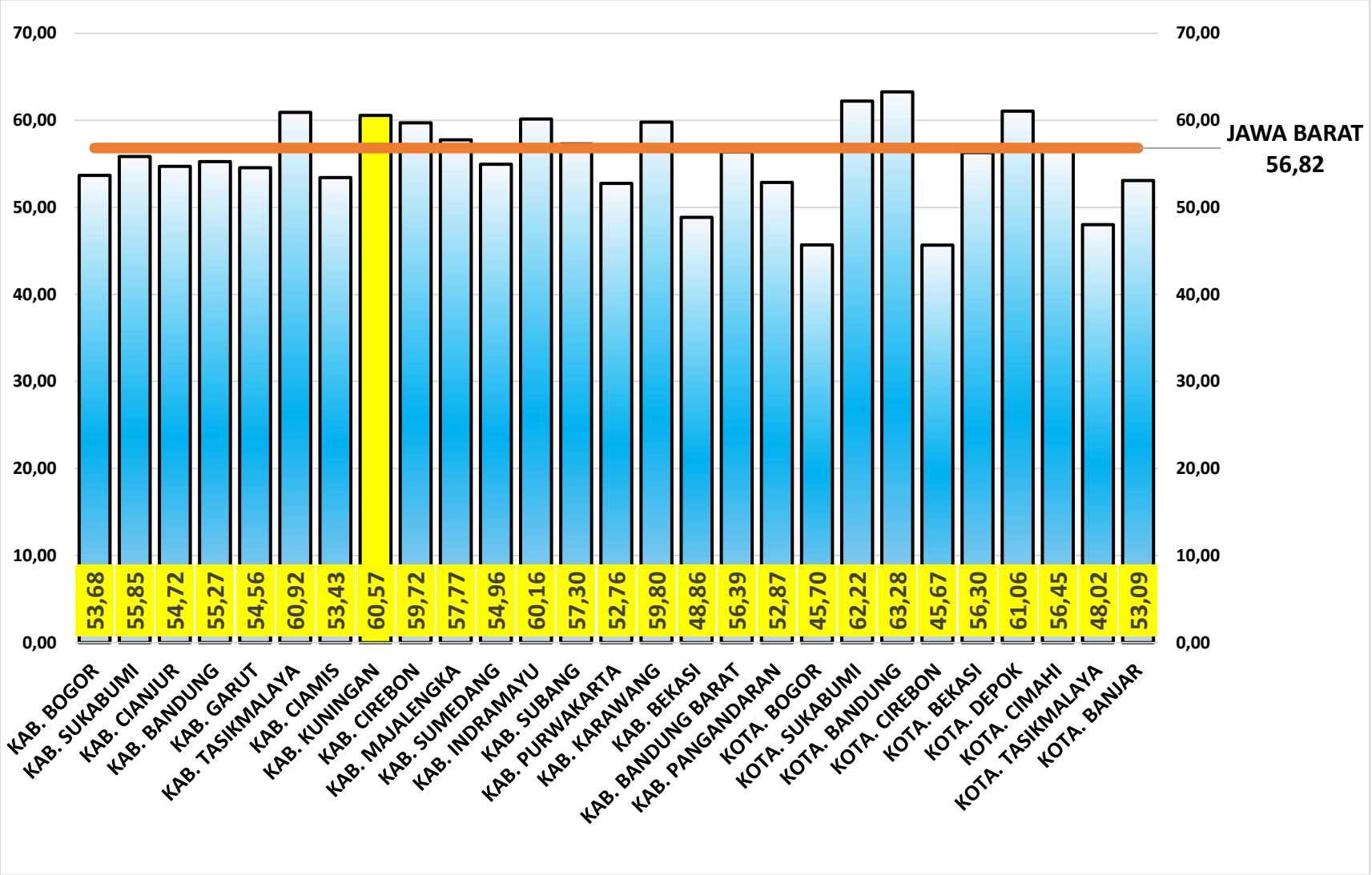

Tabel 6.5. Luas Panen Padi di Provinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota, 2019-2020 (Hektare)

Kabupaten Kota	2020	2019	Pertumbuhan	
			Absolut (Ha)	Relatif (%)
KAB. BOGOR	55.692,05	54.987,79	704,26	1,26
KAB. SUKABUMI	93.371,47	93.377,51	-6,04	-0,01
KAB. CIANJUR	113.856,46	117.909,06	-4.052,60	-3,56
KAB. BANDUNG	50.150,32	56.310,25	-6.159,93	-12,28
KAB. GARUT	77.873,41	80.397,63	-2.524,22	-3,24
KAB. TASIKMALAYA	72.941,41	83.365,36	-10.423,95	-14,29
KAB. CIAMIS	52.925,20	51.209,15	1.716,05	3,24
KAB. KUNINGAN	45.785,65	44.201,18	1.584,47	3,46
KAB. CIREBON	83.233,39	87.700,59	-4.467,20	-5,37
KAB. MAJALENGKA	98.037,63	94.996,45	3.041,18	3,10
KAB. SUMEDANG	55.892,07	56.438,90	-546,83	-0,98
KAB. INDRAMAYU	226.626,09	215.731,12	10.894,97	4,81
KAB. SUBANG	169.416,08	156.298,50	13.117,58	7,74
KAB. PURWAKARTA	30.315,68	26.452,65	3.863,03	12,74
KAB. KARAWANG	181.915,22	185.806,99	-3.891,77	-2,14
KAB. BEKASI	103.171,69	97.749,45	5.422,24	5,26
KAB. BANDUNG BARAT	29.196,89	29.184,27	12,62	0,04
KAB. PANGANDARAN	29.313,07	29.858,96	-545,89	-1,86
KOTA. BOGOR	33,32	62,29	-28,97	-86,94
KOTA. SUKABUMI	2.335,74	2.391,05	-55,31	-2,37
KOTA. BANDUNG	1.074,49	1.214,88	-140,39	-13,07
KOTA. CIREBON	225,82	231,11	-5,29	-2,34
KOTA. BEKASI	483,64	518,27	-34,63	-7,16
KOTA. DEPOK	30,99	84,99	-54,00	-174,25
KOTA. CIMAHI	77,49	70,93	6,56	8,47
KOTA. TASIKMALAYA	7.569,30	7.231,25	338,05	4,47
KOTA. BANJAR	5.344,06	5.055,12	288,94	5,41
JAWA. BARAT	1.586.888,63	1.578.835,70	8.052,93	0,51

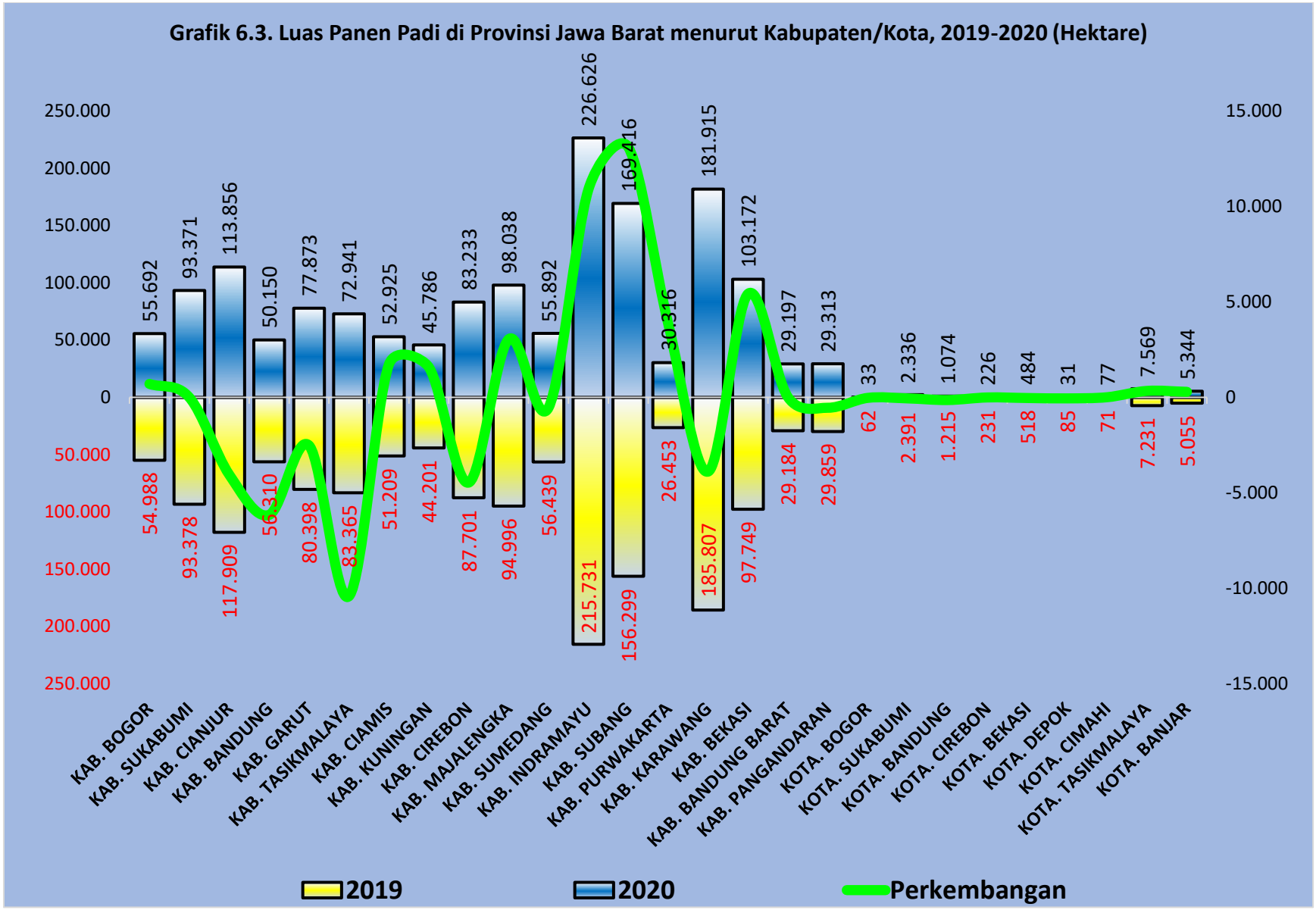
Grafik 6.3. Luas Panen Padi di Provinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota, 2019-2020 (Hektare)
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
15.000
10.000
5.000
0
-5.000
-10.000
-15.000
55.692
93.371
113.856
50.150
77.873
72.941
52.925
45.786
83.233
98.038
55.892
226.626
169.416
30.316
181.915
103.172
29.197
29.313
33
2.336
1.074
226
484
31
77
7.569
5.344
54.988
93.378
117.909
56.310
80.398
83.365
51.209
44.201
87.701
94.996
56.439
215.731
156.299
26.453
185.807
97.749
29.184
29.859
62
2.391
1.215
231
518
85
71
7.231
5.055
KAB. BOGOR
KAB. SUKABUMI
KAB. CIANJUR
KAB. BANDUNG
KAB. GARUT
KAB. TASIKMALAYA
KAB. CIAMIS
KAB. KUNINGAN
KAB. CIREBON
KAB. MAJALENGKA
KAB. SUMEDANG
KAB. INDRAMAYU
KAB. SUBANG
KAB. PURWAKARTA
KAB. KARAWANG
KAB. BEKASI
KAB. BANDUNG BARAT
KAB. PANGANDARAN
KOTA. BOGOR
KOTA. SUKABUMI
KOTA. BANDUNG
KOTA. CIREBON
KOTA. BEKASI
KOTA. DEPOK
KOTA. CIMAHI
KOTA. TASIKMALAYA
KOTA. BANJAR
2019
2020
Perkembangan

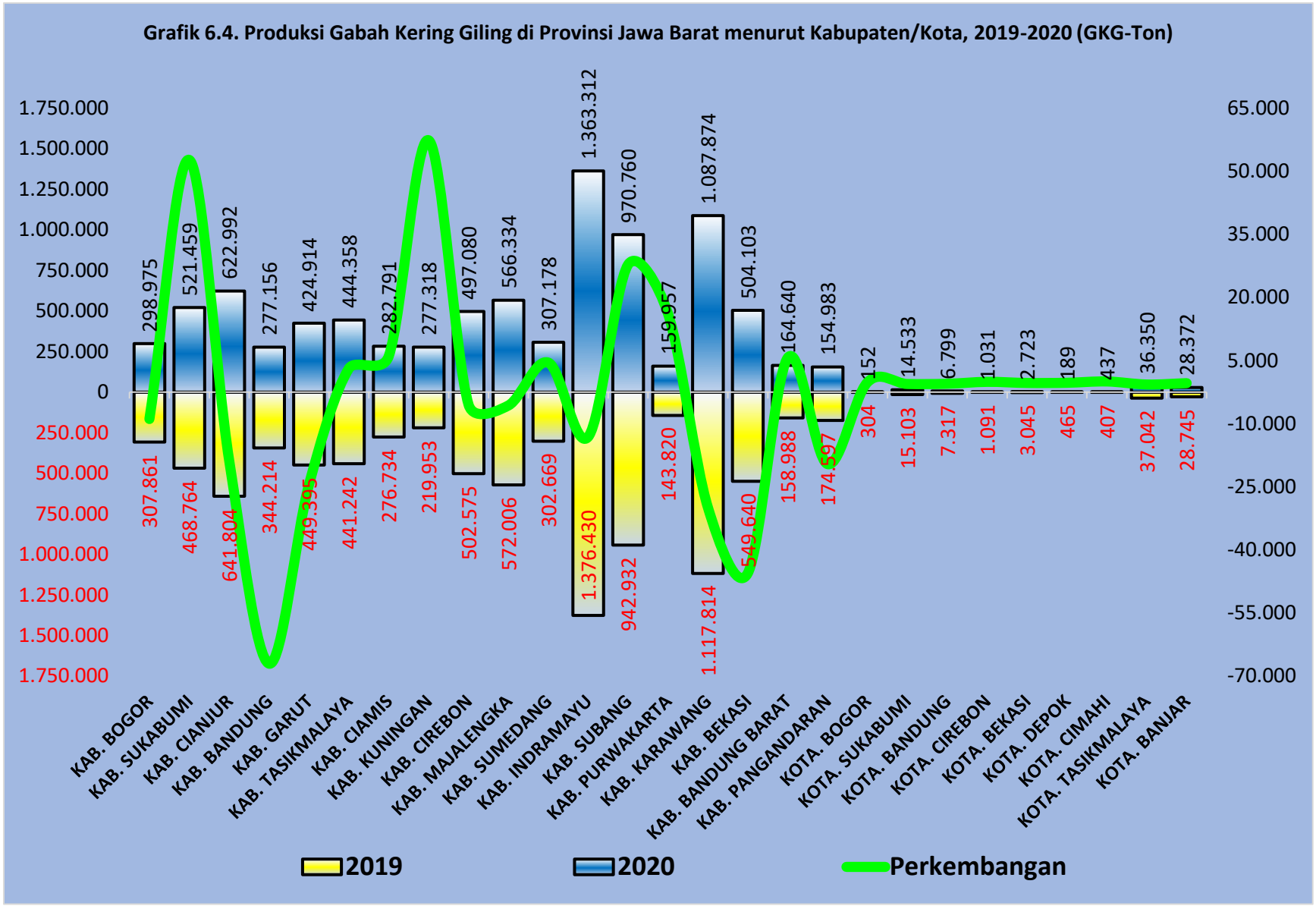
Grafik 6.4. Produksi Gabah Kering Giling di Provinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota, 2019-2020 (GKG-Ton)
1.750.000
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
250.000
500.000
750.000
1.000.000
1.250.000
1.500.000
1.750.000
65.000
50.000
35.000
20.000
5.000
-10.000
-25.000
-40.000
-55.000
-70.000
298.975
521.459
622.992
277.156
424.914
444.358
282.791
277.318
497.080
566.334
307.178
1.363.312
970.760
159.957
1.087.874
504.103
164.640
154.983
152
14.533
6.799
1.031
2.723
189
437
36.350
28.372
307.861
468.764
641.804
344.214
449.395
441.242
276.734
219.953
502.575
572.006
302.669
1.376.430
942.932
143.820
1.117.814
549.640
158.988
174.597
304
15.103
7.317
1.091
3.045
465
407
37.042
28.745
KAB. BOGOR
KAB. SUKABUMI
KAB. CIANJUR
KAB. BANDUNG
KAB. GARUT
KAB. TASIKMALAYA
KAB. CIAMIS
KAB. KUNINGAN
KAB. CIREBON
KAB. MAJALENGKA
KAB. SUMEDANG
KAB. INDRAMAYU
KAB. SUBANG
KAB. PURWAKARTA
KAB. KARAWANG
KAB. BEKASI
KAB. BANDUNG BARAT
KAB. PANGANDARAN
KOTA. BOGOR
KOTA. SUKABUMI
KOTA. BANDUNG
KOTA. CIREBON
KOTA. BEKASI
KOTA. DEPOK
KOTA. CIMAHI
KOTA. TASIKMALAYA
KOTA. BANJAR
2019
2020
Perkembangan

Grafik 6.5. Persentase Perkembangan Luas Panen Tanaman Padi Kabupaten Kota di Jawa Barat Tahun 2019 & 2020

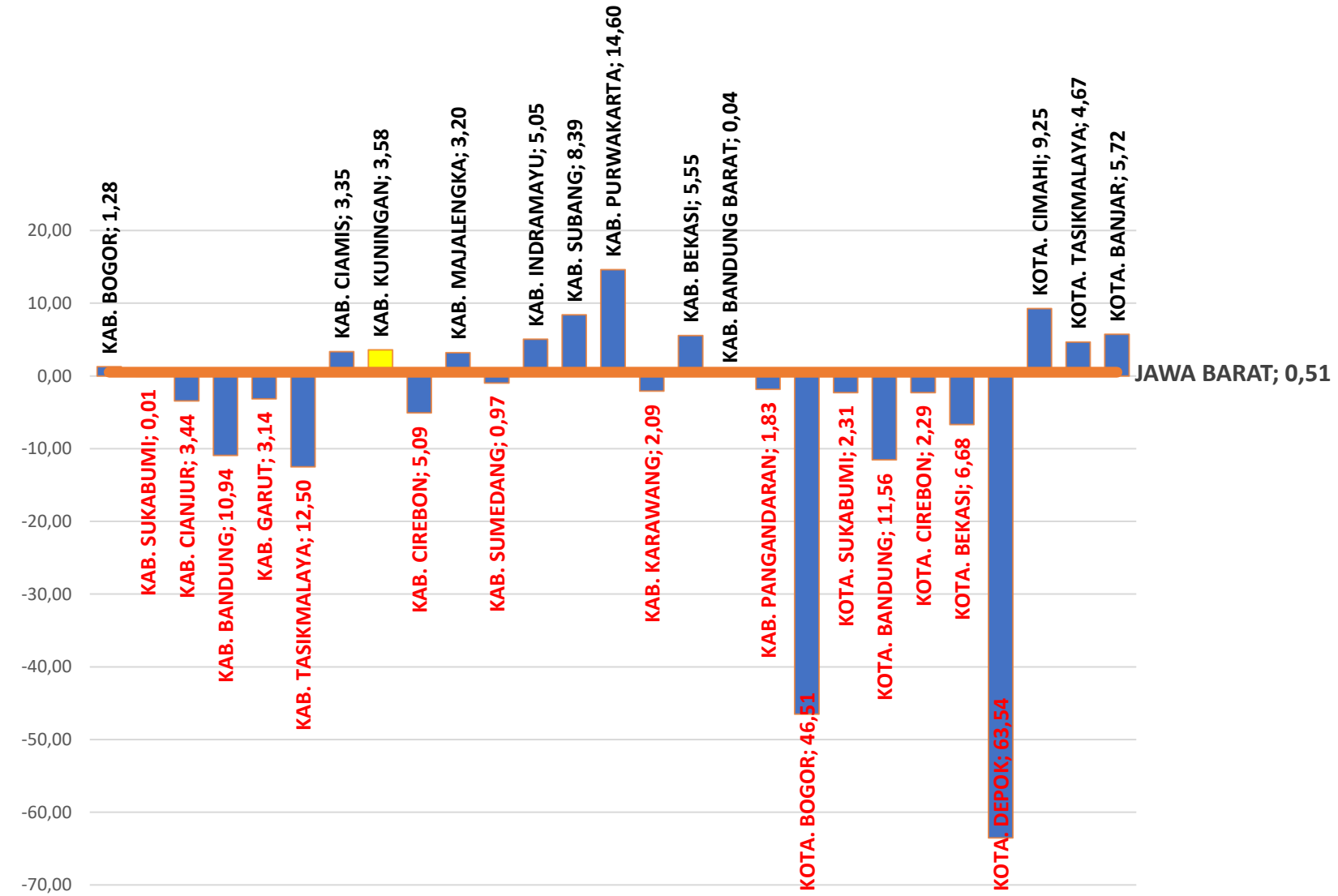

Grafik 6.6. Persentase Perkembangan Produksi Gabah Kering Giling (GKG) Kabupaten Kota di Jawa Barat Tahun 2019 & 2020

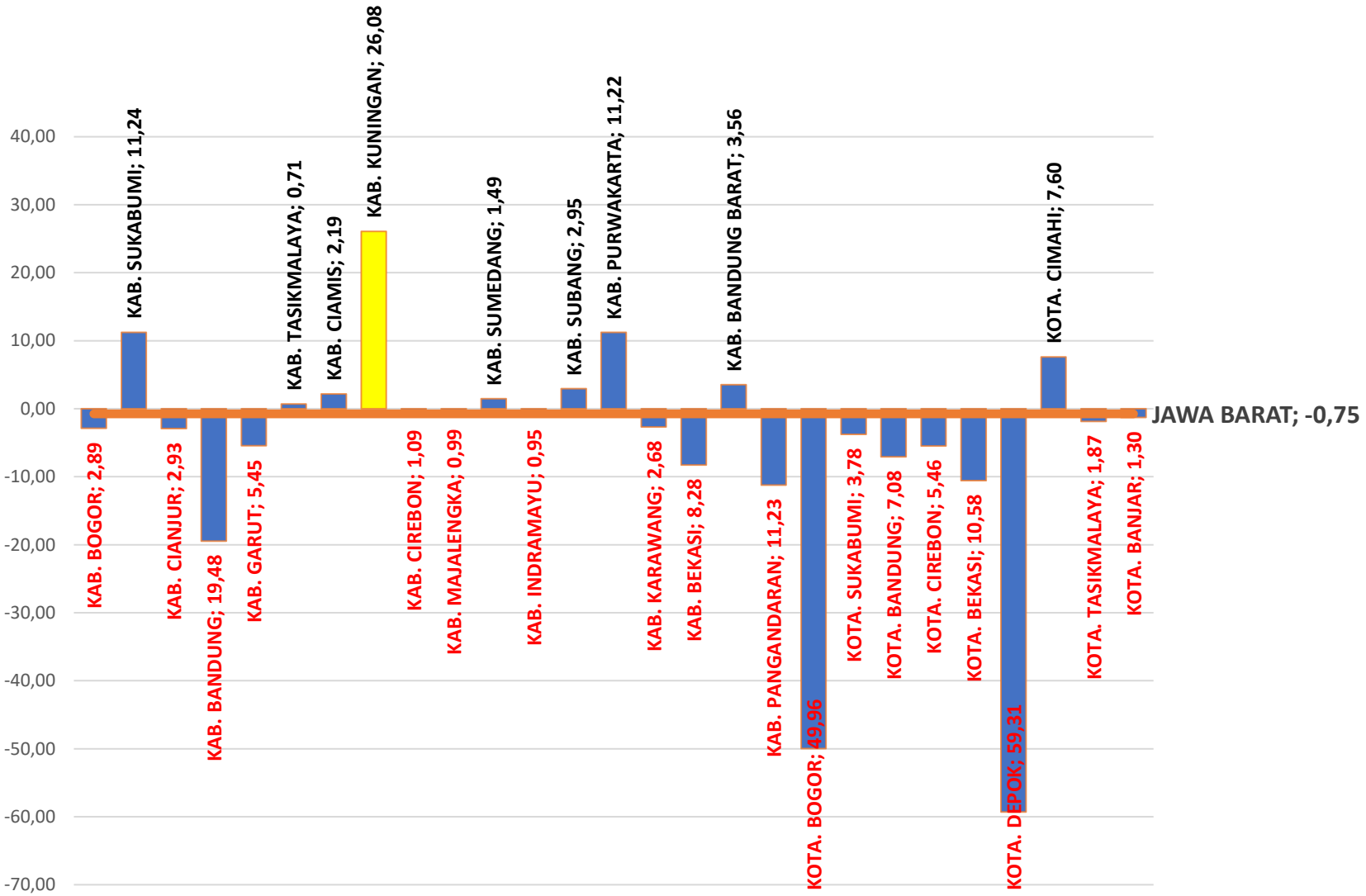

Bab VII
HASIL LQ ANALISIS, SHIFT SHARE & PENENTUAN KATEGORI PEREKONOMIAN UNGGULAN

Kajian Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan Tahun 2021

BAB VII.

HASIL LQ ANALISIS, SHIFT SHARE & PENENTUAN KATEGORI PEREKONOMIAN UNGGULAN

7.1. Hasil LQ Analisis

Analisis ini menggunakan angka PDRB ADHK (Series 2010) dari tahun 2014 sampai dengan 2020.

Perhitungan LQ Tahun 2014

Kategori Perekonomian dan uraiannya		Kabupaten	Provinsi	Tahun 2014	Ket
		pi/p total	Pi/P total	LQ 2014	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,23163	0,08062	2,87300	basis
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01830	0,02375	0,77079	non basis
C	Industri Pengolahan	0,02415	0,43720	0,05524	non basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00099	0,00555	0,17880	non basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00091	0,00078	1,16233	basis
F	Konstruksi	0,08833	0,08058	1,09614	basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,17656	0,15979	1,10493	basis
H	Transportasi dan Pergudangan	0,13689	0,04488	3,04993	basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,01729	0,02397	0,72117	non basis
J	Informasi dan Komunikasi	0,04363	0,03133	1,39251	basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,05075	0,02393	2,12120	basis
L	Real Estate	0,03072	0,01142	2,69021	basis
M,N	Jasa Perusahaan	0,00411	0,00397	1,03663	basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,03947	0,02060	1,91568	basis
P	Jasa Pendidikan	0,08759	0,02560	3,42075	basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,01519	0,00677	2,24343	basis
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,03350	0,01926	1,73917	basis

Perhitungan LQ Tahun 2015

Kategori Perekonomian dan uraiannya		Kabupaten	Provinsi	Tahun 2015	Ket
		pi/p total	Pi/P total	LQ 2015	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,22013	0,07687	2,86354	basis
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01732	0,02270	0,76306	non basis
C	Industri Pengolahan	0,02415	0,43444	0,05558	non basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00096	0,00492	0,19517	non basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00090	0,00079	1,15044	basis
F	Konstruksi	0,08992	0,08164	1,10148	basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,17136	0,15775	1,08627	basis
H	Transportasi dan Pergudangan	0,14021	0,04665	3,00535	basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,01764	0,02467	0,71531	non basis
J	Informasi dan Komunikasi	0,04744	0,03469	1,36743	basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,05182	0,02445	2,11923	basis
L	Real Estate	0,03033	0,01146	2,64585	basis
M,N	Jasa Perusahaan	0,00418	0,00409	1,02192	basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,03793	0,02070	1,83269	basis
P	Jasa Pendidikan	0,09417	0,02685	3,50674	basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,01629	0,00736	2,21476	basis
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,03525	0,01998	1,76439	basis

Perhitungan LQ Tahun 2016

Kategori Perekonomian dan uraiannya		Kabupaten	Provinsi	Tahun 2016	Ket
		pi/p total	Pi/P total	LQ 2016	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,21690	0,07690	2,82056	basis
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01629	0,02127	0,76589	non basis
C	Industri Pengolahan	0,02439	0,43075	0,05662	non basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00096	0,00481	0,19916	non basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00090	0,00079	1,14045	basis
F	Konstruksi	0,08780	0,08114	1,08201	basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,16839	0,15590	1,08012	basis
H	Transportasi dan Pergudangan	0,14123	0,04805	2,93907	basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,01796	0,02552	0,70383	non basis
J	Informasi dan Komunikasi	0,04979	0,03752	1,32716	basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,05342	0,02589	2,06291	basis
L	Real Estate	0,03051	0,01155	2,64095	basis
M,N	Jasa Perusahaan	0,00428	0,00418	1,02391	basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,03684	0,02018	1,82560	basis
P	Jasa Pendidikan	0,09758	0,02735	3,56819	basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,01677	0,00762	2,20029	basis
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,03598	0,02056	1,74996	basis

Perhitungan LQ Tahun 2017

Kategori Perekonomian dan uraiannya		Kabupaten	Provinsi	Tahun 2017	Ket
		pi/p total	Pi/P total	LQ 2017	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,21504	0,07418	2,89906	basis
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01534	0,01979	0,77542	non basis
C	Industri Pengolahan	0,02407	0,43069	0,05589	non basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00094	0,00405	0,23177	non basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00091	0,00080	1,13129	basis
F	Konstruksi	0,08977	0,08261	1,08667	basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,16422	0,15470	1,06152	basis
H	Transportasi dan Pergudangan	0,13975	0,04782	2,92219	basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,01833	0,02626	0,69806	non basis
J	Informasi dan Komunikasi	0,05194	0,03984	1,30374	basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,05268	0,02544	2,07093	basis
L	Real Estate	0,03133	0,01199	2,61296	basis
M,N	Jasa Perusahaan	0,00440	0,00430	1,02280	basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,03523	0,02004	1,75735	basis
P	Jasa Pendidikan	0,10154	0,02821	3,59883	basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,01731	0,00784	2,20763	basis
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,03720	0,02143	1,73618	basis

Perhitungan LQ Tahun 2018

Kategori Perekonomian dan uraiannya		Kabupaten	Provinsi	Tahun 2018	Ket
		pi/p total	Pi/P total	LQ 2018	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,21358	0,07168	2,97985	basis
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01450	0,01796	0,80730	non basis
C	Industri Pengolahan	0,02382	0,43422	0,05485	non basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00092	0,00383	0,24003	non basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00092	0,00080	1,14875	basis
F	Konstruksi	0,09182	0,08404	1,09263	basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,16064	0,15258	1,05281	basis
H	Transportasi dan Pergudangan	0,13843	0,04769	2,90265	basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,01874	0,02688	0,69701	non basis
J	Informasi dan Komunikasi	0,05322	0,04115	1,29312	basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,05208	0,02517	2,06927	basis
L	Real Estate	0,03205	0,01244	2,57633	basis
M,N	Jasa Perusahaan	0,00453	0,00443	1,02424	basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,03394	0,01927	1,76118	basis
P	Jasa Pendidikan	0,10515	0,02822	3,72562	basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,01756	0,00801	2,19308	basis
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,03811	0,02164	1,76150	basis

Perhitungan LQ Tahun 2019

Kategori Perekonomian dan uraiannya		Kabupaten	Provinsi	Tahun 2019	Ket
		pi/p total	Pi/P total	LQ 2019	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,20995	0,07012	2,99389	basis
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01325	0,01662	0,79724	non basis
C	Industri Pengolahan	0,02442	0,42998	0,05679	non basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00090	0,00360	0,24845	non basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00089	0,00078	1,13431	basis
F	Konstruksi	0,09155	0,08490	1,07831	basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,16236	0,15612	1,03991	basis
H	Transportasi dan Pergudangan	0,13775	0,04764	2,89120	basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,01898	0,02744	0,69166	non basis
J	Informasi dan Komunikasi	0,05452	0,04281	1,27338	basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,05076	0,02448	2,07351	basis
L	Real Estate	0,03279	0,01297	2,52849	basis
M,N	Jasa Perusahaan	0,00463	0,00460	1,00617	basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,03330	0,01924	1,73046	basis
P	Jasa Pendidikan	0,10750	0,02826	3,80372	basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,01795	0,00835	2,15041	basis
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,03852	0,02207	1,74582	basis

Perhitungan LQ Tahun 2020

Kategori Perekonomian dan uraiannya		Kabupaten	Provinsi	Tahun 2020	Ket
		pi/p total	Pi/P total	LQ 2020	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,21279	0,07352	2,89428	basis
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01288	0,01633	0,78856	non basis
C	Industri Pengolahan	0,02445	0,42213	0,05793	non basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00088	0,00341	0,25693	non basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00097	0,00089	1,08623	basis
F	Konstruksi	0,08493	0,08182	1,03796	basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,15735	0,14731	1,06813	basis
H	Transportasi dan Pergudangan	0,13554	0,04679	2,89657	basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,01824	0,02655	0,68694	non basis
J	Informasi dan Komunikasi	0,06769	0,05908	1,14566	basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,05095	0,02538	2,00748	basis
L	Real Estate	0,03287	0,01355	2,42639	basis
M,N	Jasa Perusahaan	0,00449	0,00385	1,16760	basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,03201	0,01836	1,74353	basis
P	Jasa Pendidikan	0,10922	0,03091	3,53365	basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,01734	0,00809	2,14315	basis
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,03740	0,02202	1,69834	basis

Hasil LQ Analisis dari PDRB Kabupaten Kuningan dan Propinsi Jawa Barat 2014 sd 2020

Kategori Perekonomian dan uraiannya		Local Quotient							Rata-rata	Ket
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,87	2,86	2,82	2,90	2,98	2,99	2,89	2,90	basis sangat kuat
B	Pertambangan dan Penggalian	0,77	0,76	0,77	0,78	0,81	0,80	0,79	0,78	non basis
C	Industri Pengolahan	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	non basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,20	0,20	0,23	0,24	0,25	0,26	0,22	non basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,16	1,15	1,14	1,13	1,15	1,13	1,09	1,14	basis
F	Konstruksi	1,10	1,10	1,08	1,09	1,09	1,08	1,04	1,08	basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,10	1,09	1,08	1,06	1,05	1,04	1,07	1,07	basis
H	Transportasi dan Pergudangan	3,05	3,01	2,94	2,92	2,90	2,89	2,90	2,94	basis sangat kuat
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,72	0,72	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,70	non basis
J	Informasi dan Komunikasi	1,39	1,37	1,33	1,30	1,29	1,27	1,15	1,30	basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,12	2,12	2,06	2,07	2,07	2,07	2,01	2,07	basis
L	Real Estate	2,69	2,65	2,64	2,61	2,58	2,53	2,43	2,59	basis
M,N	Jasa Perusahaan	1,04	1,02	1,02	1,02	1,02	1,01	1,17	1,04	basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,92	1,83	1,83	1,76	1,76	1,73	1,74	1,80	basis
P	Jasa Pendidikan	3,42	3,51	3,57	3,60	3,73	3,80	3,53	3,59	basis sangat kuat
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,24	2,21	2,20	2,21	2,19	2,15	2,14	2,19	basis
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,74	1,76	1,75	1,74	1,76	1,75	1,70	1,74	basis

7.2. Hasil Shift Share Analisis

Data PDRB

Kategori Perekonomian dan uraiannya		Kabupaten (rupiah)		Provinsi (rupiah)		ri	Ri	Ra
		PDRB 2019	PDRB 2020	PDRB 2019	PDRB 2020			
		yo	yt	Yo	Yt	yit/yio	Yit/Yio	Yt/Yo
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.540.569,76	3.591.833,00	104.596.750,29	106.991.939,99	1,0145	1,0229	0,9756
B	Pertambangan dan Penggalian	223.465,13	217.426,17	24.791.421,11	23.771.256,40	0,9730	0,9589	0,9756
C	Industri Pengolahan	411.822,95	412.733,31	641.352.048,15	614.291.242,47	1,0022	0,9578	0,9756
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.094,33	14.794,64	5.373.577,01	4.964.314,70	0,9801	0,9238	0,9756
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.991,27	16.318,33	1.168.926,16	1.295.180,01	1,0885	1,1080	0,9756
F	Konstruksi	1.543.846,66	1.433.511,76	126.631.198,70	119.068.584,14	0,9285	0,9403	0,9756
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.737.994,64	2.655.961,06	232.871.679,88	214.374.848,53	0,9700	0,9206	0,9756
H	Transportasi dan Pergudangan	2.322.998,84	2.287.912,42	71.064.359,92	68.097.411,47	0,9849	0,9582	0,9756
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	320.064,25	307.836,57	40.928.315,75	38.634.853,69	0,9618	0,9440	0,9756
J	Informasi dan Komunikasi	919.420,25	1.142.555,68	63.861.229,68	85.980.065,77	1,2427	1,3464	0,9756
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	855.982,18	859.970,03	36.512.282,79	36.932.386,18	1,0047	1,0115	0,9756
L	Real Estate	553.005,78	554.888,03	19.344.117,67	19.716.059,47	1,0034	1,0192	0,9756
M,N	Jasa Perusahaan	78.035,96	75.829,49	6.859.664,40	5.599.118,85	0,9717	0,8162	0,9756
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	561.596,95	540.307,08	28.704.062,40	26.716.829,14	0,9621	0,9308	0,9756
P	Jasa Pendidikan	1.812.968,74	1.843.532,86	42.156.299,57	44.978.193,16	1,0169	1,0669	0,9756
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	302.650,44	292.772,31	12.448.015,09	11.777.487,17	0,9674	0,9461	0,9756
R,S,T,U	Jasa lainnya	649.638,80	631.270,26	32.912.005,18	32.045.368,61	0,9717	0,9737	0,9756
	Total	16.864.146,93	16.879.452,99	1.491.575.953,74	1.455.235.139,77	1,0009	0,9756	0,9756

Hasil Perhitungan dan Cara Mengoreksi

Kategori Perekonomian dan uraiannya		KPN	KPP	KPPW	Koreksi*)	
		Ra-1	Ri-Ra	ri-Ri	KPN+KPP+KPPW	Pertumbuhan Ekonomi
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2%	4,73%	-0,84%	1,45%	1,45%
B	Pertambangan dan Penggalian	-2%	-1,68%	1,41%	-2,70%	-2,70%
C	Industri Pengolahan	-2%	-1,78%	4,44%	0,22%	0,22%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-2%	-5,18%	5,63%	-1,99%	-1,99%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2%	13,24%	-1,95%	8,85%	8,85%
F	Konstruksi	-2%	-3,54%	-1,17%	-7,15%	-7,15%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2%	-5,51%	4,95%	-3,00%	-3,00%
H	Transportasi dan Pergudangan	-2%	-1,74%	2,66%	-1,51%	-1,51%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2%	-3,17%	1,78%	-3,82%	-3,82%
J	Informasi dan Komunikasi	-2%	37,07%	-10,37%	24,27%	24,27%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-2%	3,59%	-0,68%	0,47%	0,47%
L	Real Estate	-2%	4,36%	-1,58%	0,34%	0,34%
M,N	Jasa Perusahaan	-2%	-15,94%	15,55%	-2,83%	-2,83%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2%	-4,49%	3,13%	-3,79%	-3,79%
P	Jasa Pendidikan	-2%	9,13%	-5,01%	1,69%	1,69%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-2%	-2,95%	2,12%	-3,26%	-3,26%
R,S,T,U	Jasa lainnya	-2%	-0,20%	-0,19%	-2,83%	-2,83%

Interpretasi Pergeseran Bersih (PB)

Kategori Perekonomian dan uraiannya		KPP	KPPW	KPP+KPPW (PB)	KETERANGAN
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,73%	-0,84%	3,88%	progresif
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,68%	1,41%	-0,27%	mundur
C	Industri Pengolahan	-1,78%	4,44%	2,66%	progresif
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-5,18%	5,63%	0,45%	progresif
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,24%	-1,95%	11,29%	progresif
F	Konstruksi	-3,54%	-1,17%	-4,71%	mundur
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,51%	4,95%	-0,56%	mundur
H	Transportasi dan Pergudangan	-1,74%	2,66%	0,93%	progresif
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,17%	1,78%	-1,38%	mundur
J	Informasi dan Komunikasi	37,07%	-10,37%	26,71%	progresif
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,59%	-0,68%	2,90%	progresif
L	Real Estate	4,36%	-1,58%	2,78%	progresif
M,N	Jasa Perusahaan	-15,94%	15,55%	-0,39%	mundur
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-4,49%	3,13%	-1,35%	mundur
P	Jasa Pendidikan	9,13%	-5,01%	4,12%	progresif
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-2,95%	2,12%	-0,83%	mundur
R,S,T,U	Jasa lainnya	-0,20%	-0,19%	-0,39%	mundur

Interpretasi KPP

Kategori Perekonomian dan uraiannya		KPP (+/-)	Ket
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,73%	spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh cepat
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,68%	spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
C	Industri Pengolahan	-1,78%	spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-5,18%	spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,24%	spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh cepat
F	Konstruksi	-3,54%	spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,51%	spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
H	Transportasi dan Pergudangan	-1,74%	spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,17%	spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
J	Informasi dan Komunikasi	37,07%	spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh cepat
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,59%	spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh cepat
L	Real Estate	4,36%	spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh cepat
M,N	Jasa Perusahaan	-15,94%	spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-4,49%	spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
P	Jasa Pendidikan	9,13%	spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh cepat
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-2,95%	spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat
R,S,T,U	Jasa lainnya	-0,20%	spesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat

7.3. Perhitungan Skor Hasil LQ dan Shift Share Analisis dan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan Tahun 2020

Kategori Per-ekonomi-an *)	Perhitungan LQ (PDRB)	Status LQ	Perhitungan Pergeseran Shift Share (PDRB)	Status Shift Share	Selisih Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (Kuningan & Jawa Barat)	Status Ketenaga-kerjaan	Penilaian Status Potensi Menurut Kategori Perekonomian Kuningan 2020			
							Nilai LQ	Nilai SHIFT SHARE	Nilai TENAGA KERJA	TOTAL
A	2,90	basis sangat kuat	3,88	progresif	11,76	Sangat Potensi	2	1	3	6
B	0,78	non basis	-0,27	mundur	-0,31	Kurang Potensi	0	0	1	1
C	0,06	non basis	2,66	progresif	-10,11	Tidak Potensi	0	1	0	1
D	0,22	non basis	0,45	progresif	0,15	Potensi	0	1	2	3
E	1,14	basis	11,29	progresif	-0,32	Kurang Potensi	1	1	1	3
F	1,08	basis	-4,71	mundur	1,27	Potensi	1	0	2	3
G	1,07	basis	-0,56	mundur	1,85	Potensi	1	0	2	3
H	2,94	basis sangat kuat	0,93	progresif	-1,79	Kurang Potensi	2	1	1	4
I	0,70	non basis	-1,38	mundur	2,31	Potensi	0	0	2	2
J	1,30	basis	26,71	progresif	-0,54	Kurang Potensi	1	1	1	3
K	2,07	basis	2,90	progresif	-0,38	Kurang Potensi	1	1	1	3
L	2,59	basis	2,78	progresif	-0,19	Kurang Potensi	1	1	1	3
M,N	1,04	basis	-0,39	mundur	-0,74	Kurang Potensi	1	0	1	2
O	1,80	basis	-1,35	mundur	-0,86	Kurang Potensi	1	0	1	2
P	3,59	basis sangat kuat	4,12	progresif	0,85	Potensi	2	1	2	5
Q	2,19	basis	-0,83	mundur	-0,74	Kurang Potensi	1	0	1	2
R,S,T,U	1,74	basis	-0,39	mundur	-2,22	Kurang Potensi	1	0	1	2

*) Kategori Perekonomian

A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B	Pertambangan dan Penggalian
C	Industri Pengolahan
D	Pengadaan Listrik dan Gas
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F	Konstruksi
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H	Transportasi dan Pergudangan
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J	Informasi dan Komunikasi
K	Jasa Keuangan dan Asuransi
L	Real Estate
M,N	Jasa Perusahaan
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P	Jasa Pendidikan
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R,S,T,U	Jasa lainnya

Bab VIII
PEMBAHASAN HASIL ANALISIS KETENAGAKERJAAN & PERTANIAN

Kajian Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan Tahun 2021

BAB VIII.

PEMBAHASAN HASIL ANALISIS KETENAGAKERJAAN & PERTANIAN.

Bentuk dari permbahasan dari hasil analisis ini adalah dalam bentuk beberapa literatur yang diambil dari beberapa jurnal ilmiah terkait tentang pertanian dan ketenagakerjaan.

8.1. Menjaga Stabilitas Sektor Pertanian Saat Pandemi Covid-19

Covid – 19 (*Corona Virus Disease*) atau dapat dikenal dengan sebutan corona virus merupakan virus baru yang menyerang pada sistem pernafasan manusia. Virus ini pertama ditemukan di Negara China tepatnya Wuhan pada akhir tahun 2019. Corona virus dinyatakan penyakit yang membahayakan bagi kesehatan manusia karena proses penyebaran yang mudah dari manusia ke manusia yang lain serta menyerang manusia siapa saja dari mulai bayi hingga orang dewasa dan rentan lansia. Tak bisa dipungkiri bahwa virus ini dalam beberapa bulan sudah menyebar ke beberapa negara termasuk Indonesia sehingga pada awal bulan maret pemerintah menerapkan kebijakan untuk tetap berada di rumah dan dilanjut dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya tindakan untuk menurunkan penyebaran virus tersebut.

Perubahan pada berbagai sektor di kehidupan manusia selama masa pandemik membuat masyarakat menjadi resah, panik dan khawatir karena menyangkut ekonomi masing–masing. Bahkan pada sektor pertanian yang merupakan bahan pemasok pangan bagi manusia mengalami perubahan dalam aktivitas petani. Berbagai petani di Indonesia merasakan dampak adanya virus tersebut. Mirisnya banyak keluhan petani terhadap keadaan masa pandeminya yang merubah nasib petani menjadi khawatir. Adanya keadaan virus pandemi yang belum diketahui sampai kapan akan

berakhir memiliki dampak yang signifikan bagi petani, pemasok bahan pangan atau sektor pertanian.

Dikutip dari berita Kompasiana 18/04/2020 menyatakan bahwa sektor pertanian tidak luput dari dampak covid-19. Sebagian besar pelaku pertanian telah merasakan dampak dimulai dari hasil penjualan panen yang mulai sepi pelanggan dikarenakan kebijakan untuk tetap berada dirumah sehingga berpengaruh terhadap harga yang turun dan kondisi petani yang mulai panik akan kerugian yang di alami. Himbauan kebijakan pemerintah untuk tetap di rumah tidak bisa sepenuhnya dilakukan oleh para petani, hal ini disebabkan karena bertanilah mata pencaharian mereka. Menurut survey memang terjadi penurunan pemesanan hasil panen dari pasar yang sangat drastis tanpa disadari pelanggan di pasar mulai sepi.

Dikutip dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan 27/05/2020 mengatakan bahwa ada 6 dampak yang mempengaruhi sektor pertanian yaitu harga pasar dan pertanian yang menciptakan pasar dan transaksi yang tidak semestinya sehingga akan memperngaruhi stabilitas *supply* dan *demand* barang, rantai pasokan melambat dan kekurangan akibat logistik mengalami kesulitan, kesehatan petani yang mayoritas relatif umurnya lebih tua dibanding dengan pekerjaan umum yang dapat menimbulkan kepanikan aktivitas petani, tenaga kerja pertanian, keselamatan pekerja dan alat pelindung diri (APD), dan gangguan lainya.

Keadaan sulit adanya pandemik berbagai sektor di kehidupan mengalami kendala masing – masing. Pada sektor pertanian yang mengharuskan tetap memproduksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sedang berjuang untuk menstabilkan keadaan pertanian. Kepanikan dan kekhawatiran petani menjadi salah satu keluhan yang terdengar karena aktivitas yang sebelumnya tidak berjalan dengan semestinya saat ini. Petani berusaha untuk dapat memproduksi secara optimal melewati jatuh bangun untuk menjaga ketahanan pangan. Untuk itu

masyarakat dan pemerintah untuk menunjukan dukungan dan solusi yang terbaik bagi petani di Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Petani yang tetap untuk berkontribusi dalam penyediaan pangan tidak berbeda jauh dengan elemen masyarakat lain yang menjadi garda terdepan dalam penangan masa pandemik.

Pertama, Petani harus mendapatkan dukungan yang adil, dimaksudkan dengan adil yaitu petani diseluruh Indonesia merasakan dan mendapatkan dukungan yang diberikan oleh pemerintah. Adanya dukungan petani harapanya dapat mengurangi kepanikan dan khawatir sehingga dalam menjalankan aktivitas untuk memproduksi dapat optimal sesuai dengan keinginan.

Kedua, masyarakat juga harus berbondong bondong untuk saling membantu dalam keadaan seperti ini. Kontribusi setiap masyarakat adalah hal yang diperlukan untuk melawan keadaan sulit. Karena saat wabah yang akan meluas tetap yang sangat dibutuhan oleh setiap masyarakat yaitu pangan. Kebutuhan pangan tidak akan terhenti dan akan tetap terus memenuhi permintaan masyarakat. Sehingga peran semua masyarakat dibutuhkan untuk mewujudkan dalam ketahaan pangan.

Ketiga, kebijakan pemerintah pada sektor pertanian mengenai srategi pertanian dalam masa pandemik ini.

Kementrian Pertanian Republik Indonesia mengatakan bahwa memiliki 6 strategi sektor pertanian pada masa pandemik covid -19. Pertama, Tetap bekerja dengan semangat mewujudkan kemandirian pangan. Mengharuskan seluruh pekerja dalam bidang pertanian saling berkontribusi dalam pekerrjaan masing- masing antara penyuluhan dengan petani.

Kedua, meningkatkan produksi nasional berbasis pertanian rakyat dan keberpihakkan pada petani kecil. Keadaan seperti menjadikan momentum reformasi sektor pangan yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Ketiga, optimalisasi lahan dan perkarangan dengan tanaman pangan untuk kebutuhan rumah tangga. Masyarakat untuk saat ini diharuskan untuk memanfaatkan lahan sekitar dalam memenuhi sebagian pemenuhan kebutuhan.

Keempat, mematakan daerah rawan pangan dan alokasi kebutuhan pangan secara tepat. Mengalokasikaan rakyat yang berada didaerah yang sulit akan terpenuhnya kebutuhan sehingga adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah akan mudah bagi rakyat kecil.

Kelima, menciptakan efesiensi rantai pemasaran produk pertanian dan berpihakan pasar pada petani dengan memfasilitasi kerjasama antara petani dengan produsen melalui pengantaran berbasis online.

Keenam, menjaga petani tetap sehat, sejahtera, dan semangat agar tetap terus berproduksi karena petani merupakan pelaku pertama dalam pembangunan pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional.

8.2. Strategi Ekonomi Sektor Pertanian Di Tengah Pandemi Covid-19

Adanya krisis yang dibarengi dengan almost complete autarky (restriksi perdagangan internasional) memberikan ruang eksperimen kepada sistem pertanian kita untuk diuji sehingga kita bisa mengkaji "lubang-lubang" kelemahan agar ketahanan pangan dan cita-cita swasembada pangan kita di masa yang akan datang dapat dicapai. Mengutip ekonom legendaris Indonesia Mohamad Sadli dengan Sadli's law-nya: Good times make bad policies, bad times make good policies.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan "ambruk" di tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 0.5%, sementara SDGs Center UNPAD memproyeksikan antara 1.0 – 1.8%. Jauh melampaui

pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama beberapa tahun terakhir yang berada di kisaran 5%. Dalam analisis outlook ekonomi yang dilakukan UNPAD, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bahkan bisa turun lebih besar dari nasional menjadi antara -2.1% (skenario pesimis) dan 0.6% (skenario optimis). Sebagai dampaknya, berbagai agenda pembangunan seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan IPM akan mengalami gangguan serius. Pengangguran diprediksi akan meningkat dari 8% di tahun 2019 menjadi 12% dalam skenario terparah.

Pandemi Covid-19, efeknya akan bervariasi terhadap berbagai sektor perekonomian. Analisis SDGs Center UNPAD, misalnya memprediksikan salah satu sektor yang akan terkena dampak parah adalah sektor terkait pariwisata. Sementara itu BPS, melaporkan, perekonomian Bali Nusa Tenggara misalnya selama kuartal pertama tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar hampir 7%, terparah di seluruh Indonesia. Ini pun belum memasukan dampak dari pembatasan sosial karena krisis pandemi Korona baru mulai di bulan April 2020. Ketika itu terjadi sektor manufaktur dan industri secara umum akan terkena dampak cukup masif.

Analisis pemodelan ekonomi UNPAD tersebut juga memproyeksikan sektor manufaktur dan industri akan terkena imbas yang juga parah. Demikian juga daerah-daerah basis industri tersebut seperti Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Analisis ini juga menyimpulkan bahwa sektor pertanian akan terkena dampak paling kecil dibandingkan sektor lain. Hal ini terjadi karena dampak dari pembatasan sosial akan relatif minimal pada sektor pertanian, walaupun masih ada resiko dari disrupsi rantai penawaran (supply chain) dan terpuruknya permintaan. Relatif resilient-nya sektor pertanian juga dikonfirmasi oleh proyeksi dari the Economist Inteligence Unit (EIU) untuk perekonomian Indonesia edisi bulan April lalu. Ketika sebagai dampak dari pandemi Covid-19, EIU merevisi pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 3.0% menjadi -1.5% (terkoreksi -4.5%) dan sektor jasa sebesar 7.2% menjadi 2.4% (terkoreksi -4.8%), pertumbuhan sektor pertanian

hanya direvisi dari 4.1% menjadi 3.2% (-0.9%). Analisis pemodelan SDGs Center UNPAD, memberikan hasil yang senada.

Sejarah krisis di Indonesia, misalnya krisis moneter 1997-1998 juga menyisakan catatan relatif bertahannya sektor pertanian dan bahkan menampung kembali tenaga-tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan di perkotaan. Nampaknya peran sektor pertanian sebagai setor penyangga (buffer sector) di masa krisis akan terulang di tahun ini.

Selain imbas restriksi sosial yang dampaknya relatif kecil karena pusat produksi pertanian bukan di wilayah padat penduduk, sektor pertanian, terutama tanaman pangan, secara alamiah tidak akan separah sektor lain ketika terjadi krisis. Ini terjadi karena sifat barang-barang pertanian tanaman pangan yang elastisitas permintaannya rendah. Ketika ekonomi mengalami periode booming, permintaannya tidak akan meningkat pesat, demikian pula ketika terjadi resesi, permintaannya tidak akan menurun drastis.

Sejarah krisis di Indonesia, misalnya krisis moneter 1997-1998 juga menyisakan catatan relatif bertahannya sektor pertanian dan bahkan menampung kembali tenaga-tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan di perkotaan. Nampaknya peran sektor pertanian sebagai setor penyangga (buffer sector) di masa krisis akan terulang di tahun ini.

Dibandingkan dengan berkurangnya ekspor karena resesi global dan menurunnya aktivitas pariwisata, dampak restriksi sosial terhadap aktivitas ekonomi lah yang justru akan menjadi sumber pemicu utama resesi. Resesi akan mempunyai ongkos sosial ekonomi apalagi di negara-negara yang sistem jaringan pengaman sosialnya tidak begitu kuat. Martin Ravallion, ekonom ahli kemiskinan ternama dari Amerika Serikat bahkan membuka kemungkinan resiko lockdown yang akan berdampak pada kelaparan di negara-negara miskin.

Dalam situasi seperti ini, “obat” bisa jadi lebih mematikan daripada “penyakit”-nya. Oleh karena, itu masuk akal, jika pembatasan sosial sebaiknya tidak disamaratakan untuk semua aktivitas perekonomian. Aktivitas-aktivitas perekonomian yang esensial dan rendah resiko pelakunya terpapar virus harus diberi perhatian lebih agar mendapat sentuhan kebijakan khusus. Dari berbagai aspek yang akan dibahas berikut, sektor pertanian adalah salah satu kandidat terkuat.

Pertama, dari sudut pandang urgensi, pertanian adalah sektor penopang ketahanan pangan (food security) yang akan krusial di kala krisis ekonomi. Ini bukan hanya sebatas bertahan hidup tapi juga masalah asupan gizi masyarakat. Krisis moneter 1997/98 meninggalkan generasi yang mengalami stunting dan malnutrition yang cukup parah di kalangan anak-anak dan ini mempunyai dampak permanen. Ada dua pertimbangan ekstra yang membuat urgensi sektor pertanian lebih tinggi. Pertama, perdagangan internasional, termasuk sektor pertanian, sedang terganggu. Bahkan beberapa negara melakukan restriksi ekspor produk pertanian, seperti yang dilaporkan oleh WTO. Ini membuat sistem produksi pertanian dalam negeri menjadi krusial. Selain itu, pandemi Covid-19 juga belum menunjukkan kepastian kapan berakhir, sehingga pencabutan restriksi sosial/PSBB bisa saja akan tertunda-tunda. Satu pemodelan dari tim epidemiolog di Universitas Harvard mengajukan kemungkinan diperlukannya penerapan strategi restriksi sosial secara intermiten sampai tahun 2022 untuk menghindari ledakan ulang kasus Covid-19. Kita harus menghindari krisis Covid-19 berubah menjadi krisis pangan. Urgensi yang kedua adalah kemiskinan yang intensitasnya tinggi di pedesaan. Mempertahankan aktivitas ekonomi di pedesaan menjadi relevan agar peningkatan angka kemiskinan tahun ini dapat diredam. Tahun ini pun diramalkan akan ada kekeringan yang lebih parah dibandingkan biasanya. Ini menambah resiko ambruknyasektor pertanian di luar dampak pandemi Covid-19. Semua ini

berdampak pada relevansi dan urgensi sektor pertanian untuk mendapat perhatian lebih dalam penanganan krisis.

Kedua, krisis membuka jendela kesempatan (window of opportunity) untuk merevitalisasi sektor pertanian. Kondisi ketertutupan penuh dari perdagangan internasional (complete autarky), akan menguji keras sistem produksi pertanian Indonesia, dan membantu kita mengindentifikasi titik-titik lemah untuk diperbaiki dalam konteks jangka panjang. Seperti yang disebutkan di atas, selain sebagai bagian penting dari sistem penyediaan pangan, di saat krisis ternyata sektor pertanian bisa menjadi jaring pengaman sosial (sosial safety net)alamiah. Sektor pertanian, di kala normal pun, masih merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia, apalagi ketika ada krisis ekonomi.

Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka membuka ruang fleksibilitas bagi aktivitas sektor pertanian di masa restriksi sosial (PSBB) ini, tanpa mengesampingkan aspek kesehatan publik, menjadi hal yang masuk akal. Akan tetapi, fleksibilitas ini memerlukan catatan-catatan sebagai berikut.

Pertama, resiko terpapar virus Korona di sektor pertanian dan pedesaan tidak bisa diabaikan. Betul bahwa dalam aktivitas produksinya, karena tidak seperti sektor lain, dilakukan di luar ruangan, dalam lahan yang relatif luas, dan di area berkepadatan rendah. Akan tetapi ada beberapa aspek yang menjadi sumber kerentanan. Petani, misalnya, umurnya berada rata-rata di kisaran pra-lansia dan lansia, 45-60an tahun. Sehingga mereka merupakan kelompok yang rentan dan beresiko jika terpapar virus Covid-19. Kemudian, meskipun berkepadatan rendah dalam aktivitas produksi, tidak berarti kepadatan rendah pula dalam aktivitas non-produksi di pedesaan seperti di pemukiman maupun di pasar-pasar tradisional. Selain itu, tingkat pendidikan di pedesaan yang relatif rendah, membuat pemahaman masyarakat akan protokol perlindungan terhadap virus seperti

mencuci tangan, bersin yang aman, bisa jadi lebih rendah daripada di perkotaan. Risiko juga diperparah dengan kondisi geografis pedesaan yang sering cukup terpencil dan jauh dari fasilitas kesehatan yang cukup untuk menangani pasien yang terpapar Covid-19.

Terakhir, migrasi musiman, seperti mudik lebaran, juga pengangguran di perkotaan sebagai dampak dari krisis, akan membuat masyarakat pedesaan cukup rentan terkena Covid-19 dari para pendatang. Semua ini menunjukkan bahwa fleksibilitas aktivitas pertanian di pedesaan di masa restriksi sosial (PSBB) tetap harus mempertahankan protokol penanganan kesehatan yang ketat seperti physical distancing, penggunaan masker, intensitas cuci tangan dan disertai kegiatan pengawasan aktif untuk mendeteksi secara dini adanya potensi penularan Covid-19 di kelompok pekerja sektor pertanian dan penduduk pedesaan pada umumnya. Kepastian pelaksanaan protokol-protokol ini tidak bisa ditawar-tawar dan memang tantangannya cukup berat dilakukan di daerah-daerah terpencil. Pemerintah dan perangkat desa serta kelompok masyarakat harus bahu-membahu menggalakkan budaya ini melalui program-program pemasyarakatan dengan berbagai saluran.

Kedua, solusi harus bersifat integratif dengan memasukkan sektor pendukung pertanian ke dalam perlakuan khusus. Sektor yang terpenting di antaranya adalah sektor transportasi dan logistik yang menghubungkan produk-produk pertanian ke pasar, juga sektor-sektor yang mengangkut input, baik bahan baku, maupun mesin-mesin atau alat-alat berat yang penting dalam aktivitas produksi pertanian. Saat ini, kegiatan ini mulai terganggu dengan dibatasinya mobilitas akibat adanya kebijakan restriksi sosial (PSBB). Khusus terkait sektor perkebunan, seperti kopi, diperparah oleh kondisi ekonomi global dan sifatnya yang tingkat esensialnya tidak setinggi bahan kebutuhan pokok. Sektor perkebunan juga mengalami kesulitan mencari pekerja untuk masa panen karena berkurangnya mobilitas sebagai dampak dari restriksi sosial.

Ketiga, fleksibiltas atau relaksasi aktivitas sektor pertanian di masa pandemi Covid-19 tidak akan banyak bermanfaat jika disrupsi permintaannya (demand) tidak diatasi. Saat ini beberapa komoditas utama sedang mengalami panen.

Dengan terbatasnya demand karena mobilitas berkurang dan masyarakat sedang menderita ekonominya, harga akan tertekan. Pada beberapa kasus, terjadi anomali ketika harga mengalami penurunan di tingkat petani tetapi mengalami kenaikan di tingkat konsumen. Pemasaran online masih belum menjadi solusi yang merangkul sebagian besar petani di pelosok-pelosok. Survei terbatas yang dilakukan Yayasan Odesa Indonesia di pasar-pasar utama Jawa Barat (misalnya di Gede Bage) menunjukkan bahwa sekitar 50% pedagang produk-produk pertanian sudah pulang kampung karena mengalami kerugian. Hanya sedikit yang masih bertahan mengandalkan keuntungan 20 ribu sampai 30 ribu rupiah per-hari. Di sisi inilah, karena situasi yang tidak normal ini, negara harus lebih memainkan peranannya dalam menghubungkan permintaan dan produksi.

Berdasarkan aspek-aspek yang dibahas di atas, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut. Pertama, tunjukkan empati dan keberpihakan kepada petani. Saat ini kampanye penanganan Covid-19 masih tampak bias hanya di perkotaan. Bagaimanapun juga, petani adalah salah satu profesi yang sering mengalami ketidakpastian, baik dari alam, seperti cuaca, maupun dari realisasi pasar. Krisis pandemi Covid-19 menambah sumber ketidakpastian di kalangan pelaku perekonomian termasuk petani. Pemimpin di pusat dan daerah perlu berdialog dengan petani dan pelaku pertanian lebih intensif untuk menggali permasalahan dari mulai hal-hal besar yang sifatnya struktural juga hal-hal mendetail di lapangan. Pedagang-pedagang di pasar induk dan sentra-sentra produksi di pinggiran-pinggiran harus diobservasi dan diajak dialog untuk memecahkan masalah. Selain itu ketenangan dan kepastian di kalangan petani akan membantu

ketahanan fisik dan mental petani menghadapi krisis pandemi Covid-19. Untuk ini, jika diperlukan untuk mengoptimalkan kelembagaan dan meningkatkan sense-of-sectoral crisis, perlu dibuat pokja (kelompok kerja) khusus penanganan sektor pertanian.

Kedua, negara di saat krisis ini harus hadir lebih intensif dalam melakukan intervensi distribusi. Secara teori peran negara sah-sah saja dan bahkan bersifat meningkatkan efisiensi alokatif jikalau terjadi kegagalan pasar karena kasus-kasus luar biasa. Yang lebih spesifik adalah dalam menyalurkan produksi pertanian dari sentra-sentra produksi di pedesaan ke masyarakat terutama di perkotaan dan target-target pasar lainnya. Operasi pasar, melalui pembelian langsung produk-produk pertanian nampaknya bukan sesuatu yang diharamkan dalam kondisi seperti ini. Tentunya dibatasi oleh ketersediaan anggaran.

Akan tetapi adanya stimulus fiskal dampak pandemi Covid sebesar 405 triliun rupiah yang sebagian didanai oleh defisit anggaran 5.07% dari PDB adalah salah satu sumber pembiayaan. Dana sebesar 150 triliun dianggarkan untuk membantu industri. Alokasi sebagian dari dana itu ke petani secara ekonomi dan moral adalah sesuatu yang dapat dijustifikasi. Kongkritnya, dan supaya lebih ekplisit, disarankan ada dana khusus stimulus fiskal sektor pertanian. Selain itu bantuan-bantuan sosial ekstra yang dilakukan pemerintah daerah bisa juga disalurkan dengan menyelaraskan pembelian produk-produk kebutuhan pokok yang diproduksi sentra-sentra pertanian disekitarnya.

Dana sebesar 150 triliun dianggarkan untuk membantu industri. Alokasi sebagian dari dana itu ke petani secara ekonomi dan moral adalah sesuatu yang dapat dijustifikasi. Kongkritnya, dan supaya lebih ekplisit, disarankan ada dana khusus stimulus fiskal sektor pertanian.

Ketiga, aktivitas sektor pertanian terutama sektor pertanian tanaman pangan harus diberi ruang untuk tetap aktif berproduksi, dengan batasan-batasan tertentu, di masa restriksi sosial

(PSBB) dengan mempertahankan protokok-protokol perlindungan standar Covid-19. Ini karena sifat esensial dan urgensi yang dibahas di atas. Selain karena karakteristik proses produksi relatif rendah resiko penularannya dibandingkan sektor-sektor lain seperti manufaktur ataupun jasa-jasa. Sektor pertanian juga cakupannya luas sehingga diperlukan kajian lebih detail terkait sektor sub-pertanian apa yang perlu dilakukan relaksasi dan tidak dengan dasar kasus per kasus (case-by-case basis).

Pelaksanaannya, walaupun demikian, harus dipantau secara ketat, karena dalam tahapannya ada beberapa proses produksi yang lebih beresiko. Petani apalagi petani penggarap adalah kelompok rentan dari segi ekonomi, resiko terpapar virus, dan mortalitas akibat terinfeksi virus Covid-19. Antisipasi dan persiapan harus dilakukan matang karena tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat pedesaan yang kurang dibandingkan dengan di daerah perkotaan.

Kampanye publik harus lebih masif dan terstruktur, menggunakan metode dan saluran (channel) yang paling efektif untuk kelompok sasaran di atas, terutama untuk pembudayaan kebiasaan-kebiasaan yang disyaratkan pada protokol perlindungan standar Covid-19. Elemen masyarakat baik formal (aparat desa) maupun informal (pemimpin-pemimpin, orang berpengaruh, dan influencer informal di pedesaan) serta organisasi-organisasi kemasyarakatan harus dilibatkan dalam edukasi terkait protokol Covid-19. Selain itu, alat perlindungan kesehatan di pedesaan juga harus disediakan, terutama masker, juga fasilitas-fasilitas hand-sanitizer di tempat publik dan sentra-sentra produksi.

Demikian juga pelarangan mudik harus dipertegas dibarengi dengan mendorong masyarakat pedesaan agar melarang anggota keluarganya untuk mudik. Protokol dan Standard Operating Procedure (SOP) perlindungan Covid-19 ini harus disiapkan terlebih dahulu dan disosialisasikan

dengan baik ke masyarakat di pedesaan sebelum relaksasi aktivitas ekonomi di masa restriksi sosial (PSBB) dilakukan.

Keempat, karena masalah keterbatasan sumber daya dan dinamika pandemik yang bergerak cepat, diperlukan skala prioritas melalui pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sifatnya low-pain high-gain atau low-hanging fruits. Salah satunya adalah dengan memfokuskan pada area produksi yang mensuplai ke pasar daerah padat penduduk metropolitan. Di Jawa Barat misalnya daerah Bandung Raya yang jumlah penduduknya banyak (sekitar 8 juta orang) dan ketergantungan pangannya tinggi, atau di daerah Jabodetabek. Memastikan logistik atau kelancaran arus produk-produk pertanian pangan dari pedesaan ke pasar.

Terakhir, rekomendasi untuk akademisi, pengamat atau peneliti sektor pertanian. Ini saat yang tepat untuk mengkaji dan meneliti kelemahaan-kelemahan sektor pertanian di Indonesia. Adanya krisis yang dibarengi dengan almost complete autarky (restriksi perdagangan internasional) memberikan ruang eksperimen kepada sistem pertanian kita untuk diuji sehingga kita bisa mengkaji "lubang-lubang" kelemahan agar ketahanan pangan dan cita-cita swasembada pangan kita di masa yang akan datang dapat dicapai. Mengutip ekonom legendaris Indonesia Mohamad Sadli dengan Sadli's law-nya: Good times make bad policies, bad times make good policies.

8.3. Petani Merugi Saat Sektor Pertanian Tumbuh di Tengah Pandemi Corona, Apa Masalahnya?

Ketika sejumlah sektor perekonomian mengalami kontraksi atau penurunan pertumbuhan di masa pandemi, hal berbeda justru dicatatkan oleh sektor pertanian. Menteri Pertanian Syahrul

Yasin Limpo mengatakan, sektor pertanian justru mampu tumbuh di tengah pandemi Covid-19. Dilansir Antara (3/9/2020), Syahrul mengatakan bahwa sektor pertanian tercatat mampu tumbuh sebesar 16,4 persen. Hal tersebut disebabkan karena produk-produk dari sektor pertanian, sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Pernyataan Syahrul juga sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Diberitakan Kompas.com (7/8/2020), BPS mencatat, sepanjang April-Juni 2020, kinerja sektor pertanian tumbuh 2,19 persen secara tahunan (year on year/yoy). Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 15,46 persen, menjadi sektor terbesar kedua. Baca juga: Mengenal Apa Itu Resesi Ekonomi, Dampak, dan Penyebabnya... Petani justru merugi Namun, meski mencatatkan pencapaian statistik yang positif, kondisi berbeda justru dirasakan para petani di lapangan. Dilansir Antara (12/9/2020), petani kubis di sentra produksi Desa Buluharjo, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan Jawa Timur, melaporkan kerugian akibat harga anjlok di tingkat petani ketika memasuki musim panen.

Pairan, petani kubis di desa tersebut, mengatakan saat ini harga kubis di tingkat petani hanya berkisar Rp 1.000 - Rp 2.000 per kilogram. Baca juga: Selain Indah, Embun Es di Dieng Juga Bermanfaat bagi Petani, Simak Penjelasannya... Padahal, sebelumnya harga kubis masih di kisaran Rp 3.000 - Rp 5.000 per kilogram. Dengan harga yang teramat rendah itu, petani merugi lantaran hasil yang didapat tidak sesuai dengan biaya tanam yang dikeluarkan. Dia menilai, penurunan harga kubis disebabkan dampak pandemi Covid-19, sehingga daya beli masyarakat menurun dan menyebabkan permintaan pasar lesu.

Sementara itu, diberitakan Kompas.com (7/8/2020), Jono, seorang petani cabai di lereng Gunung Merapi, Boyolali, Jawa Tengah, mengatakan bahwa harga jual cabai anjlok. Harga jual cabai rawit turun drastis menjadi Rp 7.000 per kilogram. Padahal harga normal cabai awalnya bisa

mencapai Rp 20.000 per kilogram. Dengan harga yang turun drastis, Jono mengungkapkan bahwa petani jelas kesulitan.

Dia lantas menuturkan tersendatnya penjualan cabai ke luar Boyolali sebagai salah satu permasalahan. Sebelumnya, cabai petani Boyolali itu bisa menembus pasar hingga Jakarta dan Kalimantan. Dia juga mengungkapkan, rendahnya permintaan dari konsumen, dan kendala saat proses distribusi akhirnya membuat harga cabai hancur.

Masalah distribusi dan daya beli Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pemuda Tani HKTI Rina Saadah mengatakan, kerugian yang dialami oleh para petani, salah satunya memang disebabkan oleh faktor distribusi. "Kadang dari daerah ini bisa surplus, dari daerah lainnya bisa kurang. Dari sisi logistiknya saja yang menjadi PR kita itu," kata Rina saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (12/9/2020). Dia juga mengakui bahwa saat ini memang terjadi penurunan daya beli masyarakat, yang berimbas pada kesulitan petani untuk memasarkan hasil panennya.

Namun, Rina menilai, ada hal lain yang perlu juga dicermati, yakni perubahan pola perilaku konsumen atau consumer behavior. "Kalau dilihat dari sisi consumer behavior, masyarakat kita di masa pandemi ini cenderung kembali ke pola hidup sehat. Sayuran, ikan, dan konsumsi daging," kata Rina. Sebagai salah satu solusi untuk menangani masalah distribusi, dia mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk mengucurkan bantuan, dalam bentuk pembelian produk-produk hasil panen petani, dan kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk bantuan sosial. "Ini bisa dimanfaatkan juga oleh pemerintah untuk mengangkat kembali daya beli masyarakat. Khususnya, agar petani kita bisa berjalan lagi kegiatan pertaniannya dengan membeli produk-produk mereka," katanya lagi.

Namun untuk itu, dia menyebut harus ada political will atau kemauan serius dari pemerintah untuk melaksanakannya. "Supaya dalam masa pandemi ini ekonomi kita bisa tetap berputar," kata Rina. Variasi dan inovasi Lihat Foto Foto dirilis Senin (10/8/2020), memperlihatkan konsumen memanen sayuran yang ditanam dengan sistem hidroponik di atap rumah David Sugianto di Blitar, Jawa Timur. David berhasil memanfaatkan atap rumahnya menjadi ladang tanaman berbagai sayur mayur yang ditanam dengan sistem hidroponik.

Untuk menggenjot keuntungan di sektor pertanian, Rina menilai harus ada variasi produk bernilai tambah dari hasil pertanian. "Kembali lagi ke consumer behavior, misalkan dari olahan-olahan produk pertanian menjadi jajanan atau cemilan. Produk-produk seperti itu kan digemari anak muda, dengan kemasannya yang bagus dan menarik," ujar dia.

Selain itu, solusi lain untuk mengatasi permasalahan distribusi hasil panen atau produk pertanian adalah dengan memanfaatkan platform digital. Menurutnya, di masa pandemi ini consumer behavior masyarakat Indonesia lebih memilih untuk belanja online. "Ini bisa dimanfaatkan, khususnya oleh generasi muda untuk ikut memasarkan produk-produk pertanian melalui e-commerce supaya daya jangkaunya lebih luas, dan juga pelatihan untuk para petani kita untuk terus berinovasi dan melek teknologi," kata Rina.

Menguatkan ketahanan pangan Mengantisipasi terjadinya resesi pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2020, Rina menyebut harus ada peningkatan produksi di sektor pangan. "Di masa pandemi seperti sekarang ini, yang paling krusial adalah pangan. Misalnya harus ditingkatkan, 3-9 kali lipat, untuk menampung pasokan pangan nasional, mengingat kita belum bisa ekspor atau impor," kata Rina. Sehingga ketika resesi terjadi, stok pangan Indonesia masih mencukupi. Artinya, ketahanan pangan perlu juga diberi perhatian.

Disebut Bahayakan Kedaulatan Pangan Rina menilai, bahwa masa pandemi ini juga bisa dianggap sebagai peluang sekaligus tantangan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. " Sektor pertanian dan perikanan ini paling sedikit terdampak, dibanding sektor-sektor yang lain. Dari sisi tenaga kerja, PHK besar-besaran terjadi di perusahaan swasta, pabrik, dan lain sebagainya," kata Rina. "Saya rasa pertanian ini menjadi sektor unggulan, supaya masyarakat kita kembali bertani. Sekarang kan banyak dari kota-kota besar kembali ke daerah untuk menjadi petani," imbuhnya.

8.4. COVID-19 dan Dampaknya Pada Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Ketika wabah COVID-19 terus menyebar diseluruh dunia, maka penting untuk menanggapi dampak yang ada dan yang mungkin terjadi pada sektor pertanian, baik dari perspektif penawaran dan permintaan pangan.

Sangat penting untuk memastikan bahwa rantai pasokan pangan global dan nasional terus berfungsi dalam memastikan ketersediaan pasokan pangan, mencegah terjadinya krisis pangan pada negara-negara yang sudah mengalami tantangan ketahanan pangan dan nutrisi dan mengurangi dampak negatif pandemi secara keseluruhan terhadap perekonomian global.

Kendati proporsi lapangan kerja di sektor pertanian dari total lapangan kerja menurun dari 40,2 persen menjadi 26.8 persen selama dua dasawarsa terakhir, pertanian menyediakan mata pencarian bagi lebih dari satu miliar orang di seluruh dunia dan tetap merupakan tulang punggung dari banyak negara dengan penghasilan rendah terhitung 60,4 persen dari total lapangan kerja dan berkontribusi pada duapertiga produk domestik bruto di beberapa negara tersebut. Sektor ini khususnya penting di Afrika dan Asia, ketika proporsi lapangan kerja pada sektor pertanian terhadap total masing-masing sebesar 49 dan 30,5 persen. Sektor pertanian

merupakan sumber utama kesempatan kerja bagi perempuan, mencakup sebesar 41.9 persen dari seluruh angkatan kerja pertanian di negara berkembang.

Kendati terdapat penurunan proporsi lapangan kerja di sektor pertanian terhadap lapangan kerja global, keluaran pertanian terus bertumbuh. Disertai dengan urbanisasi, peningkatan pendapatan per kapita dan peluang ekspor, transformasi sistem pangan membawa pekerjaan- pekerjaan baru dalam sektor agri-pangan yang lebih besar, yang mencakup sektor pertanian dan sektor non-pertanian terkait, seperti pengolahan, manufaktur, pemasaran pangan, transportasi dan persiapan pangan. Sektor agri-pangan memperkerjakan mayoritas dari pekerjaan usaha mandiri dan pekerjaan diupah di negara-negara berkembang.

Meskipun demikian, saat ini, banyak pekerjaan ini ditandai dengan defi pekerjaan yang layak yang berakibat pada antara lain: Kelembagaan bursa kerja yang lemah, termasuk penegakan hukum yang tidak efektif, pengawasan ketenagakerjaan dan kepatuhan; lingkungan yang tidak memadai untuk perkembangan usaha, produktivitas rendah; perubahan iklim; maraknya informalitas; infrastruktur yang buruk; dan terbatasnya akses terhadap perlindungan sosial dan layanan lainnya, termasuk pendidikan dan layanan kesehatan. Tantangan lainnya muncul dari semakin meningkatnya paparan terhadap berbagai bahaya keselamatan, kesehatan, lingkungan dan biologis pada para pekerja pertanian, termasuk bahaya yang terkait dengan bahan kimia, bunyi, cedera muskuloskeletal, panas dan sebagainya.

Pekerja pertanian mengalami tingkat kemiskinan yang paling tinggi meski memiliki pekerjaan (*working poverty*). Seperempat dari pekerja yang bekerja di sektor ini mengalami kemiskinan ekstrem. Meskipun mereka memainkan peranan penting dalam perekonomian nasional, menjadi penyambung dalam struktur global produksi dan perdagangan pertanian, serta

menyediakan pangan bagi dunia, banyak pekerja pertanian dan keluarganya yang mengalami kemiskinan dan persoalan ketahanan pangan.

Kendati pekerjaan sektor agri-pangan telah ditetapkan sebagai komponen penting dalam konteks krisis COVID-19 di banyak negara, langkah-langkah yang diadopsi untuk memperlambat pandemic dapat menekan kapasitas sektor ini untuk terus memenuhi permintaan, menyediakan penghasilan dan mata pencarian dan memastikan keselamatan dan kesehatan bagi jutaan pekerja serta produsen pertanian. Tindakan-tindakan mendesak guna menanggapi berbagai tantangan kerja yang layak yang dihadapi oleh para pekerja pertanian dan guna meningkatnya jalannya sektor agri-pangan akan menjadi sangat penting dalam menangani krisis secara efektif, baik saat ini dan masa mendatang. Pelajaran perlu dipetik dari respons-respons terhadap pandemi dalam pertanian dengan cara pandang untuk "membangun kembali dengan lebih baik."

Peluang yang muncul untuk mengadopsi inovasi tekonologi dan meningkatkan kelestarian lingkungan tidak boleh terlewatkan.

Dampak Dari Covid-19

Sejak awal pandemi, sejauh ini belum ada gangguan signifikan terhadap pasokan pangan yang dialami. Namun, kendala-kendala logistik dalam rantai pasokan, khususnya lintas batas dan pembatasan pergerakan dalam negeri, serta persoalan ketenagakerjaan, dapat mengakibatkan gangguan dalam pasokan pangan, apabila kendala ini terjadi dalam jangka panjang. Komoditas bernilai tinggi, dan khususnya yang mudah rusak, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran segar, daging, ikan, susu dan bunga, terutama akan terkena dampaknya. Krisis kesehatan telah menyebabkan hilangnya pekerjaan dalam sub-subsektor seperti budidaya bunga di sejumlah negara. Mungkin juga akan terjadi beberapa penurunan kualitas pekerjaan dalam sektor ini dan

hilangnya pekerjaan, khususnya pada dasar rantai pasokan. Perempuan dan kaum muda kemungkinan besar akan mengalami dampak yang lebih kuat, karena mereka khususnya rentan secara sosio-ekonomi.

Pembatasan pergerakan juga mencegah para petani dalam mengakses pasar dan berakibat pada terbuangnya pangan. Di banyak negara, para petani sekarang tidak mampu menjual produk mereka di pasar-pasar lokal atau ke sekolah, restoran, bar, hotel dan tempat-tempat rekreasi lainnya, yang mungkin ditutup untuk sementara.

Pandemi ini juga dapat memiliki dampak yang serius pada produksi dan pengolahan tanaman pangan yang bersifat padat karya akibat kurangnya tenaga kerja dan penghentian produksi sementara. Contohnya, sektor pertanian Eropa mengalami kekurangan tenaga kerja cukup dramatis akibat ditutupnya perbatasan yang menyebabkan ratusan ribu pekerja musiman tidak dapat pergi ke lahan pertanian yang bergantung pada tenaga mereka selama musim panen.

Dampak pada sektor ini diperkirakan akan berlangsung dalam jangka waktu panjang. Sejumlah produsen pertanian Eropa utama, termasuk Perancis, Jerman, Italia, Spanyol dan Polandia, khususnya rentan akibat hal ini. Menurut Coldiretti, organisasi Italia yang mewakili petani, lebih dari seperempat makanan yang diproduksi dalam negara bergantung pada sekitar 370,000 pekerja migran musiman. Sekitar 100,000 pekerja tani tidak dapat datang ke Italia tahun ini, dan angka tersebut mungkin dua kali lipat di Perancis. Di Jerman, di mana terdapat sekitar 286,000 pekerja migran musiman yang terlibat tiap tahunnya dalam produksi buah-buahan, sayuran dan anggur, Pemerintah sedang menjajaki berbagai cara yang berbeda guna memobilisasi pekerja yang memadai untuk musim panen, termasuk dengan menjalankan penerbangan langsung bagi para pekerja tani dan mengeluarkan izin kerja sementara bagi para pencari suaka. Pada tanggal 2 April 2020, Komisi Eropa menerbitkan pedoman praktis bagi para negara anggota untuk

memfasilitasi perjalanan lintas batas bagi para pekerja musiman dalam pekerjaan-pekerjaan penting, termasuk pekerja sektor pangan, seraya menempatkan semua langkah-langkah penting guna mencegah penyebaran pandemi lebih lanjut.

Pandemi ini juga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap mata pencarian dari jutaan pekerja perkebunan yang terlibat dalam produksi pertanian yang berorientasi pada ekspor dan padat karya di negara-negara berkembang. Contohnya, penghentian sementara baru-baru ini di salah satu lelang teh terbesar di dunia di Mombasa, Kenya, di mana teh-teh dari banyak negara Afrika timur diperdagangkan, apabila penghentian tersebut diperpanjang, akan memiliki dampak yang sangat besar pada perekonomian lokal, nasional dan regional.

Dampak langsung yang akan dirasakan di berbagai simpul-simpul dalam rantai pasokan, termasuk pabrik, gudang dan pengangkutan serta pertanian, yang mungkin terpaksa menghentikan produksi dan memberhentikan para pemetik, yang seringkali merupakan bagian dari kelompok pekerja yang paling dirugikan dan sangat rentan pada pembalikan ekonomi. Di Kenya sendiri, teh menyediakan mata pencarian bagi sekitar 600,000 pekerja skala kecil dan pekerja diupah; sementara di Malawi, sektor ini adalah sektor lapangan kerja formal terbesar kedua setelah pemerintah menyediakan pekerjaan bagi sekitar 52,000 pekerja.

Pembelian berlebihan akibat rasa panik dan penimbunan makanan oleh konsumen serta respons kebijakan terkait perdagangan terhadap pandemi, khususnya pembatasan apapun pada ekspor, dapat menyebabkan naiknya harga dan peningkatkan volatilitas harga dan membuat pasar internasional menjadi tidak stabil. Krisis sebelumnya telah menunjukkan bahwa langkah semacam itu khususnya merugikan negara-negara berpenghasilan rendah dan kekurangan pangan. Krisis pangan 2007-08 memperdalam kemiskinan di antara mereka yang memang sudah miskin6 dan mendorong sekitar 130 hingga155 juta orang terjatuh ke dalam kemiskinan.

Pekerja lepasan diupah, khususnya di pertanian, petani yang tidak memiliki lahan, pedagang skala kecil dan produsen komoditas yang nilai tukarnya menurun terhadap biji-bijian pangan (*food grains*) merupakan yang terkena dampak terbesar. Menurut perkiraan ILO, untuk mempertahankan standar hidup dan tidak jatuh ke dalam kemiskinan, pekerja berupah rendah di negara-negara yang paling terkena dampaknya harus menemukan pekerjaan tambahan seminggu lebih panjang tiap bulannya. Banyak dari negara-negara ini yang juga mengamati terjadinya peningkatan signifikan dari putus sekolah dan jumlah pekerja anak, akibat tidak terjangkaunya biaya sekolah dan kurangnya pangan yang memadai.

Urgensi krisis ini dan kebutuhan untuk mengambil langkah dengan segera tidak boleh digunakan sebagai dalih untuk melepaskan kerangka normatif bagi solusi kebijakan. Prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja dan standar ketenagakerjaan internasional menyediakan basis yang kuat untuk solusi di tingkat nasional.

Pemantauan dekat terhadap harga makanan dan pasar serta penyebaran informasi yang transparan akan memperkuat kapasitas pemerintah dalam memastikan manajemen pasar pangan yang efektif, mencegah pembelian berlebihan karena rasa panik dan memandu usaha-usaha pertanian dalam membuat keputusan produksi yang rasional. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan aliran perdagangan internasional yang bebas, sementara menjamin kualitas pekerjaan dalam sistem pangan.

Agenda Pekerjaan yang Layak ILO semakin dikenal sebagai sebuah instrumen yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan kerawanan pangan12 dan menyediakan basis untuk sebuah kerangka pembangunan global yang adil dan stabil serta respons terhadap krisis yang efektif.13 Dalam menangani dampak dari krisis kesehatan saat ini pada sektor agri-pangan, respons

kebijakan nasional dan internasional harus didasarkan pada kerangka kerja ILO untuk menanggapi pandemi COVID-19, yang terdiri dari empat pilar yang saling terkait:

1. Menstimulasi perekenomian dan lapangan kerja;
2. Mendukung usaha, pekerjaan dan penghasilan;
3. Melindungi pekerja di tempat kerja; dan
4. Mengandalkan dialog sosial untuk mendapatkan solusi.

Menstimulasi Produksi Pertanian Dan Memastikan Jaminan Penghasilan

Ketika situasi pandemi COVID-19, atau kekhawatiran akan penyebarannya, memiliki dampak negatif pada sektor pertanian, langkah-langkah darurat yang tepat harus diadopsi guna mendukung usaha-usaha agri- pangan dengan berorientasi pada upaya menstimulasi produksi pertanian dan memastikan bahwa pekerja terus menerima upah yang layak serta tunjangan lainnya, sesuai dengan kesepakatan kerja bersama yang ada dan peraturan perundang-undangan yang sesuai. Dalam konteks ini, perhatian khusus perlu diberikan kepada ratusan juta pekerja pertanian diupah yang memainkan peran penting dalam memastikan keberlangsungan pasokan pangan dan kerapkali merupakan kelompok yang paling rentan, miskin dan mengalami kerawanan pangan.

Menyediakan akses ke tunjangan pengangguran dan bantuan sosial ke pekerja pertanian yang kehilangan pekerjaannya atau yang jam kerjanya dipotong juga penting untuk meringankan dampak dari krisis. Selain dari langkah-langkah segera ini, guna mengatasi krisis ini dan krisis apapun di masa mendatang dengan sukses, momentum ini harus digunakan untuk bergerak maju menuju sistem perlindungan sosial yang komprehensif, universal dan dibiayai secara kolektif.

Menjamin Jaminan Sosial

Karakteristik produksi pertanian yang sifatnya musiman menambahkan tantangan dalam memperluas cakupan perlindungan sosial kepada para pekerja pertanian yang di banyak negara umumnya banyak dikecualikan dari peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan tenaga kerja nasional, seperti peraturan yang mengatur tentang upah minimum, jam kerja maksimum, cuti sakit berbayar dan jaminan sosial. Maraknya informalitas dan kurangnya infrastruktur dan layanan di daerah-daerah pedesaan lebih lanjut menghambat akses ke layanan perlindungan sosial yang ada.

Rekomendasi ILO 2012 mengenai Landasan untuk Perlindungan Sosial (No. 202), yang mempromosikan pendekatan universal dan progresif guna memperluas perlindungan sosial bagi semua, menanggapi semua kekhawatiran ini. Memastikan bahwa semua pekerja pertanian memiliki akses ke layanan kesehatan penting, termasuk pengujian, yang khususnya penting untuk menjamin keselamatan dan mencegah penyebaran virus.

Mekanisme perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan langsung tunai, akses ke pinjaman, produk- produk asuransi jiwa-kredit dan asuransi indeks cuaca, terutama dapat menjadi penting bagi usaha-usaha agri-pangan, khususnya apabila terdapat penurunan sementara dalam aktivitas ekonomi mereka, seperti yang terjadi sekarang. Pada masa-masa normal, mekanisme semacam ini dapat memainkan peranan penting dalam melindungi usaha-usaha pertanian dan masyarakat pedesaan dari kegagalan panen, dengan menyuntik uang ke perekonomian pedesaan yang haus akan uang tunai, dan menciptakan infrastruktur.

Memastikan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Perlu ada fokus khusus terhadap keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja pertanian baik ketika memastikan ketersediaan jumlah pekerja pertanian musiman yang memadai di perekonomian maju, dan keberlanjutan produksi di negara-negara berkembang.

Semua pekerja dalam sektor agri-pangan, baik sementara, musiman ataupun migran, tidak peduli status hukumnya atau gendernya, memiliki hak untuk bekerja dalam kondisi yang aman dan sehat. Meskipun demikian, pada kenyataannya, mereka seringkali kekurangan akses untuk mendapatkan alat pelindung diri, fasilitas air dan sanitasi, sementara itu tempat produksi yang sangat ramai, yang umum terjadi, khususnya di negara-negara berkembang, meningkatkan risiko penularan.

Langkah-langkah untuk memitigasi risiko keselamatan dan kesehatan terkait COVID-19 dapat mencakup: Menyediakan akses ke alat pelindung diri yang memadai; mengatur ulang pekerjaan guna memastikan adanya jarak fisik yang aman antar pekerja, terutama dengan meninjau proses-proses yang umumnya memerlukan interaksi yang dekat; menerapkan langkah-langkah pengendalian lainnya, termasuk akses permanen ke pemeriksaan kesehatan dan fasilitas medis; memastikan akses ke air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak dengan sabun dan sanitasi tangan berbasis alkohol; melakukan pembersihan fasilitas tempat kerja dan peralatan kerja dengan disinfektan; dan meningkatkan frekuensi pembersihan.

Juga penting untuk memastikan bahwa pekerja memiliki akses ke semua informasi yang relevan terkait dengan COVID-19, perlindungan pribadi dan kebersihan dalam bahasa setempat. Pengembangan dan penegakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang efektif mencakup semua peraturan K3 yang komprehensif untuk semua sektor, termasuk pertanian, dan penyediaan perlindungan untuk semua pekerja harus dilengkapi dengan budaya K3 yang

bersifat preventif secara nasional dalam sektor tersebut, sesuai dengan Konvensi mengenai Keselamatan dan Kesehatan di Pertanian, 2001 (No. 184), dan Rekomendasi penyertanya No. 192. Langkah- langkah ini harus memungkinkan sektor pertanian untuk menghadapi risiko keselamatan dan kesehatan dengan lancar di masa mendatang.

Memastikan Kondisi Pekerjaan Yang Layak

Pekerja pertanian kerapkali tinggal dekat dengan lokasi produksi dan satu sama lainnya. Ini dapat meningkatkan risiko paparan ke COVID-19. Apabila pekerja disediakan akomodasi, penting untuk memastikan bahwa akomodasi tersebut sesuai dengan standar-standar yang berlaku, yang mewajibkan adanya jarak yang memadai, per orang atau per keluarga, akses atas air minum yang aman dan fasiltas sanitasi serta bilas yang memadai.

Memperkuat Pengawasan Ketenagakerjaan

Upaya-upaya harus diteruskan guna memastikan kepatuhan tempat kerja melalui pengawasan ketenagakerjaan. Mungkin perlu untuk meninjau ulang metode kerja para pengawas tenaga kerja guna meningkatkan akses ke layanan-layanan yang mereka sediakan, termasuk dengan memanfaatkan kemajuan- kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Di negara-negara yang sangat mengandalkan pekerja migran dalam sektor pertanian, perhatian khusus perlu diberikan guna memastikan rekrutmen yang adil dan diterapkannya langkah-langkah perlindungan dan pengaturan yang diperlukan, meliputi, contohnya, transportasi dengan kualitas dan kondisi kebersihan yang layak menuju tempat kerja. Dengan tidak berfungsinya sistem pengawasan ketenagakerjaan dengan baik selama krisis, terdapat laporan bahwa pekerja migran menghadapi risiko eksploitasi yang semakin tinggi.

Mengandalkan Dialog Sosial Untuk Solusi

Konvensi Organisasi Pekerja Pedesaan, 1975 (No. 141) menegaskan pentingnya menghubungkan organisasi pekerja pedesaan dengan aksi-aksi pembangunan ekonomi dan sosial guna meningkatkan kondisi kerja dan hidup para pekerja pedesaan secara permanen dan efektif. Pekerja sektor pedesaan, oleh karenanya, harus terlibat penuh dalam penilaian dampak COVID-19 dan pemerintah harus memastikan bahwa konsultasi dan pelibatan organisasi pekerja pedesaan yang efektif dilakukan dalam proses penentuan respons yang tepat terhadap krisis. Untuk mencapai hal tersebut, dan sesuai dengan

Paragraf 11–13 dari Rekomendasi Organisasi Pekerja Pedesaan, 1975 (No. 149), pemerintah harus mengambil langkah-langkah aktif guna memastikan bahwa organisasi pekerja pedesaan terwakili dalam dialog sosial di berbagai tingkat yang berbeda dan bahwa suara mereka didengar dalam berbagai hal yang muncul akibat krisis yang sedang terjadi dan membawa dampak pada masyarakat pedesaan dan angunan pedesaan.

Respons Oleh Pemerintah dan Pelaku Usaha

Dalam sebuah surat terbuka, “A call to action for world leaders preventing a global food security crisis while combating COVID-19” (“Seruan bagi para pemimpin dunia untuk mencegah krisis ketahanan pangan global seraya melawan COVID-19”), para CEO dari perusahaan-perusahaan besar, organisasi masyarakat sipil, para peneliti dan politisi menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk mengambil tindakan penting dan terkoodinir guna mencegah pandemi COVID menjadi krisis pangan dan kemanusiaan global. Aksi yang diusulkan fokus pada: (1) Menjaga agar pasokan pangan mengalir ke seluruh dunia – mempertahankan perdagangan

terbuka; (2) Memperluas dukungan bagi yang paling rentan; dan (3) Berinvestasi pada sistem pangan berkelanjutan yang tangguh – menabur benih pemulihan bagi masyarakat dan planet.

Pentingnya mempertahankan perdagangan terbuka juga ditekankan dalam sebuah pernyataan bersama oleh Direktur Jenderal Organisasi Pangan Dunia (FAO), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).Dalam sebuah surat ke kepala FAO dan WHO, International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers'

Associations (IUF) – sebuah federasi serikat pekerja dengan anggota berasal dari beragam industri, termasuk pertanian dan pengolahan makanan–menyerukan aksi untuk melindungi nyawa, keselamatan dan mata pencarian pekerja pertanian yang menjadi sumber utama untuk ketahanan pangan. IUF juga menyusun serangkaian permintaan dan pedoman mencakup pertanian, makanan dan minuman dan kesetaraan gender.

Sejumlah organisasi pekerja sektoral (seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia/GAPKI dan Federasi Organisasi Pertanian Afrika Selatan/ Agri SA) telah mengeluarkan pedoman bagi anggota mereka mengenai COVID-19. Pedoman yang sama juga dikeluarkan oleh sejumlah organisasi pekerja pertanian (seperti Farm Labor Organizing Committee/FLOC).

FAO telah menerbitkan serangkaian risalah kebijakan mengenai dampak COVID-19 pada sistem pangan. Sebagai bagian dari Rencana Tanggap Kemanusiaan COVID-19 Global PBB, FAO telah meninjau program kemanusiaannya yang sedang berjalan untuk berfokus pada dukungan berkelanjutan bagi yang paling rentan dan menyusun tindakan untuk menanggapi efek samping dari virus tersebut. Upaya-upaya FAO berfokus pada: (1) Membangun sebuah fasilitas data glonal, berkolaborasi dengan Program Pangan Dunia (WFP) dan mitra lainnya; (2) Melakukan stabilisasi

penghasilan dan akses terhadap pangan dan mempertahankan mata pencarian dan bantuan produksi pangan yang sedang berjalan; (3) Memastikan keberlangsungan rantai pasokan pangan kritis bagi populasi yang paling rentan; dan (4) mencegah penularan COVID 19 di antara para pekerja rantai pasokan pangan dengan meningkatkan kesadaran akan peraturan-peraturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan pangan, termasuk mengenai hak, peran dan tanggung jawab pekerja, bersama dengan otoritas nasional dan WHO.

Di Kolombia, sebuah kesepakatan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2020 antara serikat pekerja pedesaan SINTRAINAGRO dan asosiasi industri pisang Augura untuk menyediakan dukungan dan langkah- langkah perlindungan keselataman dan kesehatan bagi sekitar 22,000 pekerja perkebunan pisang. Ini mencakup, antara lain, penyediaan alat pelindung diri seperti masker dan disinfektan bagi semua pekerja, pembersihan dengan disinfektan dan penerapan jarak aman dalam transportasi, sesi istirahat makan rutin dan sebagainya. Semua pekerja di atas 65 tahun dan yang memiliki kondisi penyakit sebelumnya, termasuk kehamilan yang berisiko, tidak peduli jenis kontrak kerjanya, mendapatkan pengecualian kerja selama durasi berlakunya keputusan pemerintah mengenai langkah-langkah pengamanan terkait dengan COVID-19 dan akan menerima gaji pokok serta 8 persen tambahan.

Contoh-Contoh Langkah-Langkah Khusus Yang Diambil Negara

Sebagian besar respons kebijakan nasional yang diambil berbentuk dukungan finansial bagi usaha pertanian dan langkah perlindungan sosial jangka pendek guna mendukung populasi kerja. Namun, hanya sedikit kebijakan yang diarahkan pada penerapan standar ketenagakerjaan dalam sektor atau promosi dialog sosial untuk pengembangan respons kebijakan. Ini adalah kesenjangan yang perlu diisi.

Di **Kanada**, kapasitas peminjaman Farm Credit Canada telah dinaikkan sebesar 5 miliar dolar (CAD) dan 100 juta dolar Kanada (CAD) telah dialokasikan oleh organisasi lokal, regional dan nasional untuk mendukung ketahanan pangan di seluruh pelosok negara. Di bawah Tunjangan Tanggap Darurat Kanada, pekerja yang tidak dapat bekerja karena alasan medis, dan memiliki manfaat cuti yang terbatas atau tidak berbayar melalui pemberi kerjanya, dapat mengajukan aplikasi untuk memperoleh tunjangan kerja hingga selama15 minggu, paling banyak 55 persen dari penghasilan mereka, atau sebesar 573 CAD per minggu.

Di **Tiongkok**, Peoples Bank of China memperkenalkan perluasan peminjaman ulang dan fasilitas pemotongan ulang dengan bunga kecil sebesar 500 miliar yuan (RBM) guna mendukung UMKM. Bunga peminjaman ulang bagi wilayah pedesaan, pertanian, petani dan usaha- usaha kecil diturunkan menjadi 2,5 persen juga. Guna mendorong ketahanan pangan, Kementerian Pertanian dan Wilayah Pedesaan mengeluarkan beberapa catatan untuk mendukung kelanjutan dari operasi usaha- usaha pakan, penjagalan dan pengolahan daging serta rekomendasi bagi para manajemen tananaman pangan di lapangan dan langkah-langkah untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. Beberapa kebijakan lokal memberikan manfaat pada angkatan kerja pertanian seperti subsidi tunjangan hidup sementara sebesar 300 RMB bagi pekerja pedesaan di Provinsi Hubei dan bantuan langsung tunai sebesar 3000 RMB untuk retensi populasi migran di Wuhan.

Di **Mesir**, moratorium undang-undang pajak atas lahan pertanian telah diperluas selama dua tahun. Kementerian Solidaritas Sosial juga merencanakan untuk memasukkan 100,000 keluarga tambahan ke dalam program bantual sosial yang ada dan meningkatkan tunjangan sebesar 900 pound Mesir (EGP) untuk perempuan dan pemimpin-pemimpin di wilayah pedesaan. Pembayaran satu kali sebesar 500 EGP direncanakan bagi para pekerja informal terdaftar.

Di **El Salvador**, dana sebesar US$ 80 juta akan dialokasikan melalui Dana Darurat guna mendukung sektor pertanian dan memastikan ketahanan pangan. Bantuan langsung tunai sebesar US$ 300 juga telah diberikan kepada 1,5 juta rumah tangga yang bekerja di perekonomian informal yang belum memiliki jaring pengaman finansial.

Di **Fiji**, sebuah paket respons pertanian mencakup paket dukungan pertanian baru guna mendukung produksi tanaman pangan jangka pendek melalui distribusi bahan baku dan benih. Anggaran Tanggap COVID-19 menyediakan bantuan pembayaran keringanan satu kali sebesar US$ 150 bagi mereka yang bekerja di sektor informal.

Di **Jerman**, Pemerintah telah memperpanjang "Peraturan 70 Hari" bagi para pekerja musiman, yang sekarang bekerja hingga 115 hari sampai akhir Oktober 2020 tanpa harus membayar kontribusi jaminan sosial. Pemerintah Jerman juga sudah meningkatkan batasan penghasilan tambahan untuk kompensasi kerja sementara dan untuk pensiun petani. Cuti sakit berbayar juga telah disesuaikan sehingga, ketika Undang-undang Perlindungan dari Infeksi berlaku, jumlah yang diterima sama besarnya dengan upah bersih pekerja slama enam minggu pertama, dan sama dengan tunjangan cuti sakit.

Di **Italia**, di bawah stimulus Cura Italia, persyaratan untuk memperoleh tunjangan pengangguran bagi para pekerja pertanian telah dipermudah dan pembayaran satu kali sebesar 600 EUR telah diberikan kepada pekerja rentan. Pekerja yang berpenghasilan lebih rendah dari 40,000 EUR setahun yang harus hadir di tempat kerja berhak atas tunjangan satu kali bebas pajak sebesar 100 EUR.

Di **Namibia**, Paket Stimulus dan Bantuan Ekonomi sebesar 200 juta dolar Namibia (NAD) mencakup jaminan pinjaman dengan bunga rendah bagi petani dan usaha-usaha pertanian, termasuk petani yang mengalami kendala kas dan UKM pertanian yang mengalami kehilangan

pendapatan. Sebuah Bantuan Penghasilan Darurat satu kali sebesar 750 NAD akan disediakan bagi semua pekerja formal dan informal yang kehilangan pekerjaan mereka.

Di **Filipina**, paket fiskal sebesar 27,1 milyar peso Filipina (PHP) mencakup perlindungan sosial bagi para pekerja yang paling rentan dan dukungan bagi sektor- sektor yang terkena dampak paling parah, seperti pariwisata dan pertanian. Di bawah program Subsidi Darurat, 18 juta rumah tangga berpenghasilan rendah yang bekerja dalam sektor informal akan diberikan 5,000 hingga 8,000 PHP per bulan selama dua bulan. Administrasi Kesejahteraan Pekerja di Luar Negeri juga menyediakan bantuan tunai kepada pekerja Filipina di luar negeri yang terkena pelarangan perjalanan.

Perangkat Hukum Dan Respons ILO

ILO telah mengadopsi serangkaian instrumen dan perangkat yang menyediakan sebuah kerangka yang berharga bagi langkah-langkah tanggap darurat dan pembangunan sektor berjangka lebih panjang secara berkelanjutan.

Konvensi mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan (Pertanian) Convention, 1969 (No. 129), bersama dengan instrumen-instrumen relevan lainnya, menjabarkan serangkain prinsip-prinsip untuk membangun dan menyelenggarakan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang berfungsi, termasuk rekrutmen dan kekuasaan serta kewajiban para pengawas ketenagakerjaan.

Konvensi mengenai Hak untuk Berserikat (Pertanian), 1921 (No. 11) memastikan semua yang terlibat dalam pertanian memiliki hak yang berserikat dan bergabung, seperti halnya pekerja-pekerja industri.

Konvensi mengenai Perkebunan, 1958 (No. 110), menjabarkan serangkaian prinsip-prinsip pelibatan dan rekrutmen pekerja migran, kontrak kerja dan penghapusan sanksi pidana, upah, libur

tahunan dengan upah dibayar, istirahat mingguan, tunjangan kehamilan, kompensasi pekerja, hak kebebasan berserikat, dan perundingan bersama, pengawasan ketenagakerjaan, perumahan dan perawatan kesehatan. Rekomendasi mengenai Perkebunan, 1958 (No. 110), memuat panduan secara rinci untuk memperbaiki kondisi kerja dari pekerja perkebunan.

Konvensi mengenai Organisasi Pekerja Pedesaan, 1975 (No. 141), dan Rekomendasi penyertanya No. 149,menyediakan hak pekerja pertanian dan pedesaan untuk membentuk dan bergabung dalam semua tipe organisasi pekerja pedesaan, sesuai dengan pilihan mereka, guna memiliki suara yang kuat, independen dan efektif.

Konvensi mengenai Keselamatan dan Kesehatan dalam Pertanian, 2001 (No. 184), dan Rekomendasi No. 192 penyertanya, menjabarkan serangkaian prinsip-prinsip untuk menyusun dan menerapkan sebuah kebijakan nasional yang koheren mengenai keselamatan dan kesehatan dalam sektor pertanian.

Rekomendasi mengenai Landasan Perlindungan Sosial, 2012 (No. 202), mempromosikan pendekatan yang bersifat universal dan progresif untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi semua, yang khususnya relevan dalam sektor pertanian dan perekonomian pedesaan. Rekomendasi ini mendorong perluasan perlindungan sosial dengan menjamin akses ke layanan kesehatan dasar dan jaminan penghasilan pokok sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan secara nasional, termasuk rumah tangga miskin yang rawan pangan dan pekerja dalam sektor informal, yang khususnya marak di pertanian dan sektor terkait.

Rekomendasi mengenai Ketenagakerjaan dan Kerja yang Layak untuk Perdamaian dan Ketangguhan, 2017 (No. 205), menekankan bahwa respons terhadap krisis perlu memastikan dijunjungnya semua hak asasi manusia dan aturan hukum, termasuk prinsip-prinsip mendasar dan hak-hak di tempat kerja dan untuk standar ketenagakerjaan internasional.

Kaidah mengenai keselamatan dan kesehatan di pertanian (2011) menyediakan pedoman mengenai penerapan Konvensi-konvensi ILO yang relevan, termasuk strategi-strategi yang tepat untuk menanggapi serangkaian risiko K3 yang dihadapi dalam pertanian.

Memberikan suara bagi para pekerja pedesaan: Survei Umum mengenai hak berserikat dan instrumen organisasi pekerja pedesaan), Laporan III (Bagian 1B), Konferensi Perburuhan Internasional, Sesi ke-104, Jenewa (2015).

Standar ILO dan COVID-19: Pertanyaan yang sering diajukan – Ketentuan-ketentuan utama dari standar ketenagakerjaan internasional yang relevan dengan wabah COVID-19 yang terus berkembang.

Portofolio catatan pedoman kebijakan mengenai promosi pekerjaan yang layak dalam perekonomian pedesaan (ILO, 2019) menawarkan pedoman bagi para pembuat kebijakan, mitra sosial dan praktisi pembangunan mengenai cara-cara yang efektif dalam menangani persoalan-persoalan ketenagakerjaan - dan terkait dengan pekerja - dalam konteks pedesaan. Dokumen ini menyediakan contoh-contoh konkret program kegiatan ILO untuk perekenomian pedesaan dan menyatukan serangkaian instrumen dan perangkat yang telah dikembangkan selama tahun-tahun terakhir.

Pekerjaan yang layak di perkebunan (ILO, 2017) merupakan sebuah program ILO yang bertujuan meningkatkan akses pekerja pertanian terhadap hak-haknya dan pekerjaan berkualitas, sementara mendukung usaha untuk menerapkan standar ketenagakerjaan pokok dan peraturan perundang- undangan nasional tentang ketenagakerjaan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan dan daya saing dalam rantai pasokan mereka. Program ini mencapai hal tersebut dengan mendukung dialog sosial, memperkuat peraturan tenaga kerja dan penegakan peraturan hukum nasional serta meningkatkan produktivitas dan keterampilan.

8.5. Generasi Muda Dan Pekerjaan Di Sektor Pertanian : Faktor Persepsi Dan Minat

Minat untuk menekuni dunia pertanian semestinya menjadi alasan utama generasi muda memilih pendidikan berbasis vokasi pertanian, namun banyak faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan persepsi generasi muda khususnya mahasiswa Polbangtan Manokwari terhadap pertanian dan minat mereka akan bekerja di sektor pertanian serta mendeskripsikan faktor-faktor pembentuk minat tersebut.

Penelitian yang dilaksanakan di Kampus Polbangtan Manokwari, dengan objek penelitiannya mahasiswa Polbangtan Manokwari, melalui pendekatan penelitian kuantitatif dan analisis data lewat uji statistik non-parametrik (uji *Chi-Square* dan *Spearman*), diperoleh informasi bahwa persepsi generasi muda terhadap pekerjaan di sektor pertanian secara keseluruhan adalah negatif. Artinya pekerjaan di sektor pertanian kurang diminati oleh generasi muda terdidik, karena adanya faktor yang bersifat *push factor* (pendorong)/factor internal, dan *pull factor* (faktor penarik)/faktor eksternal. Tidak terdapat hubungan yang signifikan pada variabel internal maupun eksternal ketika dilakukan uji statistik.

Faktor internal (motivasi, pengetahuan dan kepribadian) dan Faktor eksternal (status sosial ekonomi, sosialisasi pekerjaan dan tingkat kosmopolitan) pada generasi muda terlihat cenderung berpandangan negatif terhadap pekerjaan disektor pertanian dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor internal dan faktor eksternal dengan persepsi pekerjaan disektor pertanian. Oleh sebab itu, perlu adanya dukungan stake holder dan pemahaman pada generasi muda bahwa industri pertanian dapat menjadi inklusif serta bekerja sebagai petani juga merupakan suatu karir dengan *reward* yang memadai. Sektor pertanian akan menjadi sektor yang menarik dan menjanjikan apabila dikelola dengan tekun dan sungguh-sungguh.

Realitas pada saat ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran minat bekerja atau menekuni pekerjaan disektor pertanian ke sektor diluar pertanian. Ada sejumlah penyebab, seperti

pertanian dianggap tidak mampu menopang masa depan, akses lahan dan modal yang terbatas, minim akses pelayanan finansial, pasar serta teknologi baru. Selain itu, minimnya berbagai dukungan lain bagi generasi muda. Faktor-faktor tersebut, berkontribusi membentuk persepsi generasi muda melihat pertanian menjadi sektor yang tidak menjanjikan. Kondisi ini hampir dialami semua subsektor pertanian. Hal itu belum termasuk menurunnya minat lulus sarjana pertanian yang mau bekerja di sektor pertanian.

Sebagaimana dipertegas dalam Susilowati (2016), bahwa sepanjang sektor pertanian belum mampu menumbuhkan image kebanggaan dan prospek pendapatan yang baik, maka semakin membaiknya tingkat pendidikan tenaga kerja muda tidak akan berpengaruh banyak bagi kualitas tenaga kerja pertanian. Sektor pertanian akan tetap ditinggalkan oleh tenaga kerja muda yang berpendidikan tinggi (Susilowati 2016). Raharjo (2004), mengemukakan hasil penelitian di Missouri (AS) bahwa pemuda yang mempunyai tingkat pendidikan atau kecakapan terbaik telah meninggalkan daerah sektor pertanian dan beranjak ke daerah non pertanian seperti kota (Hendri 2014). Eksodus ini, didasari asumsi mereka untuk mengejar tujuan karir dan peluang ekonomi perkotaan yang lebih baik dibandingkan daerah pedesaan (Ogbeide, Ele, and Ikheloa 2015).

White menyebutkan ada 3 hal yang menyebabkan orang muda beralih dari pertanian, yaitu: 1) menghilangnya keahlian dan pengetahuan mengenai pertanian di kalangan pemuda pedesaan (*deskilling youth*); 2) menurunnya persepsi mengenai pertanian dan hidup di pedesaan; 3) abainya pemerintah terhadap pertanian skala kecil dan pembangunan infrastruktur pedesaan. Pendidikan telah melahirkan generasi-generasi muda yang terdidik tetapi tidak mengakrabi pengetahuan tentang pertanian. Pertanian juga hanya dianggap sebagai pekerjaan yang cocok bagi

mereka yang tidak berprestasi di sekolah (*something for those who dont do well in school*) (White 2012).

Menurut Inwood dan Sharp (2009), regenerasi merupakan isu krusial dalam relasi pedesaan-perkotaan. Pertanian merupakan sektor khusus yang regenerasinya banyak dijadikan pembanding sektor-sektor lainnya (Rasmikayati, Setiawan, And Saefudin 2017). Orang muda yang sekolah dan kuliah memiliki preferensi untuk tidak bekerja di bidang pertanian dan lebih memilih bekerja di sektor non pertanian seperti menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut mereka lebih menjanjikan dari segi penghasilan (Nugraha and Herawati 2015).

Lalu, bagaimana generasi muda memandang pekerjaan sektor pertanian dan faktor-faktor apa saja yang membentuk minat mereka terhadap pekerjaan di sektor pertanian?

Minat

Minat merupakan kecenderungan tertarik pada sesuatu objek atau menyenangi sesuatu objek (Suryabrata 1988). Menurut Crow and Crow minat adalah pendorong seseorang memberi perhatian terhadap orang, sesuatu, aktivitas-aktivitas tertentu (Killis 1988), dan sumber motivasi untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih (Hurlock 2007). Menurut H.C. Witherington yang dikutip Suharsimi Arikunto, "Minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, suatu masalah atau situasi yang mengandung kaitan dengan dirinya" (Arikunto 1993). Menurut Crow and Crow, ada tiga faktor yang menimbulkan minat yaitu "Faktor yang timbul dari dalam diri individu, faktor motif sosial dan faktor emosional" (Killis 1988). Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Sudarsono (1980), bahwa faktor-faktor yang menimbulkan minat dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Faktor kebutuhan dari dalam. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan.
2. Faktor motif sosial, Timbulnya minat dalam diri seseorang dapat didorong oleh motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, perhargaan dari lingkungan dimana ia berada.
3. Faktor emosional. Faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap sesuat kegiatan atau objek tertentu (Agung and Sumaryanto 2015)

Minat terhadap ilmu pertanian dapat diartikan sebagai upaya yang mendorong setiap individu untuk memahami proses pengolahan tanaman dan lingkungannya agar menciptakan suatu produk yang berdaya saing (Mardjuki 1990). Sehingga dapat disimpulkan, faktor yang menimbulkan minat terdiri dari dorongan dari diri individu, dorongan sosial dan motif, dan dorongan emosional. Timbulnya minat pada diri individu berasal dari individu, selanjutnya individu mengadakan interaksi dengan lingkungannya yang menimbulkan dorongan sosial dan dorongan emosional.

Persepsi Bekerja di Sektor Pertanian

Leavit (1978), berpendapat bahwa persepsi merupakan interpretasi seseorang mengartikan sesuatu yang ditangkap oleh alat indranya. Menurut Kayam (1985) dalam Puspasari (2010), persepsi berhubungan dengan penerimaan atau penolakan dan melibatkan aktivitas penginderaan yang bergantung pada stimulus fisik dan sosial yang ada disekitar (Young,1951 dalam Yunita, 2011). Hal-hal yang ada di lingkungan akan diolah bersama dengan hal yang telah dipelajari sebelumnya baik itu berupa harapan, nilai dan sikap, ingatan, dan lain-lain (Hendri, 2014).

Yunita (2011), menjelaskan persepsi setiap individu terbagi atas dua kelompok besar, yaitu : 1) Karakteristik internal, berkaitan langsung dengan dirinya (jenis kelamin, umur, tingkat pengetahuan dan tingkat pendidikan); 2) Karakteristik eksternal, dipengaruhi oleh lingkungan dan mempengaruhi penilaian seseorang, (lingkungan sosial budaya, interaksi antar individu, dan media komunikasi).

Generasi Muda dan Pertanian

Perubahan struktur ketenagakerjaan di sektor pertanian, banyak dijumpai di negara- negara agraris di dunia, seperti di Philipina dimana rata-rata usia petani mencapai 57 tahun, dan semakin sulit ditemukan pemuda yang kembali ke pertanian. Begitupun dengan negara maju seperti di Jepang dan Eropa dimana umur petani mencapai rata-rata 65 tahun. Sedangkan di negara-negara Afrika, walaupun sekitar 65% pemudanya tinggal di daerah pedesaan namun mereka tidak tertarik bekerja di sektor pertanian (White, 2009; Leavy & Smith, 2010). Fenomena keluarnya pemuda dari sektor pertanian akan menjadi permasalahan serius yang mengancam regenerasi petani (Ningrum et al. 2016).

Leavy dan Hossain (2014) dan Murphy (2014), mencatat bahwa pertanian adalah pekerjaan yang menantang secara mental dan fisik, dan kaum muda tidak menganggap pertanian sebagai jaminan bagi masa depan (Ogbeide et al. 2015). Perubahan persepsi generasi muda dalam memandang pertanian ke depan tidak terlepas dari relasi-relasi yang terbangun dalam struktur dan formasi sosial yang mengkontekstualisasikannya. Jika dalam pertanian skala kecil berbasis rumah tangga, relasi antar generasi terlihat dari pola hubungan kerja antara orang tua dan anak, sebaliknya dalam rejim pertanian yang lebih kompleks, hubungan kerja melibatkan struktur sosial yang lebih luas, termasuk negara (melalui instrumen aturan), korporasi (yang

mengendalikan sumber daya dan menciptakan hubungan kerja baru) serta sistem pasar yang diciptakannya (Ningrum et al. 2016).

Faktor-Faktor Pembentuk Persepsi dan Minat Pekerjaan di Sektor Pertanian

Minat terhadap pekerjaan di pertanian dapat berasal dari faktor intern maupun ekstern diri seseorang. Menurut Purwanto (1987), faktor intern terbagi menjadi dua, yaitu: faktor fisiologis dan faktor psikologis. Sedangkan faktor ekstern, terbagi menjadi dua, yaitu: faktor lingkungan alam dan faktor lingkungan sosial. (Melkisedek and Yuliawati; 2018).

Faktor Internal

a) Motivasi

Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengerjakan suatu tujuan tertentu, memberi kepuasan ataupun mengurangi ketidakseimbangan (Martoyo 2007:183). Chung dan Megginson (Gomes 2000), mengemukakan bahwa motivasi adalah perilaku yang ditunjukkan pada sasaran.. Ketersediaan fasilitas dan kemudahan dalam mengakses informasi pertanian (baik melalui internet dan buku diperpustakaan), kurikulum dan sistem pembelajaran yang menarik serta dorongan terciptanya kewirausahaan, menjadi motivasi untuk belajar menekuni pekerjaan pertanian.

b) Pengetahuan

Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indra pendengaran (telinga) dan penglihatan (mata). Menurut Notoatmodjo (2012), pengetahuan memiliki 6 tingkatan pengetahuan diantaranya: tingkat pertama, tahu setelah mendapatkan pengetahuan; tingkat kedua, memahami pengetahuan yang didapatkan; tingkat ketiga, dapat mengaplikasikan pengetahuan dalam

kehidupan sehari-hari; tingkat keempat, mampu menjabarkan suatu materi atau menganalisis, tingkat kelima, dapat mensintesis atau menunjukan kemampuan untuk meringkas suatu materi; dan tingkat pengetahuan yang keenam, seseorang mempunyai kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi. Semakin dalam pengetahuan seseorang akan pertanian, akan semakin mendorong orang tersebut tertarik (minat) berkecimpung di pertanian.

c) Kepribadian

Kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu baik bersikap dan berkehendak maupun perbuatan. Terdapat 2 faktor yang memengaruhi kepribadian, yaitu:1) Faktor Internal; yang berasal dalam diri sendiri seperti faktor yang berhubungan dengan konsitusi tubuh, struktur tubuh dan keadaan fisik, koordinasi motorik, kemampuan mental dan bakat khusus, dan 2) Faktor eksternal; yaitu keluarga dan lingkungan (Sjarkawi 2008).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi kepribadian menekuni atau mengerjakan sesuatu usaha secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap minat berusaha. Untuk itu perlu adanya upaya menumbuhkan dan membangun potensi diri generasi muda. Jika semakin banyak yang memiliki potensi kepribadian misalnya jiwa wirausaha di bidang pertanian, semakin banyak pula yang berminat berwirausaha dan siap menjalani proses kewirausahaan (Aprilianty 2012).

Faktor Eksternal

Dalam hal pemilihan pekerjaan maupun persepsi terhadap pekerjaan di sektor pertanian ini, faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu status sosial ekonomi keluarga, sosialisasi pekerjaan dan tingkat kosmopolitan. Pekerjaan merupakan aspek pelapisan sosial yang penting, apabila jenis pekerjaan seseorang diketahui, maka akan mudah untuk menduga tinggi rendahnya

pendidikan, standar hidup, teman, jam kerja dan kebiasaan sehari- hari keluarga orang ini (Setiadi dan Kolip 2010; Hendri 2014).

Herlina (2002), menemukan fakta dalam penelitiannya bahwa para orang tua memberikan pandangan kalau bekerja di sektor pertanian itu capek, dipandang rendah, dan masa depannya tidak terjamin. Hal ini menyebabkan pemuda desa memiliki pandangan atau penilaian yang kurang baik terhadap pekerjaan pertanian sehingga mencoba untuk keluar dari sektor pertanian tersebut (Hendri 2014). Sejalan dengan hal tersebut, fakta menunjukkan bahwa semakin baik sosialisasi pekerjaan pertanian maka akan semakin baik persepsi pemuda terhadap pekerjaan pertanian tersebut (Chandra 2004).

Sosialisasi yang intens dibangun akan mendorong terciptanya keterbukaan terhadap informasi dari luar. Keterbukaan seseorang terhadap informasi berdampak pada tingkat kosmopolitannya (Parlina 2012). Tingkat kosmopolitan memiliki hubungan negatif dengan pekerjaan pertanian, ketika tingkat kosmopolitan generasi muda rendah maka ia akan cenderung untuk memiliki persepsi yang tinggi atau lebih baik terhadap pekerjaan pertanian (Chandra 2004).

Ada kecenderungan yang nampak bahwa resistensi terhadap pertanian oleh generasi muda bukan hanya sekedar persoalan untung atau rugi, melainkan ada persoalan nilai dan identitas. Nilai-nilai yang diusung oleh kapitalisme modern yang memupuk dengan begitu suburnya sifat-sifat hedonisme, gaya hidup instan, individualis, nampaknya secara sadar atau tidak, terus diinternalisasi pada generasi muda sekarang ini (Hamyana 2017).

Globalisasi telah merengkuh generasi muda ke dalam budaya global dan konsumerasi tetapi sekaligus juga memarjinalkan mereka karena keterbatasan ekonomi mereka. Tidak peduli berapa lama bersekolah atau seberapa baik mereka sekolah, pendidikan mereka tetap tidak mampu

membuka akses kepada pekerjaan yang aman. Mereka masuk ke dalam apa yang disebut dengan „time pass", „waithood" atau „standby" mode" (masa tunggu/persiapan-menunggu penghasilan, rumah dan pernikahan yang semuanya bergantung pada pekerjaan) (Pujiriyani et al. 2016).

Generasi muda dalam penelitian ini merupakan mahasiswa Polbangtan Manokwari, memiliki preferensi untuk tidak bekerja di bidang pertanian. Mereka memiliki keinginan untuk bekerja di sektor non pertanian seperti menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). White menyebutkan ada 3 hal yang menyebabkan orang muda beralih dari pertanian yaitu: 1) menghilangnya keahlian dan pengetahuan mengenai pertanian di kalangan pemuda pedesaan (*de-skilling youth*); 2) menurunnya persepsi mengenai pertanian dan hidup di pedesaan; 3) abainya pemerintah terhadap pertanian skala kecil dan pembangunan infrastruktur pedesaan.

Pendidikan telah melahirkan generasi-generasi muda yang terdidik tetapi tidak mengakrabi pengetahuan tentang pertanian. Pertanian juga hanya dianggap sebagai pekerjaan yang cocok bagi mereka yang tidak berprestasi di sekolah (*something for those who dont do well inschool*).

Kendala terbesar yang membuat generasi muda masih berpikir dua kali untuk bekerja di bidang pertanian adalah kepemilikan tanah untuk bertani. Selain itu pula, sepanjang sektor pertanian belum mampu menumbuhkan *image* bahwa pekerjaan di sektor pertanian juga dapat memberikan kebanggaan dan prospek pendapatan yang baik, maka semakin membaiknya tingkat pendidikan tenaga kerja muda tidak akan berpengaruh banyak bagi kualitas tenaga kerja pertanian. Sektor pertanian akan tetap ditinggalkan oleh tenaga kerja muda yang berpendidikan tinggi.

Persepsi generasi muda terhadap pekerjaan di sektor pertanian secara keseluruhan adalah negatif. Kondisi ini tercipta karena generasi muda yang dijadikan responden merupakan generasi terdidik (mahasiswa Polbangtan), yang berpandangan bahwa dengan tingkat pendidikan

dan ijazah yang mereka miliki sudah sewajarnya mereka bekerja sebagai pegawai negeri atau pegawai kantoran.

Pekerjaan di sektor pertanian kurang diminati oleh generasi muda terdidik dikarenakan adanya faktor yang bersifat *push factor* (pendorong) atau faktor internal, dan *pull factor* (faktor penarik) atau faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang lebih banyak disebabkan oleh kondisi internal individu atau sektor pertanian yang kurang memberikan daya tarik kepada generasi muda pertanian yang akan berusaha di sektor pertanian dan minat untuk bekerja di sektor pertanian. Sedangkan Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari kondisi lingkungan sekitar dan pengalaman individu yang berdampak pada ketertarikan terhadap pekerjaan dan minat bekerja di sektor pertanian.

Tidak terdapat hubungan yang signifikan pada variabel internal maupun eksternal ketika dilakukan uji statistik. Faktor internal (motivasi, pengetahuan dan kepribadian) dan Faktor eksternal (status sosial ekonomi, sosialisasi pekerjaan dan tingkat kosmopolitan) pada generasi muda terlihat cenderung berpandangan negatif terhadap pekerjaan disektor pertanian dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor internal dan faktor eksternal dengan persepsi pekerjaan disektor pertanian.

8.6. Upaya Meningkatkan Minat ke Sektor Pertanian

Dalam meningkatkan dan menarik minat generasi muda terjun ke sektor pertanian, dapat dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

Optimalisasi Dana Desa untuk Kemajuan Pertanian

Dari sisi anggaran, pemerintah dapat menggunakan dana desa untuk mendukung inovasi teknologi pertanian (baik riset dan pengadaan teknologi), serta melakukan pelatihan dan pengembangan SDM petani. Dana desa juga dapat digunakan untuk memotong panjanganya rantai distribusi petani (misalnya pembuatan Toko Tani Indonesia atau toko *online* lainnya) sehingga diharapkan petani lebih sejahtera. Kesejahteraan petani secara tidak langsung akan memperbaiki stigma generasi muda terhadap profesi petani. Perlu ditekankan bahwa penggunaan anggaran diharapkan lebih fokus ke program bukan ke perencanaan supaya manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh para petani.

Penambahan lembaga pendidikan vokasional

Pendidikan vokasi khusus pertanian, dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan minat penduduk usia muda untuk terjun ke desa dan membangun sektor pertanian. Dengan pembenahan kurikulum dan metode pembelajaran berbasis produksi dan bisnis, program pendidikan vokasional diharapkan dapat menjembatani dunia pendidikan tinggi dengan dunia kerja dan kebutuhan pasar. Lembaga pendidikan vokasional sangat dibutuhkan terutama di wilayah-wilayah yang memiliki keunggulan sektor pertaniannya.

Peran lembaga pendidikan untuk mengubah pola pikir

Peran lembaga pendidikan diperlukan dalam memberikan edukasi seluas-luasnya serta membuka wawasan terhadap pentingnya posisi dan peran sebagai petani. Lembaga pendidikan dalam hal ini Universitas juga masih sangat kurang mempersiapkan peserta didik untuk terampil mengabdi bagi daerah tertinggal. *Mindset* berpikir ‘kembali ke desa’, pada setiap lembaga

perguruan tinggi negara dengan harapan generasi mudalah tongkak dalam mewujudkan kesejahteraan, pembangunan, peradaban dalam era kemajuan teknologi saat ini.

Kontribusi langsung mahasiswa di sektor pertanian

Lembaga pendidikan tinggi pertanian diharapkan dapat mendorong para mahasiswa untuk lebih berkontribusi secara langsung di sektor pertanian. Kontribusi tersebut dapat berupa kerja praktek di sektor pertanian maupun mengoptimalkan fungsi inkubator bisnis khusus di bidang pertanian. Mahasiswa diharapkan dapat melakukan pembaruan di bidang teknologi pertanian serta memberikan pengarahan tentang penggunaan teknologi tersebut kepada para petani konvensional. Harapan ke depan, para lulusan pertanian tersebut dapat menjadi *agripreneur*.

Mendukung *agripreneur*

Young Agriprenuership merupakan suatu konsep strategi membangun dunia pertanian berkelanjutan saat ini, melalui tenaga kerja usia muda. Konsep *agriprenuer* membutuhkan dukungan baik dari pemerintah, lembaga ekonomi, masyarakat dan lembaga pendidikan. Mempromosikan konsep *agripreneurship* membuat pertanian lebih menarik dengan inovasi-inovasi modernnya serta dapat menjembatani petani dengan pasar potensial dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

8.7. Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Generasi Muda Bekerja Di Pertanian

Sektor pertanian sesungguhnya mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Dalam kaitan dengan proses pembangunan pertanian, Mosher (1966) di dalam bukunya *Getting Agriculture*

Moving, menyatakan bahwa pembangunan pertanian adalah bagian integral dari pembangunan ekonomi dan masyarakat secara umum. Secara luas pembangunan pertanian bukan hanya proses atau kegiatan menambah produksi pertanian melainkan sebuah proses yang menghasilkan perubahan sosial baik nilai, norma, perilaku, lembaga, sosial, dan sebagainya demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat yang lebih baik. Oleh karenanya, sektor pertanian sesungguhnya bukan hanya dalam konteks *on farm*, melainkan agribisnis secara luas mencakup kegiatan pertanian hulu sampai hilir, termasuk jasa penunjangnya.

Namun sayangnya, sektor pertanian seringkali dipersepsikan secara sempit hanya kegiatan *on farm*, dan kebijakan pemerintah di sektor pertanian pun selama ini bias ke arah *on farm.* Kaitannya dengan bahasan pada makalah ini, keengganan generasi muda bekerja di pertanian juga dilihat dari sudut pandang pertanian sebagai kegiatan produksi *on farm.* Sektor pertanian bagi generasi muda secara umum seringkali dipersepsikan sebatas kegiatan *on farm* yang kurang menarik, pelaku harus bekerja di bawah terik matahari dan kotor dengan sumber daya lahan terbatas. Publikasi tentang pertanian lebih banyak menampilkan berita tentang kegagalan pertanian seperti banjir, kekeringan, serangan hama, puso, yang secara tidak langsung menjadi ***black campaign*** bagi mahasiswa pertanian. Pandangan tersebut perlu diluruskan dan perlu mengubah persepsi pertanian yang kotor, sulit, dan berisiko tinggi menjadi pertanian yang berteknologi dan bergengsi.

Fenomena semakin menurunnya minat tenaga kerja muda bekerja di sektor pertanian mempunyai konsekuensi bagi keberlanjutan sektor pertanian ke depan. Di masa depan beban sektor pertanian akan semakin berat dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya permintaan pangan sehingga peningkatan produksi dan produktivitas menjadi faktor kunci.

Mahasiswa dan tenaga kerja muda sebagai generasi penerus petani harus ditumbuhkan minatnya untuk kembali ke sektor pertanian dan bertanggung jawab dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan penyediaan pangan nasional.

Analisis data hasil survei dengan unit observasi desa yang dilakukan oleh Sumaryanto et al. (2015) memperoleh kesimpulan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir jumlah tenaga kerja perdesaan yang bekerja dan mencari pekerjaan di kota makin banyak. Sebagian besar berorientasi pada pekerjaan/usaha di sektor nonpertanian, baik di sektor formal maupun nonformal. Kecenderungan meningkat- nya minat tenaga kerja perdesaan usia muda bekerja di sektor nonpertanian di perkotaan tidak hanya terjadi pada perdesaan yang lokasinya berdekatan dengan perkotaan tetapi terjadi pula pada perdesaan yang lokasinya relatif jauh dari perkotaan, di Jawa maupun luar Pulau Jawa.

Berbagai faktor yang menyebabkan sektor pertanian semakin ditinggalkan oleh tenaga kerja usia muda dan tenaga kerja muda berpendidikan, baik yang bersifat *push factor* (pendorong) atau faktor internal, dan *pull factor* (faktor penarik) atau faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang lebih banyak disebabkan oleh kondisi internal individu atau sektor pertanian yang kurang memberikan daya tarik kepada tenaga kerja muda untuk berusaha di pertanian. Faktor-faktor tersebut antara lain (a) rata-rata luas lahan sempit atau bahkan tidak memiliki lahan; (b) sektor pertanian dipandang kurang memberikan prestise sosial, kotor, dan berisiko; (c) *mismatch* antara kualitas pendi- dikan dan kesempatan kerja yang tersedia di desa, yang dicerminkan oleh semakin banyaknya pemuda di desa yang bersekolah ke jenjang pendidikan lebih tinggi sehingga makin selektif terhadap pekerjaan; (d) anggapan pertanian berisiko tinggi, kurang memberikan jaminan tingkat, stabilitas, dan kontinyuitas pendapatan; (e) tingkat upah dan pendapatan di pertanian rendah, terutama dengan status petani gurem; (f)

kesempatan kerja di desa kurang, diversifikasi usaha nonpertanian dan industri pertanian di desa kurang/tidak berkembang; (g) suksesi pengelolaan usaha tani kepada anak rendah, yaitu kurang dari 40%, karena sebagian besar orang tua juga tidak menginginkan anak-anak mereka bekerja seperti mereka; dan (h) belum ada kebijakan insentif khusus untuk petani muda/pemula.

Faktor lainnya bersifat *pull factor* atau factor eksternal, seperti insentif bekerja di sektor nonpertanian lebih tinggi, dan persepsi tenaga kerja muda sektor nonpertanian di perkotaan lebih bergengsi. Mereka lebih senang merantau ke kota meskipun hanya menjadi kuli bangunan atau bekerja di pekerjaan nonformal lainnya. Bagi yang berpendidikan tinggi, mereka bekerja di pekerjaan formal seperti menjadi pegawai negeri, atau di sektor industri, jasa, dan lainnya. Fenomena ini terjadi merata hampir di seluruh agroekosistem (Susilowati et al. 2012). Selain itu, dengan semakin tingginya tingkat pendi- dikan maka semakin kritis dan selektif untuk memilih bidang pekerjaan yang dianggap lebih rasional. Bekerja di sektor nonpertanian di kota menjadi pilihan dibandingkan kembali ke desa dan bekerja di pertanian.

Faktor penarik lainnya kaum pemuda lebih memilih bekerja di sektor nonpertanian adalah pengaruh kota sebagai pusat pembangunan. Tersedianya infrastruktur yang hampir merata di berbagai provinsi, terutama di Jawa, mendorong berkembangnya sektor-sektor industri, perda- gangan, dan jasa. Tumbuhnya sektor-sektor nonpertanian telah membuat daya tarik tersendiri bagi para pemuda dan mendorong terjadinya urbanisasi. Dengan kondisi tersebut, sebenarnya tidaklah sepenuhnya tepat jika dikatakan para pemuda enggan atau tidak berminat bekerja di sektor pertanian. Keeng- ganan tenaga kerja muda bekerja di pertanian di perdesaan lebih karena kurangnya kesempatan kerja di perdesaan. Jika kesempatan kerja di pertanian dan perdesaan semakin luas dengan insentif ekonomi yang bersaing maka diyakini para pemuda akan tertarik

bekerja di sektor pertanian. Faktor penarik atau eksternal tersebut umumnya didukung oleh konektivitas, informasi, dan jejaring kerja ke nonpertanian.

Migrasi ke kota atau urbanisasi pada dasarnya mencerminkan upaya tenaga kerja untuk mencari pekerjaan di sektor nonpertanian dengan meninggalkan kegiatan pertanian di perdesaan atau bahkan sebelumnya belum pernah bekerja di pertanian. Berbagai faktor yang memengaruhi migrasi pada dasarnya identik dengan faktor yang memengaruhi kurangnya minat tenaga kerja muda masuk ke sektor pertanian, sehingga mereka melakukan migrasi ke kota. Hasil empiris kajian Syafaat et al. (2000) menyatakan bahwa faktor pendorong tenaga kerja mencari pekerjaan di kota terutama adalah faktor ekonomi, antara lain rasio ketergantungan, rasio luas lahan terhadap angkatan kerja, dan rasio pendapatan pertanian terhadap pendapatan rumah tangga. Makin tinggi rasio ketergantungan, makin besar beban tanggungan, makin kecil luas lahan per kapita,serta makin kecil pendapatan yang berasal dari pertanian, maka mendorong rumah tangga melakukan migrasi ke kota. Sinuraya dan Saptana (2007) juga menyatakan faktor utama yang memengaruhi anggota rumah tangga melakukan migrasi antara lain adalah terbatasnya kesempatan kerja di desa, banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki lahan garapan di dalam desa, relatif rendahnya upah di desa, tidak mencukupinya hasil yang diperoleh dari usaha tani, dan tidak sesuai pendidikan.

Persepsi secara umum sektor pertanian dicirikan dengan 3 D, yaitu *dirty, dangerous, and difficult* (Wang 2014). Dengan persepsi seperti itu, tidak akan mudah untuk menarik tenaga kerja muda ke sektor pertanian. Menurut Tapanapunnitikul dan Prasunpangsri (2014), di Thailand generasi muda yang berasal dari keluarga petani sebagian besar tidak ingin menjadi petani. Dalam persepsi mereka, bekerja di pertanian memerlukan kerja keras, namun pendapatannya sedikit, sehingga tidak akan menjadi kaya. Kondisi kemiskinan yang mereka alami tidak membuat

mereka tertarik meneruskan karir di pertanian dan pindah ke sektor nonpertanian. Kendala lainnya yang membuat generasi muda enggan bertani adalah biaya produksi yang tinggi sementara tidak ada jaminan harga yang memadai, terutama karena pengaruh cuaca yang mengakibatkan kehilangan hasil cukup tinggi. Faktor lainnya adalah hambatan permodalan. Sebagian besar tenaga petani muda tidak *bankable* karena kepemilikan modal dan aset yang rendah (Wang 2014; Murphy 2012).

Dari dimensi sosiologi, Suyanto (2016) menganalisis penyebab keengganan generasi muda bekerja di sektor pertanian. Menurut Suyanto, generasi muda enggan bertani erat kaitannya dengan pergeseran subkultur yang menjadi identitas mereka. Perspektif *cultural studies* adalah sebuah cara pandang dalam perkembangan terbaru teori sosial yang memahami bagaimana perilaku, gaya hidup, dan berbagai hal yang dilakukan anak muda dewasa ini secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan subkultur yang menjadi identitas kultural mereka. Suyanto mengambil referensi melalui perbedaan antara mazhab Chicago yang melihat subkultur anak muda sebagai bagian dari perilaku efek dari kemajuan kota yang terlalu cepat, dengan perspektif mazhab Birmingham yang memahami subkultur anak muda sebagai bentuk perlawanan terhadap kemapanan dan hegemoni. Kaum muda terpecah antara ancaman kehancuran warisan kelas pekerja mereka disatu sisi, dan daya tarik gaya hidup konsumen kelas menengah di sisi lain. Mazhab lain yang juga memiliki pandangan berbeda dengan mazhab Chicago adalah mazhab Manchester, yang melihat subkultur anak muda bukan semata perlawanan, tetapi lebih sebagai ekspresi dari gaya atau keinginan untuk tampil beda. Mazhab-mazhab tersebut pada intinya ingin mempelajari latar belakang kenapa terjadi perubahan perilaku kaum muda dibandingkan perilaku generasi orang tua mereka.

Perubahan budaya di Indonesia yang memengaruhi keengganan generasi muda bertani diuraikan sebagai berikut. Bagi anak- anak muda di perdesaan, sektor pertanian makin kehilangan daya tarik, bukan sekedar karena secara ekonomi sektor pertanian ini makin tidak menjanjikan, tetapi yang tak kalah penting keengganan anak-anak muda untuk bertani sesungguhnya juga dipengaruhi oleh subkultur baru yang berkembang di era digital seperti sekarang ini. Era baru yang melahirkan mimpi-mimpi baru, cita-cita baru, gaya hidup baru anak muda di perdesaan, dan berbagai hal yang dulu tidak pernah dirasakan orang tuanya. Di perdesaan, anak-anak muda yang ada di sana, karena perkembangan teknologi informasi dan internet, kini tidak lagi bisa dibedakan dari kehidupan anak-anak muda urban, terutama dari segi gaya hidup, aspirasi sosial dan kemauan pemikiran mereka. Berbeda dengan generasi orang tuanya yang sebagian besar sejak kecil terbiasa diperkenalkan dengan kehidupan bercocok-tanam di desa, anak muda perdesaan kini hidup dan tumbuh dalam lingkungan pergaulan yang lebih luas. Mereka juga mengenal *gadget* dan pikiran mereka tidak lagi terkungkung oleh batas-batas geografis wilayah. Di era masyarakat *postmodern,* budaya yang berkembang dan dikembangkan anak- anak muda di perdesaan memiliki kaitan dengan kehadiran berbagai produk budaya global, seperti film, musik mancanegara, selera makan (*fast food, starbuck,* dll.), dan budaya global lain.

Kehadiran berbagai produk budaya populer yang mengglobal telah memicu perkembangan budaya anak muda, dan mengubah pema- haman mereka bahwa anak muda menjadi bagian dari industri budaya yang lebih mengglobal. Di era perkembangan masyarakat *postmodern* seperti sekarang ini, anak-anak muda di perdesaan sesungguhnya memang telah berubah. Keengganan mereka untuk bekerja sebagai petani, bukan semata karena sektor pertanian memang sudah tidak menarik lagi dari sisi ekonomi, melainkan lebih disebabkan cara pandang dan *way of life*

mereka memang telah berubah jauh melampaui batas-batas geografis dan warisan kultural orang tua mereka (Suyanto 2016).

Kebijakan Untuk Menarik Tenaga Kerja Muda Ke Sektor Pertanian

Generasi muda pada umumnya dicirikan dengan pola pikir dan aktivitas yang dinamis dan memiliki ketertarikan tinggi terhadap inovasi teknologi. Untuk memperkuat ketertarikan generasi muda pada pertanian dan agar tidak meninggalkan perdesaan, maka diperlukan media untuk mengembangkan kreativitas mereka. Kebijakan yang dilakukan haruslah secara komprehensif dipandang dari sisi *demand* dan *supply*. Sisi permintaan adalah dari sisi sektor pertanian secara umum dan perdesaan secara khusus. Pertanian dan perdesaan memerlukan tenaga kerja muda untuk merevitalisasi pertanian dan perdesaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai kebijakan terkait dengan pertanian secara umum dan perdesaan secara khusus agar tercipta kecocokan prasyarat dan kondisi sesuai yang diinginkan oleh generasi muda untuk berkarya di pertanian.

Ada tiga faktor utama yang perlu dipertimbangkan untuk menarik generasi muda ke pertanian, yaitu produktivitas dan profitabilitas usaha pertanian, kesempatan kerja yang tersedia, serta kenyamanan dan kepuasan kerja. Di sisi lain, generasi muda sebagai pemasok tenaga kerja juga memerlukan perbaikan dan peningkatan pendidikan dan keterampilan agar sesuai dengan kebutuhan pertanian.

Beberapa kebijakan yang diperlukan untuk menarik generasi muda bekerja di sektor pertanian, antara lain (a) mengubah persepsi generasi muda bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang menarik dan menjanjikan apabila dikelola dengan tekun dan sungguh-sungguh; (b) pengembangan agro- industri; (c) inovasi teknologi; (d) insentif; (e) pengembangan pertanian

modern; (f) pelatihan dan pemberdayaan petani muda; dan (g) memperkenalkan pertanian kepada generasi muda sejak dini.

Mengubah Persepsi Generasi Muda terhadap Pertanian

Persepsi negatif generasi muda ke pertanian bahwa kegiatan pertanian identik dengan kondisi lingkungan yang tidak menarik, tidak bergengsi, dan tidak memberikan penghasilan yang memadai harus diubah menjadi persepsi positif. Citra sektor pertanian selama ini bagi tenaga kerja muda dipandang kurang menarik karena adanya pandangan bahwa petani sebagai pekerjaan kelas dua dan sempitnya kesadaran dan pemahaman akan potensi pertanian. Citra tersebut perlu diperbaiki dengan memberikan dukungan dan pemahaman bahwa industri pertanian dapat menjadi inklusif serta bekerja sebagai petani juga merupakan suatu karir dan akan diperoleh *reward* yang memadai. Sektor pertanian merupakan sektor yang menarik dan menjanjikan apabila dikelola dengan tekun dan sungguh-sungguh.

Era perkembangan revolusi informasi yang didukung perkembangan teknologi informasi, seperti *twitter, facebook, email*, dan lain-lain memberikan keleluasaan bagi anak-anak muda yang berada di perdesaan untuk memperoleh berbagai informasi melalui dunia maya. Berselancar di dunia maya adalah salah satu cara anak-anak muda di perdesaan untuk mengikuti perkembangan dunia dan melakukan eksplorasi hal-hal baru. Anak-anak muda di perdesaan kini merupakan suatu konstruk sosial yang tengah berubah gaya, citra, dan identitas (Suyanto 2016). Informasi perkembangan dunia dan perkotaan yang demikian mudah dan cepat diperoleh, secara psikologis dan sosial bisa jadi menimbulkan persepsi bahwa perdesaan jauh dari hal-hal yang menarik di kota. Hal ini sedikit banyak menjadikan anak-anak muda merasa minder dan ketinggalan gaya, sehingga menjadi salah satu alasan untuk meninggalkan desa. Oleh karenanya, dengan menunjukkan bahwa

hidup di perdesaan bisa dibuat lebih menarik, bergaya, mengikuti perkembangan dunia, dan menimbulkan gengsi, maka minat untuk meninggalkan desa dapat dikurangi. Pemba- ngunan perdesaan perlu dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang menarik bagi pemuda layaknya di kota yang menimbulkan kebanggaan.

Dari perspektif ekonomi, jika usaha pertanian di perdesaan memberikan insentif ekonomi yang bersaing maka para pemuda akan tertarik dan siap untuk bekerja di perdesaan sehingga urbanisasi dapat berkurang. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan akses dan investasi di sektor pertanian, lebih spesifik lagi di sektor agribisnis perdesaan.

Pengembangan Agroindustri

Pengembangan agroindustri melalui penggunaan teknologi industri yang mampu menciptakan nilai tambah, menunjukkan bahwa pertanian tidak semata-mata kegiatan *on farm* untuk memproduksi bahan-bahan mentah/ bahan baku produksi. Selama ini pertanian Indonesia cenderung terperangkap pada sistem pertanian *on farm* (budi daya), namun belum menuju ke pertanian *off farm* (*pascapanen*). Oleh karenanya, pengembangan agroindustri akan merubah pandangan generasi muda tentang stigma pertanian *on farm* yang hanya menghasilkan *raw material* semata, melainkan juga menghasilkan *final product* dengan menciptakan nilai tambah yang tinggi di sektor hilir.

Kaitannya dengan teknologi industri, Daryanto (2009) mengemukakan, *branding* yang merupakan bagian dari aktivitas teknologi industri, merupakan ekonomi kreatif yang biasanya disukai oleh generasi muda. Dalam *branding* termasuk di dalamnya adalah *packing* dan *processing*. Industri tersebut dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Citra pertanian melalui agroindustri akan dapat diperbaiki di mata pemuda karena mereka tidak harus berkutat di lahan

pertanian *on farm.* Pada saat yang sama teknologi mekanisasi pertanian perlu ditingkatkan sehingga selain mening- katkan produktivitas tenaga kerja dan pertanian juga meningkatkan gengsi pemuda untuk bekerja di pertanian *on farm.*

Inovasi Teknologi

Inovasi teknologi sangat terkait dengan generasi muda, yakni menggugah ketertarikan pemuda di sektor pertanian. Karakteristik kaum muda adalah pada kekuatannya, rasa ingin tahunya, kesediaan untuk mengambil risiko dan mencoba-coba peluang baru. Salah satu contoh untuk meningkatkan citra pertanian di mata pemuda adalah melalui inovasi *urban farming*. Berdasarkan karakteristik khas perkotaan yang memiliki luasan lahan yang sempit hingga sangat sempit, maka pengembangan budi daya tanaman di perkotaan dapat dilakukan melalui inovasi budi daya model taman dinding (*wall gardening*), budi daya dalam pot, budi daya sistem vertikal, hidroponik, dan aquaponik (Albayani dan Prabatmodjo 2015).

Model-model budi daya *urban farming* tersebut memadukan antara keterampilan dan seni yang umumnya digemari oleh anak muda. Demikian pula inovasi informasi pada media sosial sangat akrab bagi pemuda. Model inovasi *urban farming* yang disebarkan melalui media sosial (internet, *twitter*, *facebook*), memiliki efek viral yang luar biasa dalam menyebarkan inovasi *urban farming*. Efek media sosial berhasil menerbitkan semangat pemuda untuk berpartisipasi meskipun tidak memahami benar teknologi itu sendiri. Pemuda yang terlibat dapat menyebar benih, menyiram, berpose di lahan yang sudah dibuat berlarik-larik dan ditanami sebagian, atau di depan *wall garden*. Aksi tersebut mampu menarik minat pemuda untuk bertani/berkebun di lahan-lahan perkotaan.

Insentif

Insentif perlu diberikan khususnya kepada petani muda atau petani pemula yang berusaha untuk menarik minat mereka berusaha di sektor pertanian. Berbagai program insentif di bidang fiskal melalui kebijakan subsidi input dan subsidi suku bunga kredit selama ini memang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia, namun tidak secara khusus ditujukan untuk pemuda atau petani pemula agar tertarik bekerja di sektor pertanian. Belajar dari pengalaman di negara-negara lain di mana pemerintahnya memberikan berbagai insentif khusus untuk pemuda (Murphy 2012), pemerintah Indonesia juga perlu mengadakan skema insentif khusus untuk pemuda terutama insentif untuk membantu permodalan. Insentif di bidang moneter perlu diberikan kepada petani muda dan pemula khususnya mempermudah persyaratan untuk akses ke sektor perbankan untuk memperoleh kredit. Hal ini sangat perlu, mengingat perbankan selalu mensyaratkan agunan bagi debitur untuk mengantisipasi risiko, sementara petani muda dan pemula pada umumnya belum memiliki aset memadai sebagai agunan. Menjembatani debitur petani muda dan pemula dengan perbankan melalui pihak ketiga sebagai avalis diharapkan akan memperlancar proses permodalan bagi petani muda yang memerlukan permodalan melalui bank.

Selain itu, insentif lain yang diperlukan adalah di bidang perizinan, yaitu kemudahan dan penyederhanaan perizinan yang diperlukan untuk mendorong petani muda dan pemula dalam berwiraswasta di sektor agroindustri hulu maupun hilir. Jaminan harga pasar juga merupakan faktor penting untuk menarik mereka masuk berbisnis di sektor pertanian.

Kauffman (2013b) menyatakan bahwa petani muda dan pemula di Amerika Serikat memiliki risiko tinggi sebagai debitur di bank untuk mengambil kredit perbankan untuk membeli lahan usaha tani karena tidak memiliki agunan. Hal ini merupakan hambatan untuk mulai berusaha tani di lahan sendiri apalagi dengan semakin meningkatnya harga lahan. Meskipun saat ini pemerintah

Amerika Serikat menerapkan kebijakan fiskal melalui pemberian subsidi suku bunga dan Federal Reserve memberikan perpanjangan waktu pelunasan kepada petani muda dan petani pemula untuk,membeli lahan pertanian, namun pemerintah perlu mengambil alternatif kebijakan dengan memberikan insentif berbagai kemudahan yang diarahkan bukan untuk pembelian lahan namun untuk menyewa lahan. Hal ini belajar dari kenyataan bahwa sekitar 80% perusahaan- perusahan di AS menggunakan perlengkapan kantor dengan cara menyewa.

Pertanian Modern

Salah satu alasan tenaga kerja muda tidak suka bekerja di pertanian adalah persepsi bahwa pertanian merupakan kegiatan *on farm* dengan teknologi sederhana, jauh dari kesan prestise. Persepsi inilah yang akan diubah melalui kebijakan pengembangan pertanian modern, yaitu melalui penggunaan mekanisasi pertanian secara penuh. Program modernisasi pertanian akan mengubah pertanian konvensional yang menggunakan peralatan manual menjadi pertanian mekanisasi. Dengan menggunakan mekanisasi pertanian, kegiatan *on farm* tidak lagi dipandang sebagai kegiatan yang kumuh dan kurang membanggakan, yang dengan demikian diharapkan akan menarik minat tenaga kerja muda bekerja di pertanian *on farm.*

Melalui inovasi teknologi dan kelembagaan, pertanian modern dicirikan oleh tiga indikator, yaitu peningkatan efisiensi, peningkatan produktivitas, dan perluasan areal. Melalui modernisasi pertanian diharapkan penggunaan biaya tenaga kerja dan biaya produksi menurun, kehilangan hasil menurun, produktivitas meningkat, yang pada akhirnya keuntungan juga meningkat. Hasil analisis dari pemanfaatan berbagai jenis alsintan meliputi traktor roda dua, alat tanam (*transplanter), power thresher,* dan alat panen *(mini combine harvester)* di tingkat usaha tani

secara finansial menguntungkan yang ditunjukkan oleh nilai R/C (*return cost ratio*) dari penggunaan masing-masing alat tersebut yang lebih besar dari satu (Saliem et al. 2016).

Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas

Masalah umum ketenagakerjaan yang dialami Indonesia adalah ketidakmampuan untuk memberikan cukup banyak lapangan kerja bagi para kaum muda siap kerja dan rendahnya mutu tenaga kerja. Hal yang sama juga untuk tenaga kerja pertanian. Oleh karenanya, penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda di pertanian harus dilakukan melalui kebijakan komprehensif dengan mempertimbangkan faktor permintaan dan pasokan tenaga kerja. Secara umum kebijakan pemerintah tentang lapangan kerja kaum muda terutama tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Tanggung jawab untuk penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda terletak pada Direktorat Jenderal Penciptaan Lapangan Kerja dan Penempatan Dalam Negeri, sementara kebijakan tentang pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan pelatihan merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Pelatihan dan Produktivitas. Pelaksanakan pelatihan bagi pencari kerja dilakukan melalui pusat-pusat pelatihan kejuruan. Selain itu, dalam menjalankan program magang untuk membantu para pencari kerja juga dilakukan bekerja sama dengan sektor swasta (ILO 2007).

Pada dasarnya kebijakan pemerintah untuk lapangan kerja dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan kete- rampilan. Penciptaan lapangan kerja dan pengembangan keterampilan sangat berhu- bungan dengan lapangan kerja kaum muda. Program-program yang melibatkan kelompok- kelompok kaum muda pencari kerja di daerah perdesaan dan perkotaan dirancang untuk tidak hanya mengurangi pengangguran, namun juga untuk menciptakan pekerjaan permanen. Program-program untuk lapangan kerja kaum muda antara lain

Pengembangan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP) bagi lulusan perguruan tinggi dengan mengikut- sertakan universitas lokal, Program Pengem- bangan Swausaha yang Terdidik melalui keikutsertaan LSM untuk lulusan sekolah menengah umum dan program-program penciptaan lapangan kerja umum lainnya antara lain program menerapkan teknologi tepat guna untuk kelompok komunitas yang kurang mampu. Di perdesaan program tersebut diwujudkan melalui kelompok kegiatan usaha produktif untuk komunitas perdesaan (ILO 2007).

Menyadari peran penting dan strategisnya generasi muda, secara khusus untuk sektor Pertanian, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP 2016b) juga melakukan pembinaan terhadap generasi muda, melalui berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk menyiapkan petani muda wirausaha maupun dalam rangka membangun kecintaan dan penghargaan terhadap dunia pertanian pada generasi muda umumnya. Sasaran pembinaan generasi muda dapat digolongkan tiga kelompok, yaitu (1) generasi muda yang berusia antara 15–22 tahun, mencintai pertanian, dan berminat bekerja di bidang pertanian, disebut Taruna Bumi; (2) generasi muda yang berusia antara 16–22 tahun, anak petani, turut serta membantu kegiatan usaha tani keluarga/orang tua, dan belum menentukan bidang pertanian sebagai mata pencaharian, disebut Taruna Tani; dan (3) generasi muda yang berusia 20–35 tahun, yang mandiri, berusaha tani sendiri, telah menentukan bidang pertanian sebagai sumber mata pencaharian dan memiliki semangat wirausaha, disebut Petani Muda Wirausaha. *Agricultural Training Camp* (ATC) adalah salah satu bentuk diklat pertanian yang diperuntukkan bagi anak usia sekolah untuk memberi pengetahuan dan keterampilan di bidang pertanian sehingga tumbuh dan berkembang apresiasi (minat dan kecintaan) terhadap pertanian. Pelaksanaan ATC dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Pertanian sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab menyiapkan sumber daya

manusia pertanian dan generasi muda pertanian baik melalui diklat maupun pemagangan (BPPSDMP 2016b).

Dengan mengaktifkan peran institusi dan program seperti diuraikan di atas, maka tenaga kerja muda di perdesaan tidak perlu harus meninggalkan desanya untuk mencari kerja di kota. Cakupan luas dari sektor pertanian memungkinkan tenaga kerja muda yang telah terampil selain dapat bekerja di pertanian *on farm,* terutama bagi yang memiliki sumber daya pertanian memadai, juga dapat bekerja di kegiatan industri pertanian, dan jasa pendukung pertanian lainnya dari hulu sampai hilir.

Pemberdayaan Petani Muda

Program pemberdayaan petani sudah banyak dilakukan baik oleh Kementerian dan lembaga-lembaga swasta baik dalam negeri maupun internasional serta LSM. Salah satu contoh program pemberdayaan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan program PNPM Mandiri. PNPM Mandiri memiliki banyak program pendukung, di antaranya adalah PNPM Mandiri Perdesaan, yang memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, kelembagaan lokal, pendampingan masyarakat, pelatihan masyarakat, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM). Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman/hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan di bawah koordinasi Bank Dunia. Namun, seperti halnya program- program pemerintah di sektor pertanian, PNPM Mandiri

Perdesaan ini tidak secara khusus menyasar generasi muda namun masyarakat secara umum di perdesaan,

Contoh program pemberdayaan generasi muda di perdesaan untuk kegiatan pertanian dilakukan oleh Yayasan Al Ashar dengan program yang disebut sebagai #Al Ashar Peduli Ummat. Yayasan ini melakukan pemberdayaan masyarakat perdesaan, termasuk generasi muda perdesaan di kegiatan pertanian melalui berbagai program. Salah satu program tersebut adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Pesantren dengan peserta para santri di pesantren. Tujuan program adalah menum- buhkan jiwa bertani dan peningkatan keahlian bertani bagi para santri pondok pesantren dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam lokal. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah memfasilitasi pengelolaan (budi daya dan pemasaran hasil) kebun kentang dan usaha tani jamur. Program lainnya adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bekerja sama dengan generasi muda setempat yang difungsikan sebagai pendamping dalam mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk tanaman sayur mayur sebagai upaya menekan angka belanja keluarga di desa-desa gemilang di sebelas provinsi. Kegiatan lainnya adalah mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif dengan tanaman hortikultura. Para kader muda dan kelompok tani juga diajak melakukan studi lapang dan praktik uji tanah sawah yang dibimbing langsung oleh para pakar dan peneliti di Balai Besar Tanaman Padi, Badan Litbang Pertanian, di Subang Jawa Barat (Yayasan Al Ashar 2014).

Memperkenalkan Pertanian kepada Generasi Muda Sejak Dini

Langkah operasional Kementerian Pertanian dalam penumbuhan minat generasi muda terhadap sektor pertanian adalah melalui program kewirausahaan mahasiswa pertanian. Program ini bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dan bertujuan untuk mengembangkan jiwa

kewirausahaan mahasiswa di bidang pertanian (*agripreneur*), meningkatkan peluang bisnis bagi lulusan sehingga mampu menjadi *job creator* di sektor pertanian, mendorong pertumbuhan dan perkembangan kapasitas Institusi Pendidikan Tinggi Pertanian sebagai *center of agripreneur development* berbasiskan inovasi agribisnis (BPPSDMP 2016b). Langkah akhir dari program tersebut sasarannya adalah menciptakan mahasiswa pertanian menjadi *agripreneur* (petani pengusaha).

Upaya pengenalan pertanian kepada generasi muda juga dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) beberapa Perguruan Tinggi di Jawa dan luar Jawa diundang untuk menghadiri berbagai kegiatan ekspose atau gelar teknologi pada beberapa acara nasional, seperti Pekan Nasional Petani dan Nelayan (Penas), Hari Pangan Sedunia (HPS) dan Dialog Nasional Pembangunan Pertanian. Tujuan mengundang BEM pada acara-acara tersebut adalah untuk membang- kitkan kepedulian dan peran generasi muda kepada sektor pertanian. Dengan memper- kenalkan berbagai inovasi teknologi pertanian yang telah dihasilkan oleh Balitbangtan diha- rapkan akan tumbuh minat para mahasiswa tersebut untuk nantinya bekerja dan mengembangkan sektor pertanian.

Upaya menumbuhkan minat dan ketertarikan generasi muda ke sektor pertanian juga dapat dilakukan sejak pendidikan dasar. Salah satu *success story* yang pernah ada dalam menumbuhkan dan menanamkan kecintaan murid-murid kepada dunia pertanian dilakukan oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bernama Kelompok Langkah Bocah (LB) dengan anggota para anak muda, di antaranya alumnus dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Pembangunan Nasional, dan Universitas Brawijaya.

Kelompok LB adalah sebuah LSM yang secara formal berdiri pada tahun 1998, yang didukung oleh beberapa LSM dan kelompok tani yang berlokasi di Yogyakarta, yang peduli

dengan pangan lokal dan menaruh perhatian besar kepada pendidikan anak-anak dan pertanian. Visi LSM tersebut adalah masyarakat yang mandiri, mampu melakukan kegiatan- kegiatan yang berkenaan dengan kepedulian terhadap anak dan kelestarian alam.

Konsep pertanian berkelanjutan yang berperspektif lingkungan sudah seharusnya berawal dari anak-anak. Anak-anak berhak mendapatkan informasi dan pengetahuan yang berkenaan dengan pertanian. Oleh karena itu, LSM tersebut melakukan pendekatan kepada beberapa sekolah dasar di Kabupaten Bantul, Yogyakarta untuk memasukkan pelajaran pertanian pangan lokal, tidak hanya sebagai kegiatan ekstrakurikuler, namun sebagai muatan lokal.

Tidak mudah awalnya untuk meyakinkan pentingnya materi tersebut sebagai salah satu muatan lokal. Melalui perjuangan yang gigih dan panjang, pelajaran pertanian pangan lokal sebagai muatan lokal ini pada akhirnya dapat diterima oleh dua SD di Kabupaten Bantul dan mendapat dukungan dari para orang tua murid dan petani setempat. Hal ini ditunjukkan dari kesediaan mereka menjadikan kebun, sawah, dan pekarangannya untuk dijadikan "tempat praktik" bagi murid-murid. Murid-murid SD sibuk mencangkul, menanam pohon, memanen umbi- umbian, bahkan berdiskusi sesama teman membicarakan berbagai tanaman dan hewan yang mereka temukan di sekitar rumah dan sekolah (Syahwanto 2004).

Kesimpulan

Sektor pertanian sampai saat ini tetap memiliki peran strategis sebagai pemasok bahan baku pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah populasi. Peran pemuda sangat penting sebagai generasi penerus untuk keberlanjutan sektor pertanian. Namun, fenomena yang terjadi petani muda enggan bekerja di pertanian sehingga jumlah petani muda semakin menurun, sebaliknya jumlah petani tua meningkat. Penurunan jumlah

petani muda erat kaitannya dengan sempitnya luas penguasaan lahan pertanian dan persepsi umum terhadap sektor pertanian yang kurang bergengsi dan kurang memberikan pendapatan yang baik. Menyikapi perubahan struktural ketenagakerjaan tersebut, strategi yang perlu dilakukan untuk menarik minat pemuda bekerja di pertanian di antaranya adalah dimulai dengan upaya mengubah persepsi generasi muda bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang menarik dan menjanjikan apabila dikelola dengan tekun dan sungguh-sungguh. Sejalan dengan upaya tersebut juga diperlukan pengembangan agroindustri, inovasi teknologi, pemberian insentif khusus kepada petani muda, pengembangan pertanian modern, pelatihan dan pemberdayaan petani muda, serta memperkenalkan pengembangan industri pertanian dan inovasi pertanian kepada generasi muda sejak dini.

Belajar dari pengalaman negara-negara lain untuk menarik minat pemuda ke sektor pertanian, pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pertanian Indonesia, perlu meningkatkan keberpihakan kepada petani muda dengan memprioritaskan program insentif khusus untuk pemuda, selain insentif lainnya yang telah ada selama ini untuk petani secara umum. Selain itu, diperlukan dukungan komponen pertanian lainnya yang dapat mempermudah berusaha di sektor pertanian baik *on farm* maupun *off farm*, jaminan pasar serta membangun institusi pertanian dari hulu sampai hilir. Program-program pemberdayaan dan pelatihan petani muda juga diperlukan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kerja muda pertanian.

Bab IX
PENUTUP DAN SARAN

Kajian Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan Tahun 2021

BAB IX.

PENUTUP DAN SARAN

9.1. PENUTUP

Pada bagian ini ada beberapa kesimpulan yang dapat di ambil dari kajian ketenagakerjaan di Kabupaten Kuningan;

1. Secara PDRB dan ketenagakerjaan bahwa Kabupaten Kuningan mengalami penurunan pertumbuhan perekonomian dari tahun 2019 yang lebih besar dari 6 persen menjadi hanya 0,09 persen di tahun 2020. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2019 sebesar 9,68 persen menjadi 11,22 persen di tahun 2020.
2. Peran dari kategori perekonomian Pertanian merupakan salah satu penopang dari pertumbuhan PDRB yang sedikit masih berada di atas angka positif di tahun pandemic Covid-19 (2020) ini. Peran pertanian juga terlihat dari penyerapan tenaga kerja di tahun 2020 kategori pertanian mampu menyerap 132.775 tenaga kerja atau sebesar 28,67 % naik dari tahun sebelumnya (2019) dimana daya serapnya sebesar 113.083 tenaga kerja atau sebesar 24,57 %. Kenaikan sebesar 19.692 tenaga kerja jelas sangat mendongkrak jumlah kenaikan penduduk yang bekerja yang hanya naik 2.937 tenaga kerja dari tahun 2019 yang sebanyak 460.227 tenaga kerja menjadi 463.164 tenaga kerja di tahun 2020. Artinya tanpa peran dari kategori pertanian mengalami koreksi / penurunan yang cukup tajam. Dalam hal ini kategori pertanian memiliki daya tampung yang cukup besar untuk menampung kelebihan jumlah tenaga kerja yang terdapat di Kabupaten Kuningan.
3. Analisis terhadap angka PDRB dan ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan dengan menggunakan Local Qoutient Analisis dan Shift Share Analisis dimana data PDRB dan ketenagakerjaan di Jawa Barat yang menjadi pembanding utamanya menunjukkan bahwa

kategori pertanian menjadi kategori perekonomian dengan standar basis dan daya saing paling baik di Kabupaten Kuningan.

4. Penghitungan hasil KSA (Kerangka Sampel Area) di Kabupaten menunjukkan :

4.1. Luas panen padi pada tahun 2020 yang sebesar 45.786 Ha meningkat 3,58 % dari luas panen padi di tahun 2019 yang sebesar 44.201 Ha.

4.2. Produksi Gabah Kering Giling (GKG-ton) meningkat 26,08 % dari 219.953 ton GKG di tahun 2019 menjadi 277.328 ton GKG pada tahun 2020.

4.3. Produksi padi tahun 2020 adalah sebesar 159.321 ton di tahun 2020 hal ini berarti meningkat dari tahun 2019 yang baru mencapai 126.365 ton.

4.4. Produksi beras yang sebesar 159.321 ton ini melampaui jumlah kebutuhan konsumsi beras yang mencapai 136.203 ton untuk seluruh penduduk Kabupaten Kuningan. Terdapat surplus sebesar 23.117 ton atau sekitar 16,97 % dari total kebutuhan konsumsi penduduk Kabupaten Kuningan selama tahun 2020.

4.5. Efektifitas dan efisiensi produksi padi di Kabupaten Kuningan pada tahun 2020 sudah menunjukkan kualitas yang baik, sehingga mampu berswasembada beras.

5. Pertanian menjadi kategori yang menjadi sandaran utama dari pertumbuhan perekonomian dan ketenagakerjaan di Kabupaten Kuningan, sehingga sangat perlu ditumbuhkembangkan bagaimana pertanian seharusnya mampu di kelola menjadi kategori yang berkesinambungan membangun kesejahteraan penduduk Kabupaten Kuningan.

6. Persentase penduduk yang bekerja di Propinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa pekerja di Jawa Barat cenderung berada pada kelompok umur penduduk yang relative lebih muda apabila dibandingkan dengan pekerja di Kabupaten Kuningan. Persentase penduduk yang bekerja di Kabupaten Kuningan menunjukkan persentase yang lebih tinggi pada kelompok umur 40 tahun

ke atas. Kondisi ini sangat memungkinkan juga terjadi pada kategori pertanian, sehingga perlu dipikirkan kembali bagaimana pertumbuhan pertanian jangan berhenti saat pandemic berakhir. Pembentukan petani muda di Kabupaten Kuningan perlu menjadi skala prioritas untuk peningkatan kesejahteraan penduduk dimasa yang akan datang.

9.2. SARAN

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya pertanian sudah menunjukkan menjadi kategori yang mampu bertahan dan menjadi pertahanan dari petumbuhan perekonomian di Kabupaten Kuningan di tahun 2020, tahun dimana suka atau tidak suka disebut sebagai tahun pandemik Covid-19. Beberapa saran terkait pertanian di Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut :

1. Penduduk yang bekerja di kategori perekonomian pertanian perlu terus diremajakan sehingga kesinambungan produktifitas pertanian akan berkesinambunga.
2. Perlu adanya diversifikasi produksi, dengan mencontoh pola pertumbuhan tanaman padi maka tanaman lain yang bersifat tanaman unggulan perlu terus ditumbuhkembangkan produktifitasnya.
3. Perlu peningkatan ketersediaan saprotan dan saprodi (bibit, pupuk dll) dengan harga terjangkau sesuai dengan waktu / siklus tanaman.
4. Menjaga tata kelola niaga agar produksi hasil pertanian tetap terjaga pada nilai keekonomisan yang tetap mampu mensejahterakan pelaku usaha pertanian.
5. Perlu adanya kebijakan / tata kelola lahan yang lebih berpihak pada petani yang tidak memiliki lahan, terutama petani-petani muda.

6. Meningkatkan peran serta aktif dari penyuluh pertanian untuk terus melakukan penyuluhan pertanian dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan perkembangan tehnologi informasi. Terutama untuk petani-petani muda di minta aktif mengembangkan diri melalui platform pertanian digital yang sudah banyak tersedia di dunia maya, tetapi tetap dalam bimbingan petugas penyuluh pertanian.
7. Secara bertahap mulai melakukan pengalihan platform penjualan hasil pertanian menjadi lebih ke arah digitalisasi perdagangan.
8. Pemerintah daerah menjadi motivator terdepan tersedianya platform pertanian digital terkait proses produksi dan pemasaran produksi hasil pertanian. Pengadaan kelas-kelas virtual yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan produksi petani dengan melibatkan peran serta penyuluh pertanian adalah hal yang perlu dicoba dan diterapkan di Kabupaten Kuningan. Evaluasi efektfitasnya menjadi bahan untuk mendapatkan masukan tentang perekonomian petani di masa-masa selanjutnya.

Daftar Pustaka

Kajian Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan Tahun 2021

DAFTAR PUSTAKA

Afi Azimatun Najakhah; *Menjaga Stabilitas Sektor Pertanian Saat Pandemi Covid-19*; 2020

Agung, Alvian Dhian And Sumaryanto. 2015.*Pengaruh Motivasi Mental Berwirausaha Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Berwirausaha: Studi Pada Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan*. *Jurnal REKSA* 4(1):39–54.

Albayani M, Prabatmodjo H. 2015. *Keberlanjutan pertanian perkotaan di kawasan metropolitan Jakarta*. JPWK. 4(2):265-275. Juga tersedia dari: http://sappk.itb.ac.id/jpwk1/wp-content/uploads/20 15/12/V4N2_265-275.pdf.

Aprilianty, Eka. 2012. *Pengaruh Kepribadian Wirausaha, Pengetahuan Kewirausahaan, Dan Lingkungan Terhadap Minat Berwirausaha Siswa Smk*. *Jurnal Pendidkan Vokasi* 2(3):311–24.

Arief Anshory Yusuf, Tarkus Suganda, Hermanto, Faiz Mansur, Panji Hadisoemarto; Strategi Ekonomi Sektor Pertanian Di Tengah Pandemi Covid-19; 2020

Arikunto, Suharsimi. 1993. *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bi JY. 2014. *Overview of youth engagement in agriculture in China and emerging trends*.

BPS, 2020, https://jabar.bps.go.id

BPS, 2020, https://kuningankab.bps.go.id

BPPSDMP Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. 2016a. Tinjauan tenaga kerja pertanian saat ini dan strategi ke depan. *Bahan Pertemuan Upaya Meningkatkan Minat Generasi Muda terhadap Pertanian*; 2016 Feb 23; Bogor, Indonesia. Bogor (ID): Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Informasi.

BPPSDMP Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. 2016b. *Petunjuk pelaksanaan Diklat ATC* (*Agricultural Training Camp*). Jakarta (ID): Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian.

CAPSA Palawija Newsletter. 31(1)6-8). Also available from: http://www.uncapsa.org/ ?q=palawija-rticles/overview-youth-engagement-agriculture-china- and-emerging-trends.

CGTN, "*PBOC increases re-lending, re-discount quota by 500 billion yuan to support small businesses*", 27 Februari 2020; People's Daily Online, "*Mitigating the impact of COVID-19 in the agricultural sector in China*", 11 Maret 2020; World Bank, "*Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A real time review of country measures (Version 3)*", 3 April 2020.

Compton, J., Wiggins, S. & Keats, S., *"Impact of the global food crisis on the poor: What is the evidence?",* Overseas Development Institute, 2010.

Compton, J., Wiggins, S. & Keats, S., 2010 op. cit.

Dang BQ. 2014. *Technological consultation and backup for young generation entry into farming*. FFTC-RDA 2014 *International Seminar on Enhanced Entry of Young Generation into Farming;* 2014 Oct 20-24; Jeonju, Korea.

Daryanto A. 2009. *Dinamika daya saing industri peternakan.* Bogor (ID): IPB Press.

Davis J, Caskie P, Wallace M. 2013. *How effective are new entrant schemes for farmers? Euro Choices*. 12(3):32-37.

Devie D. 2003. *Mengkaji peluang pasar internasional melalui kinerja ekonomi negara-negara Uni Eropa.* JMK. 5(1):1-16.

Duffy M, Smith D. 2004. *Farmland ownership and tenure in Iowa 1982–2002*: a twenty-year perspective. Iowa (US): Iowa State University,

Egypt Today, "*Egypt takes economic measures related to pensions, agricultural taxes*", 22 Maret 2020; Scoop Empire, "*COVID-19 Updates: What is Egypt doing to curb the spread of the virus?*", 2 April 2020; World Bank, 3 April 2020 op. cit.

Erabaru. 2015 Agu 19. WHO mengeluarkan kriteria baru kelompok usia [Internet]. [diunduh 2016 Mar 12]. Tersedia dari: http://erabaru.net/2015/08/19/ who-mengeluarkan-kriteria-baru-kelompok-usia/.

Euractiv, "*German farms need nearly 300,000 seasonal farm workers*", 25 Maret 2020; World Bank, 3 April 2020 op. cit.

European Comission. 2012. *Rural development in the European Union: statistical and economic information report 2012*. Brussel (BG): The European Directorate-General for Agriculture and Development. Also available from: https://ec. europa.eu/agriculture/sites/ agriculture/files/statisti cs/rural-development/2012/full-text_en.pdf.

FAO, *"Agri-food markets and trade policy in the time of COVID-19"*, 2 April 2020; Agrilinks, *"Preventing Global Food Security Crisis under COVID-19",* 18 Maret 2020.

FarmLast Project. 2010. *Farm land access, succession, tenure and stewardship.* Washington, DC (US): US Department of Agriculture, The National Institute of Food and Agriculture.

Fiji Village, "*Agriculture response package for COVID-19 will be implemented to ensure access to food is not affected – Reddy*", 19 Maret 2020; The Fijan Government, "*2020 COVID-19 budget response address by the Attorney-General and Minister for Economy Hon. Aiyaz Sayed-Kaiyum*", 27 Maret 2020.

G20, *"G20 Food Security and Nutrition Framework",* 2014; United Nations, "*Zero Hunger Challenge*", 2012; United Nations System High Level Task Force on the Global Food Security Crisis, "*The Updated Comprehensive Framework for Action*", September 2010.

Gomes, F. Cardoso. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Keempat. Yogyakarta: ANDI.

Hendri, Meziriati. 2014. *Persepsi Pemuda Pencari Kerja Terhadap Pekerjaan Sektor Pertanian Dan Pilihan Pekerjaan Di Desa Cihideung Udik Kecamatan Ciampea,* Kabupaten Bogor. Institut Pertanian Bogor.

Hukom A. 2014. *Hubungan ketenagakerjaan dan perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat*. JEKT. 7(2):120-129.

Hurlock. 2007. *Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.

IFAD, *Rural development report 2016: Fostering inclusive rural transformation,* 2016

ILO "*Investing in food security as a driver of better jobs",* dalam World of Work Report 2011: Making markets work for jobs, 2011, p. 76; ILO, "*Decent work for food security and resilient rural livelihoods",* 2019.

ILO International Labour Organization. 2007. *Country review on youth employment in Indonesia.* Geneva (SZ): International Labour Organization

ILO, "*COVID-19: Social protection systems failing vulnerable groups*", 25 Maret 2020

ILO, "*Decent work matters in crisis: ILO response to crisis challenges*", Mei 2003; ILO, "*The financial and economic crisis: A Decent Work response*", March 2009.

ILO, "*Governments' responses to COVID-19 (Countries A-L)*", 6 April 2020; World Bank, 3 April 2020 op. cit.

ILO, *World Employment Social Outlook: Trends for women 2017*, 2017.

ILOSTAT, *Lapangan kerja berdasarkan jenis kelamin dan aktivitas ekonomi perkiraan menggunakan model dari ILO,* November 2019.

International Food Policy Institute, "*COVID-19: Trade restrictions are worst possible response to safeguard food security"*, 27 March 2020.

Jawahir Gustav Rizal; *Petani Merugi Saat Sektor Pertanian Tumbuh di Tengah Pandemi Corona, Apa Masalahnya;* Kompas 2020

Joint Statement by the Directors-General of FAO, WHO and WTO, *"Mitigating impacts of COVID-19 on food trade and markets",* 31 Maret 2020.

Katchova AL, Ahearn M. 2014. *Farm land ownership and leasing: implication for young and beginning farmers. Agricultural Economics Staff Paper* #486. Lexington, KY (US): University of Kentucky, Department of Agricultural Economics

Kauffman N. 2013a. *Financing young and beginning farmer. The Main Street Economist. Agricultural and Rural Analysist. Issue* 2. Kansas City (US): Federal Reserve Bank of Kansas City.

Kauffman NS. 2013b. *Credit markets and land ownership for young and beginning farmers. Choices.* 28(2):1-5.

Kementerian Pertanian. 2015a. *Rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun* 2015–2019. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian. 2015b. Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2015. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.

Killis, John. 1988. *Hubungan Minat Kerja, Motivasi Ekstrinsi k Dan Bimbingan Dalam Pelajaran Dengan Kecakapan Kerja Teknik Listrik Lulusan STM Pada Industri-Industri DIY*. IKIP Jakarta.

Lokollo EM, Rusastra IW, Saliem HP, Supriyati, Friyatno S, Budhi GS. 2007. *Dinamika sosial ekonomi pedesaan: analisis perbandingan antar- Sensus Pertanian.* Laporan Akhir Penelitian. Bogor (ID): Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Ma SJ. 2014. *How to encourage young generation to engage in farming: Korea's case*. FFTC-RDA 2014 International Seminar on Enhanced Entry of Young Generation into Farming; 2014 Oct 20-24; Jeonju, Korea.

Malian AH, Friyatno S, Dermoredjo SK, Mardiyanto S, Suryadi M, Maulana M. 2004. *Analisis perkembangan aset, kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga di sektor pertanian.*

Laporan Akhir Penelitian. Bogor (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.

Melkisedek, Albert And Yuliawati. 2018. Hubungan Faktor Internal Dan Eksternal Generasi Millennial Dengan Minat Ilmu Pertanian Di Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga-Jawa Tengah. E-Jurnal UKSW. Retrieved December 14, 2018 (Http://Ejournal.Uksw.Edu/Ecodunamika /Article/Download/1910/980/).

Mosher A. 1966. *Getting agriculture moving.* New York (US): Frederick A. Praeger.

Murphy D. 2012. *Young farmer finance*. Nuffield Australia Project No. 1203, Australia.

Ningrum, Vanda, Gutomo Bayu Aji, Makmuri Sukarno, Yb Widodo, And Anggi Afriansyah. 2016. *Pemuda Dan Pertanian Dalam Keberlanjutan Kedaulatan Pangan; Studi Kasus Lampung Tengah Dan Cilacap*.

Nugraha, Yogaprasta A. And Rina Herawati. 2015. Menguak Realitas Orang Muda Sektor Pertanian Di Perdesaan. *Jurnal Analisis Sosial* 19(1):27–38.

Ogbeide, Osadebamwen Anthony, Ideba Ele, And Emmanuel Ikheloa. 2015. *Young People And Agricultural Employment : Locality And Interest Factors. Mayfair Journal Of Agriculture Development In Emerging Economies 1(1):1–13.*

Pujiriyani, Dwi Wulan, Sri Suharyono, Ibnul Hayat, And Fatimah Azzahra. 2016. *"Sampai Kapan Pemuda Bertahan Di Pedesaan? Kepemilikan Lahan Dan Pilihan Pemuda Untuk Menjadi Petani." Bhumi* 2(2):209–26.

Rasmikayati, Elly, Iwan Setiawan, And Bobby Rachmat Saefudin. 2017. *Kajian Karakteristik, Perilaku Dan Faktor Pendorong Petani Muda Terlibat Dalam Agribisnis Pada Era Pasar Global. Mimbar Agribisnis* 3(2):134–49.

Reuters, "*No bed of roses: East Africa's female flower workers lose jobs as coronavirus hits exports"*, 11 April 2020; Martinplaut, *"Tens of thousands of African jobs at risk as Europe dumps flowers during the Coronavirus crisis"*, 22 March 2020

Saliem HP, Sumaryanto, Mayrowani H, Agustian A, Syahyuti. 2016. *Model pengembangan agribisnis padi: analisis ekonomi dan kelembagaan pemanfaatan alsintan.* Laporan Analisis Kebijakan. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Setiawan SA. 2007. *Pengaruh umur, pendidikan, pendapatan, pengalaman kerja,dan jenis kelamin terhadap lama mencari kerja bagi tenaga kerja terdidik di kota. Retrieved December 14, 2018* (Http://eprints.undip.ac.id/24451/1/Skrips i_Full_Text.pdf)

Shute LL. 2011. *Building a future with farmers: challenges faced by young, American farmers and a national strategy to help them succeed*. New York (US): National Young Farmers' Coalition.

Sinuraya JF, Saptana. 2007. *Migrasi tenaga kerja pedesaan dan pola pemanfaatannya*. SOCA. 7(3):1-23.

Sumaryanto, Hermanto, Ariani M, Suhartini SH, Yofa RD, Azahari DH. 2015. *Pengaruh urbanisasi terhadap suksesi sistem pengelolaan usaha tani dan implikasinya terhadap keberlanjutan swasembada pangan*. Laporan Akhir Penelitian. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Supriyati. 2010. *Dinamika ekonomi ketenagakerjaan pertanian: permasalahan dan kebijakan srategis pengembangan*. AKP. 8(1):49-65.

Susilowati SH, Purwantini TB, Hidayat D, Maulana M, Ar-Rozi AM, Yofa RD, Supriyati, Sejati WK. 2012. Panel petani nasional (Patanas): *Dinamika Indikator pembangunan pertanian dan perdesaan.* Laporan Akhir Penelitian. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Susilowati, SH. 2014. *Attracting the young generation to engage in agriculture*. FFTC-RDA 2014 International Seminar on Enhanced Entry of Young Generation into Farming; 2014 Oct 20-24; Jeonju, Korea.

Susilowati, Sri Hery. 2016. *Fenomena Penuaan Petani Dan Berkurangnya Tenaga Kerja Muda Serta Implikasinya Bagi Kebijakan Pembangunan Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi 34(1):35–55.*

Suyanto B. 2016. *Kenapa generasi muda enggan bertani? Memahami subkultur dan gaya hidup anak muda dari perspektif cultural studies.* Bahan Pertemuan Upaya Meningkatkan Minat Generasi Muda terhadap Pertanian; 2016 Feb 23; Bogor, Indonesia. Bogor (ID): Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Informasi.

Syafaat N, Mardianto S, Friyatno S. 2000. *Mobilitas angkatan kerja dan kesejahteraan rumah tangga pedesaan: tinjauan konseptual dan empirik*. Dalam: Rusastra IW, Nurmanaf AR, Susilowati SH, Jamal E, Sayaka B, editors. Prosiding Seminar Perspektif Pembangunan Pertanian dan Perdesaan dalam Era Otonomi Daerah; 1999 Nov 16; Bogor, Indonesia. Bogor (ID): Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. hlm. 204-225.

Syahwanto I. 2004. *Pertanian pangan lokal, mulok dan hak murid-murid SD*. Majalah Salam. 7(Juni):18-20.

Tapanapunnitikul O, Prasunpangsri S. 2014. *Entry of young generation into farming in Thailand*. FFTC-RDA 2014 International Seminar on Enhanced Entry of Young Generation into Farming; 2014 Oct 20-24; Jeonju, Korea.

The Diplomat, "*COVID-19: Countering the economic contagion*", 24 Maret 2020; International Monetary Fund, "*Policy Responses to COVID-19*", April 2020; World Bank, 3 April 2020 op. cit.

Uchiyama T. 2014. *Recent trends in young people's entry into farming in Japan: an international perspective*. FFTC-RDA 2014 International Seminar on Enhanced Entry of Young Generation into Farming; 2014 Oct 20-24; Jeonju, Korea.

United Nations Organization for Education, Science and Culture. c2016b. African youth charter [Internet]. Paris (FR): United Nations Organization for Education, Science and Culture;

[cited 1016 Apr 16]. Available from: http://www. unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/th emes/youth/strategy-african-youth/african-youth-c harter.

United Nations Organization for Education, Science and Culture. c2016a. What do we mean by "youth"? [Internet]. Paris (FR): United Nations Organization for Education, Science and Culture; [cited 2016 Apr 10]. Available from: http://www.unesco.org/new/en/ social-and-human- sciences/themes/youth/youth-definition.

Wang JH. 2014. *Recruiting young farmers to join smallscale farming: a structural policy perspective*. FFTC-RDA 2014 International Seminar on Enhanced Entry of Young Generation into Farming; 2014 Oct 20-24; Jeonju, Korea.

White, Ben. 2012. *Agriculture And The Generation Problem: Rural Youth, Employment And The Future Of Farming*. *IDS Bulletin* 43(6):9–19.

World Bank estimates cited in United Nations Department of Economic and Social Affairs, "*The global social crisis: Report on the world social situation 2011",* 2011, p. 63.

Y. Yan Makabori, Triman Tapi; *Generasi Muda Dan Pekerjaan Di Sektor Pertanian : Faktor Persepsi Dan Minat*;2020

Yaganimura S. 2014. *Farm expansion and entry to farm business: experiences in Hokkaido agriculture.* FFTC-RDA 2014 International Seminar on Enhanced Entry of Young Generation into Farming; 2014 Oct 20-24; Jeonju, Korea.

Yayasan Al Ashar. 2014. Al Ashar Peduli Ummat. Dokumen internal (tidak dipublikasikan).

Yunita. 2011. *Strategi Peningkatan Kapasitas Petani Padi Sawah Lebak Menuju Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Kabupaten Ogan Ilir Dan Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.* [Tesis].Bogor (ID): IPB